

PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL



PENULIS :

**Fitri Adi Setyorini, Ajeng P. Marlinda, Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi,
Alfredha Shinta Putri, Tiffany Setyo Pratiwi,
Anastazia Niatri Wattimena, Mohamad Rohim, Salsabilah Attamimi,
Syah Abadi Mendrofa, Hidayat Chusnul Chotimah**

PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL

Fitri Adi Setyorini
Ajeng P. Marlinda
Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi
Alfredha Shinta Putri
Tiffany Setyo Pratiwi
Anastazia Niatri Wattimena
Mohamad Rohim
Salsabilah Attamimi
Syah Abadi Mendrofa
Hidayat Chusnul Chotimah



CV LAUK PUYU PRESS

PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL

Penulis:

Fitri Adi Setyorini

Ajeng P. Marlinda

Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi

Alfredha Shinta Putri

Tiffany Setyo Pratiwi

Anastazia Niatri Wattimena

Mohamad Rohim

Salsabilah Attamimi

Syah Abadi Mendrofa

Hidayat Chusnul Chotimah

ISBN: 978-623-10-1578-5

Editor: Yuliatris Novita, M.Hum.

Penyunting: Fajri SE.

Desain Sampul dan Tata Letak: Mutia Febrina Sari, S.Akun.

Penerbit: CV LAUK PUYU PRESS

Anggota IKAPI No.048/SBA/2024

Redaksi:

**Jln. Mansur Tayib, Jorong Pilubang, Kenagarian Biaro Gadang,
Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam, Sumatera Barat**

website:

email: laukpuyupress@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2024

**Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya Peneliti telah dapat menyelesaikan buku monograf dengan judul Pengantar Hubungan Internasional. Pengantar Hubungan Internasional merupakan buku yang membahas mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup Hubungan Internasional, Sejarah Hubungan Internasional, Perspektif dalam Hubungan Internasional, Negara Sebagai Aktor dalam Hubungan Internasional, Individu Sebagai Aktor dalam Hubungan Internasional, Keamanan dan Perdamaian Internasional, Ekonomi Politik Internasional, Isu Kontemporer dalam Hubungan Internasional, Perkembangan Ilmu Hubungan Internasional (Evolusionisme), dan Hubungan Internasional Pra-Kontemporer.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Pilubang, Mei 2024
Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Perspektif Tokoh-Tokoh dalam Memahami Fondasi Hubungan Internasional	3
1.3 Perkembangan HI Sebagai Bidang Studi	6
1.4 Urgensi Mempelajari Hubungan Internasional	9
1.5 Ruang Lingkup Studi Hubungan Internasional.....	13
DAFTAR PUSTAKA	18
BAB 2 SEJARAH HUBUNGAN INTERNASIONAL	21
2.1 Hubungan Internasional Era Kuno	21
2.2 Hubungan Internasional Pasca Westphalia	27
2.3 Perang Dunia, Perang Dingin, Dekolonisasi.....	33
2.4 Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin	41
DAFTAR PUSTAKA	43
BAB 3 PERSPEKTIF DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	45
3.1 Pendahuluan	45
3.2 Pentingnya Perspektif Dalam Menganalisa Hubungan Internasional	47
3.3 Diferensiasi Perspektif Hubungan Internasional	50
3.4 Perspektif Utama Hubungan Internasional	52
3.5 Perspektif Alternatif	58
3.6 Kesimpulan	75
DAFTAR PUSTAKA	77

Pengantar Hubungan Internasional

BAB 4 NEGARA SEBAGAI AKTOR DALAM HUBUNGAN

INTERNASIONAL..... 81

4.1 Pengertian dan Ciri-ciri Negara..... 81

4.2 Sejarah Mengenai Sistem Negara 84

4.3 Bentuk-bentuk Negara 89

DAFTAR PUSTAKA 97

BAB 5 INDIVIDU SEBAGAI AKTOR DALAM HUBUNGAN

INTERNASIONAL..... 99

5.1 Pendahuluan 99

5.2 Definisi Aktor “Individu” Dalam HI 102

5.3 Alasan-Alasan Hadirnya Aktor Individu dalam HI Beserta
Peranannya 105

5.4 Kesimpulan 117

DAFTAR PUSTAKA 119

BAB 7 KEAMANAN DAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL 123

6.1 Pendahuluan 123

6.2 Studi Keamanan dalam Hubungan Internasional 123

6.3 Perdamaian Internasional 131

6.4 Kesimpulan 137

DAFTAR PUSTAKA 138

BAB 8 EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL..... 139

7.1 Pengantar Ekonomi Politik Internasional 139

7.2 Teori-teori dalam Ekonomi Politik Internasional 148

7.3 Polarisasi Politik Internasional dalam Konteks Ekonomi 159

7.4 Institusi dan Perjanjian dalam Ekonomi Politik Internasional &
Sistem Moneter Internasional 163

7.5 Perdagangan Internasional dan Investasi Asing Langsung 171

7.6 Kesimpulan 178

7.7 Tantangan Dan Peluang Di Masa Depan Dalam Studi Ekonomi
Politik Internasional..... 179

DAFTAR PUSTAKA 182

BAB 8 ISU KONTEMPORER DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL . 185

8.1 Lingkungan (Environmental Issue) 189

8.2 Sosial (Societal Issue) 193

8.3 Politik (Political Issue) 197

Pengantar Hubungan Internasional	
8.4 Teknologi (Technological Issue).....	200
8.5 Kesimpulan	205
DAFTAR PUSTAKA	206
BAB 9 PERKEMBANGAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	
(EVOLUSIONISME).....	209
9.1 Teori Hubungan Internasional	212
9.2 Isu-isu Global Kontemporer	226
9.3 Organisasi Internasional dan Kemitraan	246
9.4 Diplomasi dan Hubungan Bilateral	247
9.5 Kemajuan Teknologi dan Hubungan Internasional.....	249
9.6 Perspektif Kritis.....	251
9.7 Metode Penelitian.....	253
DAFTAR PUSTAKA	256
BAB 10 HUBUNGAN INTERNASIONAL PRA-KONTEMPORER	259
10.1 Pendahuluan	259
10.2 Hubungan Internasional pada Era Klasik	262
10.3 Hubungan Internasional pada Abad Pertengahan	269
10.4 Hubungan Internasional pada Masa Renaissance	279
10.5 Kesimpulan.....	284
DAFTAR PUSTAKA	285
BIODATA PENULIS	287

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 World System Theory dari Emmanuel Wallerstein66
**Gambar 4. 1. Pemerintahan Abad Pertengahan dan Pemerintahan
Modern.....89**

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan 3 Perspektif Utama Hubungan Internasional	56
Tabel 3. 2 Perbandingan 4 Perspektif Alternatif Hubungan Internasional	73
Tabel 4. 1. Sistem Negara Pertama: Negara Kota dan Kekaisaran ...	85
Tabel 4. 2. Sistem Negara pada Zaman Pertengahan	87
Tabel 4. 3. Perbedaan Desentralisasi dan Otonomi di Negara Kesatuan dan Negara Federal	92

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Fitri Adi Setyorin

1.1 Pendahuluan

Hubungan Internasional adalah bidang studi yang luas dan kompleks yang membahas secara mendalam tentang interaksi antara aktor negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya di tingkat global. Memahami konsep dasar dalam Hubungan Internasional adalah kunci untuk memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di panggung internasional. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, pengetahuan tentang hubungan internasional menjadi semakin penting bagi siapa saja yang ingin memahami perubahan dunia dan berpartisipasi dalam proses pembangunan perdamaian dan keamanan global.

Pentingnya memahami konsep dasar Hubungan Internasional dapat dilihat dari peranannya dalam membuka wawasan tentang dinamika hubungan antarnegara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep dasar seperti kedaulatan negara, diplomasi, perdagangan internasional, keamanan tradisional, keamanan manusia, hak asasi manusia, dan organisasi internasional menjadi fondasi utama dalam menganalisis interaksi antarnegara (Baylis et al., 2017). Tanpa pemahaman yang kuat terhadap konsep-konsep ini, sulit bagi seseorang untuk menafsirkan kebijakan luar negeri suatu negara, mengantisipasi konflik global, atau berkontribusi dalam menciptakan solusi untuk tantangan global.

Memahami konsep dasar Hubungan Internasional juga membantu mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam menghadapi

berbagai situasi kompleks di tingkat internasional. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, seseorang dapat mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan, dan merumuskan strategi yang efektif dalam menanggapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, atau krisis kemanusiaan (Waltz, 1979). Pemahaman konsep dasar Hubungan Internasional juga memberikan landasan untuk menganalisis konflik dan kerjasama internasional. Konflik dan kerjasama merupakan dua sisi dari koin yang membentuk dinamika Hubungan Internasional. Dengan memahami konsep dasar, kita dapat mengidentifikasi penyebab konflik antarnegara serta faktor-faktor yang mendorong kerjasama dan integrasi regional (Goldstein and Pevehouse, 2017).

Pemahaman konsep dasar Hubungan Internasional memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam dialog global dan advokasi untuk mendorong terwujudnya perubahan yang positif. Dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu global dan konsep-konsep yang mendasarinya, seseorang dapat lebih efektif berkontribusi dalam upaya-upaya perdamaian, pembangunan, dan keadilan global (Mingst et al., 2019). Hal ini membuka peluang bagi individu untuk menjadi agen perubahan yang berpengaruh dalam skala internasional.

Dengan demikian, pemahaman konsep dasar Hubungan Internasional merupakan hal yang sangat penting dalam konteks globalisasi ini. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar HI, kita dapat lebih baik memahami dinamika hubungan internasional, mengevaluasi kebijakan luar negeri suatu negara, dan mencari solusi yang tepat untuk berbagai tantangan global yang dihadapi oleh dunia saat ini (Keohane and Nye, 2001).

Dengan penuh kesadaran akan kompleksitas hubungan internasional di era globalisasi, buku ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep dasar dalam Hubungan

Internasional secara menyeluruh. Buku ini akan membedah setiap konsep, memberikan contoh konkret serta studi kasus yang relevan, serta menganalisis dampaknya terhadap dinamika hubungan internasional kontemporer. Tujuan utama buku ini adalah memberikan landasan yang kokoh dan pemahaman yang mendalam kepada pembaca tentang aspek-aspek kunci dalam Hubungan Internasional. Dengan pemahaman yang diperoleh melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat menginterpretasikan dan menyikapi peristiwa-peristiwa global dengan lebih cermat, serta berpartisipasi secara aktif dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dunia.

1.2 Perspektif Tokoh-Tokoh dalam Memahami Fondasi Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah hasil dari evolusi kompleksitas politik global sepanjang sejarah manusia. Seiring berjalannya waktu, berbagai pandangan dan teori telah muncul dari para tokoh terkemuka dalam studi HI yang mencerminkan perubahan dalam dinamika antarnegara, perkembangan sosial, dan perkembangan teknologi. Pada masa awal kehidupan manusia, interaksi antar kelompok terbatas pada level lokal. Munculnya era globalisasi mendorong perkembangan mengenai pemahaman tentang HI yang menyesuaikan diri dengan perubahan dunia.

Pemahaman awal tentang HI sering kali didasarkan pada pandangan realisme, yang menempatkan kepentingan nasional dan persaingan kekuasaan antarnegara sebagai fokus utama. Tokoh seperti Thucydides dan Machiavelli memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman awal tentang politik internasional. Dalam karya monumentalnya, "Sejarah Perang Peloponnesos," Thucydides menggambarkan konflik dan persaingan antara negara-kota Yunani, seperti Athena dan Sparta, sebagai contoh pertama tentang politik internasional.

Thucydides menyoroti motivasi dan kepentingan negara-negara tersebut, serta dinamika persaingan dan konflik yang mengarah pada perang. Karyanya memberikan wawasan awal tentang pentingnya kekuatan, keamanan, dan strategi dalam hubungan antarnegara (Hyde-Price, 2016).

Sementara itu, Niccolò Machiavelli, dengan karyanya yang terkenal, "The Prince," memberikan kontribusi penting dalam pemikiran realis tentang politik internasional. Machiavelli menekankan pentingnya kekuatan politik dan stabilitas dalam hubungan antarnegara. Dia menyarankan bahwa negara harus menggunakan kekuatan dan strategi yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan nasional, terlepas dari pertimbangan etika atau moral. Pemikiran Machiavelli menyoroti realitas kaku dan pragmatis dari politik internasional, serta kompleksitas dalam menjaga kekuasaan dan mengelola konflik (Wendt, 1999).

Seiring berjalannya waktu, pandangan tentang HI menjadi lebih kompleks dan beragam. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman ini adalah Immanuel Kant, dengan konsep perdamaian demokratisnya. Dalam karyanya yang terkenal, "*Perpetual Peace: A Philosophical Sketch*", Kant menyajikan gagasan bahwa negara-negara yang menganut sistem demokratis cenderung untuk menjalin perdamaian satu sama lain. Kant berpendapat bahwa karena adanya akuntabilitas publik dan kontrol warga atas keputusan politik, negara-negara demokratis memiliki minat yang lebih besar dalam memelihara perdamaian daripada negara-negara otoriter (Waltz, 1979).

Konsep perdamaian demokratis Kant membawa dimensi moral dan ideologis yang kuat ke dalam studi HI. Pandangan ini menyoroti bahwa tidak hanya faktor-faktor kekuatan dan keamanan yang mempengaruhi hubungan antarnegara, tetapi juga nilai-nilai politik dan sistem pemerintahan (Mingst et al., 2019). Dengan demikian, pandangan Kant memperkaya pemahaman kita tentang dinamika hubungan internasional

dengan memperkenalkan elemen moral dan ideologis yang penting dalam analisis politik global.

Perkembangan dalam pemahaman tentang HI juga dipengaruhi oleh kontribusi tokoh-tokoh seperti Hans Morgenthau, Kenneth Waltz, dan Joseph Nye. Hans Morgenthau, seorang tokoh utama dalam studi Hubungan Internasional, dikenal karena karyanya yang monumental, "*Politics Among Nations*." Dalam karyanya, Morgenthau menekankan perjuangan untuk kekuasaan sebagai salah satu elemen kunci dalam politik internasional. Morgenthau berpendapat bahwa negara-negara bersaing untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan demi mencapai kepentingan nasional mereka. Morgenthau menyoroti pentingnya kepentingan nasional sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, dan bahwa negara-negara harus mempertimbangkan kekuasaan sebagai faktor utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional (Goldstein and Pevehouse, 2017).

Di sisi lain, kontribusi Kenneth Waltz dalam teori HI dengan "Anarki Sebagai Struktur" membawa pemahaman baru tentang sistem internasional. Waltz menekankan bahwa sistem Hubungan Internasional didasarkan pada kondisi anarki, di mana tidak ada otoritas pusat yang mengatur interaksi antara negara-negara. Dalam teorinya, Waltz menyoroti bahwa struktur anarki ini mendorong negara-negara untuk bertindak secara rasional dalam mencari keamanan, dan oleh karena itu, perilaku negara dipengaruhi oleh dinamika struktural sistem internasional (Waltz, 1979).

Joseph Nye, dengan konsep *Soft Power*, membawa dimensi baru ke dalam studi HI. Nye menyoroti pentingnya pengaruh budaya, nilai-nilai, dan diplomasi dalam politik internasional. Menurutnya, *soft power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain melalui daya tarik nilai-nilai, budaya, dan kebijakan. Dengan memperhatikan aspek ini, Nye menunjukkan bahwa kekuatan dalam politik internasional tidak

hanya berasal dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui nilai-nilai yang dipromosikan oleh sebuah negara (Hurrell and Andrew, 2007).

Melalui kontribusi Morgenthau, Waltz, dan Nye, pemahaman tentang Hubungan Internasional menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Mereka membawa gagasan-gagasan baru yang memperkaya pandangan kita tentang dinamika politik internasional, dari perjuangan untuk kekuasaan hingga struktur sistem internasional, dan dari pengaruh budaya dan nilai-nilai dalam diplomasi hingga konsep *soft power*. Kontribusi mereka terus menjadi titik referensi penting dalam studi dan analisis tentang politik global.

Pemahaman tentang Hubungan Internasional (HI) tidak hanya dipengaruhi oleh teori-teori dan konsep-konsep dari para pemikir terkemuka, tetapi juga oleh faktor-faktor kontekstual yang terjadi dalam sejarah dan perkembangan dunia. Faktor kontekstual yang berpengaruh adalah Perang Dunia I dan II, serta era globalisasi. Globalisasi mempercepat interaksi antarnegara dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, keuangan, dan komunikasi. Hal ini memperluas cakrawala diplomasi internasional dan meningkatkan kompleksitas hubungan internasional. Negara-negara sekarang lebih terhubung secara ekonomi, politik, dan sosial daripada sebelumnya, yang menghasilkan tantangan baru dan peluang dalam politik global.

1.3 Perkembangan HI Sebagai Bidang Studi

Hubungan Internasional merupakan bidang studi yang mempelajari interaksi antara aktor negara, non-negara, dan fenomena global lainnya dalam konteks politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Definisi Hubungan Internasional telah berkembang seiring waktu yang sejalan dengan perubahan dinamika dunia. Pada awalnya, Hubungan Internasional lebih

terfokus pada diplomasi antarnegara dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Namun, seiring dengan berkembangnya globalisasi, Hubungan Internasional telah meluas dan mencakup berbagai aspek, termasuk perdagangan internasional, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan teknologi.

Perkembangan Hubungan Internasional sebagai bidang studi dimulai pada abad ke-20 dengan terbentuknya disiplin ilmu politik modern. Pengaruh peristiwa Perang Dunia I dan II menjadi pemicu penting bagi pembentukan Hubungan Internasional sebagai bidang studi yang mandiri. Konsep-konsep seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme mulai digunakan untuk menganalisis dinamika politik internasional. Selain itu, institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadi fokus kajian dalam Hubungan Internasional, mengingat peran PBB dalam menjaga perdamaian dan kerjasama antarnegara.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, Hubungan Internasional menjadi semakin kompleks dan multidimensional. Perubahan dalam sistem politik dan ekonomi global, seperti runtuhnya Uni Soviet dan perkembangan ekonomi Republik Rakyat China, memicu munculnya pemikiran baru dalam studi Hubungan Internasional. Studi tentang globalisasi, transnasionalisme, dan keamanan non-tradisional menjadi topik utama dalam kajian Hubungan Internasional modern. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang baru dalam analisis dan penelitian dalam Hubungan Internasional (Baylis et al., 2017).

Dalam era kontemporer, Hubungan Internasional juga semakin terintegrasi dengan disiplin ilmu lain seperti ekonomi, sosiologi, dan ilmu komunikasi. Pendekatan lintas disiplin menjadi penting dalam memahami kompleksitas fenomena global. Selain itu, isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan terorisme juga menjadi fokus kajian dalam Hubungan Internasional. Peran aktor non-negara seperti organisasi

internasional, perusahaan multinasional, dan gerakan sosial semakin diperhatikan dalam analisis Hubungan Internasional.

Hubungan Internasional merupakan bidang studi yang dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan dunia. Definisinya telah meluas dari sekadar diplomasi negara-negara hingga mencakup berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks global. Perkembangan Hubungan Internasional sebagai bidang studi terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh perubahan dalam dinamika politik global, perkembangan teknologi, dan tantangan-tantangan baru dalam era globalisasi. Pemahaman tentang Hubungan Internasional merupakan hasil dari kompleksitas pandangan, teori, dan pengalaman sejarah yang beragam. Dinamika politik global yang kompleks dan berubah-ubah telah memengaruhi perkembangan pemikiran tentang HI.

Studi Hubungan Internasional akan tetap menjadi subjek utama dalam studi akademis dan kebijakan internasional di masa depan karena semakin terlihatnya kompleksitas politik global dalam era globalisasi yang semakin terhubung. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik internasional menjadi semakin penting karena negara-negara di seluruh dunia semakin terkait secara ekonomi, politik, dan sosial (Mingst et al., 2019). Fenomena seperti perdagangan internasional, migrasi manusia, dan aliran informasi yang cepat melintasi batas-batas nasional memperkuat ketergantungan dan interkoneksi antara negara-negara.

Tantangan-tantangan kompleks seperti konflik bersenjata, ketidakstabilan ekonomi global, dan ancaman terorisme semakin menuntut pendekatan multidimensional dan kolaboratif dalam memahaminya. Konflik bersenjata tidak lagi terbatas pada konflik antarnegara, tetapi juga melibatkan konflik internal dalam negara, konflik antara kelompok etnis atau agama, serta konflik terkait dengan sumber daya alam. Ini menyoroti perlunya pendekatan yang komprehensif dan inklusif

dalam menganalisis akar penyebab konflik dan mencari solusi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dalam era globalisasi yang semakin terhubung, studi HI tidak hanya menjadi relevan tetapi juga mendesak. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik internasional, bersama dengan pendekatan multi-dimensional dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan kompleks, akan menjadi kunci bagi pembentukan kebijakan yang efektif dan pemecahan masalah global di masa depan.

1.4 Urgensi Mempelajari Hubungan Internasional

Dalam konteks globalisasi yang semakin memperkuat interaksi antarnegara dan kompleksitas dinamika hubungan internasional, studi mengenai hubungan internasional menjadi semakin relevan dan penting. Bidang ini tidak hanya memungkinkan individu untuk memahami perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat global, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pemahaman tentang dinamika politik antarnegara memainkan peran esensial dalam membuka cakrawala yang lebih luas terhadap sistem internasional. Melalui analisis yang mendalam terhadap politik global, individu dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi perilaku negara-negara di tingkat internasional. Salah satu aspek utama dalam pemahaman ini adalah kekuatan dan kelemahan dari sistem internasional itu sendiri (Keohane and Nye, 2001). Dalam konteks politik global, individu dapat mengamati bagaimana kekuatan besar dan kecil berinteraksi satu sama lainnya. Misalnya, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, dan Rusia memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan internasional.

Selain itu, analisis politik global juga memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor-faktor ini termasuk kepentingan nasional, nilai-nilai politik, tekanan domestik dan internasional, serta dinamika dalam hubungan bilateral dan multilateral. Contohnya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering kali dipengaruhi oleh kombinasi dari kepentingan keamanan nasional, kebijakan luar negeri tradisional, dan tekanan politik domestik. Selain itu, pemahaman politik global memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika konflik dan perdamaian di tingkat internasional. Melalui pemetaan konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, individu dapat mengidentifikasi penyebab konflik, upaya penyelesaiannya, serta implikasi jangka panjangnya terhadap stabilitas regional dan global (Waltz, 1979).

Tidak hanya itu, analisis politik global juga memungkinkan individu untuk memahami upaya kolaborasi antarnegara dalam menanggapi tantangan global yang bersifat lintas batas. Contohnya, perjanjian perdagangan internasional seperti Trans-Pacific Partnership (TPP) atau upaya-upaya kolaborasi dalam mengatasi perubahan iklim melalui Konferensi Perubahan Iklim PBB. Pemahaman tentang dinamika diplomasi multilateral menjadi kunci dalam memahami bagaimana negara-negara berusaha untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama lintas batas.

Dalam konteks ekonomi global, studi hubungan internasional membuka jendela bagi pemahaman yang mendalam tentang interdependensi ekonomi antarnegara dan implikasi dari fenomena global yang mempengaruhi sistem ekonomi internasional. Melalui analisis yang komprehensif, individu dapat mengeksplorasi bagaimana perdagangan bebas, investasi asing, dan krisis keuangan internasional dapat mempengaruhi dinamika ekonomi global serta kebijakan ekonomi suatu negara (Mingst et al., 2019).

Pemahaman tentang perdagangan internasional menjadi kunci dalam studi hubungan internasional. Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam menghubungkan perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Melalui perdagangan, negara-negara dapat saling mengakses barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri mereka sendiri, serta memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika perdagangan internasional memungkinkan individu untuk merumuskan kebijakan perdagangan yang lebih efektif, memperkuat posisi negara dalam pasar global, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Investasi asing juga menjadi fokus penting dalam studi hubungan internasional. Investasi asing dapat memberikan manfaat dalam bentuk transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas produksi di negara penerima investasi. Namun, investasi asing juga dapat memunculkan tantangan terkait dengan kontrol keuangan, ketidakesetaraan ekonomi, dan kedaulatan nasional. Pemahaman yang mendalam tentang implikasi investasi asing memungkinkan individu untuk merumuskan kebijakan investasi yang dapat mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan risiko yang terkait.

Aspek sosial dan budaya memainkan peran yang krusial dalam studi hubungan internasional, karena mereka membentuk landasan dari interaksi antarnegara dan mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat global (Goldstein and Pevehouse, 2017). Pemahaman yang mendalam tentang keragaman budaya, nilai-nilai, dan norma-norma sosial di berbagai negara menjadi kunci untuk menganalisis akar penyebab konflik budaya, mempromosikan dialog lintas budaya, dan membangun kerjasama internasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Wendt, 1999). pemahaman tentang keragaman budaya merupakan prasyarat dalam memahami kompleksitas dan heterogenitas masyarakat

internasional. Setiap negara memiliki warisan budaya yang unik, termasuk bahasa, agama, adat istiadat, dan sistem nilai. Pemahaman yang mendalam tentang keragaman ini membantu dalam merespons dan menghormati perbedaan, serta mendorong toleransi dan penghargaan terhadap pluralisme budaya.

Selain itu, pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial di berbagai negara memungkinkan individu untuk menggali akar penyebab konflik budaya yang mungkin muncul dalam hubungan internasional. Misalnya, ketidaksepakatan dalam nilai-nilai seperti hak asasi manusia, demokrasi, atau perlakuan terhadap minoritas dapat memicu ketegangan antarnegara. Dengan memahami perbedaan nilai ini, individu dan pembuat kebijakan dapat berupaya untuk mengurangi ketegangan dan mencapai konsensus yang lebih luas.

Urgensi mempelajari hubungan internasional juga tercermin dalam pentingnya menganalisis isu-isu global yang memiliki dampak luas dan seringkali lintas batas. Isu-isu seperti perubahan iklim, migrasi, ketimpangan ekonomi, dan isu kesehatan global merupakan tantangan kompleks yang memerlukan tanggapan komprehensif dan terkoordinasi di tingkat nasional maupun internasional (Jervis, 2017). Perubahan iklim menjadi salah satu isu paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat internasional saat ini. Dampak dari perubahan iklim termasuk kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, dan kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian jutaan orang di seluruh dunia. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika perubahan iklim dan faktor-faktor yang menyebabkannya memungkinkan individu untuk merumuskan kebijakan dan strategi adaptasi serta mitigasi yang efektif.

Isu migrasi juga membutuhkan perhatian serius dalam studi hubungan internasional. Migrasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik, perubahan iklim, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan ekonomi (Buzan

and Little, 2000). Dampak dari migrasi dapat meliputi masalah kemanusiaan, integrasi sosial, dan isu keamanan nasional. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika migrasi global memungkinkan individu untuk merancang kebijakan migrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, isu kesehatan global telah menjadi fokus utama dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks pandemi seperti yang dialami dengan COVID-19. Penyebaran penyakit menular secara global membutuhkan tanggapan yang terkoordinasi dan solidaritas internasional. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika penyebaran penyakit, sistem kesehatan global, dan tantangan dalam mengendalikan wabah memungkinkan individu untuk merancang strategi respons yang efektif dan melindungi kesehatan masyarakat secara global (Baylis et al., 2017). Pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas isu-isu ini memungkinkan individu untuk merumuskan tanggapan yang komprehensif dan terkoordinasi di tingkat nasional maupun internasional, sehingga dapat mengatasi tantangan global dan mempromosikan kesejahteraan bersama bagi masyarakat internasional.

1.5 Ruang Lingkup Studi Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah bidang pengetahuan yang memperdalam pemahaman kita tentang interaksi dinamis antara negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam panggung global. Seperti mozaik yang kompleks, ruang lingkup HI mencakup berbagai aspek, mulai dari politik hingga ekonomi, dari keamanan hingga lingkungan, dan dari budaya hingga teknologi. Dalam sub-bab ini, kita akan merenungkan tentang keberagaman ruang lingkup HI dalam enam dimensi yang memikat dan mempengaruhi arus global.

Pada aspek politik Hubungan Internasional, kita menjelajahi panorama dinamis kekuatan antarnegara, di mana negara-negara bersaing dan berkolaborasi dalam mengejar

kepentingan nasional dan global (Cooper et al., 2015). Tidak hanya sebatas pada pembentukan kebijakan luar negeri, namun juga meliputi analisis mendalam tentang evolusi struktur kekuasaan global, peran aktor non-negara seperti kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat sipil, serta tren baru dalam diplomasi digital dan diplomasi publik (Walt, 2018). Pemahaman terkini tentang hubungan bilateral dan multilateral menjadi penting dalam konteks dinamika politik global yang terus berubah, termasuk upaya-upaya untuk memperkuat aliansi strategis, menangani konflik regional, dan mengatasi tantangan transnasional seperti terorisme dan perdagangan manusia. Selain itu, analisis tentang diplomasi, negosiasi, serta upaya perdamaian menjadi semakin relevan dalam menghadapi krisis regional dan konflik bersenjata yang sedang berlangsung, sambil memperhatikan perkembangan baru dalam teknologi komunikasi dan media sosial yang mempengaruhi cara negosiasi dan pengambilan keputusan politik .

Dalam aspek ekonomi, kita memasuki domain keterkaitan ekonomi antarnegara, dinamika perdagangan internasional, dan investasi asing, serta pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi suatu negara (Krugman and Maurice, 2017). Lebih dari sekadar sekedar transaksi finansial, analisis ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, dan perkembangan teknologi memengaruhi keputusan politik dan kebijakan luar negeri (Drezner, 2014). Pada tingkat yang lebih luas, interdependensi ekonomi antarnegara menjadi titik sentral dalam studi ini. Negara-negara tidak lagi beroperasi secara terisolasi, tetapi terlibat dalam jaringan ekonomi global yang kompleks. Perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran modal internasional menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi global, sambil menciptakan tantangan baru dalam mengelola ketergantungan ekonomi antarnegara (Baldwin and Richard, 2016).

Dalam aspek keamanan, kita menjelajahi medan yang kompleks dan beragam, di mana negara-negara dan aktor non-negara berhadapan dengan berbagai ancaman dan tantangan keamanan global. Analisis dalam bidang ini tidak hanya memusatkan perhatian pada konflik bersenjata dan perang tradisional, tetapi juga memperluas ruang lingkupnya untuk mencakup tantangan baru seperti terorisme, kejahatan transnasional, dan proliferasi senjata nuklir (Jackson and Georg, 2013).

Ancaman keamanan global saat ini tidak lagi terbatas pada konflik antarnegara, tetapi juga melibatkan aktor non-negara yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Terorisme internasional, khususnya, telah menjadi fokus utama dalam agenda keamanan global, dengan serangan-serangan teror yang menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas internasional dan perdamaian global (White, 2017). Kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, dan pencucian uang, juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas di tingkat regional dan global. Perdagangan manusia, misalnya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang meresahkan, sementara perdagangan narkoba dan pencucian uang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik di banyak negara.

Dalam aspek lingkungan, kita menghadapi tantangan yang mendesak dan mendalam terkait dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem global. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam menjadi fokus utama dalam analisis ini. Hal ini karena dampaknya yang meluas dan berdampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup manusia dan planet kita (Baldwin and Richard, 2016).

Selain perubahan iklim, degradasi lingkungan juga menjadi masalah serius dalam HI. Deforestasi, pencemaran air dan udara, serta kerusakan habitat mengancam keberlanjutan ekosistem bumi. Analisis tentang bagaimana isu-isu lingkungan

ini memengaruhi politik dan kebijakan internasional mengungkapkan kompleksitas tantangan lingkungan global dan perlunya tindakan kolektif dari komunitas internasional. Di samping itu, keberlanjutan sumber daya alam menjadi fokus penting dalam HI. Ketergantungan global pada sumber daya alam seperti energi fosil dan air menghadirkan tantangan tersendiri dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan rentan terhadap eksploitasi berlebihan (Krugman and Maurice, 2017). Analisis tentang upaya-upaya untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam, mendorong pengembangan energi terbarukan, dan melindungi keanekaragaman hayati menjadi bagian integral dari agenda HI yang berkelanjutan. Dalam mengatasi tantangan lingkungan ini, kerja sama internasional dan pembangunan kerangka kerja hukum yang kuat menjadi kunci. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati memainkan peran penting dalam mengarahkan upaya-upaya global untuk menjaga lingkungan hidup kita.

Dalam aspek hukum dan institusional, kita memasuki ranah yang mempelajari kerangka kerja hukum internasional dan peran organisasi internasional dalam membentuk sistem politik global. Lebih dari sekedar norma dan aturan, analisis ini membahas bagaimana hukum internasional dan lembaga-lembaga internasional mempengaruhi perilaku dan interaksi antarnegara, serta upaya untuk memperkuat sistem hukum internasional.

Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Bank Dunia, memainkan peran penting dalam membentuk tatanan politik global. Mereka berfungsi sebagai forum bagi negara-negara untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan bekerja sama dalam menangani masalah-masalah global, mulai dari perdamaian dan keamanan hingga pembangunan ekonomi dan lingkungan. Analisis tentang bagaimana organisasi-organisasi ini mengatur interaksi antarnegara dan mengkoordinasikan

upaya internasional menjadi kunci untuk memahami dinamika politik global yang kompleks (Jervis, 2017).

Di samping itu, hukum internasional merupakan fondasi penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas di tingkat internasional. Hal ini mencakup berbagai perjanjian, konvensi, dan kode etik yang mengatur perilaku negara-negara di berbagai bidang, termasuk hak asasi manusia, perdagangan, lingkungan, dan konflik bersenjata. Analisis tentang implementasi hukum internasional, kepatuhan negara-negara terhadap norma-norma internasional, serta tantangan dalam penegakan hukum menjadi fokus penting dalam bidang ini.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa internasional juga menjadi perhatian utama dalam HI. Dalam menghadapi konflik antarnegara dan perselisihan internasional, lembaga-lembaga seperti Pengadilan Internasional dan Badan Penyelesaian Sengketa WTO memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan memfasilitasi penyelesaian damai. Analisis tentang efektivitas mekanisme ini dalam menyelesaikan sengketa internasional, serta tantangan-tantangan yang dihadapinya, memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika politik global. aspek hukum dan institusional dalam HI tidak hanya membahas peran organisasi internasional dan hukum internasional, tetapi juga menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan upaya untuk memperkuat sistem hukum internasional dalam menghadapi kompleksitas tantangan politik global (Cooper et al., 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, Richard, 2016. *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- Baylis, J., Steve, S., Patricia, O., 2017. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*.
- Buzan, B., Little, R., 2000. *International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations*. Oxford University Press.
- Cooper, A.F., Heine, J., Thakur, R., 2015. *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press.
- Drezner, D.W., 2014. *The System Worked: How the World Stopped Another Great Depression*. Oxford University Press.
- Goldstein, J.S., Pevehouse, J.C., 2017. *International Relations (11th ed.)*. Pearson.
- Hurrell, Andrew, 2007. *On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society*. Oxford University Press.
- Hyde-Price, A., 2016. *Realism and Fear in International Relations: Morgenthau, Waltz and Mearsheimer Reconsidered, Realism and Fear in International Relations: Morgenthau, Waltz and Mearsheimer Reconsidered*. Springer International Publishing.
- Jackson, R., Georg, S., 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford University Press.
- Jervis, R., 2017. *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton University Press.

- Keohane, R.O., Nye, J.S., 2001. Power and Interdependence. Pearson.**
- Krugman, P.R., Maurice, O., 2017. International Economics: Theory and Policy. Pearson.**
- Mingst, K.A., McKibben, H.E., Arregun-Toft, I.M., 2019. Essentials of International Relations (8th ed.). W. W. Norton & Company.**
- Walt, S.M., 2018. The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy. Farrar Straus and Giroux.**
- Waltz, K.N., 1979. Theory of International Politics.**
- Wendt, A., 1999. Social Theory of International Politics. Cambridge University Press.**
- White, J.R., 2017. Terrorism and Homeland Security. Cengage Learning.**

BAB 2

SEJARAH HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Ajeng P. Marlinda

2.1 Hubungan Internasional Era Kuno

2.1.1 Sejarah Perang Eropa

Perang yang terjadi di abad ke 16 dan abad ke 17 Masehi adalah perang yang diwarnai oleh beragam isu maupun motif masing-masing pihak. Ketika itu pemerintahan mayoritas adalah berbentuk kerajaan. Mereka memiliki motif yang berbeda-beda dalam berperang. Ada yang dilatarbelakangi oleh motif agama, ada pula yang berperang karena demi otonomi politiknya, ada pula berperang untuk ekspansi teritori politiknya. Yang jelas, peperangan pada masa itu akan mengubah masa depan dunia politik Eropa yang ditandai dengan munculnya sistem internasional berbasis negara berdaulat. Tepatnya ketika muncul dua perjanjian penting yang menyebabkan kekuatan Gereja dan Kekaisaran Agung Romawi yang makin melemah sehingga memperkuat ide tentang negara-negara berdaulat, yakni Perjanjian Religius Augsburg tahun 1555 dan Perjanjian Westphalia tahun 1648.

Sebelum membahas mengenai perjanjian Westphalia, terlebih dahulu kita akan membahas tentang perjanjian Augsburg. Perjanjian ini mengakhiri peperangan besar antara dua kubu, yakni dinasti Habsburg dari Austria dengan dinasti Valois dari Perancis atau biasa dikenal dengan Perang Habsburg – Valois. Pada mulanya perang ini disebabkan adanya pernikahan antara Maximilian I dari Habsburg, yang merupakan salah satu dinasti di

Kekaisaran Agung Romawi, dengan Mary dari Burgundi, dinasti dari Kerajaan Perancis. Raja Perancis Louis XI dari Valois merasa tidak terima karena salah satu teritorinya dikuasai, sehingga iapun mendesak Maximillian untuk mengakui Burgundi sebagai bagian dari teritorinya. Louis pun terus mendesak hingga Maximillian akhirnya mengakui Burgundi menjadi salah satu wilayah Perancis. Kesepakatan ini tercantum di dalam Perjanjian Arras pada tahun 1482.

Namun, ternyata tidak selesai sampai perjanjian tersebut. Pernikahan antara Maximillian dengan Mary ini justru menjadi pemicu peperangan besar di Eropa yang akan berlangsung selama kurang lebih dua abad kemudian. Maximillian dan Mary pun melahirkan seorang putra bernama Philip, yang akhirnya dinikahkan dengan Joanna dari Castille. Joanna merupakan anak Ferdinand dan Isabela dari Spanyol. Philip dan Joanna pun dikaruniai seorang anak yang bernama Charles V. Ia menerima warisan wilayah yang sangat besar, yakni Austria, Burgundi, beberapa kerajaan di Itali, dan daerah kekuasaan Spanyol di Amerika Tengah. Karena begitu luasnya kekuasaan yang ia miliki, membuat Charles ingin menyatukan kembali Kristen di bawah Kekaisaran Agung Romawi.

Keinginan Charles tersebut tidak semudah itu untuk diwujudkan. Karena terjadi perselisihan di dalam tubuh kekaisaran yang berujung pada perpecahan. Selain itu, isu agama pun memperparah kondisi tersebut, yakni munculnya isu Protestanisme. Apalagi reformasi Gereja dan munculnya protestanisme terjadi pada akhir abad pertengahan Eropa. Sayangnya, ide tersebut ditentang oleh kalangan Katolik. Pandangan yang sama juga ditujukan pada Calvinis - ajaran John Calvin yang menganut tradisi predestinasi dan gagasan bahwa Tuhan telah memilih siapa yang akan menerima keselamatan (Crosswalk.com, 2023; Tim Kristen Murni, 2024); kehadirannya dianggap merusak

tatanan awal Katolik. Pandangan ini merupakan pandangan Charles V, sang Kaisar saat ia meredam perlawanan raja-raja Jermannya yang beragama Protestan.

Perjanjian Augsburg tahun 1555 pun menandai berakhirnya peperangan antar saudara tersebut. Perjanjian itu berisi tentang *cuius regio eius religio* (*whose the region, his the religion*). Bahwa artinya semua Raja bebas untuk menentukan agama apa yang akan dianut termasuk agama rakyatnya, tanpa adanya intervensi dari Kekaisaran. Sehingga, banyak raja-raja di bagian Utara dan Tengah Jerman menjadi Lutheran – ajaran Martin Luther yang mengajarkan keselamatan ditawarkan secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan diterima melalui kasih karunia (Hillerbrand, 2024; Tim Kristen Murni, 2024), sementara mayoritas raja-raja di Selatan tetap memeluk Katolik. Namun ternyata perjanjian tersebut pun tidak dapat menghentikan konflik yang terjadi karena perjanjian itu hanya mengakui dua agama saja, padahal perkembangan Calvinis Reformed dalam Kekaisaran semakin banyak.

Meningkatnya Calvinis untuk mempengaruhi raja-raja di Jerman membuatnya tidak mepedulikan perjanjian Augsburg. Oleh karena itu, Rudolf II, Kaisar Romawi Agung yang baru kembali membuat aturan pembatasan kehidupan beragama, dimana kesepakatan dalam perjanjian Augsburg semakin diacuhkan. Kemudian pada awal abad ke 17, muncullah dua blok agama yang terbentuk dalam kekaisaran, yaitu Uni Evangelis (aliansi kaum Protestan) pada 1608 dan juga Liga Katolik (aliansi kaum Katolik) pada 1609. Kedua kelompok agama ini pun masing-masing mempersiapkan persenjataan selengkap mungkin demi berjaga-jaga kalau perang akan meletus sewaktu-waktu.

Apa yang diprediksi oleh kedua kelompok agama tersebut pun menjadi kenyataan. Namun untuk perang kalinini dipicu oleh dinasti Habsburg. Charles V melepaskan jabatannya dengan membagi wilayah kekuasaan terhadap kedua anaknya. Philip I mendapat kekuasaan di daerah Spanyol, sedangkan Ferdinand I mendapat kekuasaan di Eropa Tengah, termasuk Austria, Bohemia, dan Hungaria. Selanjutnya Ferdinand (dari Styria yang merupakan cucu dari Ferdinand I) pun menjalankan aturan diskriminasi agama dan bahkan menutup beberapa gereja Protestan ketika menjabat sebagai raja Bohemia. Hal tersebut pun mengundang protes dari kalangan bangsawan Protestan di Bohemia. Sehingga terjadilah apa yang disebut '*the defenestration of Prague*' atau '*pelemparan di Praha*' yakni peristiwa pelemparan dua orang pegawai kerajaan ke luar jendela istana. Peristiwa ini juga menandainya munculnya apa yang dinamakan Perang Tiga Puluh Tahun.

2.1.2 Perang 30 Tahun

Perang tiga puluh tahun ini terdiri dari empat fase (Amsir, 2021), yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Fase Bohemia (1618-1625)

Pada fase pertama ini dimulai dengan adanya perang saudara di daerah Bohemia antara Raja Ferdinand yang memimpin Liga Katolik dengan Pangeran Frederick dari Palatine yang memimpin Uni Evangelis. Selanjutnya Ferdinand dihentikan jabatannya oleh pangeran-pangeran dari Bohemia. Gantinya adalah Frederick yang diangkat sebagai Raja Bohemia pada 1618. Kemudian, Ferdinand naik sebagai Kaisar Romawi Agung pada 1620 yang membuat ia semakin mudah menghapuskan protestanisme di Bohemia.

2. Fase Denmark (1625-1629)

Pada fase Denmark ini, seorang Raja dari Denmark bernama Christian IV mencoba untuk membela kalangan protestan. Sayangnya, kekuatannya tidak sebanding dengan jenderal perang Katolik bernama Albert dari Wallenstein. Sehingga protestan Bohemia harus mengalami kekalahan kembali. Alhasil dalam kurun waktu 10 tahun, kaum protestan Bohemia harus menerima dikatolikkan oleh Ferdinand.

3. Fase Swedia

Selanjutnya pada fase ketiga ini merupakan fase keberuntungan bagi protestan yang ditandai oleh bergabungnya Raja Swedia Gustavus Adolphus di tanah Jerman. Ia membawa Denmark (lagi), Polandia, Finlandia dan beberapa negara kecil di Baltik untuk membantu Protestan, atau lebih tepatnya membantu saudaranya, bernama Duke Mecklenburg yang sedang diasingkan. Selain Swedia, Perancis pun turut membantu melalui perdana menteri Cardinal Richelieu dari segi finansial. Akhirnya pada 1631 Gustavus berhasil mengalahkan Katolik di Breitenfield dan pada 1632 di Lützen. Namun, pada peperangan di Nördlingen tahun 1634, Gustavus tewas. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat Perancis, tetapi justru semakin menguatkan usahanya dalam melawan Habsburg atau mendukung protestan.

4. Fase Perancis (1635-1648)

Masuknya Perancis sekaligus menandai “internasionalisasi” Perang Tiga Puluh Tahun, yaitu dengan bergabungnya Belanda (sebagai balas budi saat berperang melawan Spanyol, 1622), Skotlandia, dan sejumlah tentara bayaran Jerman yang disewa raja-raja Potestan Jerman. Pada fase ini, perang yang terjadi berlangsung cukup lama karena dapat dibilang antara dua kekuatan berada pada posisi stalemata

(imbang) dimana tidak ada pihak yang memenangkan peperangan karena keterbatasan logistic dari kedua belah pihak. Situasi ini tentunya merugikan kedua belah pihak jika terjadi secara terus-menerus. Karena terutama berdampak pada kerugian ekonomi masing-masing pihak. Sehingga mau tidak mau membuat para pemimpin kerajaan tidak memiliki pilihan lain selain memikirkan perjanjian damai untuk menghentikan perang. Perdamaianlah menjadi satu-satunya solusi yang mendesak untuk dipenuhi saat ini yang merupakan kepentingan bersama (setidaknya untuk sementara waktu). Maka, teretuslah sebuah perjanjian bernama Perjanjian Westphalia. Perjanjian ini memiliki dua traktat utama, yaitu Traktat Münster dan Traktat Osnabrück.

2.1.3 Awal Mula Lahirnya Perjanjian Westphalia

Perjanjian Westphalia hadir selain sebagai sebuah kesepakatan bagi pihak-pihak yang berperang pada Perang Tiga Puluh Tahun, namun juga memiliki arti krusial terutama dalam sejarah Eropa dan juga tatanan dunia secara global. Perjanjian inilah yang membuat konsep tentang menyatukan seluruh Eropa di bawah pemimpin tunggal yaitu Gereja Katolik dan Kaisar Romawi Agung gagal (Polimpung, 2007).

Dapat disimpulkan, bahwa Perang Tiga Puluh Tahun merupakan perang yang diawali dengan perang antar agama yakni kaum protestan dengan Katolik. Namun, perang tersebut meluas dan melibatkan sebagian besar kekuatan-kekuatan besar yang ada di Eropa. Perang yang pada awalnya dimulai dengan isu agama, akhirnya berkembang menjadi persaingan antara kekuatan besar di Eropa terutama Habsburg dan Perancis. Dimana mereka berlomba-lomba untuk menjadi hegemoni di kawasan tersebut. Tetapi perlu diingat, bahwa perang tersebutlah

yang melahirkan konsep negara-bangsa atau negara modern yang ditandai oleh Perjanjian Westphalia hingga dan digunakan oleh pengamat hubungan internasional hingga saat ini (Amsir, 2021).

2.2 Hubungan Internasional Pasca Westphalia

2.2.1 Perjanjian Westphalia dalam Hubungan Internasional

Perjanjian Westphalia mengakhiri peperangan yang terjadi di dalam kekaisaran Romawi dan mencetuskan lahirnya konsep awal negara – bangsa (nation state) atau dapat disebut pula negara modern. Perjanjian Westphalia membuat banyak perubahan dalam bentuk negara modern (Amsir, 2021), yang meliputi:

1. Munculnya perwakilan pemerintah,
2. Adanya revolusi Industri,
3. Makin berkembangnya Hukum Internasional,
4. Terdapat peningkatan metode-metode diplomasi,
5. Munculnya aturan-aturan untuk penyelesaian konflik

Konsep dunia setelah adanya perjanjian Westphalia menunjukkan bahwa batas negara cenderung diabaikan. Makna Hubungan Internasional Konvensional berubah menjadi Hubungan Transnasional dan mengabaikan batas-batas negara, yang membuat negara satu dengan yang lain bebas berinteraksi, bebas bekerja sama, namun negatifnya adalah makin mudah pula adanya potensi konflik. Hubungan Internasional yang bisa berarti hubungan antar bangsa (*inter-nation*) membuat negara-bangsa lah yang menjadi actor utama, sehingga kurang menganggap adanya aktor non-negara. Seperti pendapat dari Robert C. Keohane yang melihat tidak terfokus pada Perang Dinginnya, namun lingkungan di sekelilingnya yang terbentuk sebab adanya

perang tersebut. Keohane melihat bahwa isu-isu ekonomi politik dunia mulai menggantikan peran dari isu keamanan internasional, aktor utama dalam Hubungan Internasional tidak hanya negara-bangsa, namun ada aktor-aktor transnasional, bentuk-bentuk interaksi internasional tidak lagi *interstate relations* namun menjadi transnasional dan *transgovernmental relations*, dan sebagainya.

Gagasan yang dikemukakan Keohane ketika itu sebagai pengkritik konsepsi Hubungan Internasional secara umum yang melihat realisme sebagai yang dominan. Dimana realisme menganggap bahwa kehidupan Hubungan antar bangsa itu penuh konflik dan cenderung anarki. Namun, pemikiran Keohane melihat bahwa Hubungan Internasional bisa menciptakan suatu hubungan damai dengan banyak peluang kerja sama (Mukti, 2013).

Perjanjian Westphalia ini telah mengubah struktur hierarki masyarakat yang telah terbentuk sejak lama. Dimana pada awalnya rakyat hanya tunduk dan patuh terhadap segala jenis aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya, baik kerajaan maupun gereja. Adanya perjanjian ini mengubah konsep tersebut menjadi pemahaman bahwa rakyat lebih berdaulat dalam mengambil kebijakan.

Perjanjian Westphalia yang menciptakan hubungan transnasional berhasil mempengaruhi sistem interaksi negara-bangsa. Dimana mereka memiliki karakter yang lebih partisipatif dari semua level, baik aktor internasional maupun local, baik tingkat negara, institusi, maupun individual. Perjanjian Westphalia selain dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hubungan internasional modern, juga masuk ke dalam peristiwa hukum internasional modern yang didasarkan atas negara-negara

nasional. Hal tersebut disebabkan oleh (Amsir, 2021), sebagai berikut:

1. Perjanjian Westphalia mengakhiri perang 30 tahun, dan karena perang itu terjadi di Eropa, maka perjanjian ini telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi.
2. Perjanjian ini membuat berakhirnya usaha Kaisar Romawi untuk selama-lamanya.
3. Hubungan antar negara-bangsa dilepaskan dari urusan gereja, namun berdasar pada kepentingan nasional masing-masing negara.
4. Perjanjian Westphalia mengakui adanya kemerdekaan negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman.

Sejak adanya Perjanjian Westphalia, mulai bermunculanlah negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech sebagai asas politik internasional. Berikut akan diuraikan perbedaan antara masyarakat Kristen Eropa pada zaman abad pertengahan dengan masyarakat internasional (Heliarta, 2010; Syahrul Salam, Adi Rio Arianto, 2017):

1. Negara adalah suatu unit teritorial yang memiliki daulat penuh.
2. Hubungan antara negara yang satu dengan yang lain berdasarkan atas kemerdekaan mereka dan mempunyai persamaan derajat.
3. Masyarakat negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang Kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai kepala gereja.
4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan hukum yang banyak mengambil pengertian lembaga hukum perdata, hukum Romawi.
5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai

hukum yang mengatur hubungan antar negara, namun negara harus benar-benar tunduk dan patuh terhadap hukum ini.

6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan Polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional.
7. Anggapan terhadap perang beralih dari anggapan mengenai ajaran perang suci ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.

Setelah munculnya Perjanjian Westphalia, susunan masyarakat internasional juga didasarkan pada hakikat negara beserta pemerintahannya, yaitu memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Perjanjian Westphalia secara singkat telah menciptakan suatu konsep baru tentang komposisi dalam komunitas global yang baru (Amsir, 2021).

Karena sebuah negara telah memiliki kedaulatannya sendiri, maka pemerintah sebagai pemimpin negara tersebut sebagai pemegang amanah dari kedaulatan rakyatnya. Pemerintah juga memiliki hak istimewa untuk mengkodifikasi undang-undang negaranya, dapat menggunakan kekerasan untuk menegakkan hukum, dan dapat mempergunakan kekuatan militer untuk melindungi negaranya ataupun untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya (Pratiwi, 2013).

Perjanjian Westphalia pada 1648 menandai negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk. Puncak dari sejarah kedaulatan negara tersebut adalah pada penyelenggaraan Konferensi Internasional ke 7 Negara-negara Amerika di Montevideo, Uruguay pada 26 Desember 1933. Dalam konferensi internasional dirumuskanlah Konvensi Montevideo (*Convention on Rights and Duties of*

States, 1933) yang mengatur sejumlah unsur yang mesti dimiliki oleh negara berdaulat (Atmaja, 2014), yakni:

- 1. Masyarakat,**
- 2. Wilayah,**
- 3. Pemerintah,**
- 4. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.**

2.2.2 Isi Perjanjian Westphalia

Perjanjian Damai Westphalia terdiri dari dua perjanjian yang ditandatangani di dua kota di wilayah Westphalia, yaitu di:

- 1. Osnabrück pada 15 Mei 1648, yang mendamaikan Swedia (dan sekutunya) dengan Kekaisaran Romawi Agung.**
- 2. Münster pada 24 Oktober 1648, yang mendamaikan antara Perancis (dan sekutunya) dengan Kekaisaran Romawi Agung**

Kedua perjanjian ini mengakhiri Perang 30 Tahun di Kekaisaran Romawi Suci pada 1618-1648 dan Perang 80 Tahun antara Spanyol dan Belanda pada 1568-1648. Rumusan utama perjanjian Westphalia menciptakan suatu konsep utama yakni wilayah yang tadinya berbentuk kerajaan menjadi sebuah negara nasional yang berdaulat. Negara-negara tersebut diijinkan untuk menyusun kontrak perjanjian dengan negara lain. Perjanjian ini juga mengakhiri kekuasaan kekaisaran Katolik yang dialihkan menjadi kedaulatan negara. Akibatnya, sistem dunia pun berubah menjadi didasarkan pada sistem negara (Wekke, Ismail Suardi, 2018).

2.2.3 Pengaruh Perjanjian Westphalia dari Otoritas Gereja ke Negara Berdaulat

Menurut Robert M. Maclver, negara adalah suatu entitas yang mempunyai aturannya tersendiri dalam penertiban masyarakat di suatu wilayah menurut aturan hukum yang diadakan oleh pemerintah negara tersebut (Budiarjo, 2008). Dalam konsep kedaulatan, secara umum pemimpin manapun cenderung ingin mengklaim sebagai penguasa tunggal untuk memberi keputusan di wilayah yang dipimpinnya. Kesulitannya bukan terletak pada bagaimana menemukan seorang pemimpin yang menganggap dirinya berdaulat, namun bagaimana cara menemukan sekelompok pemimpin yang saling mengakui kedaulatan. Seperti konsep kedaulatan yang terjadi pada Abad Pertengahan. Gagasan tentang otoritas akhir adalah wajar untuk mengorbankan diri untuk Gereja, sebagaimana Tuhan adalah otoritas, statusnya diwakilkan di bumi melalui Paus dan Kaisar Romawi Suci untuk mewakilinya. Jadi, meskipun negara berdaulat ada, mereka tidak mengakui satu sama lain (Croxtton, 1999).

Dengan demikian, negara-negara Eropa modern muncul dari kehancuran perang tiga puluh tahun, dimana sekitar dua pertiga dari total penduduk telah hilang dan lima perenam dari perkampungan telah dihancurkan. Bencana yang mengerikan ini menegaskan bahwa komunitas Kristen abad pertengahan (khususnya di Eropa) sangat rapuh dan sebab itu secepatnya dibutuhkan sistem pengganti. Akhirnya lahirlah konsep negara berdaulat (*sovereign state*) dari perdamaian Westphalia yang ditandatangani 1648. Perdamaian Westphalia secara luas diakui sebagai garis pemisah antara Eropa abad pertengahan yang didominasi unit-unit politik lokal di bawah otoritas yang komprehensif dari Tahta Suci Romawi (Paus) serta Eropa Modern dimana negara-negara diakui

sebagai entitas yang berdaulat. Tahta Suci Romawi dan Paus tetap eksis, namun semua kekuasaan politik mereka telah dihancurkan. Sebelum 1648 sempat berkembang pemikiran dari para sarjana hukum internasional bahwa suatu negara dibenarkan untuk mengintervensi masalah negara lain dengan alasan untuk melindungi warga negara lain tersebut dari penindasan. Lima puluh tahun kemudian, para sarjana hukum menyimpulkan bahwa intervensi suatu negara terhadap masalah negara lain merupakan pelanggaran kedaulatan, belajar dari pengalaman Perang Tiga Puluh Tahun dan perjanjian Westphalia. Menjelang abad ke 18, konsep negara berdaulat menjadi prinsip hukum yang dominan untuk mengatur hubungan antara negara di Eropa. Sistem negara modern model Westphalia ini, bukan hanya merupakan hasil dari perkembangan keagamaan, namun juga adanya perubahan-perubahan ekonomi dan teknologi untuk memperkuat negara berdaulat (Amsir, 2021).

Eropa memiliki kestabilan yang cukup lama dikarenakan adanya Inggris sebagai negara yang kuat baik dari segi militer maupun ekonomi. Sehingga Inggris dapat menjadi penyeimbang di wilayah Eropa. Kondisi geografis Inggris yang terpisah dari daratan juga menguntungkan posisi Inggris dalam persaingan Hubungan Internasional di Eropa (Bakry, 2017).

2.3 Perang Dunia, Perang Dingin, Dekolonisasi

2.3.1 Perang Dunia 1, 1914-1918

Perang Dunia I dengan tepat disebut sebagai perang ilusi yang dengan jelas mengungkap semua kebodohan generasi sebelum perang. Rencana perang yang dibuat oleh para jenderal langsung gagal, dan ekspektasi bahwa intensitas senjata modern akan mampu melancarkan

serangan, atau bahwa perang akan berlangsung singkat, terbukti sangat salah. Jerman berharap untuk mencapai hegemoni di Eropa sebagai langkah menuju kekuatan dunia, dan sebaliknya kekuatan dunia diminta untuk ikut berperan dalam mencegah hegemoni di Eropa. Kaum sosialis mengira perang akan menghasilkan pemogokan umum dan revolusi, dan sebaliknya perang tersebut mengilhami persatuan nasional yang patriotik. Kaum monarki berharap perang akan memperkuat rezim lama, dan sebaliknya akan menjatuhkan dinasti-dinasti yang tersisa di Eropa Timur. Kaum liberal berharap bahwa perang akan mendorong penyebaran kebebasan, dan sebaliknya perang akan memaksa pemerintah demokratis untuk menerapkan sensor, darurat militer, dan memerintah perekonomian yang tunduk pada perintah birokrasi terpusat. Masing-masing negara dengan caranya masing-masing mengorbankan satu demi satu nilai-nilai yang mereka klaim telah mereka perjuangkan dengan keyakinan bahwa kemenangan akhir akan menyelesaikan semua kerugian yang harus ditanggung. Dan dengan ironi yang mengerikan, Perang Dunia I juga berakhir dengan berbagai rencana perdamaian yang sama ilusinya dengan rencana perang. Seperti yang ditulis oleh sejarawan William McNeill, “irasionalitas perencanaan yang rasional dan profesional tidak dapat diwujudkan dengan lebih nyata.”

Perang Dunia I dapat dibagi menjadi tiga periode yakni:

1. Periode 1914 - 1916 adalah pertempuran awal berupa perjuangan untuk mendapatkan sekutu baru, dan mobilisasi di lini depan,
2. Tahun 1917 adalah permulaan peperangan ideologis dalam revolusi Rusia dan masuknya Amerika
3. Tahun 1918 yakni perjuangan empat arah terakhir

antara imperialisme Jerman, diplomasi tujuan perang Sekutu, internasionalisme liberal Wilsonian, dan bolshevisme Leninis.

2.3.2 Perang Dunia 2, 1939-1945

Tahun 1930-an merupakan dekade krisis yang tidak terselesaikan dan berpuncak pada pecahnya perang total yang kedua. Perjanjian dan penyelesaian pada era pertama pascaperang runtuh secara tiba-tiba akibat dampak Depresi Besar dan revisionisme agresif Jepang, Italia, dan Jerman. Pada tahun 1933 hampir tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas struktur ekonomi lainnya yang dibangun pada tahun 1920an. Pada tahun 1935, rezim Nazi Adolf Hitler telah membatalkan Perjanjian Versailles dan pada tahun 1936 juga membatalkan perjanjian Locarno. Konflik bersenjata dimulai di Manchuria pada tahun 1931 dan menyebar ke Abyssinia pada tahun 1935, Spanyol pada tahun 1936, Tiongkok pada tahun 1937, Eropa pada tahun 1939, serta Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1941.

Perang sekali lagi pecah karena konflik kebangsaan di Eropa Timur-Tengah, yang sebagian dipicu oleh dorongan Jerman untuk hegemoni benua, dan perang ini sekali lagi meluas menjadi konflik global yang zona pertempurannya menyentuh perairan atau jantung hampir setiap benua. Sifat keseluruhan Perang Dunia II melampaui tahun 1914-1918 dimana penduduk sipil tidak hanya berkontribusi pada upaya perang namun juga menjadi sasaran langsung serangan udara. Selain itu, pada tahun 1941 rezim Nazi melancarkan perang pemusnahan terhadap orang-orang Slavia, Yahudi, dan unsur-unsur lain yang dianggap inferior menurut ideologi Hitler, sementara Stalinis Rusia

memperluas kampanye terornya terhadap Ukraina hingga ke wilayah Polandia yang ditaklukkan. Perang Jepang-Amerika di Pasifik terkadang juga merupakan aspek brutal dari perang antar ras. Demokratisasi peperangan yang terakhir ini menghilangkan perbedaan lama antara kombatan dan non-kombatan dan memastikan bahwa jumlah korban jiwa dalam Perang Dunia II akan jauh melebihi jumlah korban Perang Dunia I dan bahwa korban sipil akan melebihi korban militer.

Sekali lagi perang Eropa berubah menjadi pertarungan antara Mitteleuropa yang diduduki Jerman dan koalisi Sekutu di pinggiran. Namun kali ini Italia mengabaikan netralitas bagi pihak Jerman, dan Uni Soviet bertahan di timur, sementara Prancis runtuh di barat. Oleh karena itu, diktator Soviet Joseph Stalin menggantikan Prancis dalam pertemuan “Tiga Besar”, bersama dengan Franklin Roosevelt dan Winston Churchill. Jepang memilih untuk tetap netral terhadap Uni Soviet, sementara Aliansi Besar negara-negara anti-Fasis dilanda konflik mengenai strategi dan tujuan perang. Oleh karena itu, Perang Dunia II terdiri dari beberapa perang yang paralel atau saling tumpang tindih, sedangkan perang di Eropa menjadi semacam pertarungan tiga arah antara kekuatan demokrasi, Nazisme, dan Komunisme. Segera setelah kekuatan Jerman dan Jepang tersingkir, konflik di antara pihak yang menang pun meledak dan melahirkan Perang Dingin. Perang Dunia II menyelesaikan kehancuran sistem Kekuatan Besar yang lama, mempersiapkan disintegrasi kerajaan-kerajaan Eropa di luar negeri, dan menenggelamkan Eropa sendiri ke dalam arena dunia yang didominasi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat.

2.3.3 Perang Dingin, 1945-1957

Pertemuan simbolis pertama tentara Amerika dan Soviet terjadi di Torgau, Ger., pada tanggal 25 April 1945. Jabat tangan dan bersulang mereka dengan bir dan vodka merayakan kemenangan bersama mereka atas Nazi Jerman dan menandai runtuhnya Eropa lama; namun dengusan mereka yang tidak jelas dan senyuman berlebihan menandakan kurangnya komunikasi dalam hubungan mereka di kemudian hari. Koalisi-koalisi besar di masa perang selalu terpecah ketika pertarungan bersama digantikan oleh perselisihan mengenai pembagian harta rampasan, namun para pemenang setelah perang Louis XIV dan Napoleon atau Perang Dunia I setidaknya menegosiasikan perjanjian damai, sementara dendam di antara mereka dimoderasi oleh waktu atau bahaya bahwa musuh bersama mungkin akan bangkit kembali. Namun, setelah tahun 1945, tidak ada konferensi perdamaian besar yang diadakan, tidak ada ketakutan bersama terhadap Jerman atau Jepang, dan perselisihan di antara para pemenang semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga menjadi apa yang oleh penasihat presiden AS Bernard Baruch dan pakar Walter Lippmann disebut sebagai Perang Dingin.

Konflik AS-Soviet dimulai pada tahun 1945 mengenai perlakuan terhadap Jerman yang diduduki dan komposisi pemerintahan Polandia. Hal ini berkembang pada tahun 1946 ketika Soviet mengomunikasikan tanah-tanah yang berada di bawah pendudukan mereka dan para pemenang gagal menyepakati rencana pengendalian energi atom. Dari tahun 1947 hingga 1950, reaksi Washington dan Moskow terhadap ancaman yang dirasakan oleh kedua belah pihak memperkuat perpecahan Eropa dan sebagian besar dunia

menjadi dua blok, dan Perang Dingin menjadi universal, terlembaga, dan termiliterisasi. Hal ini juga menciptakan sekutu dari musuh sebelumnya. Setelah kekalahan Jerman, misalnya, banyak ilmuwan dan teknisi Nazi diizinkan bermigrasi ke Amerika Serikat, karena pengetahuan ahli mereka dianggap penting dalam kekalahan Jepang dan, setelah perang, dalam perjuangan melawan komunisme selama Perang Dingin. Sebagai bagian dari program kontroversial seperti Project Paperclip, sekitar 1.500 profesional Jerman dan Austria beserta keluarga mereka pindah ke Amerika Serikat, sebagian besar dari mereka kemudian menjadi warga negara AS.

Oleh karena itu, penyelesaian setelah Perang Dunia II adalah perdamaian tanpa perjanjian, dan Perang Dingin memperbesar, mendistorsi, atau mempermainkan tren-tren sejarah lain yang dipicu oleh perang-perang dunia pada abad ke-20: nasionalisme Asia, dekolonisasi, dan sebagainya. Puncak dari Revolusi Tiongkok yang telah berlangsung selama 37 tahun, evolusi partai-partai Komunis independen di Yugoslavia dan Asia, dan upaya Eropa Barat untuk mengakhiri konflik selama empat abad melalui integrasi ekonomi. Awal Perang Dingin bukanlah dekade yang dipenuhi ketakutan dan kegagalan, namun juga merupakan masa kreatif yang melahirkan hal yang paling mendekati tatanan dunia yang telah ada sejak tahun 1914. Dengan satu-satunya pengecualian besar pada perpecahan Sino-Soviet yang kemudian terjadi, batas-batas, institusi, dan hubungan yang terbentuk pada akhir tahun 1940an hampir sama dengan yang membentuk politik dunia pada tahun 1980an.

2.3.4 Dekolonisasi dan Perkembangan

Peristiwa Dunia Ketiga juga menimbulkan permusuhan antara Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Ketiganya berasumsi bahwa negara-negara baru secara alami akan memilih institusi demokrasi di negara induknya atau, sebaliknya, akan tertarik pada kubu Soviet atau yang “anti-imperialis”. Amerika Serikat telah mendesak Inggris dan Perancis untuk membubarkan kerajaan mereka setelah Perang Dunia II, namun ketika negara-negara tersebut menjadi sekutu Washington yang paling kuat dalam Perang Dingin, Amerika dengan enggan memberikan dukungan terhadap perlawanan Inggris-Prancis terhadap kelompok nasionalis dan kekuatan Komunis di koloni mereka. Program Poin Empat Presiden Truman mengamanatkan bantuan dan pinjaman luar negeri AS kepada negara-negara baru agar negara-negara baru tidak “terjerumus ke dalam kemiskinan, keputusan, ketakutan, dan kesengsaraan umat manusia lainnya yang melahirkan perang tanpa akhir” (Britannica, 2000).

Bantuan luar negeri tidak serta merta bermanfaat bagi kepentingan AS, karena banyak penguasa Dunia Ketiga memilih netralisme atau sosialisme, juga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar negara baru tidak memiliki infrastruktur sosial dan fisik yang diperlukan untuk perekonomian modern. Para pendukung bantuan menjawab bahwa modal dan teknologi AS dibutuhkan justru untuk membangun infrastruktur, membantu “pembangunan bangsa,” dan untuk membentengi penerima bantuan terhadap Komunis dan pihak lain yang mungkin menghambat proses pembangunan pada tahap awal. Sebaliknya, aliran Soviet berpandangan bahwa negara-negara baru tidak akan benar-benar merdeka sampai mereka terbebas dari ketergantungan ekonomi

pada tuan mereka sebelumnya, namun Soviet selalu mengharapkan imbalan politik atas bantuan yang mereka berikan. Klaim Republik Rakyat Tiongkok sebagai pemimpin pemberontakan di Dunia Ketiga juga mengharuskan Khrushchev untuk memberikan dukungan yang lebih berani terhadap perang pembebasan nasional. Namun pada tahun 1960, sudah jelas bahwa politik dan budaya lokal membuat setiap situasi di Dunia Ketiga menjadi unik (Britannica, 2000).

Saat ini, HI lebih mengutamakan gagasan kedaulatan Barat dan menguniversalkan gagasan Barat, seperti pasar bebas dan kapitalisme, sebagai sesuatu yang pada dasarnya baik. Ide-ide/konsep-konsep yang disajikan sebagai sesuatu yang positif secara universal tidak mengakui bahwa mereka, pada kenyataannya, berakar kuat pada nilai-nilai Barat. Misalnya, HI terus terbentuk berdasarkan 'penemuan' Dunia Baru sebagai awal sejarah, ketika diketahui bahwa banyak Masyarakat Adat telah tinggal di benua Amerika selama berabad-abad. Singkatnya, perspektif Barat mengenai HI berarti bahwa dunia dan politik dilihat melalui perspektif mereka, menyisakan sedikit ruang untuk penafsiran lain. Mungkin perspektif yang paling mendasar adalah bahwa kolonialisme berakhir pada akhir abad ke-20 dengan munculnya gerakan kemerdekaan dan lahirnya negara-negara baru. Apa yang gagal diwujudkan adalah berlanjutnya dinamika kekuasaan kolonial melalui kolonialitas yang mereproduksi hierarki ras, gender, dan geopolitik yang memberikan perlakuan istimewa kepada negara-negara Utara dan tidak termasuk negara-negara Selatan. Dekolonisasi HI harus berupaya untuk membatalkan mekanisme kekuasaan kolonial dalam disiplin ilmu tersebut, dengan menginterogasi bagaimana

kita menghasilkan pengetahuan dan apa yang dianggap sah (Gricius, 2021).

2.4 Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin

Hubungan Internasional pasca Perang Dingin atau disebut pula dengan Hubungan Internasional era modern ini dapat dikatakan sebagai hubungan antara unit-unit politik yang dikenal dengan negara bangsa. Artinya bahwa tidak lagi berbentuk kerajaan atau monarki, terutama setelah adanya perjanjian Westphalia. Konsep negara bangsa ini pun menyebar secara global ke seluruh dunia, tepatnya setelah Perang Dunia II. Salah satu era penting dalam Hubungan Internasional juga ketika terjadinya penghapusan penjajahan sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 termasuknya lahirnya Indonesia.

Hubungan Internasional pada awalnya hanya melihat negara bangsa sebagai actor utamanya. Dalam perkembangannya, akan bermunculan actor-aktor lain yang tidak terbatas hanya pada negara bangsa. Dua perang besar pada Perang Dunia I dan II mengajarkan pada kita bahwa betapa besar kerugian yang dialami akibat perang. Walaupun sama-sama mengakibatkan kerugian dan penderitaan, namun perang dunia ini berbeda dengan penjajahan. Karena perang Dunia itu melibatkan aliansi-aliansi negara bangsa serta berkembangnya teknologi militer yang membuat semakin peliknya kehidupan antar negara-bangsa. Munculnya pemimpin-pemimpin berambisi untuk mencapai kepentingan egoisnya membuat hubungan internasional dilihat sebagai suatu konflik antar negara karena adanya perang berkelanjutan terus-menerus (Setiawan, 2020).

Berakhirnya Perang Dingin mengalihkan persaingan dari persaingan militer menjadi persaingan ekonomi. Selain itu juga, hubungan internasional pasca Perang Dingin lebih melihat aspek-aspek low politics (hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) dibandingkan dengan high politics (isu politik dan keamanan). Yang mana isu kesejahteraan ekonomi dianggap lebih prioritas daripada memikirkan tentang persaingan ideologi (seperti perang Amerika Serikat dan Uni Soviet dulu) maupun kekuatan militer. Jika dahulu pada masa Perang Dingin yang lebih krusial adalah keterlibatan dalam suatu blok keamanan, berbeda dengan saat ini bahwa akan lebih penting ketika suatu negara terlibat dalam blok perdagangan (Affianty, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Affianty, D. (2017) *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*.
- Amsir, A.A. (2021) 'Perjanjian Westphalia dan Momentum Pendirian Negara Modern', *Sulesana*, 15(1), p. 21.
- Atmaja, A.E. (2014) 'Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik Uu Ite Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo', *Jurnal Opinio Juris*, 16.
- Bakry, U.S. (2017) *Dasar- Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.
- Britannica (2000) *20th-century international relations*.
- Budiarjo, M. (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Crosswalk.com, S.E. (2023) *Apa itu Calvinisme?*, *christianity.com*. Available at: https://www-christianity-com.translate.goog/church/denominations/what-is-calvinism.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Croxton, D. (1999) *The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty*.
- Gricius, G. (2021) *Decolonising International Relations*. Available at: <https://newvoicespocostudies.wordpress.com/gricius/>.
- Heliarta (2010) *Mengenal Hukum Internasional*. Semarang: PT. Sindur Press.
- Hillerbrand, H.J. (2024) *Lutheranism Christianity*, *britannica.com*. Available at: <https://www.britannica.com/topic/Lutheranism>.
- Mukti, T.A. (2013) 'Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy', *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), pp. 177-178.

- Polimpung, H.Y.S. (2007) *Psikogeneologi Negara Berdaulat Modern- Objek Sublim Kedaulatan*. Jakarta: UI.
- Pratiwi, D.A. (2013) 'Isu Global Warming Dan Sikap Dunia Internasional', *Dimensi jurnal*, 2(1).
- Setiawan, A. (2020) *Pengantar Hubungan Internasional*. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Syahrul Salam, Adi Rio Arianto, R.H. (2017) 'Pemikiran Bela Negara dan Hubungan Internasional: Pergeseran Peran Negara dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Sudut Pandang Studi Ilmu Hubungan Internasional', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), pp. 151–152.
- Tim Kristen Murni (2024) *Calvinisme Vs. Lutheranisme: Perbandingan Mendalam*, <https://www.christianpure.com/>. Available at: <https://www.christianpure.com/learn/calvinism-vs-lutheranism>.
- Wekke, Ismail Suardi, S. (2018) *Perdebatan dalam wacana Agama dan Negara: Pemerintahan Islam di Malaysia*. Yogyakarta: Deepublish.

BAB 3

PERSPEKTIF DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi

“International Relations is a discipline of theoretical disagreements – a ‘divided discipline’-.” KJ. Holsti (1985)

3.1 Pendahuluan

Studi hubungan Internasional (HI), jika dibandingkan dengan bidang studi lainnya, merupakan bidang studi yang paling dinamis dan kompleks. Paling dinamis dalam aspek bahwasanya bidang ilmu ini berkembang seiring berkembangnya zaman serta kompleks di aspek subjek penelitian hubungan internasional yang sangat beragam. Studi ini meneliti tentang berbagai perilaku aktor-aktor internasional seperti negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, dan aktor lainnya di level global.

Sejak awal berdirinya di tahun 1919, Ketika bidang studi ini memisahkan diri dari bidang studi yang lebih tua yaitu kajian politik, hukum dan filsafat, bidang studi HI telah berkembang menjadi bidang studi dengan skop penelitian yang sangat luas karena bidang studi ini menyesuaikan dengan dinamika global yang terjadi dan menganalisisnya secara teoritis. Jika diamati di tahun 2024 (Ketika buku ini terbit) sudah banyak sekali berbagai kejadian dan fenomena hubungan internasional yang terjadi. Dari perang dunia 1 dan 2, perang dingin, runtuhnya Uni Soviet, Unipolarisme Amerika, *War on Terror*, *Arab Spring*, bangkitnya China dan Rusia, menurunnya Amerika dan Barat dan bangkitnya Multipolarisme global, Isu HAM dan *Global*

warming, sampai eskalasi tensi Iran dan Israel, China dan AS tentang Taiwan yang berpotensi untuk membawa dunia ke fenomena baru yang jauh lebih besar.

Fenomena-fenomena tersebut secara teoritis juga memiliki paradigma berfikir yang berbeda. Dari Unipolarisme ke Multipolarisme, berkurangnya perang antar negara berganti perang intra-negara, munculnya aktor-aktor baru hubungan internasional, menyoal identitas dan nasionalisme, keamanan negara ke keamanan individu, dsb. Karena studi ini merespon perkembangan fenomena hubungan internasionalnya, maka setiap lanskap waktunya studi ini juga memfokuskan diri pada fenomena yang berbeda juga, seperti fokus kepada kajian perang dan damai di tahun 1920an, fokus ke Politik Ekonomi Internasional (IPE) di interval waktu perang dingin (1970-80an), misal di awal berdirinya di tahun 1920an, fokus kepada aktor-aktor non-negara baru paska perang dingin (1990-sekarang), dan kehadiran perspektif alternatif guna “menambal” berbagai lubang yang tidak bisa dijelaskan oleh peneliti sebelumnya (Hadiwinata, 2017, hal. 4).

Besarnya subjek studi ini sering kali menyulitkan penelitinya untuk melakukan penelitian yang baik dalam hubungan internasional. Para sarjana HI cenderung kesulitan dalam mengartikulasikan subjek penelitiannya ke dalam koridor teoritis. Kekhawatiran ini dirasakan oleh Kenneth Waltz yang dikutip oleh Rosenberg (2010, hal. 65–89), menurutnya: *"Students of International Politics have had an extraordinarily difficult time casting their subject in theoretical terms."*

Karena itulah, berbagai perspektif teoritis dan kerangka berfikir dalam HI diperlukan. Perspektif teoritis dalam HI berkembang mengikuti fenomena-fenomena besar yang terjadi dalam fora internasional. Banyaknya perspektif teoritis hubungan internasional berguna untuk memahami dinamika kompleks politik global (Hostli, 1967, hal.15). Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa negara bertindak seperti yang mereka lakukan dan menawarkan wawasan tentang

motivasi dan perilaku negara-bangsa dalam interaksi mereka satu sama lain (Thompson et al., 1977, hal. 20).

3.2 Pentingnya Perspektif Dalam Menganalisa Hubungan Internasional

Perspektif ibarat kacamata. Ia membantu kita melihat fenomena-fenomena di sekitar kita, namun di dalam konsep kacamata pun ia memiliki spesifikasi tersendiri. Kacamata cekung (minus) baik digunakan untuk orang dengan rabun jauh, sedangkan kacamata cembung (plus) digunakan untuk orang dengan rabun dekat. Pengetahuan awal kita akan spesifikasi kaca mata ini membantu kita dalam menggunakannya dengan cara lebih baik. Kesalahan dalam menggunakan kacamata tidak hanya akan membuat pandangan kita kabur, namun juga akan membuat kita salah memahami fenomena yang ada di depan kita. Setiap perspektif memberikan jawaban dan kesimpulan yang berbeda satu sama lain, bahkan dalam satu fenomena internasional yang sama. Dalam konteks hubungan internasional terdapat beberapa fenomena yang mampu dijelaskan dengan baik dengan satu perspektif, namun tidak dengan perspektif lainnya, biasanya disebabkan berbagai batasan dalam perspektif tersebut dan luasnya bidang yang dikaji. Pemilihan perspektif yang tepat dalam menganalisa fenomena menjadi penting untuk difahami. Dalam konteks akademik ini sering disebut sebagai pemilihan “unit analisis”. Maka dari itu, kita perlu memahami setiap perspektif yang ada sehingga kita mampu memilih perspektif yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang ingin diketahui.

Sebagai sarjana hubungan internasional, penting bagi kita untuk memahami semua perspektif-perspektif yang ada dan tidak fanatik dan “taqlid” pada satu perspektif tertentu dikarenakan mempelajari satu perspektif teoritis saja dapat menimbulkan disorientasi. Segera setelah kita merasa telah berhasil memahami satu perspektif, kita menyadari masih

banyak perspektif lainnya yang menghadirkan jawaban yang berbeda dengan apa yang kita pahami sebelumnya. Karena setiap perspektif dalam hubungan internasional memberikan kerangka teoritis yang berbeda di mana hubungan internasional dapat dianalisis dan dipahami. Perspektif dan teori dalam HI sering kali digunakan bergantian dalam konteks penggunaan yang sama. Sepanjang sejarah, perspektif dalam HI terus bermunculan dan bersaing satu sama lain dan mereka saling mengkritisi dan melengkapi gap yang ditinggalkan perspektif sebelumnya.

Terkait hal di atas, Thomas Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* (1962) menerangkan pentingnya perspektif teoritis dalam memberikan landasan untuk memahami bagaimana dan mengapa teori-teori tertentu dilegitimasi dan diterima secara luas. Ia juga mengidentifikasi proses yang terjadi ketika teori tidak lagi relevan dan muncul teori baru. Misalnya, manusia pernah yakin bahwa bumi itu datar dan menerima fakta tersebut. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia membuang kepercayaan yang selama ini diterima. Ketika penemuan tersebut terjadi, terjadilah ‘pergeseran paradigma’ dan cara berpikir lama digantikan dengan cara berpikir baru. Meskipun perubahan dalam perspektif teoritis IR tidak sedramatis contoh di atas, terdapat evolusi yang signifikan dalam disiplin ilmu ini bersamaan dengan peristiwa-peristiwa besar dalam kancah internasional. Hal ini penting untuk diingat ketika kita mempertimbangkan bagaimana teori HI berperan dalam menjelaskan dunia dan bagaimana, berdasarkan periode waktu yang berbeda dan konteks pribadi kita, satu pendekatan mungkin lebih bermanfaat bagi kita dibandingkan pendekatan lainnya (McGlinchey S and Gold D, 2017, hal. 1).

Namun dalam penggunaannya mungkin perlu sedikit diingatkan bahwa perspektif teoritis dalam hubungan Internasional, sama dengan teori-teori dalam ilmu sosial yang lainnya tidak bisa disamakan dengan teori-teori yang dimiliki

cara berfikir di bidang eksak. Terdapat perbedaan yang terlihat di aspek objek penelitiannya. Teori di bidang eksakta seperti biologi, kimia, dan fisika memiliki fondasi yang jauh lebih kuat dari pada di bidang sosial. Karena di eksak teori yang dipunya, selain berfungsi untuk menjelaskan fenomena, teori tersebut dapat dengan mudah digeneralisasi di berbagai tempat lain di dunia sekaligus mampu memprediksi fenomena yang akan datang. Di bidang sosial, perspektif teoritis memang mampu menjelaskan fenomena, namun di aspek generalisasi dan kemampuan memprediksi sedikit kurang kuat, bisa jadi jawaban yang ditemukan di satu tempat, berbeda jika diterapkan di tempat lain (Diamond, 1987, hal. 34). Contohnya, ketika air mendidih di suhu seratus derajat di satu daerah, di daerah lain kita bisa pastikan air mendidih di suhu yang sama. Dalam fenomena sosial, misal kita meneliti penyebab revolusi yang terjadi di Prancis tahun 1789, apakah sama dengan penyebab revolusi di Rusia beberapa tahun setelahnya? Pasti berbeda (Rosenberg, 2010, hal. 167).

Di aspek variable dan objektifitas penelitian pun demikian, jika variable penelitian di bidang eksak bisa dikontrol, diasingkan dan disesuaikan keadaan sekitarnya seperti di habitat aslinya di laboratorium, layaknya Ketika kita ingin melihat reaksi kimia benda tertentu, kita perlu mengintervensi penelitiannya dengan menyesuaikan suhu, kelembaban, dan keadaan di laboratorium menyesuaikan dengan keadaan aslinya di alam sehingga reaksi kimia yang terjadi sesuai dan sama dengan apa yang terjadi di alam. Di aspek penelitian sosial, apakah hal tersebut bisa dilakukan? Apakah kita bisa memisahkan revolusi yang terjadi di suatu tempat membawanya ke laboratorium dan menyesuaikan kondisi-kondisinya agar lebih mudah diteliti, saya rasa tidak bisa. Karena itu di bidang sosial, dalam upaya mengejar objektifitas variable dikontrol dengan menggunakan limitasi, baik limitasi waktu dan kontekstualitas di mana fenomena itu terjadi. bahkan usaha tersebut pun terkadang juga belum tentu dapat

benar-benar mengontrol variable yang menjadi objek penelitian. Karena itu di aspek pengejaran objektivitas, penelitian sosial jauh lebih sulit dilakukan daripada penelitian eksak karena kita sebagai peneliti tidak dapat keluar dari apa yang kita teliti. Di aspek epistemologi, kita mengamati penelitian, namun kita berada di dalamnya, apa yang kita fahami pun sering kali membuat kita bias dalam melakukan penelitian karena pikiran kita tidak objektif, pikiran kita merupakan satuan dari berbagai fragmen-fragmen ide dari pengalaman kita sebelumnya yang terkonstruksi membentuk apa yang kita perspesikan.

Mungkin karena itulah, banyak ragam perspektif yang ada di bidang ini dan karena sebab itu juga sering kali, mereka saling mengkritisi satu sama lain. Banyaknya perspektif tersebut jangan dijadikan justifikasi dari kebenaran yang kita fahami, namun jadikanlah sebagai sebuah khasanah lain yang menawarkan alternatif jawaban lain dari fenomena yang ingin kita teliti.

3.3 Diferensiasi Perspektif Hubungan Internasional

Namun biasanya para pengkaji hubungan Internasional membaginya menjadi beberapa perspektif utama dan beberapa perspektif alternatif. Secara umum, perspektif Utama HI adalah Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme. Scott Burchill, Andrew Linklater dan beberapa peneliti lain menambahkan perspektif alternatif seperti English School, Marxism, Critical Theory (Frankfurt School), Postmodernism, Feminism, Green theory (Acharya, 2014, hal. 61; Burchill, et al., 2022, hal. 4; Dunne, et al., 2013, hal.409).Pemikir teoritis lain Michael P. Sullivan, Jack Donnelly dan Jacqui True (2001) mendikotomikan perspektif arus utama dan perspektif alternatif dan menunjukkan debat antara kedua sisi. Sedangkan Peneliti lainnya seperti Stephen Chan dan Cerwyn Moore membagi perspektif hubungan internasional menjadi empat kategori yang

cenderung membingungkan; Realisme, strukturalisme, Prularisme, dan Liberalisme (Hadiwinata, 2017, hal. 6).

Ketika para peneliti membagi perspektif tersebut berdasarkan perbedaan paradigm berfikirnya, karya Prof Bob Sugeng Hadiwinata berjudul *Studi dan Teori Hubungan Internasional Arus Utama, Alternatif dan Reflektif* (2017) membagi teori-teori tersebut berdasarkan geografis dan memberikan kontekstualitas dari setiap perspektif yang dipilih; (1) Perspektif Inggris: Metode Historis/Tradisional: Liberalisme/Idealisme, English School (Idealisme/Kantian, Realisme/Hobbes, Rationalisme/Grotius), Critical Theory (Andrew Linklater): dari 1919-sekarang. (2) Perspektif Amerika Serikat: Metode Scientific/Positivist, Realisme/Neo-Realisme, Neo-Liberal Institutionalisme, Paradigma Dominan dari IPE: dari 1940an-sekarang. (3) Perspektif Skandinavia: Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik (Johan Galtung), Teori Sekuritisasi (Copenhagen School) dan Kajian Keamanan Non-Tradisional (Ole-Weaver, dkk); 1970an-sekarang. (4) Perspektif Eropa daratan: Metode Historis Interpretatif, Postmodernisme, Konstruktivisme, dan masuknya Identitas budaya dan Intensi Manusia ke dalam studi HI (Nicolas Onuf dan Friedrich Kratochwil) (Hadiwinata, 2017, hal. 3).

Pembagian yang dilakukan Prof Sugeng di atas ini menarik karena beliau menyoroti corak pemikiran yang berbeda di setiap perspektif di perspektif dengan letak geografis yang berbeda, karena itu bukan tidak mungkin di lanskap daerah lain, terdapat perspektif hubungan internasional yang berbeda pula, namun perspektif tersebut tenggelam karena terdominasi perspektif Hubungan Internasional yang dianggap *western-centric* setidaknya itu juga yang dikhawatirkan oleh Amitav Acharya and Barry Buzan dalam karyanya *Why is there no non-western international relations theory? Ten years on* (Buzan, 2017, Hal. 341-370).

Lebih lanjut, karya teoritis paling baru dan yang paling unik adalah karya dengan pembahasan lebih jauh tentang pelbagai perspektif reflektifis/alternatif di dalamnya oleh M. Kürşad Özekin and Engin Sune et al (2021) berjudul *critical approaches to international relations Philosophical foundation and current debates*. Karya ini adalah sebuah amalgam dari pendekatan perspektif alternatif dan reflektifis dari teori-teori sosial lain dan kontribusinya ke dalam studi hubungan internasional. Berbagai pendekatan yang jarang dibahas dalam studi hubungan internasional dijelaskan di sini seperti pendekatan postkolonialisme, poststrukturalisme, International political sociology, Imperialisme sebagai teori, Non-western International Theory, serta perspektif Uneven and combined development (UCD) sebagai teori sosiologi Internasional (Özekin & Sune, 2021, Hal.5). Karya ini dapat menjadi pemantik dalam diskusi-diskusi teoritis baru dan menjadi pintu gerbang yang bagi peneliti yang menggandrungi teori-teori kritis dalam hubungan Internasional yang masih terbatas jumlahnya terutama di Indonesia.

Meskipun demikian, dalam kesempatan kali ini penulis tidak akan menjelaskan semua perspektif secara rinci satu per satu, penulis akan mencoba merangkum secara ringkas berbagai perspektif-perspektif yang ada, kritik atasnya dan perkembangan teori-teori baru yang memperkaya khasanah hubungan internasional yang sudah ada.

3.4 Perspektif Utama Hubungan Internasional

Perspektif Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme telah mashur dianggap sebagai perspektif utama hubungan internasional. Setiap darinya menawarkan lensa yang berbeda dalam melihat perilaku negara dalam lanskap hubungan internasional. Realisme, yang sering disebut sebagai pendekatan tradisional atau klasik, menekankan pentingnya kekuasaan, kepentingan negara, dan mengejar keamanan

nasional dalam membentuk hubungan internasional dengan negara sebagai aktor yang dominan (Carr, 1939, hal. 1-5). Liberalisme, di sisi lain, menekankan peran lembaga-lembaga internasional, kerja sama antar negara, organisasi-organisasi Internasional dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dan demokrasi dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di antara bangsa-bangsa (Keohane, 2003, hal 39-61; Richardson, 2001, hal. 56). Konstruktivisme, sebagai perspektif yang penengah, berfokus pada peran ide, norma, dan konstruksi sosial dalam membentuk hubungan internasional yang sering kali diabaikan oleh dua perspektif di atas. Sehingga menekankan peran aktor-aktor non negara seperti Komunitas Transnasional, NGOs, Moral dan Norms Entrepreneur sebagai '*supplementary actors*' selain negara untuk menyebarkan berbagai ide-ide dan norma-norma internasional (Adler, 2013, hal. 123).

Realisme mengambil asumsi dasar bahwa fora Internasional sebagai sebuah spektrum Anarki (tidak ada otoritas di atas negara) sehingga negara di bawahnya berperilaku utamanya dikarenakan pertimbangan kepentingan nasional dan struggle of power. Hubungan internasional dipandang sebagai '*zero sum game*' di mana negara-negara lebih mementingkan keuntungan relatif daripada keuntungan absolut (seberapa besar keuntungan yang diperoleh satu negara terhadap negara lain lebih penting daripada fakta bahwa setiap orang dapat memperoleh sesuatu). Persaingan tanpa henti untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh membuat konflik tidak dapat dihindari dan kerja sama menjadi langka dan dangkal; lembaga-lembaga internasional beroperasi pada batas-batas keinginan dan kemauan kekuasaan yang besar. Tatanan internasional, yang tidak pernah permanen, dipertahankan dengan memanipulasi keseimbangan kekuasaan dengan kekuasaan yang didefinisikan terutama dalam istilah ekonomi dan militer (Acharya, 2014, hal. 61).

Versi Realisme yang lebih baru, yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz dan disebut Neo-Realisme atau Realisme Struktural, menekankan pentingnya sifat struktural dari sistem internasional dalam tatanan dunia yang anarki, terutama distribusi kekuasaan, dalam membentuk konflik dan tatanan, dengan demikian mereduksi pengaruh 'state of nature' manusia (yang ditekankan oleh kaum Realis klasik) atau politik dalam negeri dalam hubungan internasional. Lebih lanjut, terdapat perdebatan antar peneliti Realis tentang perbedaan antara "Realis ofensif" dan "Realis defensif". Realis ofensif digalangi oleh peneliti seperti Mearsheimer berpendapat bahwa negara perlu memaksimalkan kekuasaan: mengejar "semua yang bisa mereka dapatkan" dengan "hegemoni sebagai tujuan akhir mereka." Pemikir Realis Defensif, seperti Robert Jervis atau Jack Snyder, berpendapat bahwa negara-negara pada umumnya akan puas sejauh status quo keamanan mereka tidak ditantang, jadi mereka hanya mengejar kekuasaan relatif dan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (Acharya, 2014, hal. 62). Sedangkan Liberalisme Tradisional bertumpu pada tiga pilar; (1) Liberalisme Komersial, atau pandangan bahwa saling ketergantungan ekonomi, terutama perdagangan bebas, mengurangi prospek perang dengan meningkatkan biaya bagi para pihak. (2) Liberalisme Republikan, atau argumen "perdamaian demokratis", yang mengasumsikan bahwa demokrasi Liberal lebih damai daripada otokrasi, atau setidaknya jarang berperang satu sama lain. (3) Institusionalisme Liberal, yang berfokus pada kontribusi organisasi internasional dalam membina keamanan kolektif, mengelola konflik, dan mempromosikan kerja sama (Acharya, 2014,hal. 69).

Varian terbaru dari institusionalisme Liberal adalah institusionalisme neo-Liberal. Tidak seperti Liberalisme klasik, yang mengambil pandangan lunak tentang sifat manusia, institusionalisme neo-Liberal mengadopsi premis Realis dan

menganggap bahwa sistem internasional adalah spektrum anarkis dan bahwa negara adalah aktor utama, jika bukan satu-satunya, dalam hubungan internasional. Namun, ia tidak setuju dengan penolakan neo-Realis terhadap kemungkinan kerja sama dari institusi-institusi antar negara (Nye, 1988, hal. 235-251). Perspektif Neo-Liberal berpendapat bahwa institusi internasional, yang didefinisikan secara luas sebagai rezim dan organisasi internasional dapat mengatur perilaku negara dan mendorong kerja sama dengan mengurangi biaya transaksi, memfasilitasi pertukaran informasi, mencegah kecurangan, dan menyediakan jalan untuk penyelesaian konflik secara damai dengan menggunakan rezim internasional (Richardson, 2001, hal. 99). Sementara Realisme sebagai teori hubungan internasional disibukkan dengan isu-isu keamanan dan ketertiban, Liberalisme lebih memperhatikan sifat dan dinamika ekonomi politik internasional.

Sedangkan perspektif Konstruktivis berasumsi bahwa hubungan internasional dibentuk tidak hanya oleh distribusi kekuatan material seperti kekuasaan dan kesejahteraan, tetapi juga oleh faktor-faktor subjektif dan intersubjektif seperti; ide, norma, sejarah, budaya, dan identitas. Konstruktivisme mengambil pandangan sosiologis, bukan “interaksi strategis”, dalam melihat hubungan internasional. Kepentingan dan identitas negara tidak ditetapkan atau diberikan sebelumnya, tetapi muncul dan berubah melalui proses interaksi timbal balik dan sosialisasi. Kondisi seperti anarki dan politik kekuasaan bukanlah hal yang permanen atau 'organik' dalam hubungan internasional, melainkan dikonstruksi secara sosial. Kepentingan dan identitas negara merupakan bagian penting yang dibentuk oleh struktur sosial ini dan bukannya diberikan secara eksogen kepada sistem oleh sifat manusia atau politik domestik. Norma-norma, setelah terbentuk, memiliki kehidupan mereka sendiri- mereka menciptakan dan mendefinisikan kembali kepentingan dan pendekatan negara. Bagi konstruktivis, institusi internasional memiliki dampak yang

mendalam terhadap perilaku negara; mereka tidak hanya mengatur perilaku negara, tetapi juga membentuk identitas negara. Melalui interaksi dan sosialisasi, negara-negara dapat mengembangkan “identitas kolektif” yang memungkinkannya untuk mengatasi politik kekuasaan dan dilema keamanan (Acharya, 2014, hal. 73).

Perspektif Konstruktivisme berupaya untuk mendapatkan status sebagai “teori” hubungan internasional yang sebanding dengan Realisme atau Liberalisme. Beberapa kritikus memandangnya sebagai teori sosial yang tidak memiliki dasar dalam HI. Konstruktivis juga dianggap tidak memiliki teori kelas menengah dan tidak mampu melakukan penelitian empiris yang serius (meskipun kritik ini akan semakin sulit untuk dipertahankan karena semakin banyak penelitian empiris yang muncul dengan menggunakan kerangka kerja Konstruktivis); beberapa Konstruktivis sendiri mengakui bahwa, seperti halnya teori pilihan rasional, teori ini lebih merupakan sebuah metode daripada sebuah teori itu sendiri (Acharya, 2014, hal. 75).

Perbandingan 3 perspektif utama Hubungan Internasional dapat dilihat di tabel 3.1 di bawah.

Tabel 3. 1 Perbandingan 3 Perspektif Utama Hubungan Internasional

	Realisme	Liberalisme	Konstruktivisme
Aktor utama	Negara	Negara, MNC, Organisasi internasional	Negara, Komunitas Transnasional, Moral dan Norms Entrepreneur
Tujuan Utama Negara	Mengejar Kepentingan Nasional; Maksimalisasi	Kerja sama dalam menciptakan tujuan	Membangun Komunitas Internasional melalui interaksi

	Realisme	Liberalisme	Konstruktivisme
	Kekuasaan tanpa Batas (offensive Realism); Mengejar Keamanan relative dan Kemampuan Bertahan (survival) (defensive Realism)	Bersama; keamanan dunia	dan kerangka normative yang disepakati bersama
Tatanan Internasional	Sistem Kekuasaan yang seimbang (Balance of Power) yang dicirikan dengan kebergantungan pada diri sendiri dan aliansi untuk menjaga tatanan internasional	Sistem keamanan kolektif yang didukung oleh pasar bebas, demokrasi dan institusi internasional	Komunitas internasional yang dibuat karena norma dan identitas kolektif yang disepakati bersama
Model Interaksi Utama antar aktor	Interaksi aktor bersifat strategic dan reaktif dikarenakan aspek ekonomi dan militer	Interaksi aktor bersifat tawar menawar di level domestic dan internasional dikarenakan	Interaksi berupa sosialisasi menggunakan ide-ide dan institusi-institusi terkait

	Realisme	Liberalisme	Konstruktivisme
		keuntungan perdagangan dan berbagai kewajiban fungsional dari adanya rezim internasional	
Variasi perspektif dalam teori	Neo-Realisme: distribusi kekuasaan menentukan hasil dari interaksi	Institusionalisme Neoliberal: sistem internasional anarkis, tetapi institusi yang diciptakan oleh negara untuk kepentingan pribadi mereka membatasi anarkisme internasional	Konstruktivisme Kritis: menantang Konstruktivisme Wendt yang berpusat pada negara

Sumber: Acharya, A. (2014). Thinking theoretically about Asian IR. In D. Shambaugh, & M. Yahuda (Eds.), *International relations of Asia* (2nd ed., pp. 59–89). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

3.5 Perspektif Alternatif

Terdapat banyak sekali perspektif alternatif dalam studi hubungan internasional, salah satunya; marxisme, Madzhab Inggris, Madzhab Frankfurt (teori kritis), Madzhab Copenhagen (Sekuritisasi), feminisme, Postmoderenisme, Postkolonialisme, Dependency Theory, Green theory, dan sebagainya. Setiap dari

pespektif ini mencoba memberikan kontribusinya sendiri dalam studi hubungan internasional. Beberapa dari perspektif tersebut terkadang bukan berasal dari disiplin ilmu HI, seperti Marxisme dari Sosiologi, Post-Kolonial dari Sejarah, Postmoderenisme dari kajian budaya, dan feminisme dan green theory yang terinspirasi dari kritik antar kelas Marxisme dan teori kritis dari berbagai bidang multidisiplin. Namun yang pasti, semua perspektif itu memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan ilmu hubungan internasional. Baik itu dalam hal menjembatani theory yang ada, memberikan jawaban yang tidak dibahas dalam core pembahasan teori utama, dan menawarkan alternatif jawaban lain atas berbagai asumsi-asumsi dari teori utama hubungan internasional.

Terkadang ada beberapa perspektif saling beririsan. Beberapa perspektif misal, yang memiliki corak pemikiran yang sama walaupun dengan objek penelitian yang berbeda, seperti Feminisme yang fokus terhadap perjuangan gender dan perjuangan untuk terbebas dari dominasi Pria dan green theory yang fokus terhadap pentingnya alam untuk terbebas dari eksploitasi manusia, mereka sama-sama terinspirasi dari perspektif Marxisme di aspek perjuangan kelas dari dominasi Ploretariat dan sistem Kapitalis. Di sisi lain, perspektif Post-kolonial dan Post-moderenisme yang membahas fenomena dan logika berfikir yang ada di spektrum tempat dan waktu yang berbeda (misal post-kolonial membahas kondisi sosial dan keadaan masyarakat paska adanya kolonialisme, bagaimana kolonialisme mengubah corak pikir masyarakatnya dan memberikan alternatif solusi untuk kita bisa terbebas dari corak pikir tersebut, sedangkan postmoderenisme membahas kondisi sosial dan keadaan masyarakat modern paska adanya kapitalisme dan moderenitas).

Sebagai penstudi hubungan internasional, dalam upaya menganalisa fenomena menggunakan berbagai perspektif alternatif di atas, kita perlu melihat subjek dan level dari penelitian kita. Karena beberapa perspektif di atas berasal dari disiplin yang berbeda, tentu mereka memiliki unit analisa yang jauh lebih luas, karena itu kita perlu jeli dalam menggunakan perspektif tersebut. Sejauh yang saya fahami, ada beberapa kondisi yang kita perlu perhatikan ketika kita memutuskan untuk menggunakan teori-teori alternatif tersebut, di antaranya:

1. Kita perlu pastikan bahwa kita menggunakan perspektif-perspektif tersebut pada kejadian di fora internasional.
2. Ketika bisa menggunakan teori tersebut di fenomena domestik sejauh fenomena tersebut berdampak ke kebijakan luar negeri atau bisa mengubah corak perilaku negara.
3. Kita perlu bijak dan membatasi diri untuk menggunakannya di penelitian politik, karena beberapa perspektif terkadang memiliki eksplanasi dasar yang berada di bidang yang berbeda disiplin ilmu kita.

Berikut merupakan rangkuman beberapa perspektif alternatif yang berkontribusi pada khasanah hubungan Internasional yang mampu mengisi gap yang ditinggalkan oleh perspektif utama hubungan Internasional:

3.5.1 Mazhab Inggris (*English School*)

Madzhab Inggris diprakarsai oleh beberapa pemikir inggris di tahun 1970an diantaranya Hedley Bull, Martin Wight, John Vincent dan Adam Watson (Linklater & Saramago dalam Burchill et al, 2022, hal. 84). Merupakan sebuah perspektif alternatif ala inggris yang mengadopsi logika dasar dari perspektif realis dan liberalis dalam melihat fenomena internasional. Dalam pemikirannya

mereka terinspirasi dari dua perspektif utama hubungan internasional tersebut dan Mereka juga mencoba untuk melihat hal yang tidak jadi fokus pembahasan dari dua perspektif utama di atas. Madzhab Inggris menawarkan perspektif baru dengan melengkapi jawaban dari pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh dua madzhab sebelumnya seperti: Kenapa negara-negara yang seharusnya egosentrik tidak saling menyerang satu sama lain?; Apakah mungkin ada kerja sama dalam suatu kondisi anarkis?; dan bagaimana membuat komunitas internasional untuk tidak saling menyerang dalam situasi anarkis?(Hadiwinata, 2017, hal. 125). Madzhab Inggris berargumen bahwa situasi hubungan internasional tidak seanehki dan menyenamkan yang dibayangkan oleh perspektif realist namun juga tidak senaif dan senyaman yang diasumsikan perspektif liberal. Madzhab Inggris masih percaya pada anarkisme internasional dan juga percaya bahwa kerja sama mungkin dilakukan dalam hubungan internasional namun semua didorong oleh adanya rasionalitas yang dimiliki oleh aktor-aktor internasional sehingga memungkinkan munculnya order dalam masyarakat internasional yang dapat membuat aktor-aktor internasional patuh terhadapnya (Bull, 1997, hal. 9).

Terdapat 3 tradisi dalam asumsi Madzhab Inggris tradisional dalam melihat ciri masyarakat Internasional. Mengutip Martin Wight dan Charles Manning dalam Hadiwinata (2017): (1) Realisme ala Thomas Hobbes dan Nicholo Machiavelli; yang menganggap bahwa sistem internasional didominasi oleh rasionalitas negara yang didasari oleh dorongan alamiah untuk bertahan hidup dan kedamaian dapat terjadi jika ada balance of power karena negara yang saling takut untuk memulai peperangan

karena kekuatan yang relative seimbang. (2) Rasionalisme ala Hugo Grotius; yang menganggap bahwa masyarakat internasional meyakini bahwa setiap negara dituntun oleh rasionalitas untuk melembagakan kepentingan negara dan menciptakan stabilitas di kancah internasional. dan (3) Revolusionisme ala Immanuel Kant; yang menganggap bahwa masyarakat dunia didorong oleh budaya yang sama dan kosmopolitanisme internasional yang mempersatukan mereka untuk mencapai perdamaian abadi (Hadiwinata, 2017, hal. 123). Meskipun demikian, asumsi utama ini berevolusi dan berkembang seiring perubahan aktor yang mendominasi hubungan Internasional.

Revolusionisme tradisi ini diprakarsai oleh Hedley Bull yang mencanangkan pentingnya moralitas, nilai-nilai dan norma internasional dan peran masyarakat internasional dalam dinamika internasional dan bukan dari hubungan antar negara saja. Ia juga merevisi pilar tradisional madzhab inggris menurutnya: (1) Sistem internasional yang terbentuk atas dasar perimbangan kekuasaan (balance of Power); (2) masyarakat internasional yang didasarkan pada kepatuhan pada norma dan aturan yang disepakati; dan (3) masyarakat dunia merupakan representasi dari aktor-aktor sub negara, non negara dan Individu yang disebut TNAS (trans-national Actors) (Hadiwinata, 2017, hal. 132-134)

Singkatnya Madzhab Inggris mencoba untuk menjadi jembatan antara perspektif Realisme dan Idealisme dan berkontribusi pada berbagai hal yang tidak dilihat dari keduanya. Ia mencoba mendamaikan dua perspektif tersebut dan melihat hubungan internasional dengan perspektif yang lebih holistic dengan menambahkan berbagai penjelasan-penjelasan baru soal aktor-aktor baru

yang melambangkan progresifitas dalam hubungan internasional.

3.5.2 Marxisme dan Strukturalisme

Marxisme merupakan perspektif alternatif yang berasal dari pemikiran sosiologi. Diprakarsai oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang menyoroti tentang kondisi buruh proletar yang dieksploitasi berlebihan oleh kaum borjuis karena system kapitalisme yang menyengsarakan di pertengahan tahun 1840an. Asumsi dasarnya adalah apa yang menciptakan sejarah manusia selalu ada hubungannya dengan mode produksi dan pertentangan kelas (*materialism historis*) dan berprogres membentuk sebuah tatanan masyarakat kapitalisme yang lebih kompleks dan beragam (*materialism dialektis*). Kapitalisme mengambil nilai tambah komoditas dari apa yang gratis di lingkungan dan tenaga buruh (*labour theory of value*). Kapitalisme ada di dunia yang tidak setara (*uneven*), dan membuat ketidaksetaraan dunia menjadi lebih buruk di kemudian hari (*combined development*). Kapitalisme memiliki kecenderungan untuk mengakumulasi kapital di satu tempat dengan mengambil nilai kapital dari tempat lain (*Capital Accumulation*).

Kapitalisme mengakumulasi kapital sering kali dengan perampasan (*accumulation by dispossession*). Kapitalisme buruk bagi dunia bukan karena sifat antagonisme antar kelas, melainkan karena 'nature' dari kapitalisme itu sendiri, kompetisi tak terelakkan (*the cohersive law of competition*) dan 17 kontradiksi internalnya. Kapitalisme akan menghancurkan dirinya sendiri dan dunia akan digantikan dengan masyarakat tanpa kelas (*determinisme Marx*). Kerena analisis berbasis kelasnya Marxisme

dianggap merupakan perspektif awal tentang analisis sosial berbasis kelas yang menginspirasi banyak sekali pemikiran kritis lanjutan seperti madzhab frankfrut, feminisme, green theory, dan lain sebagainya.

Pemikiran Marxis dalam kontribusinya di hubungan internasional sering kali disebut strukturalisme yang merupakan interpretasi baru dalam melihat fenomena internasional dari bawah (*bottom Up*) dan mengkritik Neo-realisme dan Neo-liberalisme yang melihat dunia dari atas (*top-down*) (Linklater & Saramago dalam, Burchill et al, 2022, hal. 111). Ia mengkritik dan mereinterpretasikan beberapa asumsi-asumsi dasar yang berbeda dengan apa yang dipercayai oleh neo-realisme dan neoliberalisme, diantaranya; (1) Karakteristik Hubungan interansional dibentuk oleh struktur perekonomian dunia yang kapitalis, (2) politik Internasional dibentuk oleh faktor-faktor produksi, (3) Aktor utama dari HI adalah negara, perusahaan internasional (MNCs), Bank Dunia, dan kelas-kelas sosial transnasional (4) Negara lebih mencerminkan kepentingan kelas dominan daripada kepentingan nasional murni (5) Kapitalisme merupakan tatanan sosial yang tidak cocok di masyarakat dan menyebabkan konflik (6) kapitalisme memiliki kontradiksi internal yang problematik (7) Motif ekonomi kapitalistik kelompok elit menjadi dasar perilaku negara yang rekadang menimbulkan konflik (Steans et al., 2013, hal. 199).

Variasi perspektif marx strukturalis dalam hubungan internasional adalah teori Imperialisme dari Lenin. Ia menganggap bahwa Imperialisme disebabkan oleh kapitalisme yang meluas melebihi batas negara dan menyebar mengeksploitasi tanah jajahan agar dapat dieksploitasi lingkungan dan buruhnya. Karena analisis

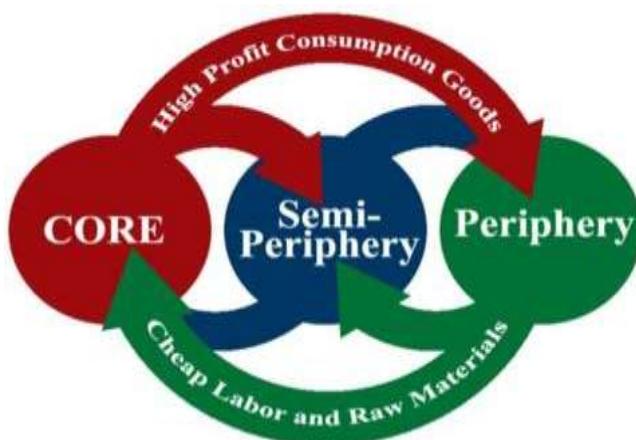
Marx tentang kapitalisme terbatas di dalam spektrum negara, Lenin melakukan modifikasi dari pemikiran Marx dan memaksa negara untuk mengambil alih beberapa proses transisi masyarakat menuju masyarakat tanpa kelas.

Variasi lainnya sering dikenal dengan madzhab *dependencia* oleh para pemikirnya seperti Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, Henrique Cardoso dan Enzo Felatto yang melihat keadaan pertumbuhan di negara-negara Amerika Latin pasca terbebas kolonialisme dan imperialisme terlihat mengalami pertumbuhan ekonomi secara progresif namun masih sangat bergantung pada negara maju. Asumsinya bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat hubungan eksploitatif dari hasil penjualan barang mentah ke negara maju dan akumulasi kapital terbesar tetap terjadi di negara-negara ini maju. Usaha ini dilakukan dengan beraliansi dengan elit-elit yang ada di negara kurang maju sehingga membuat negara tersebut tetap bergantung pada negara maju dan mengalami kemajuan semu (Steans et al., 2013, hal. 165-169).

Variasi lainnya datang dari Emmanuel Wallerstein dengan *World system theory*-nya. Ia menganggap kapitalisme sudah menguasai dunia dan akibatnya dunia terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona core (negara maju), zona semi periferi (negara *Developmentalis*) dan zona periferi (negara berkembang dan negara terbelakang). Interaksi antar zona ini dihubungkan dengan hubungan yang sifatnya eksploitatif. Negara maju mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari negara-negara periferi dengan bekerjasama oleh pemerintah di negara periferi dan menjual barang jadi yang dihasilkan dari

eksploitasi tersebut ke negara periferi. Sehingga akumulasi terbesar tetap berada di negara core dan menghasilkan ketimpangan yang signifikan dalam kekayaan dan kekuasaan. Sedangkan negara semi-periferi berada di antaranya untuk melanggengkan hubungan yang eksploitatif ini. Hubungan eksploitatif tersebut dapat dilihat di gambar 3.1 di bawah ini

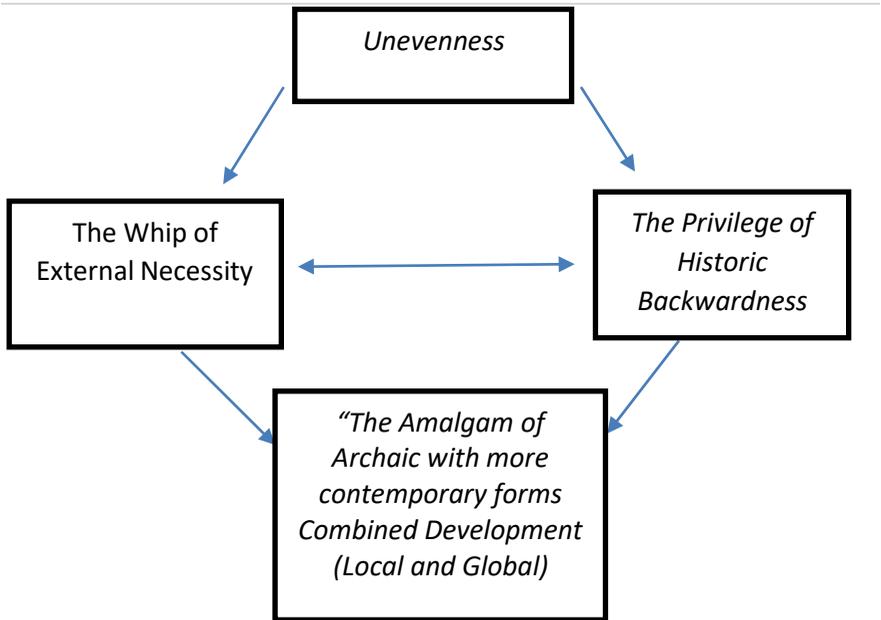
Gambar 3. 1 World System Theory dari Emmanuel Wallerstein



Satu lagi variasi dari pemikiran marxis bagi hubungan internasional yang disebut sebagai teori Uneven and Combined Development (UCD). Diprakarsai oleh Trotsky dan dikembangkan oleh Rosenberg dan Callinicos. Teori ini berpendapat bahwasanya Sejarah dunia selalu dicirikan dengan ketidaksetaraan pembangunan dan karena system kapitalisme hadir, ia memperburuk ketidaksetaraan tersebut karena kemampuannya untuk mengakumulasi kapital. Ini juga menjadi awal mula ada negara yang dengan mudah menjadi negara maju dan ada negara berkembang

dan negara yang terbelakang. Teori ini juga menyoroti hubungan negara berkembang dan negara maju dan menghadirkan sebuah hibriditas yang benar-benar baru dari hubungan antara kedua negara tersebut.

Premisnya negara yang terbelakang merasa perlu untuk berkembang karena mereka 'tercambuk' dan terinspirasi oleh negara maju (The whip of external necessities) namun mereka memiliki pra-kondisi keterbelakangan domestik yang tidak dimiliki oleh negara maju yang malah membuat mereka mengalami pertumbuhan yang cepat (The privilege of historic backwardness) ini menyebabkan adanya lonjakan ekonomi yang pesat (The Economic Leap) di negara tersebut (Avienas et al, 2016; Antunes, 2021; Rosenberg et al, 2022). Namun, pertumbuhan yang tidak normal ini menyebabkan perubahan di system domestic di negara tersebut yang menyebabkan ketidakseimbangan perkembangan antara teknologi yang diadopsi dari negara maju dan bagaimana mereka sehari-hari berkembang. Fenomena ini menghasilkan campuran mode produksi kuno dengan teknologi yang lebih modern yang disebut (amalgam of archaic with more contemporary forms) (Das, 2022). Fenomena ini sering menimbulkan masalah di masyarakat berkembang yang tidak dapat mengejar ketinggalan dengan teknologi yang diadopsi sehingga menimbulkan permasalahan yang unik yang berbeda di setiap negaranya. Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat di gambar di bawah:



Gambar 3. 2. Postulat teori Uneven and Combined Development

Teori ini sangat berguna terutama Ketika membahas soal progresifitas negara dalam hubungan internasional. Negara terbelakang mampu mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara maju yang sudah lebih dahulu memiliki tingkat pembangunan yang lebih *advance*. Seperti contohnya kebangkitan ekonomi China. Agar tidak tertinggal dari barat, China di awal abad 20 merasa perlu juga mengimplementasikan kapitalisme yang sesuai dengan kebutuhan domestiknya alih-alih tetap bertahan dengan ekonomi komunisme dengan mengadopsi teknologi dari barat (the whip of external necessities). Mereka memiliki populasi yang jauh lebih besar dari barat dengan standar hidup, upah dan kesadaran hak buruh yang jauh lebih rendah dari barat (*The privilege of Historic*

Backwardness) yang memungkinkan mereka untuk bisa menghasilkan komoditas yang jauh lebih murah dari apa yang dihasilkan barat. Komoditas ini tersebar dan mereka mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak karena efisiensi anggarannya. Inilah yang menyebabkan lonjakan ekonomi yang terjadi di China (*Economic Leap*). Meskipun demikian pengadopsian teknologi dari barat di masyarakat China membuat berbagai keunikan-keunikan system produksi yang terjadi di China (*The Amalgam of Archaic with more contemporary form*) seperti produksi komoditas yang sebagian besar terjadi di home industry di China, penggunaan marketplace yang masif untuk menjual komoditasnya, tidak adanya Hak kekayaan Intelektual di China yang menyebabkan banyaknya barang tiruan dari produk brand ternama dijual dan dilegalkan dan lain sebagainya.

Kesimpulannya, Perspektif Marxis dan Strukturalis memberikan alternatif jawaban lain dari apa yang ditawarkan perspektif utama di aspek bahwasanya kapitalisme menjadi faktor utama dari perilaku antar negara di internasional dan berbagai konflik yang mungkin terjadi dikarenakannya.

3.5.3 Madzhab Frankfurt dan Teori Kritis

Teori Kritis merupakan buah pemikiran dari sekelompok ilmuan yang disebut Mazhab Frankfrut (*frankfrut school*) seperti Jurgen Habermas, Theodor Adorno dan Max Horkheimer dari bidang-bidang sosiologi yang mengkritik dominasi pemikiran-pemikiran positivisme dalam ilmu sosial (Hadiwinata, 2017, hal. 155). Madzhab ini terinspirasi dari pemikiran Marxis yang menganggap sepanjang sejarah peradaban terdapat ide-ide,

pengetahuan-pengetahuan dan ideologi-ideologi yang dominan dan berkuasa yang menentukan bagaimana manusia hidup dan manusia tidak mampu menentukan pilihannya sendiri karena berbagai dominasi tersebut. Ide-ide tersebut perlu dieliminasi karena membelenggu kebebasan manusia. Di aspek ini kita dapat melihat bahwa ada hubungan antara pengetahuan yang ada dan kekuasaan dalam realitas sosial yang terkadang menyengsarakan kelompok masyarakat tertentu demi kepentingan kelompok masyarakat yang berkuasa (Steans et al., 2013, hal. 210).

Para pemikir teori kritis beranggapan bahwa semua pengetahuan sifatnya ideologis yang erat akan pengejaran kepentingan politik sehingga tidak ada hubungannya dengan kebenaran (*Distorted Thoughts*) (Hadiwinata, 2017, hal.162). Sehingga ide-ide pengetahuan tentang apapun bisa jadi tidak bebas nilai dan merupakan representasi dari pihak yang berkuasa. Meskipun awalnya teori kritis dari madzhab frankfurt tidak berasal dari disiplin Hubungan Internasional, namun mulai berpengaruh dalam studi ini semenjak Andrew Linklater menerbitkan bukunya yang berjudul *Beyond Realism and Marxism* (1990) dan *Critical Theory and World Politics; Citizenship, Sovereignty and Humanity* (2007) menurutnya Hubungan Internasional. Ia menganggap bahwa Perspektif utama hubungan internasional telah terkontaminasi oleh pemikiran positivisme yang menghasilkan produk penelitian yang bias, reduksionis dan mendistorsi kebenaran (Steans et al., 2013, hal 251).

Selain membuka jalan kita untuk memahami hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, kontribusi besar teori kritis Linklater juga memberikan kita kesempatan untuk

meredefinisi pengetahuan versi diri kita sendiri. Teori kritis membuka lebar pengembangan teori hubungan internasional untuk membahas tema-tema di luar arus utama dan mampu membahas tema-tema yang menyangkut isu-isu emansipasi, isu kemanan non tradisional dan hak asasi manusia. Tujuan dari teori kritis bersifat emansipatoris di mana perlu adanya sebuah upaya Bersama untuk membebaskan masyarakat dan memberikan mereka pisau analisis dalam membelah berbagai pengetahuan-pengetahuan yang sarat akan kepentingan penguasa.

3.5.4 Kritis Madzhab Copenhagen dan Teori Sekuritisasi

Telah disinggung di sub bab awal bab ini bahwasanya hubungan internasional berkembang seiring dengan berbagai kejadian-kejadian internasional yang melatarbelakanginya. Paska perang dunia kedua, terdapat fenomena di mana perang antar negara tidak lagi sering terjadi dan perang intra-negara menjadi lebih sering terjadi. Lebih dari itu di masa-masa ini peningkatan konsern dunia terhadap penegakan Hak Asasi Manusia paska disahkannya International Bill of rights, ICESCR, ICCPR oleh PBB (OHCHR, 2022) menyebabkan perubahan paradigma keamanan tradisional yang sebelumnya *state-centric* (keamanan yang fokus utamanya adalah untuk menghalau ancaman militer ke kedaulatan negara) ke *Human-centric* (keamanan yang fokus utamanya adalah keamanan manusia) karena banyak sekali berbagai hal baru yang mengancam kehidupan manusia bahkan di negara yang berdaulat sekalipun.

Upaya untuk meredefinisi kemanan mashur dipelopori oleh proyek penelitian di Copenhagen peace research

institute dengan pakar keamanan seperti Barry Buzan, Ole Weaver dan Jaap de Wilde yang berusaha menyelesaikan perdebatan awal tentang apakah keamanan sifatnya objektif (tetap, pasti dan dapat diprediksi) atau subjektif (tidak pasti, berubah dan tidak bisa diprediksi) (Hadiwinata, 2017, hal. 180). Argumen utamanya bahwasanya keamanan adalah sebuah konstruksi sosial. Keamanan adalah sebuah isu yang dinyatakan (speech act) oleh seseorang yang memiliki pengaruh (securitizing actor) terhadap audiens (referent objects) baik public, masyarakat media untuk membuat isu tersebut mengancam (existential threats) bagi manusia dan negara dengan tujuan untuk menciptakan sebuah urgensi bagi kebijakan responsive baru (extraordinary measures) yang akhirnya bisa menanggulangi ancaman tersebut. Proses di atas seringkali disebut sebagai teori proses sekuritisasi (Buzan, Weaver, Wilde (1998).

Proses redefinisi atas konsep keamanan di atas berimplikasi pada berubahnya paradigma masyarakat internasional dan negara dalam melihat keamanan dan berkembangnya studi tentang keamanan. Konsep keamanan tidak lagi terbatas di keamanan teritorial dan kedaulatan negara (keamanan Tradisional) dan meluas ke apa yang disebut sebagai keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional merupakan konsep keamanan yang berfokus kepada keamanan manusia, jadi asumsi utamanya, keterjaminan kemananan manusia tidak hanya cukup dengan manusia merdeka karena negaranya tidak diserang oleh negara lain. Namun, negara harus memastikan manusia di negaranya memiliki keamanan relatif di mana manusia dapat hidup dengan layak dan terbebas dari berbagai ancaman-ancaman yang datang dari

ancaman-ancaman yang non-militeristik. Dapat disimpulkan, bahwasanya kewajiban sebuah negara bertambah seiring dengan berkembangnya definisi keamanan tersebut. Selain negara perlu menjaga keamanan teritorinya, negara juga perlu menjaga masyarakat dari berbagai ancaman-ancaman non-tradisional lainnya.

Secara umum tabel 3.2 di bawah adalah simpulan dari berbagai perspektif alternatif yang telah dibahas.

Tabel 3. 2 Perbandingan 4 Perspektif Alternatif Hubungan Internasional

	English School	Strukturalisme	Teori Kritis	Copenhagen School dan Teori Sekuritisasi
Aktor utama	Negara (Tradisional), Aktor Transnational (TANs)	negara	Aktor Internasional yang berinteraksi tanpa dibatasi hirarki	Negara, securitizing actor, masyarakat
Tujuan Utama Aktor	Menghindari Perang dan mempromosikan Kerja sama dengan mencoba patuh kepada tatanan Internasional dan (International order)	Akumulasi Kapital	Dalam pengetahuan dunia yang terdistorsi, Aktor harus berperilaku emansipatoris	Melindungi tidak hanya teritori namun juga masyarakat
Tatanan Internasional	International Order yang didorong dengan logika yang rasional oleh negara untuk mempromosikan Kerjasama dan menghindari perang	World System Theory.	Tatanan dunia yang emansipatoris didominasi oleh kekuatan-kekuatan non negara	-
Model Interaksi	Interaksi aktor beragam	Interaksi sifatnya	Interaksi emansipatoris	Interaksi antar aktor sifatnya dialektis

Pengantar Hubungan Internasional

	English School	Strukturalisme	Teori Kritis	Copenhagen School dan Teori Sekuritisasi
Utama antar aktor	bergantung 3 tradisi utama, Hobbesian, Grotian dan Kantian (Tradisional). Interaksi aktor meluas melebihi peran utama negara, dan merupakan representasi dari 3 relasi utama antara sistem internasional, masyarakat internasional dan masyarakat dunia (kontemporer)	eksploitatif	yang membebaskan manusia dari belenggu dominasi dan represi	
Variasi perspektif dalam teori	Kosmopolitanisme (Buzan) Merevisi 3 pilar masyarakat internasional tradisional dari Madzhab Inggris guna menyesuaikan relevansi dengan peran aktor lain selain negara	Teori Imperialisme (Lenin) Dependencia School World System Theory (Wallerstein) Uneven and Combined Development (Trotsky, Rosenberg, Callinicos)	Teori Hegemoni (Gramsci) tentang hegemoni budaya Teori Kritis (Linklater) yang menempatkan teori Kritis dalam kontekstualisasi hubungan internasional	Variasi terbaru dari teori-teori sekuritisasi dan proses sekuritisasi

Sumber: Rangkuman dari Penulis

Demikian beberapa asumsi dasar dari berbagai perspektif alternatif yang mampu memberikan jawaban alternatif dari apa yang ditawarkan oleh perspektif utama hubungan internasional. Perspektif ini melihat dunia dengan cara berbeda dan menjadikan hubungan internasional jauh lebih kaya dan lebih beragam dari sebelumnya.

Tentunya masih ada beberapa perspektif lain yang tidak dibahas di sini seperti perspektif feminis, green theory, post-moderenisme dan postkolonialisme dan lain sebagainya. Namun beberapa perspektif di atas secara umum telah memberikan pola berfikir dan asumsi dasar yang sama dengan perspektif yang tidak ditulis namun mungkin dengan penerapan kontekstual yang berbeda.

3.6 Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kebangkitan Cina sebagai negara adidaya ekonomi baru dunia, penurunan ekonomi secara bertahap yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa, munculnya kekuatan baru India di Asia Timur, dan penurunan unipolarisme global, Perang Rusia-Ukraina, meningkatnya tensi Iran-Israel yang merupakan negara pemilik senjata nuklir, Pembantaian dilakukan Israel terhadap rakyat palestina dan backing dari UN dan Amerika Serikat merupakan fenomena-fenomena terkini yang sangat mungkin merubah paradigma internasional kedepannya. Beberapa dari fenomena-fenomena tersebut bahkan belum pernah terjadi sebelumnya.

Seperti yang dijelaskan di awal, perspektif hubungan internasional berkembang seiring dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia. Bukan tidak mungkin satu dari fenomena-fenomena tersebut dapat menjadi pemantik atas munculnya perspektif baru dalam hubungan internasional. Perspektif hadir guna menjelaskan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi, ibarat kaca mata yang membantu kita

melihat lebih jelas. Namun perspektif teoritis dalam bidang sosial berbeda dengan teori eksak, perspektif teoritis kehilangan potensi maksimalnya Ketika ia digeneralisasi terlalu berlebihan dan terbatas di kemampuan prediksinya. Kita perlu menyadari hal tersebut dan tidak abai dalam menggunakan perspektif yang kita yakini mampu menjelaskan fenomena.

Hubungan Internasional menjadi bidang yang jauh lebih menarik dikaji karena banyaknya perspektif di dalamnya. Berbagai perdebatan besar yang pernah terjadi sebelumnya memberikan kita khasanah teoritis yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh bidang-bidang ilmu lainnya. Berbagai perspektif-perspektif yang ada perlu difahami dan dirangkul sehingga kita bisa menambal berbagai lubang yang ditinggalkan di setiap perspektif. Selain itu kita juga perlu mengikuti berbagai fenomena-fenomena terkini dan mengaplikasikan perspektif kita guna menjelaskan fenomena tersebut. Karena terkadang, kita abai dengan fenomena-fenomena kecil yang dapat menyebabkan peristiwa besar di masa depan. Seperti yang terjadi di eropa pada awal perang dunia pertama, tidak ada seorangpun yang berfikir bahwa perang akan sebrutal dan menelan korban sebanyak itu. Apakah kita juga akan melakukan kesalahan yang sama? Apakah kita yakin bahwa penyerangan Israel ke Palestina dan arogansi negara itu terhadap UN dan dunia tidak akan menyebabkan konflik yang lebih besar kedepannya? Meskipun sangat mungkin, namun saya harap jawabannya tidak. Bab ini mungkin bisa disimpulkan dengan mengutip apa dikatakan Holsti (1985) bahwa “hubungan internasional adalah disiplin tentang ketidaksepakatan teoritis, Hubungan internasional sebuah disiplin yang terbagi.”

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. 2014. Thinking theoretically about Asian IR. In D. Shambaugh, & M. Yahuda (Eds.), *International relations of Asia* (2nd ed., pp. 59–89). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Acharya, A., & Buzan, B. 2017. 'Why is there no non-western international relations theory?' Ten years on. *International Relations of the Asia-Pacific*, 17(3), hal. 341-370.
- Adler, E. 2013. 'Constructivism in international relations: Sources, contributions, and debates'. dalam: *Handbook of international relations* 2nd ed, hal. 112-144.
- Anievas A, Matin K. 2016. 'Historical Sociology and World History' [Internet]. 1st ed. Vol. 1. London: Rowman & Littlefield; [cited 2023 Mar 17]. 1–259 p. dapat diakses dalam:
[http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/68106/1/Anievas%20&%20Matin_9781783486816%20\(corrected\).pdf](http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/68106/1/Anievas%20&%20Matin_9781783486816%20(corrected).pdf)
- Antunes de Oliveira F. 2021. 'Of economic whips and political necessities: a contribution to the international political economy of uneven and combined development'. dalam: Rosenberg J, Brake J, Pignon T, Paes L de O, editors. *New Directions in Uneven and Combined Development*. 1st ed. London: Routledge, hal .1–310.
- Burchill, S., Linklater, A., Donnelly, J., Nardin, T., Paterson, M., Reus-Smit, C., ... & Sajed, A. 2022. 'Theories of international relations'. London: Bloomsbury Publishing.
- Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. 1998. 'Security: A new framework for analysis'. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Dunne, T., Hansen, L., & Wight, C. 2013. 'The end of International Relations theory?'. *European Journal of International Relations*, 19(3), 405-425.

- E. H. Carr, 1939. *The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations* (New York: Harper Torchbooks. 1964), hal. 1-5. Originally published in 1939 by Macmillan, London, and St. Martin's Press, New York.
- Hadiwinata, B. S. 2017. 'Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis'. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Heldey Bull., 1977. 'The Anarchical Society: a Study of World Order'. *World Politics*. London: MacMillan Hal 8-10.
- Holsti KJ., 1967. 'International Politics: A Framework Analysis. USA: Englewood Cliffs. N.J Prentice Hall Inc.
- Holsti, K., (1985) 'The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity' in *International Theory* (Boston).
- Jared Diamond., 1987, 'Soft Science are often harder than hard sciences.' *Discover*. 8(8).34-39
- Keohane, R. O. 2003. *International liberalism reconsidered 1. In Power and Governance in a Partially Globalized World* London:Routledge. hal. 39-62.
- Kuhn, T.S., 1997. *The structure of scientific revolutions* (Vol. 962). Chicago: University of Chicago press.
- McGlinchey S and Gold D, 2017. 'International Relations Theory' [Internet]. tersedia dalam : <https://www.e-ir.info/2017/01/09/international-relations-theory/> (diakses : 15 Mei 2024)
- Nye, J. S. 1988. 'Neorealism and neoliberalism'. *World politics*, 40(2), hal. 235-251.
- OHCHR. 2022. *International Bill of Human Rights a brief history, and the two international covenants* [Internet]. tersedia dalam: <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights> (diakses : 15 Mei 2024)
- Özekin, M. K., & Sune, E. 2021. 'Critical Approaches to International Relations: Philosophical Foundations and Current Debates' (Vol. 205). Leiden: Brill.

- Richardson, J. L. 2001. 'Contending liberalisms in world politics: Ideology and power'. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Rosenberg J, Zarakol A, Blagden D, Rutazibwa O, Gray K, Corry O, et al. 2022. 'Debating Uneven and Combined Development/Debating International Relations: A Forum. Millennium:'. *Journal of International Studies*. 50(2). hal. 291–327.
- Rosenberg J. 2010. 'Basic problems in the theory of uneven and combined development. part ii: Unevenness and political multiplicity'. *Cambridge Review of International Affairs*. 23(1). hal. 65–89.
- Stears, J., Pettiford, L., Diez, T., & El-Anis, I. 2013. 'An introduction to international relations theory: Perspectives and themes'. London: Routledge.
- Sullivan, M., Donnelly, J., & True, J. 2001. Theories of international relations: Transition vs persistence. New York: Springer.
- Thompson, K. W. and Meyers, R. J. (eds) 1977 'Truth and Tragedy: A Tribute to Hans Morgenthau (Washington)'.

BAB 4

NEGARA SEBAGAI AKTOR DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Alfredha Shinta Putri

4.1 Pengertian dan Ciri-ciri Negara

Aktor, kepentingan, dan power adalah tiga pilar dalam hubungan internasional yang membentuk interaksi dan sistem. Ketiga aspek ini sangat penting dalam mempelajari hubungan internasional karena saling terhubung satu sama lain. Proses interaksi yang dimaksud dalam hubungan internasional adalah bagaimana dapat berjalannya sistem hubungan internasional dengan wujud menjalin kerja sama antara pihak-pihak terkait untuk mencapai suatu keputusan (Humas, 2018). Hubungan internasional akan terwujud dan terjalin jika terjadi interaksi lintas batas negara. *Actors* merupakan pelaku-pelaku dalam hubungan internasional, yang terbagi menjadi dua macam: negara (*state*) dan non-negara (*non-state*). Contoh aktor non-negara dalam hubungan internasional adalah seperti organisasi internasional, multinational corporations (MNC), non-governmental organization (NGO), masyarakat, individu, dll. Negara bisa dikatakan sebagai *actor* utama dalam interaksi hubungan internasional, karena memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya (Humas, 2018). Sejak abad 19, aktor negara ini sering disebut dengan national state (Langhorne, 2006). Negara adalah aktor yang paling efektif di mana masyarakat dapat memberikan ide atau gagasan kepada pemerintah, yang dimana ide atau gagasan tersebut diperlukan dan dapat diterima oleh penduduk (Langhorne, 2006). Selain

itu, negara merupakan entitas yang diakui keberadaannya sebagai negara yang berdaulat.

Negara yang telah berkembang secara penuh diharapkan: negara tersebut akan menjalankan kekuasaan administratif di dalam dan melakukan hubungan eksternal di luar wilayah teritorial yang ditentukan. Negara tersebut tentu akan memiliki lembaga-lembaga yang maju di dalam hal administrasi pusat dan daerah. Sehingga dalam hal ini muncul sebuah pertanyaan, apa itu negara? Menurut Kamus Hubungan Internasional yang ditulis oleh Khasan Ashari negara adalah:

“Entitas politik yang memenuhi empat kriteria yaitu (a) memiliki wilayah teritorial dengan batas-batas yang jelas; (b) terdapat populasi yang menetap di wilayah tersebut; (c) terdapat pemerintahan berdaulat yang memegang kendali atas wilayah dan penduduknya; dan (d) diakui oleh negara-negara lain. Dalam hubungan internasional, pengakuan negara-negara lain merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dan pengakuan tersebut dapat diberikan secara de facto atau de jure. Sebagian besar teori hubungan internasional menyebut negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang intensitas peran tersebut. Teori realisme memandang negara sebagai aktor yang otonom, hanya dibatasi oleh karakter anarki dari sistem internasional, dan bertindak berdasarkan kepentingan nasional yang diimplementasikan melalui power atau kekuasaan. Sebaliknya teori liberalisme memandang negara sebagai sebuah kesatuan yang mencakup berbagai kepentingan di dalamnya, bertindak mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat, dan memiliki kepentingan nasional yang dinamis serta dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dewasa ini negara menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensi dan

kewenangannya sebagai aktor hubungan internasional. Tantangan tersebut mencakup (a) globalisasi (globalization) yang ditandai dengan meningkatnya peran aktor non-negara; (b) pergerakan transnasional (transnational government) yang dalam beberapa aspek tidak memerlukan inisiatif dan persetujuan pemerintah sebagai representasi negara; dan (c) gerakan nasionalisme berdasarkan etnis (ethnonational movement) yang melahirkan gerakan pemisahan diri dari negara. Terlepas dari tantangan tersebut, negara tetap dianggap sebagai aktor terpenting dalam hubungan internasional karena (a) hanya negara yang memiliki kewenangan memerintah penduduk yang mendiami wilayahnya; (b) hanya negara yang memiliki kemampuan untuk menggunakan perang untuk mencapai tujuan; (c) berbeda dengan organisasi internasional, kewenangan negara mencakup seluruh aspek keamanan dan kesejahteraan; dan (d) hanya negara yang memiliki kedaulatan (Ashari, 2015)."

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri utama negara modern adalah bahwa negara mempunyai wilayah yang jelas, sebuah pemerintahan yang diberi otoritas kedaulatan serta pelaksanaan kekuasaan terhadap rakyat, dan pengakuan (Steans and Pettifors, 2009). Pengakuan berarti bahwa negara lain mengakui klaim negara terhadap wilayah tertentu dan haknya untuk menjalankan kedaulatan atas rakyatnya. Meskipun ada banyak bentuk pengakuan, pengakuan biasanya mencakup menjalin hubungan diplomatik atau berpartisipasi dalam berbagai perjanjian dengan negara lain.

Ciri lain mengenai negara adalah adanya kedaulatan. Ada dua macam kedaulatan negara yaitu yang pertama adalah kedaulatan internal dan yang kedua adalah kedaulatan

eksternal (Steans and Pettifors, 2009). Kedaulatan internal adalah penyelenggaraan otoritas di dalam sebuah wilayah tertentu dan terhadap orang-orang tertentu (Steans and Pettifors, 2009). Sedangkan kedaulatan eksternal adalah pengakuan dari negara-negara lain sebagai pihak yang sah yang berhak bertindak bebas di dalam urusan-urusan internasional, misalnya untuk membuat aliansi, menyatakan perang, dsb (Steans and Pettifors, 2009). Akan tetapi dalam hal ini, terkadang terdapat ketidaksepakatan mengenai karakteristik dari sebuah negara. Contohnya adalah di masa lampau misalnya negara-negara Barat dan Amerika Serikat tidak ingin berhubungan dengan pemerintah komunis China, namun mereka mengakui pemerintahan Taiwan sebagai perwakilan yang sah dari rakyat China.

4.2 Sejarah Mengenai Sistem Negara

Sistem negara adalah sebuah institusi historis (Jackson and Sorensen, 2013). Sistem negara tidak ditentukan oleh alam maupun takdir dari Tuhan. Akan tetapi, sistem negara dibentuk oleh masyarakat yang dimana itu adalah bentuk dari organisasi sosial. Dahulu sebelum adanya sebuah negara, masyarakat tidak tinggal dan hidup di sebuah negara yang berdaulat. Hal ini dikarenakan bahwa konsep *nation-state* lahir setelah adanya Perjanjian Westphalia. Adanya konsep *nation-state* lahir karena berkembangnya isu dalam hubungan internasional yang dimana hubungan antarbangsa semakin dibutuhkan. Tidak terdapat negara-negara berdaulat yang dapat dikenal secara jelas sebelum abad ke-16, ketika mereka pertama kali dilembagakan di Eropa Barat (Jackson and Sorensen, 2013). Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem negara dan modernitas berhubungan sangat erat.

Sistem negara adalah hubungan antara pengelompokan manusia yang terorganisir secara politik yang menguasai wilayah tertentu, tidak berada di bawah satu kekuatan atau kekuasaan yang lebih tinggi, dan memperoleh serta menjalankan tindakan yang tidak saling terkait/ mandiri (Jackson and Sorensen, 2013). Jika dilihat sejarah dari sistem negara dalam hubungan internasional, dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1. Sistem Negara Pertama: Negara Kota dan Kekaisaran

Negara Kota dan Kekaisaran	
Abad 500 SM - 100 SM	Sistem negara kota Yunani
Abad 200 SM - 500 M	Kekaisaran Roma
Tahun 306 - 1453	Kristen Ortodoks: Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel
Tahun 500 - 1500	Negara-negara Katolik: Paus di Roma
Tahun 1299 - 1923	Kekaisaran Ottoman (Turki), Istanbul Konstantinopel
Sejarah kekaisaran lainnya	Persia, India (Mogul), China

Sumber: (Jackson and Sorensen, 2013)

Dilihat dari tabel di atas, sistem negara kota Yunani adalah sistem negara pertama kali di dalam hubungan internasional. Sistem negara kota Yunani kuno terjadi pada abad 500 SM - 100 SM, yang kemudian dikenal sebagai "Hellas". Saat itu Yunani Kuno tidak bersistem sebagai *nation-state*, tetapi bersistem negara-kota (*polis*). Adapun *polis* di Yunani saat itu adalah Athena, Sparta, Corinth, Thebe, dan Argos. Negara-kota yang paling besar dan terkenal adalah Athena, Sparta, dan Corinth. Untuk pertama kalinya, negara-kota tersebut membentuk sistem negara dalam sejarah Barat (Jackson and

Sorensen, 2013). Akan tetapi negara-kota tersebut tidak bersifat modern dan jumlah populasinya sedikit. Kekurangan yang ada dalam sistem negara *polis* adalah tidak adanya institusi diplomasi.

Berjayanya *polis* di Yunani pada akhirnya hancur karena bangsa Romawi mampu menaklukkan, menguasai, dan memerintah hampir seluruh Eropa, sebagian Timur Tengah, dan Afrika Utara. Bangsa Yunani banyak yang menjadi budak bangsa Romawi. Mulai inilah bangsa Romawi mulai menguasai peradaban internasional. Kekaisaran Romawi membentang dari Inggris bagian utara (Roman Britain) dan Rhine di barat laut, sampai Damaskus dan Yerusalem di Tenggara, mengelilingi seluruh laut Mediterania dan mencapai seberang Afrika Utara (Jackson and Sorensen, 2013). Untuk menguasai peradaban hampir di seluruh Eropa, bangsa Romawi banyak melakukannya dengan menjajah. Hancurnya bangsa Romawi dikarenakan suku 'Barbar' mampu menghancurkan dan menguasai Kekaisaran Romawi.

Setelah hancurnya bangsa Romawi, ada dua pengganti kekaisaran Roma dimana bentuknya juga kekaisaran. Kekaisaran ini terletak di bagian Eropa Barat dan Eropa Timur. Kekaisaran di Eropa Barat adalah kekaisaran zaman pertengahan (Katolik) berpusat di Roma yang dimana bangsanya penganut Kristen. Sedangkan di Eropa Timur adalah kekaisaran Byzantium (Orthodoks) yang berpusat di Konstantinopel yang sekarang sering disebut dengan Istanbul (Byzantium) (Jackson and Sorensen, 2013). Bentuk kekaisaran zaman pertengahan, bukan seperti sistem negara. Mereka tidak merdeka dan tidak berdaulat. Tidak ada batas wilayah yang benar-benar jelas. Kekuasaan di zaman pertengahan diatur berdasarkan hierarki agama dan politik. Paus dan Kaisar adalah pimpinan yang berhubungan satu sama lain.

Tabel 4. 2. Sistem Negara pada Zaman Pertengahan

Hierarki Agama	Hierarki Politik
Paus	Kekaisaran
Uskup Agung, uskup, dan klerus terkemuka lainnya	Raja dan penguasa nasional semi-independen lain
Pendeta dan klerus umum lain	Baron dan penguasa lokal semi-independen lain
Pemeluk Kristen biasa	Rakyat biasa dari sejumlah komunitas lokal

Sumber: (Jackson and Sorensen, 2013)

Zaman Pertengahan adalah masa kekaisaran, dengan banyak aliansi dan konflik. Di zaman ini juga banyak terjadi kekacauan, ketidakteraturan, konflik, dan kekerasan, dikarenakan tidak adanya kontrol dan organisasi politik wilayah (Jackson and Sorensen, 2013). Tidak ada konsep kepentingan nasional atau bangsa, dan tidak ada wilayah yang dikendalikan secara eksklusif di Eropa zaman pertengahan. Berakhirnya zaman pertengahan adalah titik awal dari sistem internasional modern. Hal ini ditandai dengan Perang Tiga Puluh Tahun dan Perdamaian Westphalia untuk mengakhiri perang tersebut. Sehingga bukti adalah zaman modern adalah adanya Perdamaian Westphalia.

Perjanjian Westphalia

Boks 1.8

Perdamaian Westphalia (1648)

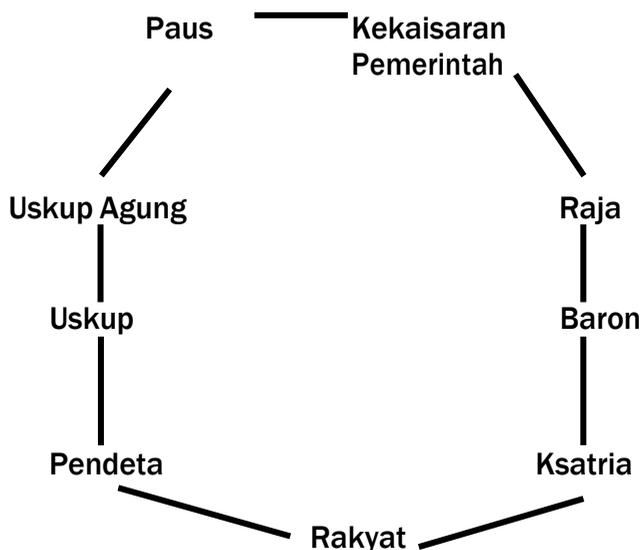
Perjanjian Westphalia melegitimasi persemakmuran negara-negara berdaulat. Hal ini menandai kemenangan 'The Stato' (negara), dalam mengendalikan masalah-masalah internalnya dan kemerdekaannya secara eksternal. Ini merupakan cita-cita para pangeran (para penguasa) secara umum – dan terutama pangeran Jerman, baik Protestan maupun Katolik, dalam hubungannya dengan kekaisaran (Roma suci atau Habsburg). Perjanjian Westphalia menyatakan banyak aturan dan prinsip politik masyarakat negara-negara baru ... penyelesaian tersebut diadakan untuk menyediakan perjanjian yang fundamental dan komprehensif bagi seluruh Eropa.

Watson (1992: 186).

Sumber: (Jackson and Sorensen, 2013)

Setelah zaman pertengahan, ada perubahan politik ke masa modern. Negara menguasai wilayahnya dan menjadikannya sebagai milik negara, dan negara menguasai penduduk dari wilayah tersebut dan mengubah mereka menjadi bawahan dan kemudian menjadi warga negaranya (Jackson and Sorensen, 2013). Pemerintahan berdaulat mengkonsolidasikan, menyatukan, dan terpusat di wilayah tersebut. Orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut percaya pada pemerintahannya dan harus mematuhi hukumnya. Kekuasaan negara dan hukum publik mengatur semua institusi di wilayah tersebut. Suatu negara memiliki otoritas eksklusif atas wilayahnya. Suatu wilayah tertentu dikuasai dan dikontrol oleh pemerintahan yang merdeka. Mulai abad ke-17, negara dilihat sebagai sebuah sistem yang legal dimana dia memiliki wilayah sendiri dan pemerintahan yang merdeka. Hal ini bisa dilihat bahwa negara mulai menjadi aktor dalam hubungan internasional. Negara adalah aktor dalam hubungan internasional yang berdaulat.

**Pemerintahan Abad Pertengahan Pemerintahan Modern
(Tanpa Kedaulatan) (Kedaulatan)**



Gambar 4. 1. Pemerintahan Abad Pertengahan dan Pemerintahan Modern
Sumber: (Jackson and Sorensen, 2013)

4.3 Bentuk-bentuk Negara

Seluruh negara di dunia memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi cara dan model pelaksanaan hubungan internasional setiap negara di dunia berbeda-beda. Suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya tentu ditentukan oleh negara itu sendiri. Negara lain maupun hukum internasional tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan sebuah negara menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Adapun bentuk-

bentuk negara adalah sebagai berikut:

4.3.1 Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan politik dan administratif terpusat di pemerintahan pusat, dan otoritas pemerintah pusat berlaku untuk seluruh wilayah negara. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang berlaku secara merata di seluruh wilayah tanpa campur tangan yang signifikan dari pemerintah lokal atau daerah. Undang-undang dasar negara kesatuan memberikan kekuasaan penuh pada pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri (Mauna, 2013). Dalam urusan luar negeri, pemerintah daerah tidak boleh berhubungan langsung dengan negara lain. Contoh negara kesatuan adalah misalnya Indonesia, Perancis, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Filipina, dll.

Negara Kesatuan adalah negara tunggal (unitaris), diorganisasikan di bawah sebuah pemerintah pusat (Strong, 1951). Seluruh kekuasaan pemerintahan konstitusional terpusat di tingkat nasional (Baradat, 1979). Negara kesatuan memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut:

a. Terdiri dari satu kepala negara

Salah satu karakteristik utama dari negara kesatuan adalah keberadaan satu kepala negara. Ini berarti bahwa dalam konteks negara kesatuan, kepemimpinan dipegang oleh satu individu sebagai kepala negara.

b. Terdiri dari satu konstitusi Undang-undang

Dalam negara kesatuan, hanya ada satu konstitusi dasar yang berlaku secara nasional. Ini berbeda dengan negara federasi di mana setiap negara bagian dapat memiliki undang-undangnya sendiri, yang bervariasi tergantung pada pemerintahan di setiap

negara bagian.

c. Wewenang tertinggi terdapat di tangan pemerintah pusat
Kekuasaan pemerintah dapat diselenggarakan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dimana pemerintah daerah hanya akan melaksanakan semua kebijakan dan ketentuan dari pemerintah pusat (Yusuf, 2023). Di samping itu, pemerintah pusat mungkin memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, tetapi kekuasaan puncak tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

d. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan ke luar

Kedaulatan negara dalam negara kesatuan mencakup kedaulatan internal dan eksternal, yang secara resmi disahkan oleh pemerintah pusat. Ini berarti bahwa pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas kedaulatan di dalam dan di luar negara.

e. Tidak ada negara di dalam negara

Ciri negara kesatuan berikutnya adalah tidak adanya entitas negara yang berdiri sendiri di dalamnya. Ini berarti bahwa hanya ada satu negara yang memiliki kedaulatan penuh dan merangkul semua wilayah dan daerah di dalamnya. Hal tersebut sangat berbeda dengan negara serikat yang mempunyai beberapa negara bagian di dalam satu negara (Yusuf, 2023).

4.3.2 Negara Federal

Negara Federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya (Mauna, 2013). Negara-negara bagian ini memiliki nama penyebutan yang berbeda-beda. Seperti misalnya di Kanada negara bagian disebut dengan *propinsi*. Kemudian di Swiss negara bagian sering disebut dengan *canton* atau

lander. Lalu di Amerika Serikat, Brazil, Mexico, dan Australian negara bagian sering disebut dengan *negara bagian*. Dalam setiap rezim federal, undang-undang dasar biasanya memberikan kepada pemerintahan federal wewenang mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri, pertahanan nasional, pengaturan perdagangan dengan negara-negara lain, dll (Mauna, 2013). Hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, menjalin perdamaian, dan menegosiasikan perjanjian politik serta militer. Tidak ada negara bagian yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam tindakan-tindakan semacam itu.

“Federalism denies the existence of just one “center” able to centralize or decentralize power, and it develops, instead, a multi-centered and noncentralized structure of government, where each center is given a guaranteed portion of power which cannot be removed by the others (Baldi, 1999).”

Tabel 4. 3. Perbedaan Desentralisasi dan Otonomi di Negara Kesatuan dan Negara Federal

Bentuk Negara	Desentralisasi	Otonomi Daerah
Federal	<i>Separation of powers</i> (pemisahan kekuasaan)	Otonomi penuh
Kesatuan	<i>Division / sharing of powers</i> (pembagian kekuasaan/kewenangan).	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Otonomi luas ➢ Otonomi terbatas ➢ Otonomi khusus

Sumber: (Widodo and Utomo, 2012)

4.3.3 Uni Riil

Uni negara adalah dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat mempunyai satu kepala negara yang sama, atau dua/lebih negara dikepalai oleh satu kepala negara (Suantra and Nurmawati, 2017). Uni Riil adalah penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan (Mauna, 2013). Sesuai perjanjian atau konstitusi yang menggabungkan kedua negara, mereka tidak boleh berperang satu sama lain atau secara terpisah melakukan perang dengan negara lain (Glahn, 1981). Uni membuat perjanjian internasional atas nama negara-negara anggota karena negara-negara tersebut kehilangan status personalitas internasional. Contoh negara Uni Riil:

- a. Austria-Hongaria yang bubar di tahun 1918 sesaat sebelum berakhirnya Perang Dunia I, Denmark dan Iceland dari 1918-1944.
- b. Timur Tengah pernah terjadi penggabungan antara negara beberapa dalam bentuk uni. Mesir dan Syria contohnya, mereka pernah menggabungkan diri dalam *United Arab Republic* tetapi itu tidak berlangsung lama. Hanya dari bulan Februari 1958 – September 1961 (Mauna, 2013).
- c. Uni Indonesia – Belanda pada tahun 1949.

4.3.4 Uni Personil

Uni Personil adalah dua negara yang mempunyai seorang raja yang sama sebagai kepala negara (Suantra and Nurmawati, 2017). Uni personil terbentuk bila dua negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai

raja yang sama (Mauna, 2013). Walaupun mereka bergabung, tetapi perbatasan, sistem hukum, dan kepentingan masing-masing negara tetap berbeda (Oppenheim, 2005). Uni Personil dapat muncul karena berbagai macam alasan, dari ketidaksengajaan misalnya, seorang putri yang sudah menikah dengan seorang raja dari negara lain menjadi ratu yang berkuasa, dan anaknya menjadi penerus tahta kedua negara. Uni personal bisa diatur dalam hukum tertulis, seperti dalam konstitusi kedua negara yang menetapkan kepala negara yang sama, atau dapat tidak diatur dengan jelas, sehingga dapat terpecah jika terjadi peristiwa seperti kematian kepala negara sementara kedua negara memiliki garis penerus yang berbeda. Contoh negara Uni Personil:

- a. Belanda – Luxemburg tahun 1839 – 1890
- b. Uni Inggris – Skotlandia tahun 1603 – 1707

4.3.5 Konfederasi

Konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi (Mauna, 2013). Konfederasi adalah perserikatan atau pesekutuan antar beberapa negara dan setiap negara yang menjadi anggota pada umumnya merupakan negara merdeka dan berdaulat (Suantra and Nurmawati, 2017). Munculnya konfederasi sering kali disebabkan oleh kesamaan kepentingan, dinamika sosial-politik global, atau peristiwa-peristiwa sejarah yang berkembang. Kesepakatan bersama tersebut diungkapkan dalam bentuk traktat internasional yang disusun oleh para anggota konfederasi. Terbentuknya konfederasi biasanya karena adanya kesamaan kepentingan, dinamika sosial-politik global atau karena perkembangan sejarah (Suantra and Nurmawati, 2017). Menurut Kamus Hubungan Internasional karya Khasan Ashari, negara konfederasi adalah:

“Gabungan negara-negara berdaulat yang dibentuk untuk menjalankan kebijakan dan tindakan bersama dalam berhadapan dengan negara atau aktor internasional lain. Negara-negara yang bergabung membentuk pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas aspek pertahanan, politik luar negeri, dan mata uang bersama; sementara aspek-aspek yang lain diatur oleh masing-masing negara. Tingkat hubungan antarpihak diatur dalam perjanjian dan umumnya lebih erat dibandingkan organisasi internasional namun lebih longgar dibandingkan federasi (Ashari, 2015).

Contoh negara konfederasi adalah *State Union of Serbia and Montenegro* pada tahun 1992-2006 yang dibentuk oleh dua negara bekas Yugoslavia, Serbia, dan Montenegro.

4.3.6 Protektorat

Negara protektorat adalah negara yang secara *de facto* atau *de jure* berada di bawah pengaruh atau kendali politik, militer, atau ekonomi negara lain yang lebih kuat. Ini berarti bahwa negara protektorat mempertahankan sebagian kedaulatan mereka sendiri, tetapi juga tergantung pada pemegang protektorat dalam beberapa hal. Dalam sistem protektorat ini negara kolonial memperoleh sejumlah wewenang atas negara yang dilindunginya (Mauna, 2013). Negara-negara yang tergolong dalam sistem protektorat memiliki keterbatasan dalam kapasitas mereka terkait dengan urusan hubungan luar negeri dan pertahanan, yang umumnya diurus oleh negara yang melindungi. Menurut kamus Hubungan Internasional karya Khasan Ashari negara protektorat adalah:

“Wilayah otonom yang mendapatkan perlindungan militer dan diplomatik dari negara yang memiliki kekuatan lebih besar sesuai dengan perjanjian bilateral yang disepakati kedua pihak. Wilayah protektorat pada umumnya memberikan konsesi kepada negara yang memberikan perlindungan dan menjalankan sejumlah kewajiban sebagai konsekuensi dari diberikannya perlindungan tersebut. Wilayah protektorat secara formal tetap memiliki kedaulatan dan berdasarkan hukum internasional tetap dikategorikan sebagai negara (Ashari, 2015).”

Contoh negara protektorat adalah Brunei Darussalam pada tahun 1888 – 1984. Pada periode tersebut Brunei mendapatkan perlindungan militer dan diplomatik dari Inggris. Selain itu, contoh lain adalah pada saat peninggalan zaman kolonial seperti Tunisia, Maroko, Kamboja, Laos, dan Vietnam dulunya merupakan protektorat Perancis (Mauna, 2013).

4.3.7 Dominion

Negara dominion adalah tipe negara yang khususnya ada dalam kerangka kerajaan Inggris. Ini merujuk pada negara-negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris, yang telah merdeka dan memiliki kedaulatan, tetapi masih mengakui Raja Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara ini termasuk dalam apa yang dikenal sebagai Persemakmuran Inggris. Wilayah jajahan Inggris yang mendapatkan status otonomi pada periode 1867 – 1947 dan tetap mengakui takhta Inggris sebagai kepala negara (Ashari, 2015). Setelah berakhirnya Perang Dunia II, bentuk hubungan antara Inggris dan negara-negara bekas jajahannya dilembagakan melalui organisasi *Commonwealth*. Contoh negara dominion adalah Australia dan Kanada pada tahun 1867.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, K., 2015. Kamus Hubungan Internasional. Nuansa Cendekia, Bandung.
- Baldi, Brunetta, 1999. Beyond the Federal-Unitary Dichotomy. Working paper. Institute of Governmental Studies. University of California. Berkeley.
- Glahn, G.V., 1981. Law Among Nations. Mac Millan Publishing, New York.
- Humas, 2018. Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia [WWW Document]. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. URL <https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/> (accessed 4.30.24).
- Jackson, R., Sorensen, G., 2013. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford University Press, New York.
- Langhorne, R., 2006. The Essentials of Global Politics [WWW Document]. Google Docs. URL https://drive.google.com/file/d/1Sk6WTnBKJKxNyNeMzntNOLX9pj8BOJUw/view?usp=sharing_eip_se_dm&ts=6630ad9c&usp=embed_facebook (accessed 5.2.24).
- Mauna, B., 2013. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. PT Alumni, Bandung.
- Oppenheim, L., 2005. International Law: A Treatise. The Lawbook Exchange.
- Steans, J., Pettifors, L., 2009. International Relations: Perspective and Theme, 1. Pearson Education Limited, England.

- Suantra, I.N., Nurmawati, M., 2017. Konfederasi sebagai Salah Satu Bentuk Hubungan Antarnegara. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.**
- Widodo, T., Utomo, W., 2012. Dekonsentrasi dan Desentralisasi dalam Diskursus Negara Kesatuan dan Negara Federal. Jurnal Ilmu Administrasi IX, 34–44.**
- Yusuf, M.A., 2023. Memahami Ciri-ciri Negara Kesatuan dan Keunggulannya - Gramedia Literasi. URL <https://gramedia.com/literasi/ciri-ciri-negara-kesatuan/> (accessed 5.5.24).**

BAB 5

INDIVIDU SEBAGAI AKTOR DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Tiffany Setyo Pratiwi

5.1 Pendahuluan

Kita sering mendengar atau menonton tokoh-tokoh dunia yang diberitakan di media cetak, media massa, atau media sosial telah melakukan sesuatu yang menolong dunia atau telah menjadi orang paling berpengaruh. Apakah mereka ini termasuk dalam aktor hubungan internasional? Jawabannya iya. Bahkan semua warga negara yang melakukan interaksi antar negara dengan membawa agenda tertentu bisa menjadi aktor HI. Tentu kita pernah mendengar nama Greta Thunberg anak gadis yang saat itu masih berusia 16 tahun, namun sangat berani menyuarakan tentang pemanasan global, hingga mendapatkan atensi dari berbagai negara dan mampu membangun jejaring advokasi internasional melalui gerakan *Friday For Future* (FFF), tindakannya jelas sudah masuk ke ranah isu lingkungan global, dan di dalam HI ia bisa dikategorikan ke dalam aktor individu non-pemerintah (Evendi dan Haryanto: 2021).

Perhatian dalam studi hubungan internasional sejak awal berakar pada kajian perilaku negara-negara yang memiliki kepentingan dalam percaturan dunia. Sehingga tidaklah heran bahwa perilaku hubungan antar negara sejak awal menjadi perhatian utama dalam studi hubungan internasional. Isu hubungan internasional pada sekitar tahun 1920-an masih

konvensional dengan banyak membahas soal perang ataupun konflik, akan tetapi fokus ini mulai berkembang dan bergeser pasca perang dingin yang ditandai dari sekitar tahun 2000-an. Selain itu, cakupan level analisis studi HI jauh lebih menguat dari tingkat analisis yang mencakup tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Kajian dalam hubungan internasional yang telah merambah isu-isu yang lebih beragam berimplikasi terhadap aktor yang terlibat. Dengan meningkatnya keragaman aktor dalam hubungan internasional membawa isu-isu dalam hubungan internasional bergeser menjadi isu-isu *low politics* (Hermawan, 2007: 7-16). Selanjutnya seiring berkembangannya zaman dan dinamika permasalahan global, perluasan aktor-aktor dalam hubungan internasional secara kompleks telah menghadirkan berbagai aktor non-negara berperan di dalamnya.

Chris Brown dalam bukunya yang berjudul “*Understanding International Relations*” menyoroti pemahaman hubungan internasional yang bersifat konvensional dengan merujuk pada perspektif bahwa negara melakukan tindakan dalam konteks kepentingan kedaulatannya, diplomasinya, militernya, dan prinsip negara yang mengedepankan “*self help*” atau menolong diri sendiri (tidak bergantung dengan negara lain) yang terkandung dalam konteks keamanan nasional telah melekat dalam sistem internasional. Namun demikian Chris Brown juga menegaskan bahwa negara-negara dunia telah mengalami transaksi-transaksi lintas batas negara yang melibatkan pelaku atau aktor lain, hal ini dikarenakan negara-negara memiliki keterbatasan dan seringkali gagal dalam mengatasi suatu permasalahan. Oleh karenanya, sumber daya dari aktor non-negara hadir sebagai jawaban bahwa dunia ini mengalami ketergantungan yang kompleks atau *complex interdependence*. Artinya, aktor selain negara juga berperan penting dalam

hubungan internasional, dan mereka saling berinteraksi dalam kepentingan masing-masing dengan membangun hubungan kerjasama yang menguntungkan dan bersinergi. Aktor selain negara ialah aktor yang bisa berasal dari organisasi swasta, organisasi sipil, lembaga internasional misalnya International Monetary Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO) serta masyarakat internasional (Brown, 2005: 1-4). Namun aktor selain negara ini hadir pula dalam bentuk yang “membahayakan”, dengan kata lain cenderung membangun hubungan buruk yang bisa berwujud tindakan kekerasan dan kejahatan bahkan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang mengancam keamanan internasional, seperti teroris dan mafia narkoba (Williams: 2008).

Aktor dalam hubungan internasional yang patut dibahas lebih mendalam adalah aktor individu. Meskipun bukan menjadi aktor utama dalam hubungan internasional, aktor individu telah memberikan warna baru dalam percaturan dunia. Dalam konteks kekinian, kita sering melihat di media massa dan media sosial hadirnya aktor individu seperti selebriti dunia, atlet dunia, atau pengusaha kaya yang terjun dalam arena internasional. Mereka hadir dalam arena internasional atas profesinya yang mampu menarik perhatian global bahkan mampu membentuk jaringan dukungan lintas batas negara. Dalam konteks kekinian contohnya artis-artis dunia atau pemain sepak bola dunia seperti Cristiano Ronaldo yang mampu mengumpulkan donasi kemanusiaan secara global untuk membantu negara-negara miskin. Penulis berpendapat bahwasannya secara teoritis kita dapat memaknai peranan individu sebagai aktor dalam hubungan internasional dengan melihat kehadiran mereka yang ada di pemerintahan, apakah itu presiden sebagai kepala negara, begitupun ketika individu tersebut memiliki jabatan krusial dalam sebuah perusahaan

multinasional, sebagai pemimpin perusahaan yang mampu berperan dalam ekonomi global atau sebagai artis dunia hiburan seperti Hollywood dan KPop yang menerima atensi masyarakat global. Maka dari itu, dalam bab ini Penulis akan menyoroti alasan-alasan kehadiran aktor individu dalam hubungan internasional beserta peranannya. Dalam berbagai literatur yang Penulis pelajari, Penulis akan menguraikan tujuh alasan penting yang melatarbelakangi kehadiran individu dalam hubungan internasional, diantaranya:

1. Individu sebagai pemimpin politik dalam politik luar negeri (Muhammad: 2019),
2. Implikasi dari hadirnya hak asasi manusia internasional (Osee dkk: 2019),
3. Ide yang dibawa oleh kaum liberal yang menempatkan kebebasan individu dalam hubungan internasional (Doyle: 1986),
4. Hadirnya pelaku bisnis yang memiliki pengaruh kekuatan ekonomi internasional (Grozdanovska dkk: 2017),
5. Hadirnya aktor individu sebagai pegiat filantropi dalam skop global (Bishop: 2013),
6. Perkembangan globalisasi dan teknologi (Bae: 2003),
7. Lahirnya aktor/pelaku individu kejahatan lintas batas negara (Williams; 2008).

Tujuh poin diatas selanjutnya akan Penulis jabarkan dalam Bab ini secara mendalam dengan menyertakan contoh-contoh kasus yang relevan.

5.2 Definisi Aktor “Individu” Dalam HI

Herbert C. Kelman dalam tulisannya yang berjudul *“The Role of the Individual in International Relations: Some Conceptual and Methodological Considerations”* mendefinisikan aktor individu yang dimaksud dalam

hubungan internasional ialah individu yang memiliki posisi dalam pengambilan keputusan di sebuah negara atau masyarakat pada umumnya yang menggunakan ide pemikiran dan aksinya untuk mengekspresikan apa yang menjadi daya tariknya dalam arena internasional. Aktor individu ini membawa interaksi-interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dalam hubungan internasional. Aktor individu dalam hubungan internasional cenderung tidak otonom atau mandiri dalam peranannya, artinya aktor individu ini berperan ataupun bertindak dalam kerangka aturan institusi dimana ia bernaung baik nasional maupun internasional (Kelman: 1970). Pemahaman tentang aktor individu juga ditawarkan oleh Teftedarija dkk (2013), yang memasukkan individu bagian dari aktor non negara dimana individu ini bukanlah bagian dari struktur dalam sebuah negara. Sehingga menurut hemat Penulis, aktor individu dalam hubungan internasional bisa kita kategorikan yakni aktor individu yang berasal dari pemerintahan dimana ia sebagai bagian dari negara misalnya presiden dan aktor individu non pemerintah dimana ia bisa berasal dari pelaku bisnis, organisasi masyarakat global, kelompok kepentingan, dan lain sebagainya.

Memaknai aktor individu dalam hubungan internasional secara keilmuan multidisipliner terkait pengambilan keputusan atau tindakan aktor individu itu sendiri, para ahli menyoroti dari kerangka teori keilmuan psikologi politik. Salah satunya tulisan dari Ross James Gildea (2020) yang berjudul "*Psychology and aggregation in International Relations*". Di dalam tulisannya, ia memaparkan bahwa karakteristik ilmu psikologi terletak pada unit analisis individu yang secara teoritis dan empirik mampu menganalisis tindakan individu (*behavior*), temuan

psikologis tersebut mampu mendukung analisis perilaku politik individu dalam hubungan internasional. Karena menurutnya, preferensi individu dalam proses pengambilan keputusan secara kelembagaan maupun kelompok seringkali berbenturan dengan penilaian bias dari individu tersebut. Meskipun secara teori psikolog dan HI dihubungkan menjadi teori interdisipliner dimungkinkan, Gildea menegaskan terdapat hambatan dalam membangun kompleksitas teori, dimana keilmuan HI cenderung memiliki model penelitian melalui unit analisis negara, birokrasi, kelompok bersenjata, dan jaringan institusional.

Herbert C. Kelmen memaparkan secara jelas bagaimana peranan aktor individu dalam hubungan internasional. Terdapat tiga poin utama dalam memahami tingkah laku individu dalam hubungan internasional, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan luar negeri, yakni ketika individu memiliki wewenang sebagai pengambil kebijakan, maka dalam proses pengambilan keputusan tersebut aktor individu tersebut memiliki pertimbangan dari unit-unit di dalam dirinya yang bersifat personal secara psikologis dan unit-unit diluar dari dirinya seperti pertimbangan kepentingan nasional bahkan pengaruh dari lingkungan sosialnya.
2. Opini publik dalam proses kebijakan luar negeri, yakni adanya efek dari opini publik yang signifikan dalam mempengaruhi pemimpin negara untuk pengambilan keputusan. Masuknya opini publik dalam pengambilan kebijakan luar negeri bisa diidentifikasi melalui dukungan dan penolakan yang muncul dari publik terhadap isu kebijakan luar negeri yang menjadi agenda sebuah negara.
3. Interaksi personal lintas batas nasional, yakni interaksi yang terjalin secara informal oleh individu-individu,

seperti pariwisata, pertukaran pelajar, bisnis internasional, pertemuan ilmuwan internasional, dan lembaga masyarakat yang melakukan pertemuan secara internasional baik soal kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Interaksi individu-individu tersebut dalam konteks pengaruhnya untuk hubungan antar negara masih belum berefek besar ketika berbicara konteks perang antar negara, meskipun demikian berbagai pertemuan individu-individu tersebut mampu membuka peluang komunikasi yang lebih besar dan penguatan stabilitas dan integrasi dalam sistem internasional hingga berpeluang mengurangi polarisasi politik.

5.3 Alasan-Alasan Hadirnya Aktor Individu dalam HI Beserta Peranannya

- 1. Individu sebagai Pemimpin Politik dalam Politik Luar Negeri**
Politik luar negeri atau polugri adalah seperangkat nilai-nilai ideal politik luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Polugri juga diartikan sebagai sebuah strategi suatu negara dalam menghadapi berbagai situasi. Polugri juga dipahami sebagai sebuah tindakan atau sikap yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon situasi yang terjadi dalam hubungan internasional. Para pembuat keputusan ini bisa menyampaikan sikap lewat sebuah pernyataan berupa pidato resmi kenegaraan ataupun tindakan tertentu. Salah satu faktor dalam politik luar negeri ialah faktor individu. Individu yang dimaksud adalah pemimpin negara sebagai elit politik, dan ketika dihadapkan dengan situasi yang memerlukan sikap atau tindakan pemimpin, tak jarang pemimpin menerima

berbagai tekanan kepentingan yang sangat mungkin membatasi bahkan menghalangi keinginan pribadi pemimpin tersebut. Sikap atau tindakan pemimpin ini bisa dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pemimpin. Selain karakteristik, kapasitas pemimpin juga mempengaruhi otoritas dan legitimasinya. Contohnya saja seorang pemimpin kepala negara ada di pemerintahan yang otoriter sehingga keleluasaan dirinya dalam kapasitas pengambil keputusan tidak perlu mengkhawatirkan akan menerima banyak tekanan. Sebaliknya, pemimpin di suatu negara akan menerima kritik atau opini publik yang jelek jika mengambil tindakan A, maka ia akan berpikir ulang bahkan mungkin tidak akan mengambil tindakan A, melainkan tindakan B atau C yang lebih populis (Muhammad, 2019: 169-190).

Orientasi individu dalam konteks sebagai pembuat kebijakan (*decision-makers*) dapat ditinjau melalui dua perspektif yang bersifat absolut (utopis) dan realis. Absolut cenderung mencapai kepentingan dengan stabilitas yang total atau dengan memusnahkan musuh secara total demi kepentingannya sedangkan realis cenderung melihat bahwa pencapaian tertinggi tanpa ada kesalahan adalah hal yang mustahil karena kemungkinan-kemungkinan adanya kekurangan dan peluang masalah di masa depan bisa saja terjadi. Contoh aktor individu yang cenderung absolut ialah Woodrow Wilson dengan gagasan populernya tentang perdamaian dunia yang seutuhnya, sedangkan pandangan yang bersifat realis bisa kita lihat dari pandangan Sun Tzu "*When you surround an army, leave an outlet free, Do not press a desperate foe too hard*" artinya jika kamu mengirim dan menyebar tentara, biarkan ada wilayah yang terbebas dari intervensi, jangan menekan

musuh yang sudah putus asa dengan keras (Back: 1963). Dari dua pendekatan ini, aktor individu dalam hubungan internasional mempertimbangkan setiap tindakannya, apakah secara absolut atau realis.

2. Hadirnya Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang melekat di dalam dirinya, seperti hak untuk hidup. Individu yang berstatus subjek hukum internasional. Hak Asasi Manusia yang bersifat individu selain hak atas hidup, ada pula hak privasi, hak kebebasan, hak kesetaraan dan hak tidak di diskriminasi. Hak asasi manusia internasional di dalamnya memuat perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok. Mengapa HAM begitu penting untuk manusia? Karena HAM adalah seperangkat nilai dan hukum yang mengatur pemenuhan dasar manusia itu sendiri. Bahkan manusia telah memiliki haknya sejak dalam kandungan, hak untuk hidup dan lahir, yang termaktub dalam hak anak (United Nations).

Selain itu, seperangkat aturan HAM telah termuat dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948, adanya Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang ditetapkan Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Sehingga hadirnya HAM ini menguatkan peranan individu sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia dan harus mendapatkan perlindungan.

Seiring perkembangan HAM, aspek individu yang dimaksud dalam HAM mengalami dinamika perkembangan perspektif yang mengubah pula cara memaknai hak individu itu sendiri, berikut uraiannya (Wellman, 2000: 639-657):

1. HAM generasi pertama, menempatkan hak individu sebagai hak yang harus dilindungi dari perlakuan negara yang melanggar atau sengaja membiarkan pelanggaran HAM terjadi;
2. HAM generasi kedua, hak individu untuk menuntut negara untuk menciptakan dan mempertahankan program pemerintah untuk menguntungkan dirinya sendiri;
3. HAM generasi ketiga, generasi baru dalam HAM di generasi ketiga ini sering disebut Hak Solidaritas (*Solidarity Rights*) dimana hadirnya hak individu untuk berpartisipasi dalam komunitas. Hak ini mampu menekan sifat penyendiri (*solitary*) yang dimiliki manusia. Sehingga hak ini mampu mencapai kemampuan manusia dalam bekerjasama satu sama lain dengan kehidupan sosial di berbagai komunitas yang mereka punyai, sekaligus hal ini mampu menjawab tantangan masalah global yang semakin kompleks dimana negara seringkali gagal mengatasinya.

Artinya, perkembangan generasi HAM ke-3 ini telah membawa lebih luas dan lebih banyak lagi peran individu untuk melindungi hak-nya bahkan hak-hak yang lebih besar lainnya. Lebih lanjut, dukungan kepatuhan dari aktor negara, sektor publik, kelompok swasta dan seluruh komunitas internasional sangatlah penting terlibat dalam hak solidaritas ini.

3. Ide Yang Dibawakan Oleh Kaum Liberal

Liberalisme merupakan salah satu paradigma ataupun teori utama dalam hubungan internasional. Optimisme dari pemikiran teori ini terletak pada ide dan keyakinan bahwa manusia adalah individu yang memiliki sikap positif dalam membangun hubungan kerjasama, dan manusia memiliki rasionalitas yang akan mempertimbangkan baik dan buruknya atau untung dan ruginya atas tindakan yang ia lakukan. Artinya rasionalitas ini merupakan bentuk atas kebebasan individu dalam hak-haknya sebagai manusia. Sehingga dalam teori liberalisme menempatkan aktor utama dalam HI adalah individu dan kelompok masyarakat. Ide ini akhirnya membatasi peran negara yang mana dalam pandangan liberalisme negara (pemerintah) hanya memfasilitasi untuk mempermudah individu dalam mengasah kemampuannya baik di aspek ekonomi maupun lainnya untuk kemudian membawa kesejahteraan (Rosyidin: 2022). Dalam konteks inilah apa yang dinamai dengan sistem kapitalisme yang mengedepankan peranan individu (*individualizes*) dan peluang subyektif (*subjectives opportunity*, sehingga mendukung pemerintahan yang demokratis seperti apa yang diyakini oleh aliran liberalis republikan. Liberalis republikan menganggap bahwa hadirnya individu yang rasional akan menuntut negara yang demokratis agar tercipta perdamaian (Doyle: 1986). Artinya, dalam tradisi liberalisme menekankan kemerdekaan individu dalam suatu negara agar mencapai perdamaian dunia.

Lebih lanjut ide kaum liberal juga menitikberatkan pada isu-isu yang dipelajari dalam hubungan internasional. Bagi kaum liberal, isu keamanan tidak lagi menjadi isu yang utama, melainkan isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, polusi udara, krisis pangan, kekerasan perempuan dan anak juga memiliki urgensi yang sama besarnya. Sehingga perluasan isu-isu dalam hubungan

internasional telah melibatkan lebih banyak lagi aktor individu di dalamnya.

4. Pelaku Bisnis Yang Memiliki Pengaruh Kekuatan Ekonomi Internasional

Berbicara mengenai hubungan internasional dan ekonomi maka sudah pasti bahasannya mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi terkait pertukaran komoditas serta barang dan jasa manufaktur lintas batas. Pandangan liberalisme mengedepankan pasar bebas yang mampu memaksimalkan produktivitas dan kemampuan individu, sehingga lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) *Multinational Corporation* (Jones: 1981).

Perusahaan multinasional sendiri sudah sangat jelas menjadi aktor yang sangat penting dalam hubungan internasional. Mereka memiliki kemampuan untuk memindahkan sumber-sumber ekonomi melewati lintas batas negara. Karenanya beberapa perusahaan multinasional memiliki kerjasama atau aliansi dengan banyak negara. Kesamaan kepentingan (*common interest*) antara keduanya menciptakan pasar global yang terintegrasi secara sistem ekonomi global (Wells: 1971). Di dalam tubuh perusahaan multinasional ini adalah aktor individu yang mampu menjalankan roda bisnisnya. Pelaku bisnis global inilah yang mampu memainkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi global. Sebagai contoh seorang Elon Musk pendiri Tesla dan juga memiliki beberapa perusahaan lain di bidang teknologi kecerdasan buatan, dan belakangan juga menjadi pemilik platform media sosial Twitter yang sekarang berganti nama menjadi X, ia telah dinobatkan majalah Forbes sebagai orang terkaya di muka bumi, dengan kepemilikan kekayaan mencapai 4.000 trilliun rupiah. Sehingga Musk menjadi investor atau vendor utama dalam kontrak-kontrak dengan pemerintah di berbagai negara (CNN: 2023).



Elon Musk
(Sumber: Wikipedia)

5. Hadirnya Aktor Atau Pegiat Filantropi Dalam Skop Global

Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan filantropi yang dilakukan individu telah menysasar berbagai sektor pembangunan dan kemanusiaan global. Filantropi berasal dari bahasa latin yakni *caritas* atau dalam bahasa inggrisnya *charity*. Definisi filantropi adalah sebuah tindakan atau kegiatan atau perilaku seseorang yang secara sukarela menjadi relawan dalam berbagi bantuan, dukungan, sumbangan, dan sumber daya untuk kepentingan publik, filantropi juga bisa dilakukan oleh perkumpulan organisasi maupun perusahaan.

Aktor individu yang menjadi pegiat filantropi global memiliki peranan yang mampu membantu menyelesaikan permasalahan publik. Salah satunya yang dilakukan oleh Ted Turner pendiri dari saluran berita global CNN Amerika Serikat. Turner telah menyumbangkan sebagian kekayaannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dipergunakan bagi kesejahteraan warga miskin di AS dan di dunia. Aktor individu lainnya adalah Mario Marino seorang pengusaha perangkat lunak asal Amerika yang mendirikan Marino Institute pada tahun 1994 yang mendorong inovasi dan kewirausahaan serta mempromosikan filantropi yang efektif. Sekitar tahun 2000-an ia lalu mendirikan *Venture*

Philanthropy Partners (VPP) (Philanthropynewsdigest.org). Selanjutnya pendekatan filantropi ini kemudian dikenal dengan istilah “Philanthrocapitalism”, sebuah pendekatan baru dalam dunia filantropi yang masuk dalam kategori sebagai *social investors*. Hal ini berarti mengalokasikan uang mereka untuk memberikan dampak sebesar-besarnya terhadap permasalahan masyarakat, dengan kata lain, untuk memaksimalkan “keuntungan sosial/*social return*” mereka. Saat ini filantropi paling berpengaruh di dunia adalah The Gates Foundation yang di dirikan oleh Bill Gates bersama istrinya Melinda Gates, lembaga ini mempunyai aset mencapai 620 triliun rupiah (CNN Indonesia: 2021). Penyumbang terbesarnya adalah Warrent Buffet sekaligus ia menjadi tokoh filantropi dunia. Tidak hanya dari pengusaha/pebisnis saja, di dunia hiburan Hollywood misalnya, ada nama Angelina Jolie yang terjun dalam dunia filantropi berkolaborasi dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*).

Dalam konteks hubungan internasional, kehadiran aktor atau pegiat filantropi ini telah membantu berbagai permasalahan global dari kemiskinan, masalah kesehatan, minimnya fasilitas pendidikan, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya di berbagai belahan dunia. Praktik filantropi global ini bisa disebut pula sebagai upaya penyelesaian masalah alternatif yang memungkinkan membangun dan mewujudkan negara kesejahteraan (Fauzi dan Gunawan: 2022).

6. Perkembangan Globalisasi Dan Teknologi

Kemajuan di bidang teknologi khususnya dalam aspek informasi dan komunikasi serta transportasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai lini kehidupan manusia. Hal ini tak terelakkan akibat pengaruh globalisasi yang menyasar semua negara-negara di dunia. Artinya perkembangan dinamika hubungan aktor individu telah juga mengalami perubahan, dimana aktor individu di

negara satu akan sangat mudah berinteraksi dengan individu di negara lain. Hal serupa juga berlaku dalam penggunaan media sosial yang semakin masif di era digital seperti hari ini. Kebebasan aliran informasi yang sangat cepat dan tersebar luas membuat pengguna media sosial bisa menerima berbagai informasi lintas batas negara. Keadaan ini berdampak pada hubungan masyarakat di dunia maya yang semakin sulit untuk dikontrol oleh negara. Yang pada akhirnya acapkali perkembangan dunia yang sangat cepat ini tidak disertai dengan keterlibatan yang cepat dan tepat oleh negara sebagai perlindungan keamanan. Meskipun ada ancaman yang hadir dari perkembangan teknologi informasi ini, akan tetapi nyatanya, perkembangan teknologi ini sejatinya telah memberikan perubahan positif dalam ekonomi politik global, yaitu lahirnya *e-commerce*.

Pesatnya perkembangan pasar *e-commerce* telah menjadi sebuah bentuk diplomasi dalam pasar global. Saat ini China adalah negara terkuat pasar *e-commerce*. Perubahan sistem ekonomi yang belakangan disebut sebagai *digital economy* atau ekonomi digital membutuhkan inovasi-inovasi untuk bisa bersaing secara global. Disinilah peran individu sebagai aktor dalam ekonomi digital global harus mampu mengakselerasikan inovasi-inovasi agar bisa bersaing. Selain dari aspek ekonomi, adapun perubahan dari kemajuan teknologi dirasakan dari dinamika gerakan sosial transnasional. Melalui internet telah membuka akses komunikasi yang interaktif secara gratis bagi individu lintas batas negara yang tertarik pada gerakan global (Bae, 2003: 79-82).

Pesatnya kemajuan teknologi ini tidak bisa dipungkiri telah memperkuat peran aktor non negara dalam hubungan internasional. Kemajuan teknologi ini sangat dirasakan dalam bidang informasi dan komunikasi, yakni adanya media sosial. Media sosial mampu memberikan

wadah yang tak terbatas bagi individu dalam mempengaruhi berbagai keputusan global. Media sosial yang bertebaran hari ini seperti Facebook, Instragram, Tiktok, Youtube, dan lainnya telah mendorong digitalisasi dalam hubungan internasional, bahkan individu di manapun mampu menjadi aktor dalam hubungan internasional dengan meliput, merekam, layaknya membuat konten yang kemudian di share di media sosialnya, yang kemudian dikenal dengan jurnalisme warga (*citizen journalism*). Lebih jauh, media sosial ini telah membuka bentuk praktik diplomasi yang jauh lebih terbuka dan terkesan jauh dari formal dan kekakuan seperti diplomasi konvensional. Disinilah akhirnya lahir diplomasi digital yang membantu membangun interaksi antara warga di suatu negara dengan negara lain untuk kemudian membangun jejaring yang mana fenomena ini termasuk dalam diplomasi modern (Subagyo: 2019).

Sebagai contoh hadirnya aktor individu dari produk kebudayaan populer Korea Selatan yakni BTS yang menunjukkan bahwa popularitas yang ia miliki mampu mendapatkan perhatian masyarakat secara global. Bahkan membuka peluang dan kerjasama yang baik antara BTS dan United Nations untuk mengedukasi dan menyebarluaskan *program Sustainable Development Goals* (SDGs). Fanbase atau penggemar BTS yang sangat banyak di seluruh negara di dunia selanjutnya menjadi kekuatan dalam melakukan diplomasi digital itu sendiri.



Aktor Grup Band Kpop BTS bekerja sama dengan United Nations dalam Mengkampanyekan Program *Sustainable Development Goals*. (Sumber: Youtube)

7. Lahirnya Aktor/Pelaku Kejahatan Lintas Batas Negara
Penulis meminjam istilah pelaku kejahatan dalam hubungan internasional yang dipakai oleh Phil Williams (2008) dalam tulisannya yakni *Violent Non-State Actors* (VNSAs). Ia lantas menjabarkan bahwa aktor VNSAs muncul akibat dari lemahnya pemerintahan dalam sebuah negara secara legitimasinya dan faktor globalisasi telah lebih besar memfasilitasi munculnya VNSAs. Kemunculannya terjadi sebagian dari individu warga negara yang mengalami kekecewaan atas otoritas pemerintahan yang sah, kekecewaan ini bisa menjadi pemicu dari kegagalan pemerintah menjamin pendidikan, pekerjaan, dan keamanan. Sehingga individu warga negara tadi melakukan tindakan kejahatan yang di beberapa kasus memobilisasi orang lain hingga menciptakan kelompok atau pengikut, sehingga terciptalah kejahatan teroganisir bahkan bertransformasi menjadi jaringan teroris. Artinya semakin besar celah kelemahan dan kekurangan negara, maka prospek kebangkitan VNSAs juga akan semakin besar. Kecenderungan negara yang lemah akan sulit menciptakan atau mempertahankan loyalitas dan nasionalisme warga

negaranya. Faktor lain adalah globalisasi, sebagai contoh ialah aliran jual beli senjata global yang sulit dikontrol oleh negara. Penjual senjata global adalah pemain transnasional yang menjual senjata mereka kepada siapapun yang mampu membayar. Sebut saja pedagang senjata internasional Victor Bout, Leonid Minin dan Monzer Al Kassar yang telah menjual senjata mereka kepada kelompok kekuatan militer untuk menantang pemerintah. Akar kebangkitan VNSAs juga bisa berawal dari kota di sebuah negara yang tidak terkontrol (*ungovernable*). Norton (2003) dalam tulisannya memakai istilah “*Feral Cities*” atau kota-kota liar. Indikator-indikator yang dijabarkan Norton hingga sebuah kota bisa menjadi kota liar adalah ketiadaan layanan sosial, tidak adanya jaring pengaman sosial, lahirnya individu penjahat atau kelompok perlawanan atau klan suku yang memiliki wilayah kekuasaan di bagian-bagian kota hingga memiliki jaringan di kota negara lain, korupsi yang sangat masif, kekerasan dan tingkat penyakit yang tinggi, serta polusi yang parah.

Aktor individu yang termasuk dalam pelaku kejahatan internasional adalah pemimpin teroris ISIS bernama Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi yang kemudian terbunuh dalam bentrokan di wilayah barat laut Suriah, kemudian penggantinya adalah Abi Hafs al-Hashimi al-Qurashi. Melalui konsep Jihad Global, ISIS meyakinkan calon pengikutnya dengan doktrin kuat dari pemimpinnya. Selain itu, individu sangat berperan dalam pengambilan keputusan suatu kondisi negara yang sedang mengalami peperangan. Kondisi tersebut dialami oleh mantan pemimpin kelompok militan Darfur, Sudan. Ia digugat telah melakukan pelanggaran HAM berat yang secara sistematis melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap

kemanusiaan (VOA Indonesia: 2022). *International Court Justice* (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan dan proses peradilan masih terus berjalan. Dalam proses peradilan pelaku kejahatan individu diatur dalam wilayah yuridiksi ICC. ICC hanya menghukum kejahatan yang dilakukan individu (icc-pi.int/cases).

5.4 Kesimpulan

Aktor dalam hubungan internasional tidak hanya berfokus pada perilaku negara. Seringkali negara tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah global, sehingga ketergantungan satu sama lain dengan keterlibatan aktor non-negara menjadi suatu keharusan. Di era globalisasi hadirnya aktor individu mampu membangun interaksi dan menjalin kerjasama lintas batas negara. Salah satunya kehadiran aktor individu memberikan alternatif penyelesaian dari berbagai polemik global yang ada. Individu sebagai aktor dalam hubungan internasional secara konseptual dimaknai sebagai seseorang yang mampu melakukan aksinya dalam arena internasional dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Di dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut, seorang individu tidak bisa benar-benar terlepas dari pengaruh orang lain, hal inilah yang mempertegas bahwa tindakan individu akan dipengaruhi oleh bias penilaian dirinya sendiri dan pengaruh institusi dimana ia berada atau bernaung, dengan kata lain individu cenderung sulit melakukannya secara otonom. Aktor individu sendiri terbagi menjadi aktor individu dalam pemerintahan dan aktor individu non pemerintah.

Secara garis besar, individu sebagai aktor dalam hubungan internasional tidak bisa terlepas dari pemahaman ide yang digaungkan oleh kaum liberal yang meyakini kebebasan individu harus dijamin oleh negara dan hal ini telah memberikan kesempatan individu dalam mengembangkan dirinya dalam aspek ekonomi dan pemberdayaan dirinya. Hadirnya peranan aktor individu dalam hubungan internasional menyoroti beberapa hal penting yang melatarbelakanginya. Faktor yang melatarbelakanginya adalah globalisasi dimana memberikan kemudahan interaksi individu di berbagai negara dengan salah satunya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Terutama media sosial yang saat ini mampu membangun jejaring global individu secara lebih luas dan cepat. Di sisi lain, kekuatan individu yang memiliki pengaruh besar di masyarakat secara global telah membantu beragam program kerja dunia. Sebut saja kehadiran artis yang memiliki banyak penggemar telah mampu melakukan praktik diplomasi digital sebagai upaya mengkampanyekan program keberlanjutan atau SDGs. Namun kelemahan juga ditemukan dari peran individu ini dalam hubungan internasional. Misalnya saja pelaku kejahatan lintas batas negara hingga aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang individu. Sehingga kehadiran aktor individu dalam hubungan internasional memiliki dua peran sekaligus, yakni peran yang membantu menyelesaikan berbagai masalah global dan peran aktor individu yang muncul namun menciptakan masalah dalam hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Back, K. W., & Gergen, K. J. (1963). Individual Orientations, Public Opinion and the Study of International Relations. *Social Problems*, **11(1)**, 77–87. <https://doi.org/10.2307/798808>
- Bae, Y. J. (2003). Information Technology and the Empowerment of New Actors in International Relations. *Journal of International and Area Studies*, **10(2)**, 79–92. <http://www.jstor.org/stable/43107081>
- Brown, Chris. (2005). *Understanding International Relations*. Palgrave Macmillan. Hal. 1-4
- Bishop, M. (2013). Philanthrocapitalism: Solving Public Problems through Private Means. *Social Research*, **80(2)**, 473–490. <http://www.jstor.org/stable/24385612>
- CNN, 28 November 2023. Elon Musks Foreign Affairs. Diakses melalui <https://edition.cnn.com/2023/11/28/tech/elon-musks-foreign-affairs-netanyahu-antisemitism/index.html>
- CNN Indonesia. Menengok Jejak Lembaga Filantropi Bill Gates. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210504101320-134-638199/menengok-jejak-lembaga-filantropi-bill-gates>
- Evendi, Yusuf. Haryanto, Agus. 2021. *Peran Aktor Non-Pemerintah dalam Diplomasi Stakeholders: Studi Kasus Aktivist Lingkungan Greta Thunberd Tahun 2018-2019*. Senaspolhi 3 Fisip Unwahas. Diakses melalui <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/viewFile/5649/3847>

- Doyle, M. W. (1986). Liberalism and World Politics. *The American Political Science Review*, 80(4), 1151–1169. <https://doi.org/10.2307/1960861>
- Fauzi. Muhammad. Gunawan, Agus. 2022. *Global Philantropy Shaping Welfare States: Islamic and Jewsuah Perspectives*. Vol. 6 Nomor 2. Jurnal Sains Sosial dan Humaniora
- Gildea, James Ross. 2020. Psychology and aggregation in International Relations. *European Journal of International Relations*. SAGE. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354066120938830>
- Grozdanovska, Vesna. Jankulovski, Nikolche. Bojkovska, Katerina. (2017). *International Business and Trade*. Volume 31 No. 3. *International Journal of Sciences: Basis and Applied Research*. <https://core.ac.uk/reader/249335660>
- Hermawan P, Yulius. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Penerbit Graha Ilmu. Hal. 7-16
- International Criminal Court. Diakses melalui <https://www.icc-cpi.int/cases>
- Jones, R. J. B. (1981). International Political Economy: Problems and Issues: Part I. *Review of International Studies*, 7(4), 245–260. <http://www.jstor.org/stable/20096927>
- KELMAN, H. C. (1970). The Role of the Individual in International Relations: Some Conceptual and Methodological Considerations. *Journal of International Affairs*, 24(1), 1–17. <http://www.jstor.org/stable/24356661>
- Muhammad, Ali. 2019. *Dasar-Dasar Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 169-190

- Nauffts, Mitch 2012. Diakses melalui <https://philanthropynewsdigest.org/features/newsmakers/mario-morino-venture-philanthropy-partners>
- Norton, Richard J. (2003) "Feral Cities," *Naval War College Review*: Vol. 56: No. 4, Article 8. Available at: <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol56/iss4/8>
- Osée, U. , Bijoux, B. , Didier, S. and François, E. (2019) Individuals and International Public Opinion as an Actor in International Relations. *Open Journal of Social Sciences*, 7, 478-490. doi: 10.4236/jss.2019.73039. Accessed in <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=91513>
- Rosyidin. Muhammad. 2022. *Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatik*. Volume 1. Nomor 2 134-144. Jurnal Indonesian Perspective
- Subagyo, Agus. 2019. Media Sosial dalam Hubungan Internasional. Jurnal Dinamika Global. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/337114807_MEDIA_SOSIAL_DALAM_HUBUNGAN_INTERNASIONAL
- Teftedarija, A., Bakker, E., Briscoe, I., Homan, K., Joseph, R., Landman, L., & Verkoren, W. (2013). Non-state actors and individuals. In J. Rood & R. Dinnissen (Eds.), *An uncertain world: Clingendael 2013 Strategic Monitor* (pp. 87–106). Clingendael Institute. <http://www.jstor.org/stable/resrep05391.8>
- VOA Indonesia. 2022. Pemimpin Milisi Darfur akan diadili di Pengadilan Kejahatan Internasional. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-milisi-darfur-akan-diadili-di-pengadilan-kejahatan-internasional/6515616.html>

-
- Website United Nations <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>
- Wellman, C. (2000). Solidarity, the Individual and Human Rights. *Human Rights Quarterly*, 22(3), 639–657. <http://www.jstor.org/stable/4489297>
- Wells., L. T. (1971). The Multinational Business Enterprise: What Kind of International Organization? *International Organization*, 25(3), 447–464. <http://www.jstor.org/stable/2706050>
- Williams, Phil. 2008. *Violent Non-State Actors and National And International Security*. Penerbit: Swiss Federal Institute of Technology Zurich. Diakses melalui <https://www.files.ethz.ch/isn/93880/vnsas.pdf>

BAB 6

KEAMANAN DAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL

Oleh Anastazia Niatri Wattimena

6.1 Pendahuluan

Studi keamanan dan perdamaian merupakan salah satu percabangan dalam studi hubungan internasional yang sangat penting untuk dijabarkan. Ilmu hubungan internasional mempelajari tidak hanya hubungan perpolitikan dan diplomasi antar negara namun segala fenomena dan isu yang melingkupinya. Hubungan yang terjalin antara negara akan selalu menemui hambatan, masalah bahkan ancaman. Ancaman yang dihadapi baik negara maupun warga negara dianalisis dalam studi keamanan sedangkan metode penanganan konflik dan perbaikan hubungan antar negara yang berkonflik dibahas dalam studi perdamaian. Keduanya merupakan bagian dari hubungan internasional yang saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

6.2 Studi Keamanan dalam Hubungan Internasional

6.2.1 Defenisi Studi Keamanan

Perbincangan tentang studi keamanan dimulai saat perdebatan tentang ancaman internal dan eksternal terhadap negara mulai menyeruak setelah Perang Dunia II. Studi keamanan internasional disusun berdasarkan 4 pertanyaan dasar yang terdiri atas, apakah negara harus diberikan hak istimewa sebagai objek utama dalam studi keamanan. Sedangkan keamanan adalah tentang

mengamankan segalanya yang membutuhkan keamanan mulai dari negara, individu, kelompok etnis, lingkungan dan bahkan planet. Mengamankan negara sama dengan atau sama saja berarti mengamankan entitas apapun tanpa terkecuali dalam negara termasuk lingkungan dan individu. Pertanyaan kedua, apakah ancaman internal dan eksternal harus dimasukkan dalam studi keamanan karena studi keamanan sangat berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Keamanan juga berkaitan erat dengan perbatasan teritori dan keamanan nasional. Pertanyaan ketiga, apakah fokus studi keamanan harus diperluas tidak hanya tentang sektor militer dan penggunaan kekerasan. Pertanyaan keempat, apakah kita dapat melihat keamanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ancaman, bahaya, dan keterdesakan (Buzan & Hansen, 2009).

Keamanan adalah isu khusus dari politik, dan semua isu keamanan masuk dalam kategori politik. Sedangkan tidak semua isu politik masuk sebagai fokus studi keamanan. Isu dalam studi keamanan selalu berkembang dan meluas cakupannya karena sangat dipengaruhi oleh interaksi manusia yang memiliki kecenderungan untuk memicu konflik (Kolodziej, 2005). Christopher Rahman menyimpulkan bahwa *security* menjadi sub disiplin dan berkembang menjadi *security studies* berlangsung sejak tahun 1980an saat perang dingin memuncak. Menurut Barry Buzan konsep keamanan dapat dipahami melalui pengintegrasian antara tingkat analisis dan dimensi keamanan. Lebih lanjut Barry Buzan menjelaskan pembagian atas kedua kategori. Tingkat analisis dibagi ke dalam tingkat individu, nasional, dan internasional. Sedangkan dimensi keamanan terdiri dari keamanan militer, politik, sosial, ekonomi juga lingkungan (Setiawan, 2020). Keamanan berarti bebas dari ancaman baik di level negara maupun level individu. Keamanan juga berarti bebas dari ketakutan dan bahaya.

Studi keamanan mempelajari bukan hanya apa yang harus dilindungi / diamankan lebih jauh dari itu juga menganalisis apa yang dimaksud dengan ancaman. Apakah segala sesuatu yang mengancam seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya adalah bentuk ancaman dalam kategori studi keamanan internasional ? ataukah yang dimaksud dengan ancaman lebih besar dari ancaman terhadap individu ? mengingat objek utama dari studi keamanan adalah negara. Menurut Buzan (1998) ancaman dalam studi keamanan internasional memiliki karakteristiknya sendiri. Dalam politik, yang dimaksud dengan ancaman adalah tindakan yang membahayakan kedaulatan negara atau ideologi negara. Dalam sektor militer, negara merupakan objek utama *security* meskipun tidak menutup kemungkinan objek utama *security* juga adalah agen politik lain. Kekuatan militer digunakan sebagai sarana pertahanan negara dari ancaman namun tidak menutup kemungkinan, kekuatan militer digunakan untuk melawan pemerintah yang sedang berkuasa, misalnya dalam kasus kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berjalan (Buzan et al., 1998).

Dalam sektor ekonomi, ancaman cenderung lebih sulit untuk diidentifikasi, secara umum ancaman bagi Perusahaan adalah kebangkrutan dan perubahan aturan / hukum yang berlaku yang menjadikan aktifitas Perusahaan atau perusahaannya illegal. Dalam sektor sosial, objek utama adalah kumpulan entitas dapat berupa bangsa maupun komunitas agama. Dalam sektor lingkungan, objek yang dilindungi juga makin beragam mulai dari spesies langka yang dilindungi. Objeknya dapat juga berupa ekosistem yang dilindungi misalnya kawasan hutan lindung, danau, Sungai,dll. Dapat pula mengenai isu-isu yang cakupannya lebih luas misalnya perlindungan lapisan atmosfer, luar angkasa, dll.

6.2.2. Konsep-Konsep Dalam Studi Keamanan

1. Konstruktivisme Konvensional / *Conventional Constructivism*

Pendekatan yang pertama adalah konstruktivisme konvensional di mana melihat *security* atau keamanan dalam konteks yang sempit. Pendekatan ini masuk sebagai pendekatan yang dikenal dengan *traditional security* / keamanan tradisional. Pendekatan tradisional ini melihat negara sebagai objek pusat dari keamanan di mana isunya berkaitan dengan agresi militer, konflik militer dan pertahanan. Pendekatan konstruktivisme konvensional menjadi pendekatan yang tradisional tidak hanya karena melihat negara dari sisi militer tapi juga karena mengonfirmasi secara substantif dan epistemologi bahwa baik studi keamanan maupun studi hubungan internasional harus didedikasikan untuk menjelaskan perilaku negara.

2. Konstruktivisme Kritis / *Critical Constructivism*

Pendekatan konstruktivisme kritis mulai berkembang pada paruh kedua tahun 1990an. Poin yang membedakan antara konstruktivisme kritis dan konstruktivisme konvensional adalah konstruktivisme kritis menganalisis wacana historis, dan diskursif identitas konstitusi. Inti dari pendekatan konstruktivisme kritis adalah menganalisis aktor lain selain negara namun tetap berfokus pada aspek kekuatan militer (Buzan & Hansen, 2009).

3. Pendekatan *Copenhagen School*

Pendekatan ini memperluas definisi ancaman, yang bisa datang dari berbagai aspek tidak hanya serangan militer. Pendekatan ini juga memperluas objek *security* di level regional atau kawasan. Pendekatan Copenhagen berfokus pada sekuritisasi, dan berpengaruh di negara-negara Skandinavia dan Eropa secara umum.

4. Pendekatan *Feminist Security*

Pendekatan ini melihat Perempuan dengan persoalan keamanan tersendiri yang jarang menjadi fokus penyelesaian. Perempuan juga dinilai dapat memberikan kontribusi pada kebijakan keamanan dan pertahanan baik melalui cara-cara militer maupun non militer. Pendekatan ini berkembang di pertengahan tahun 1980an khususnya di negara-negara seperti Amerika dan Inggris.

5. Pendekatan *Post-Colonial*

Pendekatan ini menyoroti fokus studi keamanan internasional yang sangat berpusat pada negara-negara Barat (*western centrism*). Pendekatan *post-colonial* ini melihat bahwa ada ketimpangan besar antara negara-negara Barat dan negara dunia ketiga, yang mana negara dunia ketiga mengalami keterlambatan perkembangan khususnya bidang ekonomi. Ketidakseimbangan posisi ini dilatarbelakangi oleh peristiwa sejarah yakni kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Ketimpangan ini bukan hanya terjadi dalam bidang ekonomi, melainkan politik, sosial dan khususnya bidang keamanan.

6. Pendekatan *Post-Structuralist*

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa baik kedaulatan negara maupun keamanan merupakan produk dari praktek-praktek politik. Pendekatan ini awalnya berkembang di negara-negara Amerika Utara di pertengahan tahun 1980an dan kemudian berkembang semakin kuat di tahun 1990an di wilayah Eropa.

7. Pendekatan *Peace Research*

Pendekatan ini berupaya untuk menghentikan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, yang sekaligus mengkritik penggunaan senjata nuklir.

8. Pendekatan *Critical Security*

Pendekatan *critical security* memiliki persamaan dengan pendekatan *human security* di mana keduanya sama-sama menempatkan *people* masyarakat sebagai pusat fokusnya. Pendekatan *critical security* ini sering juga didefenisikan sebagai pemikiran Frankfurt. Secara konsep, *critical security* sangat mengedepankan kepentingan Masyarakat untuk dilindungi dari ancaman. Negara tidak selalu dapat diandalkan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakatnya.

9. Pendekatan (*Neo*) *Realism*

Pendekatan ini menjadi dasar dalam pemikiran-pemikiran seperti *nuclear deterrence*, kontrol senjata, dan perlombaan senjata.

10. Pendekatan *Human Security*

Pendekatan *post-colonial* menciptakan perhatian khusus pada negara-negara non barat dengan spektrum isu yang lebih mengarah pada struktur ekonomi dan isu-isu pembangunan. Perluasan fokus studi keamanan ini sangat dipengaruhi oleh United Nations Development Programs yang mendeklarasikan konsep *human security* atau keamanan manusia di tahun 1994. Defenisi keamanan atau *security* yang awalnya sangat erat berkaitan dengan pertahanan perbatasan teritorial didorong untuk memperluas cakupan fokusnya. Pertahanan demi kepentingan nasional harus mencakup pencegahan kemiskinan dan keterbelakangan pertumbuhan ekonomi. Objek utama *security* yakni yang awalnya sangat terpusat pada negara kini mengalami perluasan objek menjadi ke manusia sebagai individu dan warga negara. *Human security* fokus pada bagaimana manusia dapat secara bebas memilih dan mengaktualisasikan pilihannya dan

keleluasaan akses terhadap kesempatan-kesempatan yang ada di lingkungan sosialnya. Serta apakah setiap warga negara dapat hidup dalam suasana tanpa konflik dan penuh perdamaian. Perluasan konsep keamanan tentu berdampak pada perluasan tipe dan jenis ancaman yang ada. Ketersediaan makanan, kesempatan ekonomi, migrasi, pertumbuhan populasi perdagangan obat-obatan terlarang bahkan isu terorisme turut menjadi tipe-tipe ancaman terhadap keamanan (Buzan & Hansen, 2009).

Dalam *Human Development Report* tahun 1994 menyatakan bahwa perlunya memperluas konsep keamanan terutama setelah Perang Dingin. Awalnya negara-negara hanya berfokus pada keamanan dan pertahanan negara kemudian fokus tersebut berkembang untuk berfokus pada keselamatan individu / masyarakat biasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan laporan tersebut ada empat karakteristik dasar dalam *human security* yakni ; (1) isunya bersifat universal, berkaitan dengan semua orang dan terjadi di berbagai tempat, (2) saling ketergantungan yang berarti isu yang terjadi pada satu atau Sebagian orang juga memberikan dampak pada orang lain di tempat lain. (3) lebih mudah untuk dicegah daripada diselesaikan kemudian, (4) berpusat pada manusia.

Human security dapat didefinisikan sebagai keselamatan dari berbagai ancaman kronis misalnya kelaparan, penyakit, dan represi dari segala sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat tujuh kategori *human security* antara lain ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, perumahan, komunitas, dan politik (Von Tigerstrom, 2007). Keamanan ekonomi berarti memiliki pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Keamanan pangan berarti individu mampu memenuhi kebutuhan pangan dasarnya dan

terhindar dari ancaman kelaparan. Keamanan dalam bidang Kesehatan berarti terhindar dari ancaman kematian yang sifatnya dapat dicegah. Ancaman dalam bidang lingkungan termasuk penurunan kualitas ekosistem lokal, ketersediaan air, krisis udara bersih, dsb. Keamanan personal atau individu berarti aman dari kekerasan fisik dalam berbagai bentuk. Keamanan politik di sini berarti perlindungan dari represi politik yang dilakukan oleh negara.

Dalam tulisannya Buzan menekankan bahwa konsep *human security* ini tetap mengandung pro dan kontra. Sebagian ahli berpandangan bahwa objek *human security* yang terlalu luas akhirnya mencampurkan antara *security* dan *human rights* atau hak asasi manusia. Meski berhadapan dengan berbagai pro dan kontra, konsep *human security* terus bertahan dan menjadi pedoman perlindungan pada individu di berbagai negara.

6.2.2 Keamanan Non-Traditional (*Non Traditional Security*)

Keamanan non tradisional merupakan konsep keamanan yang menitikberatkan pada ancaman dan bahaya di luar serangan militer. Ancaman non militer yang dimaksud di sini dapat berupa ancaman terhadap perdagangan manusia atau *human trafficking*, perdagangan obat-obatan terlarang atau *drug trafficking*, penyelundupan manusia, isu pembajakan kapal-kapal, isu migrasi, dsb (Anthony et al., 2016). Penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun konsep keamanan non tradisional tidak mencakup pertahanan militer atau isu militer antar negara namun tidak menutup kemungkinan bagi isu-isu keamanan non tradisional (seperti yang disebutkan di atas) memiliki potensi untuk berujung pada konflik militer antar negara terutama apabila berkaitan dengan sumber daya yang esensial misalnya minyak

(Caballero-Anthony, 2016). Keamanan non tradisional menjadikan baik individu maupun negara sebagai dua objek penting di dalamnya. Hal ini tentu berbeda dengan konsep *human security* yang menjadikan individu sebagai objek utama. *Non traditional security* menganalisis isu keamanan berdasarkan sudut pandang kebutuhan dan hak, berbeda dengan *traditional security* yang menganalisis isu dengan menitikberatkan pada pertimbangan militer.

6.3 Perdamaian Internasional

6.3.1 Defenisi Perdamaian Internasional

Menurut *Merriam Webster Dictionary* perdamaian atau Peace memiliki makna sebagai berikut ; keadaan yang tenang dan tentram antara lain bebas dari kekacauan sosial, keadaan aman yang dihasilkan dari aturan dan hukum positif atau kebiasaan yang berlaku. Perdamaian juga berarti bebas dari opresi atau jenis tekanan apapun baik fisik maupun mental. Adanya keharmonisan dalam hubungan, adanya kerukunan antar negara, adanya persetujuan dan kesepahaman untuk menghentikan perang antara pihak-pihak yang bertikai. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa perdamaian atau peace dapat diartikan sebagai tidak adanya konflik, dan terjalannya harmoni diantara perorangan, tidak adanya perang adalah perdamaian, sosial kontrak diantara dua belah pihak juga bagian dari perdamaian (Mustafa et al., 2023). Peace atau perdamaian adalah *the absence of war*, ketiadaan perang, perdamaian adalah ketiadaan kekerasan menurut penjelasan Charles Webel dalam buku *Handbook of Peace and Conflict* (2007). Perdamaian juga berarti sarana transformasi etika pribadi dan kolektif serta aspirasi untuk membersihkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh manusia (menurut Hobbessian).

6.3.2 Proses Peacebuilding

Dalam bukunya *Transcend and Transformation*, Galtung berpendapat bahwa konflik merupakan sebuah keniscayaan yang pasti terjadi namun dapat kita cegah dan dapat diminimalisir eskalasinya (Galtung, 2004). Konflik selalu saling berkesinambungan dengan perdamaian karena dalam setiap konflik yang sudah terlanjur terjadi, tentu damai merupakan jalan keluar yang terbaik. Dalam proses pembentukan perdamaian dikenal istilah *peacebuilding*. *Peacebuilding* merupakan keseluruhan aktifitas yang menggambarkan proses jangka panjang dengan tujuan untuk mencegah pecahnya konflik baik yang melibatkan kekerasan maupun tidak, dan untuk melakukan transformasi konflik bersenjata ke dalam cara-cara yang lebih damai dan konstruktif dalam mengelola konflik (Paffenholz & Spurk, 2006). Dalam agenda perdamaian PBB tahun 1992, dijelaskan bahwa *peacebuilding* merupakan proses untuk mencegah konflik muncul lagi dan mengarah pada penggunaan kekerasan dan penggunaan senjata setelah perang, proses *peacebuilding* dapat berlangsung selama 1-3 tahun, dengan maksimal waktu 5 tahun. Proses *peacebuilding* akan berakhir setelah objek yang berkonflik, misalnya dalam hal ini negara telah mendapatkan rekognisi internasional bahwa negara tersebut dapat menjamin keselamatan dan perlindungan minimal terhadap warga negaranya pasca perang atau konflik bersenjata.

Ada tiga fase utama dalam *peacebuilding* antara lain, (1) fase pencegahan, yang mana merupakan fase pencegahan terjadinya konflik bersenjata. (2) fase manajemen konflik atau *peace making*, yang mana merupakan fase untuk mengakhiri konflik bersenjata dan melakukan perjanjian / kesepakatan damai. (3) fase

peacebuilding pasca konflik, yang mana fase ini berarti fase pasca kesepakatan damai. Fase pasca konflik juga terbagi atas dua yakni, fase langsung pasca konflik bersenjata berlangsung sekitar 1-5 tahun, dan fase setelahnya yakni 5-10 tahun. Periode yang cukup lama dalam *peacebuilding* merupakan hasil dari riset terhadap beberapa negara konflik yang setelah konflik bersenjata dalam 1-5 tahun awal masih ada 44 % kemungkinan gejala konflik masih menyala dan belum benar-benar hilang sisa-sisa konfliknya.

6.3.3 Sejarah Peace Building

Sejak akhir abad ke-19, institusi internasional dan hukum internasional mulai memberikan perhatian pada bagaimana mencegah konflik antar negara. Proses ini dimulai dengan konferensi perdamaian di Den Hag tahun 1898, dilanjutkan dengan berubahnya Liga Bangsa-Bangsa menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di akhir Perang Dunia II. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia melalui proses-proses seperti mediasi, fasilitasi, dan arbitrase antar negara (Paffenholz & Spurk, 2006). Di tahun 1960an penelitian-penelitian tentang perdamaian kemudian di jadikan sebagai salah satu disiplin ilmu. Studi perdamaian awalnya hanya membahas seputar analisis dan bagaimana manajemen konflik. Sedangkan penelitian-penelitian tentang perdamaian di wilayah Eropa dan Amerika sudah mulai menganalisis secara luas tentang sebab-sebab konflik terjadi, mulai dari sebab aspek ekonomi, politik, global, hingga ke sebab-sebab seperti agama, budaya dan aspek sosial lainnya. Selama Perang Dunia, studi perdamaian berfokus pada pencegahan perang nuklir antara negara-negara *superpower* (Paffenholz & Spurk, 2006).

Tahun 1992, akhir Perang Dingin PBB melaksanakan agenda perdamaannya. Setelah itu, terjadi pengalihan fokus yang semula pada konflik bersenjata antar negara kemudian berubah menjadi konflik bersenjata yang terjadi di dalam negara. Di saat yang bersamaan terjadi peningkatan konflik bersenjata hingga 80-90 %, di tahun 1990an aktifitas *peacebuilding* terus meningkat hingga mendorong institusi internasional untuk beradaptasi dengan tantangan baru yakni manajemen konflik dan perdamaian dalam konflik bersenjata. Istilah *peacebuilding* mulai diperkenalkan secara resmi dalam agenda perdamaian PBB tahun 1992 agenda for peace, di mana merumuskan cara baru dalam manajemen konflik bersenjata internasional. Di tahun 1990an juga beberapa konflik bersenjata seperti konflik-konflik di El-Salvador, Namibia, Kamboja mulai menemukan titik terang seiring berkembangnya proses *peacebuilding*.

6.3.4 Teori dan Pendekatan dalam Peacebuilding

1. Pendekatan *Conflict Management*

Pendekatan ini memiliki beberapa cara manajemen konflik diantara *outcome oriented-approach* yang menginisiasi penyelesaian konflik dengan menggunakan berbagai inisiatif diploamsi. Inisiatif diplomasi yang dimaksudkan di sini dilakukan oleh berbagai aktor eksternal (diplomat eksternal) dari organisasi bilateral atau organisasi multilateral. Pendekatan ini biasa digunakan untuk tujuan manajemen konflik jangka pendek, cara perta. Contoh kasus yang merujuk pada pada pendekatan ini antara lain, Camp David Agreement, dan kesepakatan damai Sudan. Manajemen konflik cara kedua dalam pendekatan ini disebut sebagai *Power Mediation* yang mana melibatkan aktor dengan kekuatan atau power lebih

besar, aktor eksternal dalam hal ini. Cara ini biasanya menggunakan insentif finansial atau ancaman militer dalam prosesnya. Contoh kasus mediasi konflik Bosnia di tahun 1995, yang mana pihak ketiga Amerika Serikat bersepakat untuk mendukung inisiasi damai antara Bosnia dan Serbia dan mengancam akan melakukan pemboman pada fasilitas militer kedua negara apabila kesepakatan damai antara keduanya tidak segera dilakukan. Kritik terhadap pendekatan ini adalah aktor eksternal memiliki kecenderungan untuk berpihak pada salah satu pihak yang bertikai dan dikhawatirkan tidak netral (Paffenholz & Spurk, 2006).

2. Pendekatan *Conflict Resolution*

Berbeda dengan pendekatan *conflict management* di mana melibatkan aktor eksternal dalam mediasi konflik. Pendekatan ini lebih berfokus pada menyelesaikan akar persoalan atau penyebab konflik dan berupaya untuk memperbaiki hubungan dari kedua pihak yang bertikai. Perbaikan hubungan antara pihak yang bertikai tidak hanya dilakukan pada top leader atau perwakilan kedua negara namun harus melibatkan keseluruhan masyarakat dari negara-negara yang bertikai. Pendekatan ini lahir dari sebuah penelitian akademik di tahun 1970an, dengan mengadopsi strategi resolusi konflik sosio-psikologi antar manusia. Awalnya, agen-agen perdamaian merupakan akademisi-akademisi dari institusi Barat yang melakukan berbagai workshop resolusi konflik. Tujuan dari workshop ini adalah untuk mengumpulkan individu-individu yang memiliki pengaruh pada pemerintah atau dekat dengan pemerintah dari kedua negara yang bertikai sehingga diharapkan dapat mempengaruhi pemerintahan kedua negara untuk berdamai. Representasi tersebut diharapkan nantinya dapat menginisiasi dan turut membantu dalam

penyelesaian penyebab konflik. Cara ini merupakan resolusi *long-term oriented*. Meski demikian, cara ini tetap mendapatkan kritik karena dinilai memakan waktu terlalu lama untuk menghentikan konflik antara pihak-pihak yang bertikai.

3. Pendekatan *Complementary*

Pendekatan ini menggunakan gabungan strategi dari pendekatan *conflict management* dan *conflict resolution*. Pendekatan ini memiliki tiga strategi atau tahapan yakni, model *contingency* Fisher dan Keashly yang mana mengatur tentang intervensi aktor atau pihak ketiga dalam konflik bersenjata. Intervensi ini dilakukan dalam dua *timing* atau waktu yang berbeda, strategi dalam pendekatan *conflict resolution* dilakukan untuk menurunkan ketegangan konflik, sedangkan strategi *power mediation* akan digunakan saat konflik memburuk. Setelah kesepakatan gencatan senjata atau damai dilakukan, barulah strategi *conflict resolution* diimplementasikan lagi. Kritik pada pendekatan ini adalah adanya banyak campur tangan dari aktor eksternal karena menggunakan kombinasi dari beberapa metode sekaligus.

4. Pemikiran *Conflict Transformation*

Pendekatan ini berdasar pada asumsi bahwa ada konflik-konflik yang memang tidak bisa diselesaikan karena sudah sangat mengakar dan mandarah daging. Oleh sebab itu dibandingkan dengan mencari cara untuk menyelesaikan konflik, pendekatan ini justru berusaha mencari cara untuk mentransformasikan konflik. Transformasi konflik yang dimaksud di sini adalah mengubah konflik bersenjata yang menggunakan kekerasan menjadi konflik yang lebih damai tanpa melibatkan kekerasan. John Paul Lederach (1997)

merupakan orang pertama yang menginisiasi metode transformasi konflik, di mana Lederach melihat perlunya menyelesaikan dilema yang terdapat dalam strategi jangka pendek yang ditawarkan oleh pemikiran *conflict management* dan strategi yang ditawarkan oleh pendekatan *conflict resolution*. Lederach ingin membangun *peacebuilding infrastructure* yang bersifat jangka panjang. Lederach sangat menyarankan untuk memperbaiki dan membangun kembali hubungan pihak-pihak yang bertikai. Fokus pada rekonsiliasi masyarakat di negara-negara yang bertikai, dan menguatkan proses perbaikan hubungan antara masyarakat. Intervensi pihak ketiga diperlukan untuk mendukung dan menguatkan aktor internal, sekaligus mengkordinasikan usaha-usaha damai yang dilakukan oleh aktor eksternal (Lederach, 1997) yang mana harus juga sensitif pada budaya lokal.

6.4 Kesimpulan

Ancaman dalam studi keamanan dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Ancaman dalam sektor politik, akan berbeda dengan ancaman pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Negara tidak hanya berperan sebagai objek utama *security* seperti dalam pendekatan *traditional security*. Objek utama dapat berupa individu, atau organisasi yang diasumsikan dapat menjadi korban atas isu *security* dan menjadi target dari ancaman. Konflik bersenjata yang berkepanjangan membutuhkan metode yang berbeda dalam menciptakan perdamaian. Mediasi dalam proses penyelesaian konflik dapat melibatkan aktor eksternal baik negara lain maupun organisasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, M.-C., Emmers, R., & Acharya, A. (2016). *Non Traditional Security in Asia*. Routledge.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press.
- Buzan, Barry., Wæver, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security : a new framework for analysis*. Lynne Rienner Pub.
- Caballero-Anthony. (2016). Non-Traditional Security Concept, Issues, and Implications on Security Governance. *Georgetown Journal of Asian Affairs*, 3(1), 5-13. <https://dr.ntu.edu.sg>
- Galtung, Johan. (2004). *Transcend and transform : an introduction to conflict work*. Pluto Press in association with Transcend.
- Kolodziej, E. A. (2005). *Security and International Relations*. Cambridge University Press.
- Lederach, J. Paul. (1997). *Building peace : sustainable reconciliation in divided societies*. Third Printing.
- Mustafa, G., Arslan, M., Ahmad, T., Jamshed, U., & Nawaz, S. (2023). Peace: A Conceptual Understanding. *Journal of Positive School Pshycology*, 7(4), 853-863. <http://journalppw.com>
- Paffenholz, T., & Spurk, C. (2006). *Civil Society, Civic Engagement, and Peacebuilding* (36; Social Development Paper, Issue 36).
- Setiawan, A. (2020). *Pengantar Hubungan Internasional*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Von Tigerstrom, B. (2007). *Human security and international law : prospects and problems*. Hart Pub.

BAB 7

EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Oleh Mohamad Rohim

7.1 Pengantar Ekonomi Politik Internasional

Dalam Sub Bab 1 "Pengantar Ekonomi Politik Internasional", kita akan menjelajahi konsep dasar ekonomi politik internasional, melihat sejarah perkembangannya, dan memahami mengapa mempelajari topik ini menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi yang terus berkembang.

7.1.1 Pengertian Dasar Ekonomi Politik Internasional

Pertama, kita akan mendefinisikan konsep dasar ekonomi politik internasional. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan bagaimana keputusan ekonomi tersebut memengaruhi dinamika hubungan internasional.

Dalam memahami kompleksitas hubungan antara politik dan ekonomi di tingkat internasional, konsep ekonomi politik internasional memainkan peran penting. Ekonomi politik internasional mempelajari bagaimana keputusan ekonomi di tingkat nasional dipengaruhi oleh faktor politik, serta bagaimana keputusan tersebut dapat memengaruhi dinamika ekonomi global. Sebagai ilustrasi, Anderson dan Taylor (2019) menjelaskan bahwa, "ekonomi politik internasional mempelajari cara di mana keputusan

ekonomi di satu negara dapat mempengaruhi negara lain, serta bagaimana kebijakan ekonomi global dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari kita" (hal. 27).

Dalam konteks ini, pemahaman yang kuat tentang konsep dasar ekonomi politik internasional menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Sejarah perkembangan studi ini mencatat kontribusi berbagai pemikir dan teori, seperti mercantilisme, liberalisme, dan marxisme, yang membentuk kerangka kerja pemikiran dalam ekonomi politik internasional (Brown, 2017, hal. 45).

Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar ekonomi politik internasional, kita dapat memperluas wawasan kita tentang bagaimana kebijakan ekonomi di suatu negara dapat memiliki dampak global yang signifikan.

Melalui pembahasan ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas hubungan antara politik dan ekonomi di tingkat internasional serta relevansinya dalam konteks globalisasi yang terus berkembang.

Ekonomi politik internasional adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara faktor politik dan ekonomi di tingkat internasional. Hal ini melibatkan analisis terhadap bagaimana kebijakan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh kekuatan politik di dalam negeri dan juga bagaimana keputusan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi negara lain di arena global. Sejarah perkembangannya mencatat bahwa sejak abad ke-17, teori ekonomi politik telah mengalami evolusi signifikan, dari mercantilisme yang menekankan kebijakan proteksionisme hingga liberalisme yang menganjurkan perdagangan bebas sebagai motor pertumbuhan ekonomi global.

Pentingnya memahami ekonomi politik internasional semakin meningkat dalam konteks globalisasi saat ini. Globalisasi telah meningkatkan interdependensi antara negara-negara di dunia, sehingga kebijakan ekonomi suatu negara dapat memiliki dampak yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Hal ini tercermin dalam konsep bahwa ekonomi politik internasional mempelajari bagaimana keputusan ekonomi di satu negara dapat mempengaruhi negara lain, serta bagaimana kebijakan ekonomi global dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu di seluruh dunia.

Salah satu konsep dasar dalam ekonomi politik internasional adalah analisis terhadap hubungan antara kepentingan ekonomi suatu negara dengan kekuatan politiknya. Teori liberalisme, misalnya, menekankan bahwa perdagangan bebas dapat menghasilkan keuntungan bersama bagi negara-negara yang terlibat, sementara teori marxisme menyyoroti konflik kepentingan antara pemilik modal dan pekerja dalam sistem ekonomi kapitalis global.

Konsep dasar lainnya adalah pemahaman tentang bagaimana institusi internasional, seperti IMF dan WTO, memainkan peran penting dalam mengatur sistem ekonomi global. Institusi-institusi ini dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara melalui mekanisme pengawasan dan penegakan aturan internasional. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep dasar ekonomi politik internasional tidak hanya membantu kita memahami dinamika ekonomi global, tetapi juga membantu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan di tingkat internasional.

7.1.2 Sejarah Perkembangan Ekonomi Politik Internasional

Kita akan melihat sejarah perkembangan ekonomi politik internasional. Ini termasuk tahapan-tahapan penting dalam pengembangan studi ini dari masa ke masa, serta kontribusi para pemikir terkemuka dalam membangun teori dan konsep yang menjadi dasar ekonomi politik internasional saat ini.

Sejarah perkembangan ekonomi politik internasional mencerminkan evolusi kompleks dalam pemikiran ekonomi global. Pada awalnya, fokus utamanya adalah pada hubungan ekonomi antar negara, terutama dalam konteks perdagangan dan akumulasi kekayaan nasional. Mercantilisme, yang berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18, menjadi landasan pemikiran ekonomi politik internasional dengan menekankan pentingnya ekspor dan akumulasi emas dan perak sebagai sumber kekuatan negara (O'Brien & Williams, 2016).

Perkembangan selanjutnya terjadi pada abad ke-19 dengan munculnya teori liberalisme ekonomi politik. Tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo menyoroti manfaat perdagangan bebas dan spesialisasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Mereka percaya bahwa pasar bebas akan mengarah pada efisiensi ekonomi yang lebih besar dan pertumbuhan yang berkelanjutan (Baylis et al., 2017).

Pada abad ke-20, teori ekonomi politik internasional semakin kompleks dengan munculnya teori marxisme. Marxisme menyoroti konflik kelas dan ketimpangan ekonomi sebagai akibat dari kapitalisme global. Pemikiran ini mengkritik sistem kapitalis yang dianggap

menguntungkan pemilik modal sementara merugikan pekerja (Gilpin, 2001).

Selain itu, perkembangan ekonomi politik internasional juga dipengaruhi oleh perubahan politik global, seperti Perang Dunia I dan II, serta pembentukan institusi-institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Institusi-institusi ini memainkan peran penting dalam mengatur hubungan ekonomi internasional dan merespons perubahan ekonomi global (Anderson & Taylor, 2019).

Selama periode pasca-Perang Dunia II, terjadi upaya besar untuk membangun kembali ekonomi global yang hancur. Inisiatif seperti Konferensi Bretton Woods tahun 1944 mendirikan kerangka kerja baru untuk sistem moneter internasional yang mengatur nilai tukar mata uang dan mempromosikan stabilitas ekonomi global (Oatley, 2016).

Selanjutnya, era pasca-perang dingin ditandai dengan globalisasi ekonomi yang semakin meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi secara lebih cepat dan efisien di seluruh dunia. Hal ini memberikan tantangan baru dalam regulasi dan kebijakan ekonomi global (Balaam & Dillman, 2015).

Sejak awal abad ke-21, isu-isu seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi global, dan kerentanan sistem keuangan global menjadi perhatian utama dalam studi ekonomi politik internasional. Perubahan iklim, misalnya, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana ekonomi

global harus beradaptasi dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan (O'Brien & Williams, 2016).

Dalam konteks ini, pemahaman yang baik tentang sejarah perkembangan ekonomi politik internasional menjadi penting untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap perubahan ekonomi dan politik global. Perkembangan teori dan konsep dalam ekonomi politik internasional memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis dinamika hubungan ekonomi global saat ini (Baylis et al., 2017).

Dengan melihat sejarah perkembangannya, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan tantangan dalam mengelola ekonomi global. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan teori ekonomi politik internasional, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang cepat dan kompleks (Gilpin, 2001).

7.1.3 Pendekatan dan metode dalam studi ekonomi politik internasional

Pendekatan dan metode ini sangat penting dalam memahami dinamika kompleks dalam hubungan ekonomi antar negara dan kebijakan ekonomi global.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam studi ekonomi politik internasional adalah pendekatan realis. Dalam pendekatan ini, negara dianggap sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan keamanan. Buku "Theories of International Relations" oleh Scott Burchill dan rekan-rekan (2017) memberikan gambaran yang baik

tentang pendekatan realis dalam konteks ekonomi politik internasional (Burchill et al., 2017).

Selain pendekatan realis, pendekatan liberal juga sering digunakan dalam studi ekonomi politik internasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama internasional, perdagangan bebas, dan institusi global dalam mencapai kesejahteraan ekonomi global. Buku "International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth" oleh Jeffrey A. Frieden dan David A. Lake (2017) memberikan wawasan mendalam tentang pendekatan liberal dalam konteks ekonomi politik internasional (Frieden & Lake, 2017).

Selain pendekatan teoretis, berbagai metode penelitian juga digunakan dalam studi ekonomi politik internasional. Metode kuantitatif, seperti analisis statistik dan model matematika, sering digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan ekonomi antar negara. Sementara itu, metode kualitatif, seperti studi kasus dan analisis teks, digunakan untuk memahami konteks historis dan politik dari kebijakan ekonomi (Creswell, 2014).

Pentingnya pendekatan dan metode dalam studi ekonomi politik internasional tidak hanya terbatas pada pemahaman teoretis, tetapi juga dalam aplikasi praktis dalam analisis kebijakan. Buku "Methods of Policy Analysis: Creating, Deploying, and Assessing Theories of Change" oleh Lawrence R. Jones (2019) memberikan wawasan tentang penggunaan metode analisis kebijakan dalam konteks ekonomi politik internasional (Jones, 2019).

Meskipun terdapat berbagai pendekatan dan metode yang digunakan dalam studi ekonomi politik internasional,

penting untuk diingat bahwa tidak ada satu pendekatan atau metode yang sempurna. Setiap pendekatan dan metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan pendekatan dan metode harus didasarkan pada tujuan penelitian dan konteks spesifik (Creswell, 2014).

7.1.4 Pentingnya Memahami Ekonomi Politik Internasional

Mengapa mempelajari ekonomi politik internasional menjadi semakin penting? Dalam era globalisasi, keputusan ekonomi di satu negara dapat memiliki dampak signifikan pada negara lain. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang ekonomi politik internasional dapat membantu kita dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap perubahan ekonomi global yang cepat.

Dengan demikian, Sub Bab 1 ini akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami konsep-konsep dasar dalam ekonomi politik internasional dan menunjukkan relevansinya dalam konteks dunia yang terus berubah dan saling terkait secara global. Pentingnya memahami ekonomi politik internasional tidak hanya relevan bagi para pembuat kebijakan dan akademisi, tetapi juga bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Studi ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi di satu negara dapat mempengaruhi negara lain, serta bagaimana kebijakan ekonomi global dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Dalam Sub Bab ini, kita akan mengeksplorasi pengertian dasar ekonomi politik internasional, melihat sejarah

perkembangannya, dan membahas mengapa mempelajari topik ini menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi yang terus berkembang.

Dengan memahami dasar-dasar ekonomi politik internasional, kita dapat memperluas wawasan kita tentang dinamika global dan menjadi lebih terinformasi dalam mengikuti perkembangan ekonomi dan politik di tingkat internasional.

Melalui pemahaman ini, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam merespons perubahan ekonomi global yang cepat dan kompleks. Studi ekonomi politik internasional juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana keputusan ekonomi di satu negara dapat memiliki dampak yang signifikan pada negara lain, serta bagaimana kebijakan ekonomi global dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang ekonomi politik internasional dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks (Anderson & Taylor, 2019).

Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, penting bagi kita untuk terus memperdalam pemahaman kita tentang ekonomi politik internasional. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar dan dinamika hubungan ekonomi global, kita dapat menjadi lebih siap dalam menghadapi perubahan ekonomi dan politik yang terjadi di seluruh dunia. Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan menggali

pengetahuan baru dalam studi ekonomi politik internasional (Brown, 2017).

Dengan memahami hubungan antara politik dan ekonomi di tingkat internasional, kita dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang ekonomi politik internasional tidak hanya penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami peran mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi global (Oatley, 2016).

7.2 Teori-teori dalam Ekonomi Politik Internasional

Dalam Sub Bab 2 "Teori-teori dalam Ekonomi Politik Internasional", kita akan menjelajahi beberapa teori utama yang telah membentuk kerangka kerja pemikiran dalam studi ekonomi politik internasional. Teori-teori ini membantu kita memahami bagaimana kebijakan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh faktor politik dan bagaimana keputusan ekonomi tersebut memengaruhi hubungan internasional.

7.2.1 Mercantilisme

Mercantilisme adalah teori ekonomi politik yang dominan pada abad ke-16 hingga ke-18, terutama di Eropa Barat. Teori ini menekankan pentingnya akumulasi kekayaan nasional, terutama emas dan perak, sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Menurut mercantilis, kekayaan suatu negara dapat diukur dari jumlah logam mulia yang dimilikinya. Pandangan ini tercermin dalam

kebijakan proteksionisme yang dianut oleh banyak negara mercantilis, yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan membatasi impor guna menciptakan surplus perdagangan (Gilpin, 2001).

Mercantilisme juga mempengaruhi pemikiran politik dan militer pada masanya. Penguatan kekuatan ekonomi dianggap sebagai prasyarat untuk kekuatan politik dan militer yang kuat. Ide-ide mercantilisme mendukung pembentukan dan ekspansi kekaisaran kolonial, di mana koloni dianggap sebagai sumber daya ekonomi yang penting bagi metropolis. Konsepsi kebijakan ekonomi dalam mercantilisme terutama berpusat pada ide-ide keamanan dan kekuatan negara (Smith, 1999).

Buku "The Political Economy of International Relations" oleh Robert Gilpin (2001) memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan mercantilis terhadap ekonomi politik internasional. Gilpin menjelaskan bagaimana mercantilisme memberikan fondasi bagi pengembangan kapitalisme, di mana keuntungan ekonomi negara dianggap lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan negara-negara mercantilis cenderung mengadopsi kebijakan proteksionisme untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional (Gilpin, 2001).

Dalam konteks sejarah, mercantilisme memainkan peran penting dalam pembentukan sistem ekonomi global. Pandangan mercantilis yang menekankan kebutuhan akan akumulasi kekayaan nasional menjadi salah satu faktor pendorong di balik penjelajahan Eropa dan pendirian koloni

di berbagai belahan dunia. Meskipun telah banyak dikritik oleh teori-teori ekonomi politik lainnya, mercantilisme tetap menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan ekonomi politik internasional (Smith, 1999).

Mercantilisme juga memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem ekonomi global modern. Prinsip-prinsip mercantilisme, seperti proteksionisme dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional, masih mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara pada masa kini. Namun, pandangan mercantilis telah mengalami evolusi seiring waktu, dengan negara-negara cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional dalam era globalisasi saat ini (Smith, 1999).

7.2.2 Liberalisme

Liberalisme adalah teori yang muncul pada abad ke-19 yang menekankan pentingnya perdagangan bebas dan spesialisasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Adam Smith dan David Ricardo adalah tokoh-tokoh utama dalam perkembangan teori liberalisme. Mereka percaya bahwa pasar bebas akan mengarah pada efisiensi ekonomi yang lebih besar dan pertumbuhan yang berkelanjutan (Baylis et al., 2017).

Liberalisme adalah salah satu teori utama dalam ekonomi politik internasional yang menekankan pentingnya perdagangan bebas, investasi asing, dan kerja sama internasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Teori ini berkembang pada abad ke-19, terutama

melalui karya-karya ekonomis Adam Smith dan David Ricardo. Liberalisme menyoroti efisiensi pasar dan pentingnya pembagian kerja internasional dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Baylis et al., 2017).

Salah satu aspek utama dari liberalisme adalah teori perdagangan bebas, yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat melalui spesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan biaya komparatif terendah (Baylis et al., 2017). Pendukung liberalisme percaya bahwa pasar bebas memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan, yang pada akhirnya akan menghasilkan efisiensi ekonomi yang lebih besar (Smith, 1776).

Pemikiran Adam Smith, terutama dalam karyanya "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", merupakan salah satu landasan utama dari liberalisme ekonomi. Smith menguraikan prinsip-prinsip ekonomi pasar yang menekankan pentingnya persaingan bebas, spesialisasi, dan pembagian kerja dalam menciptakan kemakmuran ekonomi (Smith, 1776).

Selain perdagangan bebas, liberalisme juga menekankan pentingnya investasi asing langsung (FDI) dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi global. Investasi asing dianggap dapat membawa teknologi, manajemen, dan sumber daya ke negara-negara berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Cohen, 2008).

Dalam konteks politik internasional, liberalisme menekankan pentingnya kerja sama dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan stabilitas politik global. Pendukung liberalisme percaya bahwa kerja sama internasional dan institusi multilateral seperti PBB dapat menjadi sarana untuk mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian dunia (Baylis et al., 2017).

Meskipun liberalisme telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan perdagangan bebas dan kerja sama internasional, teori ini juga telah dikritik karena kurang memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Kritik juga mengemukakan bahwa pasar bebas dapat menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi yang besar dan ketidakstabilan finansial (Cohen, 2008).

7.2.3 Marxisme

Marxisme adalah teori yang muncul pada abad ke-19 yang menyoroti konflik kelas dan ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh kapitalisme global. Karl Marx, dalam karyanya "Das Kapital", mengkritik sistem kapitalis yang dianggap menguntungkan pemilik modal sementara merugikan pekerja. Marxisme menekankan pentingnya perubahan struktural dalam sistem ekonomi untuk mencapai kesetaraan ekonomi (Oatley, 2016).

Marxisme adalah salah satu teori yang berpengaruh dalam ekonomi politik internasional, terutama dalam mengkritik kapitalisme dan mengusulkan alternatif sistem ekonomi. Marxisme, yang berakar dari karya Karl Marx dan

Friedrich Engels, menekankan konflik kelas sebagai motor utama perubahan dalam sejarah manusia. Dalam karyanya "Manifesto Komunis", Marx dan Engels menggambarkan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi kelas buruh oleh kelas kapitalis (Marx & Engels, 1848).

Marxisme juga menyoroti peran penting dari faktor-faktor ekonomi dalam membentuk hubungan internasional. Menurut Marxisme, negara-negara dianggap sebagai aktor dalam sistem ekonomi global yang didorong oleh kepentingan kelas mereka masing-masing. Teori ini menyangkal pandangan bahwa negara-negara bertindak secara independen dari kepentingan ekonomi, melainkan merupakan instrumen bagi kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi mereka (Cox, 1981).

Dalam konteks ekonomi politik internasional, Marxisme juga memberikan analisis yang kritis terhadap sistem kapitalis global. Marxisme menyoroti ketimpangan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang sebagai akibat dari kapitalisme global. Teori ini menekankan perlunya perubahan struktural dalam sistem ekonomi global untuk mencapai kesetaraan ekonomi (Oatley, 2016).

Buku "Gramsci, Historical Materialism and International Relations" oleh Stephen Gill (1993) membahas pandangan Marxisme terhadap ekonomi politik internasional dengan mendalam. Gill menguraikan konsep-konsep kunci Marxisme, seperti konflik kelas dan eksploitasi, serta mengkaji relevansi teori ini dalam konteks globalisasi dan hegemoni kekuasaan (Gill, 1993).

Meskipun kritis terhadap kapitalisme, Marxisme telah menginspirasi gerakan sosial dan politik di seluruh dunia. Pemikiran Marxisme tentang keadilan sosial dan ekonomi masih relevan dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketimpangan ekonomi global. Namun, kritik terhadap Marxisme menyoroti beberapa kelemahannya, seperti kurangnya perhatian terhadap mekanisme pasar dan inovasi ekonomi (Oatley, 2016).

7.2.4 Teori Lain yang Relevan

Selain mercantilisme, liberalisme, dan marxisme, ada juga teori-teori lain dalam ekonomi politik internasional yang relevan. Contoh teori lainnya termasuk teori dependensi yang menyoroti ketidaksetaraan antara negara-negara maju dan berkembang, serta teori hegemoni yang menekankan peran negara-negara yang dominan dalam menentukan aturan permainan ekonomi global (Anderson & Taylor, 2019).

Dengan memahami berbagai teori dalam ekonomi politik internasional, kita dapat mengidentifikasi berbagai perspektif yang berbeda dalam menjelaskan dinamika hubungan ekonomi global. Setiap teori memiliki pendekatan yang unik dalam menganalisis faktor-faktor politik dan ekonomi yang memengaruhi keputusan ekonomi suatu negara dan dampaknya pada tingkat global.

a. Teori Dependensi

Teori dependensi adalah salah satu teori dalam ekonomi politik internasional yang menyoroti ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang sebagai akibat dari hubungan ekonomi global yang tidak seimbang. Teori ini berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an sebagai kritik terhadap pandangan liberalisme yang optimis tentang dampak positif perdagangan internasional terhadap pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (Frank, 1967).

Salah satu kontributor utama dalam pengembangan teori dependensi adalah Andre Gunder Frank, yang dalam karyanya "Capitalism and Underdevelopment in Latin America" (1967) mengemukakan bahwa negara-negara berkembang tetap terjebak dalam ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara maju. Frank menyoroti bagaimana negara-negara maju memanfaatkan posisi dominan mereka dalam ekonomi global untuk memperkaya diri sendiri sementara mengeksploitasi negara-negara berkembang (Frank, 1967).

Teori dependensi menekankan bahwa hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang cenderung bersifat eksploitatif, di mana negara-negara maju memanfaatkan sumber daya dan pasar negara-negara berkembang untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi yang semakin membesar antara kedua kelompok negara tersebut (Cardoso & Faletto, 1979).

Menurut teori dependensi, untuk keluar dari ketergantungan ekonomi, negara-negara berkembang perlu melakukan transformasi struktural dalam perekonomiannya. Transformasi ini meliputi diversifikasi ekonomi, pengembangan industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Namun, tantangan utama dalam menerapkan teori dependensi adalah resistensi dan intervensi negara-negara maju yang berusaha mempertahankan dominasi ekonominya (Cardoso & Faletto, 1979).

Meskipun teori dependensi telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami ketidaksetaraan ekonomi global, teori ini juga dikritik karena kurang memperhitungkan faktor-faktor internal dalam negara-negara berkembang yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonominya. Kritik juga menyoroti bahwa teori dependensi terlalu deterministik dalam melihat hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang (Evans, 1979).

Teori ini umumnya telah berkurang popularitasnya dalam literatur akademis dalam beberapa dekade terakhir, digantikan oleh pendekatan-pendekatan lain yang lebih aktual.

Teori dependensi, yang pada awalnya sangat berpengaruh dalam analisis ekonomi politik internasional, telah mengalami penurunan popularitas dalam 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah mengubah lanskap ekonomi global. Negara-negara

berkembang yang sebelumnya dianggap terjebak dalam ketergantungan ekonomi mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan diversifikasi sumber daya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa teori dependensi mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan dinamika ekonomi global saat ini (Robinson, 2019).

Selain itu, kritik terhadap teori dependensi telah semakin banyak diungkapkan oleh para akademisi. Beberapa kritik mengatakan bahwa teori dependensi terlalu deterministik dalam melihat hubungan antara negara-negara maju dan berkembang, dan terlalu fokus pada aspek ekonomi sementara mengabaikan faktor-faktor politik dan sosial yang juga mempengaruhi perkembangan ekonomi negara-negara berkembang (Cardoso & Faletto, 1979).

Pergeseran dari teori dependensi ke pendekatan-pendekatan lain dalam ekonomi politik internasional juga dipengaruhi oleh perkembangan teori dan metodologi dalam ilmu sosial secara keseluruhan. Pendekatan-pendekatan baru seperti neoliberalisme, teori institusi, dan analisis politik global telah menjadi lebih dominan dalam literatur akademis, karena mereka menawarkan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami hubungan ekonomi global (Baylis et al., 2017).

Meskipun penurunan popularitas, teori dependensi tetap memiliki relevansi dalam konteks tertentu. Terutama dalam menganalisis ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di banyak negara berkembang, serta dalam memahami dampak dari praktik-praktik ekonomi global

seperti utang luar negeri dan perdagangan yang tidak seimbang (Robinson, 2019).

b. Teori Hegemoni

Teori hegemoni dalam ekonomi politik internasional mengacu pada konsep kekuasaan dominan yang dimiliki oleh satu negara (hegemon) dalam menentukan aturan dan struktur sistem ekonomi global. Teori ini berakar dari karya-karya pemikir seperti Gramsci dan Wallerstein, yang menyoroti peran penting kekuatan dominan dalam membentuk sistem ekonomi global (Cox, 1983).

Salah satu aspek penting dari teori hegemoni adalah konsep "penguasaan" atas sistem ekonomi global. Penguasaan ini dapat dilakukan melalui pengaruh politik, ekonomi, dan militer untuk memastikan bahwa kepentingan negara hegemon terwakili dalam struktur ekonomi global. Teori ini menekankan bahwa sistem ekonomi global sering kali dipengaruhi oleh kebijakan dan kepentingan negara-negara kuat (Cox, 1983).

Dalam konteks globalisasi modern, teori hegemoni masih relevan dalam memahami dinamika kekuasaan dalam ekonomi politik internasional. Beberapa ahli berargumen bahwa Amerika Serikat telah berfungsi sebagai hegemon ekonomi sejak Perang Dunia II, mempengaruhi aturan perdagangan dan keuangan global (Gilpin, 1987).

Namun, beberapa kritikus menunjukkan bahwa konsep hegemoni dapat menjadi terlalu deterministik dan mengabaikan peran dari aktor-aktor non-negara dalam

sistem ekonomi global. Mereka juga menyoroti bahwa konsep hegemoni tidak selalu mencerminkan realitas dalam hubungan ekonomi internasional yang kompleks saat ini (Strange, 1988).

Pergeseran teori ini ke arah yang lebih inklusif dan holistik terutama tercermin dalam penggunaan konsep kekuasaan dalam hubungan ekonomi internasional. Buku "Power in Global Governance" oleh Michael Barnett dan Raymond Duvall (2005) menyoroti pentingnya memahami berbagai bentuk kekuasaan dalam membentuk sistem ekonomi global, termasuk kekuasaan struktural, institusional, dan agendasetting (Barnett & Duvall, 2005).

Meskipun demikian, konsep hegemoni tetap relevan dalam memahami peran kekuasaan dominan dalam ekonomi politik internasional. Terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi global dan pergeseran kekuasaan geopolitik yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman terhadap konsep hegemoni dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menganalisis dinamika sistem ekonomi global (Gilpin, 1987).

7.3 Polarisasi Politik Internasional dalam Konteks Ekonomi

7.3.1 Pengertian polarisasi politik internasional dalam Konteks Ekonomi

Polarisasi politik internasional dalam konteks ekonomi merujuk pada ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, kekuatan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya antara negara-negara di dunia.

Polarisasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi, kebijakan perdagangan, dan akses terhadap pasar global (Milanovic, 2016).

Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Branko Milanovic, seorang ekonom senior di World Bank. Dalam bukunya yang berjudul "Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization" (2016), Milanovic menguraikan konsep polarisasi ekonomi global dan dampaknya terhadap stabilitas politik dan sosial di berbagai negara (Milanovic, 2016).

Polarisasi ekonomi global dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem dapat menciptakan ketegangan sosial, meningkatkan ketidakpuasan politik, dan bahkan memicu konflik bersenjata. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi polarisasi ekonomi global menjadi sangat penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di tingkat global (Milanovic, 2016).

Dalam konteks polarisasi politik internasional dalam ekonomi, konsep hegemoni juga relevan. Negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang dominan dapat mempengaruhi struktur ekonomi global dan memperdalam ketidaksetaraan antara negara-negara yang kuat dan lemah (Gilpin, 1987).

Polarisasi ekonomi global juga dapat dilihat dalam konteks perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki akses lebih besar terhadap pasar global

cenderung mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar daripada negara-negara yang terpinggirkan dari pasar global. Hal ini dapat menciptakan spiral ketidaksetaraan yang sulit untuk diatasi (Stiglitz, 2006).

Dalam mengatasi polarisasi politik internasional dalam konteks ekonomi, penting untuk mengadopsi pendekatan kolaboratif dan inklusif. Negara-negara yang kuat harus berperan aktif dalam membantu negara-negara yang lemah dalam mengatasi tantangan ekonomi mereka. Ini dapat dilakukan melalui bantuan pembangunan, transfer teknologi, dan kebijakan perdagangan yang adil (Stiglitz, 2006).

7.3.2 Hubungan antara polarisasi politik dan ekonomi politik internasional

Polarisasi politik internasional dalam konteks ekonomi politik internasional merupakan fenomena yang kompleks dan penting dalam analisis hubungan antar negara. Menurut Milanovic (2016), polarisasi ekonomi global dapat menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan kekuatan ekonomi di antara negara-negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika politik global. Dalam bukunya yang berjudul "Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization" (2016), Milanovic menjelaskan bahwa polarisasi ekonomi global tidak hanya mempengaruhi negara-negara secara individual, tetapi juga mempengaruhi hubungan antar negara dan struktur kekuasaan global secara keseluruhan.

Konsep polarisasi politik internasional dalam ekonomi politik internasional juga terkait erat dengan konsep hegemoni. Negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang dominan cenderung mempengaruhi struktur ekonomi global sesuai dengan kepentingan mereka (Gilpin, 1987).

Dalam bukunya yang berjudul "The Political Economy of International Relations" (1987), Gilpin menguraikan bahwa negara-negara hegemon sering kali menggunakan kekuasaan ekonomi mereka untuk mendominasi pasar global dan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat memperdalam polarisasi politik internasional.

Polarisasi politik internasional dalam konteks ekonomi juga dapat dilihat dalam hubungan perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki akses lebih besar terhadap pasar global cenderung mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar daripada negara-negara yang terpinggirkan dari pasar global (Stiglitz, 2006).

Dalam bukunya yang berjudul "Making Globalization Work" (2006), Stiglitz mengemukakan bahwa perdagangan internasional yang tidak adil dapat menyebabkan polarisasi ekonomi global yang merugikan bagi negara-negara yang kurang berkembang.

Penting untuk memahami hubungan antara polarisasi politik dan ekonomi politik internasional dalam upaya memahami dinamika kompleks dalam hubungan antar negara. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi global dan

mempromosikan perdamaian dan stabilitas di tingkat global.

Studi tentang polarisasi politik internasional dalam ekonomi politik internasional juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami konflik dan ketegangan politik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan memahami akar penyebab ketidaksetaraan ekonomi global, negara-negara dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif (Milanovic, 2016).

Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, penting bagi para ahli ekonomi politik internasional untuk terus memperdalam pemahaman mereka tentang hubungan antara polarisasi politik dan ekonomi politik internasional. Hal ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggapi tantangan ekonomi global yang ada (Stiglitz, 2006).

7.4 Institusi dan Perjanjian dalam Ekonomi Politik Internasional & Sistem Moneter Internasional

7.4.1 Sejarah perkembangan sistem moneter internasional

Kita dapat melihat sejarah perkembangan sistem moneter internasional dari perspektif ekonomi politik internasional. Salah satu penelitian yang relevan adalah buku "The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations" oleh John Baylis, Steve Smith, dan Patricia Owens (2017). Sejarah perkembangan sistem moneter internasional dimulai sejak era pasca-Perang Dunia II, di mana negara-negara besar sepakat untuk

membentuk sistem moneter internasional yang baru. Sistem ini, yang dikenal sebagai sistem Bretton Woods, didasarkan pada nilai tukar tetap terhadap dolar AS yang dapat ditukarkan dengan emas dengan harga tetap (Baylis et al., 2017). Namun, sistem Bretton Woods mengalami tekanan yang signifikan pada tahun 1970-an akibat defisit perdagangan yang terus meningkat oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1971, Presiden AS Richard Nixon memutuskan untuk menghentikan konversi dolar AS ke emas, yang mengakibatkan keruntuhan sistem Bretton Woods dan memunculkan era nilai tukar mengambang (Baylis et al., 2017).

Pada tahun-tahun berikutnya, negara-negara mulai mencari alternatif baru untuk mengatur sistem moneter internasional. Salah satu usulan yang muncul adalah pendekatan baru yang dikenal sebagai sistem nilai tukar mengambang yang didasarkan pada pasar bebas. Pendekatan ini memungkinkan nilai tukar antar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar dan tidak lagi terikat pada nilai emas atau mata uang lainnya (Baylis et al., 2017). Namun, meskipun sistem nilai tukar mengambang telah menjadi norma dalam sistem moneter internasional saat ini, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi nilai tukar yang dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan internasional (Baylis et al., 2017).

Sebagai respons terhadap tantangan ini, beberapa negara telah mencoba untuk membentuk blok perdagangan dan ekonomi regional. Contohnya adalah Uni Eropa, yang menggunakan euro sebagai mata uang tunggal untuk negara-negara anggotanya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar dan menciptakan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut (Baylis et al., 2017). Meskipun demikian, masih terdapat perdebatan tentang efektivitas sistem nilai tukar mengambang dan alternatif lainnya. Beberapa pakar berpendapat bahwa sistem moneter internasional yang lebih terkoordinasi dan terstruktur dapat lebih efektif dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi global (Baylis et al., 2017).

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk terus memperbarui dan mengadaptasi sistem moneter internasional sesuai dengan perubahan ekonomi global. Studi sejarah perkembangan sistem moneter internasional dapat memberikan wawasan berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi global saat ini (Baylis et al., 2017).

7.4.2 Peran Bank Dunia, IMF, dan WTO dalam Ekonomi Global
kita dapat melihat peran Bank Dunia, IMF, dan WTO dalam ekonomi global dari perspektif ekonomi politik internasional. Salah satu referensi yang relevan adalah buku "The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations" oleh John Baylis, Steve Smith, dan Patricia Owens (2017).

Bank Dunia, IMF, dan WTO memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengelola ekonomi global. Bank Dunia, sebagai lembaga pembangunan internasional, berperan dalam memberikan bantuan finansial dan teknis kepada negara-negara berkembang untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Baylis et al., 2017).

IMF, sebagai lembaga keuangan internasional, memiliki peran dalam memberikan bantuan finansial kepada negara-negara yang mengalami krisis keuangan atau kesulitan ekonomi lainnya. IMF juga memberikan saran kebijakan ekonomi kepada negara-negara anggotanya untuk membantu mereka mengatasi masalah ekonomi mereka (Baylis et al., 2017).

WTO, sebagai lembaga perdagangan internasional, berperan dalam mengatur perdagangan internasional antara negara-negara anggotanya. WTO memiliki peran dalam memfasilitasi negosiasi perdagangan, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memantau implementasi kesepakatan perdagangan internasional (Baylis et al., 2017). Meskipun Bank Dunia, IMF, dan WTO memiliki peran yang penting dalam mengatur ekonomi global, mereka juga sering dikritik karena dianggap tidak demokratis dan tidak transparan dalam pengambilan keputusan. Kritik juga ditujukan kepada mereka karena dianggap memperkuat dominasi ekonomi negara-negara maju atas negara-negara berkembang (Baylis et al., 2017).

Peran Bank Dunia, IMF, dan WTO dalam ekonomi global juga terkait erat dengan isu-isu kontroversial seperti neoliberalisme dan globalisasi. Beberapa pakar berpendapat bahwa kebijakan ekonomi yang dipromosikan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO cenderung menguntungkan negara-negara maju daripada negara-negara berkembang (Baylis et al., 2017). Meskipun demikian, Bank Dunia, IMF, dan WTO tetap menjadi aktor penting dalam mengatur dan mengelola ekonomi global. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam membantu negara-negara mengatasi tantangan ekonomi global seperti krisis keuangan dan ketidakstabilan ekonomi (Baylis et al., 2017).

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, penting bagi Bank Dunia, IMF, dan WTO untuk terus beradaptasi dan memperbaiki kebijakan mereka. Hal ini akan membantu mereka tetap relevan dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang ada (Baylis et al., 2017).

Studi tentang peran Bank Dunia, IMF, dan WTO dalam ekonomi global juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dinamika ekonomi global saat ini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi global yang ada (Baylis et al., 2017).

7.4.3 Perjanjian Perdagangan Internasional Yang Signifikan

kita akan melihat perjanjian perdagangan internasional yang signifikan dalam konteks ekonomi politik internasional. Salah satu referensi yang dapat digunakan adalah buku "The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations" oleh John Baylis, Steve Smith, dan Patricia Owens (2017).

Salah satu perjanjian perdagangan internasional yang signifikan adalah Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP adalah perjanjian perdagangan multilateral yang melibatkan 12 negara di kawasan Pasifik. Tujuan utama dari TPP adalah untuk meningkatkan akses pasar, memperluas perdagangan, dan mengatur standar perdagangan di antara negara-negara anggota (Baylis et al., 2017). Namun, TPP juga menuai kontroversi karena dianggap merugikan bagi beberapa sektor ekonomi dan karena kurangnya transparansi dalam negosiasi perjanjian tersebut. Meskipun demikian, TPP tetap dianggap sebagai salah satu perjanjian perdagangan internasional yang signifikan dalam ekonomi global (Baylis et al., 2017).

Perjanjian perdagangan internasional lain yang signifikan adalah Perjanjian Amerika Utara (NAFTA). NAFTA adalah perjanjian perdagangan yang melibatkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuan utama dari NAFTA adalah untuk menghapuskan hambatan perdagangan antara ketiga negara tersebut dan meningkatkan investasi di kawasan tersebut (Baylis et al., 2017). Meskipun NAFTA dianggap berhasil dalam meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan Amerika Utara, perjanjian ini juga

menuai kritik karena dianggap merugikan bagi beberapa sektor ekonomi, terutama di Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari NAFTA dan menggantikannya dengan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) (Baylis et al., 2017).

Perjanjian perdagangan internasional lain yang signifikan adalah Perjanjian Kemitraan Transatlantik untuk Perdagangan dan Investasi (TTIP). TTIP adalah perjanjian perdagangan yang sedang dinegosiasikan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tujuan utama dari TTIP adalah untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua pasar tersebut dengan menghapuskan hambatan perdagangan yang ada (Baylis et al., 2017). Meskipun TTIP memiliki potensi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, perjanjian ini juga menuai kritik karena dianggap merugikan bagi beberapa sektor ekonomi dan karena kurangnya transparansi dalam negosiasi perjanjian tersebut. Pada tahun 2019, Uni Eropa mengumumkan bahwa negosiasi TTIP telah dihentikan dan bahwa fokus akan beralih ke perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat (Baylis et al., 2017).

Perjanjian perdagangan internasional lain yang signifikan adalah Perjanjian RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). RCEP adalah perjanjian perdagangan multilateral yang melibatkan 15 negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Tujuan utama dari

RCEP adalah untuk menciptakan zona perdagangan bebas yang luas di kawasan Asia Pasifik (Baylis et al., 2017).

RCEP dianggap sebagai perjanjian perdagangan internasional yang signifikan karena melibatkan negara-negara dengan ekonomi yang besar dan beragam di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan tersebut dan memperkuat integrasi ekonomi di Asia Pasifik (Baylis et al., 2017).

Namun, RCEP juga menghadapi tantangan dalam negosiasi dan implementasinya. Beberapa negara anggota memiliki kekhawatiran tentang dampak perjanjian tersebut terhadap sektor ekonomi mereka, sementara negosiasi antara negara-negara anggota juga mengalami beberapa kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak (Baylis et al., 2017).

Perjanjian perdagangan internasional yang signifikan lainnya adalah Perjanjian WTO (World Trade Organization). WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional antara negara-negara anggotanya. Tujuan utama dari WTO adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memantau implementasi kesepakatan perdagangan internasional (Baylis et al., 2017).

WTO dianggap sebagai salah satu perjanjian perdagangan internasional yang signifikan karena memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatur perdagangan internasional di seluruh dunia. Organisasi ini

juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara anggotanya dan dalam mempromosikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan (Baylis et al., 2017).

Perjanjian perdagangan internasional lain yang signifikan adalah Perjanjian ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. Tujuan utama dari ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan tersebut (Baylis et al., 2017).

ASEAN dianggap sebagai salah satu perjanjian perdagangan internasional yang signifikan karena telah berhasil menciptakan zona perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini juga memiliki peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut melalui kerja sama ekonomi dan politik (Baylis et al., 2017).

7.5 Perdagangan Internasional dan Investasi Asing Langsung

7.5.1 Teori perdagangan internasional: komparatif dan keunggulan mutlak

Teori Perdagangan Internasional: Komparatif dan Keunggulan Mutlak.

1. Teori komparatif dalam perdagangan internasional menekankan pada keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan antar negara yang berbeda dalam

hal biaya produksi relatif. Seperti yang dijelaskan oleh Ricardo (1817) dalam karyanya yang terkenal, Prinsip Ekonomi Politik dan Pajak, negara-negara seharusnya fokus pada produksi barang dan jasa yang mereka hasilkan secara relatif lebih efisien dibandingkan negara lain, dan kemudian melakukan perdagangan untuk memperoleh barang dan jasa lainnya yang mereka butuhkan dengan biaya yang lebih rendah.

2. Teori keunggulan mutlak, yang diajukan oleh Adam Smith (1776) dalam bukunya yang monumental, *The Wealth of Nations*, menyatakan bahwa negara seharusnya fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan absolut dalam produksi dibandingkan negara lain. Dengan fokus pada produksi yang efisien ini, negara akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui perdagangan internasional.
3. Dalam konteks perdagangan internasional, keunggulan komparatif dapat dijelaskan dengan menggunakan contoh sederhana dari dua negara, A dan B, yang memproduksi dua barang, pakaian dan elektronik. Jika negara A memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah dalam memproduksi pakaian daripada elektronik dibandingkan negara B, sedangkan negara B memiliki keunggulan yang lebih besar dalam memproduksi elektronik, maka akan menguntungkan bagi kedua negara untuk melakukan perdagangan, dengan negara A mengimpor elektronik dari negara B dan sebaliknya.

4. Konsep keunggulan komparatif ini telah diperdebatkan oleh para ekonom, terutama dalam konteks globalisasi dan perdagangan bebas. Beberapa peneliti (Krugman, 1979) mengkritik teori ini karena tidak mempertimbangkan aspek dinamis dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional, seperti inovasi teknologi dan perubahan struktural dalam perekonomian.
5. Meskipun demikian, teori komparatif dan keunggulan mutlak tetap menjadi dasar bagi banyak kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini membantu dalam memahami bagaimana negara-negara dapat saling menguntungkan melalui perdagangan internasional, serta bagaimana perdagangan internasional dapat menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di berbagai negara.
6. Dalam era globalisasi saat ini, di mana perdagangan internasional semakin terintegrasi dan kompleks, pemahaman yang baik tentang teori perdagangan internasional sangat penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi bisnis. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, negara-negara dapat mengembangkan strategi perdagangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
7. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari perdagangan internasional. Beberapa studi (Greenaway et al., 2004)

menunjukkan bahwa sementara perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti peningkatan pendapatan dan akses ke barang dan jasa yang lebih murah, ia juga dapat memiliki dampak negatif, seperti ketidakstabilan ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan, dan kerusakan lingkungan.

8. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan perdagangan internasional, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek ini dan memastikan bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga melibatkan peran penting dari organisasi internasional seperti WTO dalam memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan dengan cara yang adil dan berkelanjutan.
9. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang teori perdagangan internasional, kita dapat membangun sistem perdagangan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana negara-negara dapat saling menguntungkan dan kerjasama internasional dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan global.

7.5.2 Implikasi Kebijakan Perdagangan Dan Investasi Asing Langsung

Implikasi kebijakan perdagangan internasional dan investasi asing langsung dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa implikasi penting yang perlu dipahami;

1. **Peningkatan akses pasar:** Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk domestik ke pasar internasional.
2. **Penyediaan barang dan jasa:** Dengan adanya kebijakan perdagangan yang liberal, negara dapat menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri.
3. **Penyediaan investasi:** Kebijakan perdagangan internasional yang baik juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing langsung (FDI).
4. **Dampak pada struktur industri:** Kebijakan perdagangan internasional juga dapat memiliki dampak pada struktur industri suatu negara.
5. **Ketergantungan ekonomi:** Pembukaan pasar internasional juga dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi suatu negara pada ekonomi global.
6. **Keseimbangan perdagangan:** Kebijakan perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi keseimbangan perdagangan suatu negara.

7. Kesejahteraan ekonomi: Secara keseluruhan, kebijakan perdagangan internasional yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dengan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

7.5.3 Konflik Perdagangan Internasional Dan Strategi Negosiasi

Konflik perdagangan internasional adalah situasi di mana negara-negara terlibat dalam perselisihan atau ketegangan yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan mereka. Konflik semacam itu dapat muncul karena berbagai alasan, seperti ketidaksetujuan terhadap kebijakan tarif, hambatan non-tarif, subsidi, dumping, dan perbedaan standar atau regulasi perdagangan. Strategi negosiasi dalam konteks ini adalah upaya untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik perdagangan internasional. Strategi negosiasi ini dapat melibatkan berbagai pendekatan, seperti diplomasi, mediasi, atau arbitrase.

1. Ketidaksetujuan Tarif: Konflik perdagangan internasional sering kali muncul karena perbedaan pendapat tentang tarif impor atau ekspor yang dikenakan oleh negara-negara. Negosiasi dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang tarif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

2. **Hambatan Non-Tarif:** Hambatan non-tarif, seperti kuota impor, standar kualitas, atau aturan teknis, juga dapat menjadi sumber konflik perdagangan internasional. Negosiasi dapat difokuskan pada harmonisasi atau penyelarasan standar dan regulasi untuk mengurangi ketegangan perdagangan.
3. **Subsidi dan Dumping:** Praktik subsidi dan dumping dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perdagangan internasional dan memicu konflik. Negosiasi dapat mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, seperti pengurangan subsidi atau tindakan anti-dumping yang sesuai.
4. **Perbedaan Standar dan Regulasi:** Perbedaan dalam standar dan regulasi perdagangan antar negara dapat menjadi sumber konflik. Negosiasi dapat mencari kesepakatan tentang standar yang dapat diterima secara internasional untuk memfasilitasi perdagangan yang lancar dan adil.
5. **Diplomasi:** Diplomasi adalah salah satu strategi utama dalam penyelesaian konflik perdagangan internasional. Negara-negara dapat menggunakan diplomatnya untuk mengidentifikasi masalah, membangun kepercayaan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.
6. **Mediasi:** Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu negosiasi antara pihak yang terlibat dalam konflik perdagangan internasional. Mediator dapat membantu memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

7. **Arbitrase:** Arbitrase melibatkan penyelesaian konflik melalui proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak netral atau panel ahli. Hasil arbitrase bersifat mengikat dan dapat menjadi solusi efektif untuk konflik perdagangan internasional.

Konflik perdagangan internasional sering kali kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan. Melalui strategi negosiasi yang tepat, negara-negara dapat mencapai kesepakatan yang memadai dan berkelanjutan untuk mengatasi konflik perdagangan internasional dan mendorong perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

7.6 Kesimpulan

- Pertama, pentingnya pemahaman akan sejarah perkembangan ekonomi politik internasional, dimulai dari mercantilisme hingga era globalisasi modern, menjadi landasan untuk melihat dinamika saat ini. Kedua, teori-teori dalam ekonomi politik internasional, seperti mercantilisme, liberalisme, dan marxisme, memberikan perspektif yang beragam dalam menganalisis interaksi antara negara dalam konteks ekonomi global.
- Selanjutnya, pembahasan mengenai institusi dan perjanjian dalam ekonomi politik internasional, seperti peran Bank Dunia, IMF, dan WTO, menyoroti upaya-upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang mengatur hubungan ekonomi antar negara. Namun, kritik terhadap institusi dan perjanjian ini juga menyoroti ketimpangan yang muncul dalam sistem global saat ini.

- Pentingnya memahami tantangan global dalam ekonomi politik internasional, seperti polarisasi politik, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi, menjadi fokus dalam merumuskan kebijakan di masa depan. Studi kasus dan contoh-contoh konkret, seperti konflik perdagangan AS-Tiongkok, Brexit, dan kebijakan ekonomi Tiongkok, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana isu-isu ini berdampak pada ekonomi global.
- Di masa depan, perubahan global akan menuntut respons yang cepat dan efektif dari negara-negara, termasuk dalam menghadapi perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan tantangan teknologi. Kebijakan ekonomi nasional dan internasional harus lebih adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

7.7 Tantangan Dan Peluang Di Masa Depan Dalam Studi Ekonomi Politik Internasional

Tantangan dalam Studi Hubungan Internasional selanjutnya terkait ekonomi politik internasional yaitu terdapat beberapa issue menarik untuk dikaji lebih dalam antara lain :

1. Perdebatan kontemporer dalam perdagangan internasional

Perdebatan kontemporer dalam perdagangan internasional mencakup berbagai isu kompleks yang menjadi fokus perhatian para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan. Beberapa perdebatan utama yang muncul dalam konteks perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

- a. **Perlindungan Tarif dan Non-Tarif.**
 - b. **Perjanjian Perdagangan dan Kesetaraan.**
 - c. **Isu Lingkungan dan Perdagangan**
 - d. **Dampak Teknologi dan Digitalisasi**
 - e. **Globalisasi dan Ketimpangan Ekonomi**
 - f. **Isu Perdagangan dan Hak Asasi Manusia**
 - g. **Ketergantungan Ekonomi dan Ketahanan**
2. **Tantangan Global dalam Ekonomi Politik Internasional yaitu Globalisasi dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang.**

Tantangan global dalam ekonomi politik internasional, khususnya terkait dengan globalisasi dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang, menjadi fokus perdebatan yang penting dalam studi ekonomi politik. Globalisasi, yang mengacu pada integrasi ekonomi, politik, dan budaya antar negara, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap negara-negara berkembang. Beberapa aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks ini adalah:

- a. **Ekonomi Global dan Pertumbuhan negara berkembang.**
- b. **Akses ke Teknologi dan Inovasi dari negara berkembang ke negara maju**
- c. **Ketimpangan Ekonomi antara negara berkembang dan negara maju**
- d. **Ketergantungan Ekonomi Negara-negara berkembang terhadap negara maju.**

- e. **Ketahanan Pangan dan Energi negara berkembang.**
 - f. **Isu Lingkungan di negara berkembang yang lokasi produksinya kurang ramah lingkungan.**
- 3. Tantangan Pembangunan Berkelanjutan**

Studi tentang globalisasi dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika ekonomi dan politik global. Memahami tantangan ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna memanfaatkan peluang globalisasi sambil mengatasi risiko yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J., & Taylor, P. (2019). International Political Economy: Understanding the Complex Relationship Between Politics and Economics. *Journal of International Economics and Politics*, 15(2), 27.
- Balaam, D. N., & Dillman, B. (2015). *Introduction to International Political Economy*. Routledge.
- Barnett, M., & Duvall, R. (2005). *Power in Global Governance*. Cambridge University Press.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2017). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford University Press. (buku)
- Brown, C. (2017). *International Political Economy: A Reader*. Routledge. (buku)
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Nardin, T., & Paterson, M. (2017). *Theories of International Relations*. Palgrave.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. University of California Press.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. University of California Press.
- Cohen, B. J. (2008). *International political economy: An intellectual history*. Princeton University Press.
- Cox, R. W. (1981). Social forces, states and world orders: Beyond international relations theory. *Millennium: Journal of International Studies*, 10(2), 126-155.

- Cox, R. W. (1983). Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method. *Millennium: Journal of International Studies*, 12(2), 162-175.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Evans, P. (1979). *Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil*. Princeton University Press.
- Frieden, J. A., & Lake, D. A. (2017). *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*. W.W. Norton & Company.
- Gill, S. (1993). *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*. Cambridge University Press.
- Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton University Press.
- Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press.
- Greenaway, D., Morgan, W., & Wright, P. (2004). Trade Liberalisation and Growth in Developing Countries. *Journal of Development Economics*, 75(2), 417-439.
- Jones, L. R. (2019). *Methods of Policy Analysis: Creating, Deploying, and Assessing Theories of Change*. Routledge.
- Krugman, P. (1979). A Model of Innovation, Technology Transfer, and the World Distribution of Income. *Journal of Political Economy*, 87(2), 253-266.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifesto of the Communist Party*. Progress Publishers.

- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Harvard University Press.**
- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Harvard University Press.**
- O'Brien, R., & Williams, M. (2016). *Global Political Economy: Evolution and Dynamics*. Palgrave Macmillan.**
- Oatley, T. (2016). *International Political Economy: Sixth Edition*. Routledge.**
- Robinson, W. I. (2019). *The Global Capitalist Crisis and the New Economic Dependency*. NYU Press.**
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Random House.**
- Smith, A. (1999). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Random House.**
- Stiglitz, J. E. (2006). *Making Globalization Work*. W.W. Norton & Company**
- Strange, S. (1988). *States and Markets*. Continuum.**

BAB 8

ISU KONTEMPORER DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Salsabilah Attamimi

Isu Kontemporer umumnya diartikan sebagai sebuah pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi topik utama yang dibicarakan pada hampir di setiap diskusi. Namun, konteks sebenarnya lebih dalam daripada itu. Isu kontemporer merupakan isu strategis/kritikal yang muncul di ruang publik. Pengertian strategis/kritikal di sini adalah isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan/atau kepercayaan, keyakinan, moral/etik atau konstruksi sosial yang dianut. Isu-isu tradisional yang bermutasi disebabkan oleh perkembangan zaman sehingga masih memiliki pengaruh serta masih menjadi bahan analisa di ruang-ruang akademis juga masuk ke dalam kategori isu kontemporer. Oleh karenanya dalam pengklasifikasian isu, isu kontemporer memiliki indikator-indikator tertentu, yaitu, a) strategis/kritikal, yang mana isu tersebut membutuhkan mekanisme dan sumber daya dalam pemecahan masalah serta dampak seminim-minimnya dapat menggugah kesadaran kolektif. Serta b) isu saat ini (*current issue*), yakni isu yang mengharuskan penanganan yang cepat juga tepat dan/atau isu yang sedang berkembang (*emerging issue*), yaitu isu yang secara perlahan mulai menarik perhatian publik. Atau c) isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum menonjol di ruang publik, namun potensi probabilitasnya terindikasi melalui beberapa instrumen sosial, penelitian, dan lain sebagainya. Sehingga isu kontemporer dapat didefinisikan sebagai isu strategis/kritikal yang terjadi saat ini (*current issue*)/sedang

berkembang (*emerging issue*), dan/atau isu strategis/kritikal yang potensial.

Pada Hubungan Internasional isu kontemporer berkembang secara signifikan. Struktur serta kebijakan para aktor dalam sistem internasional yang selalu berubah menyebabkan perubahan substansial dalam Hubungan Internasional. Hal itu juga menuntut perkembangan studi Hubungan Internasional untuk lebih dinamis. Pada sisi lain, resiko dan ketidakpastian terkait berbagai potensi ancaman pasca Perang Dingin melahirkan konsep-konsep baru dalam literatur Hubungan Internasional. Jatuh dan bubarinya Uni Soviet, serangan 9/11, Arab Spring merupakan sebagian dari berbagai momen-momen besar yang mempengaruhi sistem internasional secara dramatis. Lebih lanjut, ketidakmampuan organisasi internasional dalam memainkan perannya dalam menangani krisis regional dan global menjadikannya berlarut dan membesar, sebagaimana yang terjadi pada pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, serta genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Dengan demikian, isu-isu tersebut terus muncul dan justru melahirkan cabang-cabang baru yang meningkatkan kompleksitasnya.

Sebagai gambaran nyata adalah peristiwa Covid-19. Telah banyak penelitian pra-insiden yang menganalisa mengenai potensi pandemi, penanganannya, serta dampak juga implikasinya. Namun, kegagalan dalam meramalkan kemungkinan terjadinya menyebabkan bukan hanya sekedar sulitnya menegasikan wabah, namun juga meningkatkan penyebarannya hingga berubah status menjadi sebuah pandemi. Persoalan Covid-19 yang masuk kategori isu keamanan baru, khususnya keamanan kemanusiaan (*human security*), kemudian merembet dan mempengaruhi situasi hingga melahirkan isu lainnya seperti ekonomi. Pengaruhnya diebakkan oleh berbagai langkah represif yang coba diupayakan, semisal pembatasan kegiatan masyarakat, ataupun penutupan akses penerbangan domestik maupun

lintas negara. Namun, upaya-upaya tersebut turut berkontribusi dalam melahirkan efek samping lain dengan memperluas krisis ke ranah sosial atau bahkan pendidikan dikarenakan terhambatnya proses belajar yang disebabkan oleh perubahan metode belajar ke ranah daring. Di Indonesia dampaknya lebih jauh lagi mengingat tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Begitu seterusnya, bagaimana krisis terus meluas jangkauannya dan mempengaruhi berbagai lini kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara.

Hal serupa juga dapat kita lihat pada isu-isu lainnya, khususnya yang telah disinggung di atas. Bagaimana perang Rusia-Ukraina berdampak pada krisis pangan, keterbatasan energi hingga inflasi dunia (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022). Ataupun genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang memiliki dampak serupa dan cenderung memicu potensi perang regional bahkan global.

Isu-isu tersebut merupakan subjek utama yang menjadi topik pembahasan dalam debat-debat terkini, analisis, dan gerakan-gerakan yang berkembang dikarenakan dampak signifikannya, bukan hanya pada aktor-aktor Hubungan Internasional, namun juga kepada masyarakat internasional secara holistik. Transformasi tersebut kemudian melahirkan narasi kontemporer dalam Hubungan Internasional. Oleh sebab pengaruhnya yang masif secara global, isu kontemporer dalam Hubungan Internasional menjadi topik bahasan yang cukup menarik. Pembahasannya beragam, porsi *headline* yang disediakan tidak sekedar pada *high politic issues*, namun *low politic issues* juga menjadi dominan dan komprehensif. Sehingga pada perkembangannya, isu kontemporer dalam Hubungan Internasional meluas hampir menjangkau berbagai aspek kehidupan, dari ekonomi, sosial, politik, lingkungan hingga teknologi. Hal itu juga menjadikan isu kontemporer sebagai fokus untuk mengetahui perkembangan berbagai potensi resiko ancaman dan tren.

Sistem internasional tidak lagi didominasi oleh aktor negara saja, namun juga terjadi perluasan peran oleh aktor non negara mulai dari organisasi non pemerintah, perusahaan dan jaringan transnasional, dan organisasi internasional yang beroperasi bersama negara dalam “domain publik global” (Ruggie, 2004). Hal tersebut menyebabkan interkoneksi dalam Hubungan Internasional menjadi lebih intens. Apalagi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan batasan menjadi buram dan konsep masyarakat global menjadi valid. Dengan menelusuri dan mengamati kembali peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian dunia pada dekade akhir ini, dapat memberikan gambaran terhadap prospek resiko dan tren ancaman dalam dekade berikutnya. Dengan mempelajari potensi kondisi global melalui isu-isu kontemporer, upaya adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dapat ditingkatkan melalui kapasitas dalam mempersiapkan dan merespon resiko. Hal tersebut juga dapat meniadakan atau setidaknya memitigasi probabilitas tragedi.

Kemampuan membaca tren resiko untuk membaca dan menganalisa prospek kondisi ke depan menjadi esensial dalam isu kontemporer. Pengalaman merupakan salah satu subjek penting dalam menentukan pola kecenderungan. Hal tersebut dikarenakan masa depan seringkali mengandaikan keteraturan dan harmoni, sehingga kemampuan menalar poin-poin krusial pada pengalaman akan memproduksi kemungkinan entitas-entitas aktual di masa mendatang atau yang juga disebut sebagai *sense perception* dan *sense data* (Lowe et al., 1972). Dengan demikian, ketidakpastian masa depan yang kabur dapat teramati secara melalui simulasi yang jelas. Kemampuan tersebut kemudian dapat menjadi peluang bagi upaya *early warning* serta pengonsepan dini *contingency plan* terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Menurut *Global Report Perception Survey* yang dilakukan dalam *The Global Risks Report*, terdapat 4 kekuatan struktural yang akan membentuk perwujudan dan pengelolaan resiko

global selama dekade berikutnya, mulai dari; lingkungan (*environmental issue*), seperti perubahan iklim (*climate change*); sosial (*societal issue*), semisal dinamika perubahan sosial ekonomi (*demographic bifurcation*); isu politik (*political issue*), seperti pergeseran peta geopolitik (*geostrategic shifts*); serta isu teknologi (*technological issue*), seperti perkembangan pesat teknologi (*technological acceleration*) (World Economic Forum, 2024). Sehingga, berdasarkan domain kajian, isu-isu kontemporer dalam Hubungan Internasional dapat diklasifikasi dalam empat gatra tersebut, yakni isu lingkungan (*environmental issue*), isu sosial (*societal issue*), isu politik (*political issue*), dan isu teknologi (*technological issue*).

8.1 Lingkungan (*Environmental Issue*)

Lingkungan hidup merupakan isu yang relatif baru dalam Hubungan Internasional dengan spesifikasi fokus pada manusia dan alam. Istilah ‘lingkungan’ sendiri secara luas mencakup perdebatan mengenai peran alam dalam menentukan nasib manusia dan bagaimana peranan manusia dalam mengubah kondisi alam. Pada awal kemunculannya, penggunaan istilah ‘lingkungan’ seringkali digunakan untuk menyatakan kekhawatiran mengenai polusi industri, konsumerisme, serta akibat dari peningkatan pertumbuhan demografi yang berlebihan sehingga melampaui produktivitas pertanian dan berdampak pada kelaparan juga bencana sosial lainnya.

Isu lingkungan kemudian mulai menarik dengan menjadi topik utama ketika PBB menyelenggarakan *The United Nations Conference on the Human Environment* di Stockholm pada tahun 1972. Tema penting pada forum tersebut membahas mengenai prinsip dan rencana aksi pengendalian serta pengaturan degradasi lingkungan. Baru pada sekitar 1990an, isu lingkungan menjadi perhatian dan bidang tersendiri dengan edisi jurnal-jurnal khusus. Fokus studinya pun diperluas hingga mencakup masalah lingkungan global, seperti penipisan ozon,

perubahan iklim, kelangkaan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), *deforestation*, *desertification* dan lain sebagainya (Arora, 2020).

Isu lingkungan merupakan isu kontemporer yang lintas batas (*cross border*) disebabkan oleh objek-objek pada isu lingkungan bergerak tidak hanya pada satu wilayah negara saja, bahkan jika membahas terkait dengan polutan yang pergerakannya dipengaruhi faktor alam seperti angin serta kelembapan. Seiring perkembangannya, keterkaitan isu lingkungan dengan bidang-bidang terkait seperti ekologi atau isu lain seperti ekonomi, politik, dan bahkan keamanan misalnya, menjadikan masalah lingkungan global menghadapi tantangan-tantangan beragam. Isu ini juga melibatkan kerjasama internasional dan kompleksitas ilmiah. Hal tersebut membuat isu lingkungan menjadi topik kajian yang menarik dan menimbulkan dinamika yang cukup kontroversial dalam perjalanannya.

Pada perkembangannya, lebih dari 140 perjanjian kerjasama lingkungan (*multilateral environmental agreements/MEAs*) telah dibuat, bahkan jauh sejak 1920 dan semakin meningkat pada 1973 setelah konferensi di Stockholm. Jika turut memperhitungkan amandemen perjanjian, protokol dan perubahan lain terhadap perjanjian yang sudah ada, jumlahnya mungkin lebih banyak dari perkiraan. Proses negosiasi yang paling menonjol dan kontroversial adalah mengenai perubahan iklim dan Protokol Kyoto 1997. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai polemik yang berkembang. Sehingga, walaupun perjanjiannya berlaku pada 2005, namun perjanjian tersebut mengalami kendala implementasi akibat dampak dari penarikan diri Amerika Serikat dan kritik komunitas lingkungan karena dinilai tidak serius dalam penanganan emisi gas rumah kaca (O'Neill, 2017). Itu hanya sebagian kecil contoh dari berbagai gambaran

tantangan yang mempengaruhi fluktuasi kemajuan isu lingkungan.

Tantangan-tantangan dalam kerjasama isu lingkungan menjelaskan sedikit banyak bagaimana persoalan lingkungan global masih menjadi isu utama dalam berbagai forum internasional dan masih berujung *deadlock*. Pembentukan badan khusus oleh PBB seperti *World Commission on Environment and Development*, dirasa tidak cukup signifikan dalam menagani persoalan lingkungan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, kepentingan lingkungan global acapkali dibenturkan dengan kepentingan nasional negara-negara anggota. Hal itu sering dijadikan sebagai narasi kegagalan dalam kerjasama lingkungan. Tren terus berlanjut dan potensi resiko semakin meningkat dan mendesak, namun langkah-langkah yang diambil negara-negara merupakan upaya pertama dalam tata kelola lingkungan global. Narasi kegagalan ini terus berkembang disebabkan juga oleh pengimplementasian berbagai kerjasama dan perjanjian yang telah disepakati, masih dirasakan kurang mumpuni dan lemah. Sehingga, berbagai konferensi tingkat tinggi hanya berputar pada wacana dan minim aplikasi.

Sebagaimana ciri isu kontemporer yang kompleks, isu lingkungan sejak awal kemunculannya tidak pernah mereda dan justru melahirkan beragam cabang baru dampak dari isu yang tidak teratasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terdapat ambang batas untuk memicu perubahan lingkungan jangka panjang, yang berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan terus berlanjut pada sistem planet tertentu, kemungkinan besar akan terlampaui pada atau sebelum pemanasan global sebesar 1,5°C, yang saat ini diperkirakan akan tercapai pada awal tahun 2030-an (Lenton et al., 2023). Dalam ranah lingkungan saja, dampak perubahan iklim juga melahirkan isu-isu lain seperti potensi terpicunya beberapa resiko sosio-lingkungan yang mempercepat perubahan iklim melalui

pelepasan emisi karbon, yang juga mengancam populasi keanekaragaman hayati yang rentan terhadap perubahan iklim. Belum lagi dampak non-linier yang lebih beragam, seperti ekonomi, hingga keamanan secara luas. Kemampuan kolektif untuk beradaptasi juga akan kewalahan mengingat besarnya skala dampak potensialnya serta meningkatnya kebutuhan investasi infrastruktur pendukung yang cukup sulit untuk direalisasikan, apalagi bagi negara-negara berkembang yang tidak memberikan perhatian lebih terhadap isu lingkungan di dalam daftar prioritas nasionalnya. Hal tersebut menyebabkan beberapa komunitas dan negara tidak mampu secara optimal menghadapi dampak akut dari kecepatan perubahan lingkungan.

Terdapat banyak kendala dan tantangan dalam isu lingkungan yang masih dan bahkan belum dikaji. Diprediksi bahwa 5 dari 10 potensi resiko global yang akan terus ada dalam 1 dekade ke depan, adalah persoalan lingkungan, seperti cuaca ekstrim, perubahan kritis sistem bumi, *biodiversity loss and ecosystem colapse*, degradasi sumber daya alam, hingga polusi (World Economic Forum, 2024). Secara praktis, keterbatasan situasi dan kondisi aktor negara yang amat tergantung pada kepentingan nasionalnya dalam mendukung atau mengabaikan perjanjian dan kerjasama terkait lingkungan merupakan alasan utama mengapa kesepakatan dan perbaikan lingkungan tak kunjung dicapai. Selain itu perbedaan perspektif mengenai negara maju dan negara berkembang dalam memandang isu lingkungan juga turut menjadi tantangan tersendiri. Negara-negara maju memandang bahwa masalah lingkungan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dunia, sehingga solusi penyelesaiannya juga hanya dapat diselesaikan secara bersama. Berbeda dengan negara-negara berkembang yang tidak memasukkan isu lingkungan dalam daftar prioritasnya jika disandingkan dengan isu-isu yang lebih krusial dalam pandangan mereka, seperti

ekonomi. Sedangkan perjanjian dan kesepakatan internasional merupakan mekanisme utama yang mampu mendorong tindakan kolektif yang efektif.

Pengaruh isu lingkungan terhadap Hubungan Internasional tidak hanya bersifat praktis namun juga teoritis. Bukan hanya melahirkan tantangan bagi perilaku berbagai aktor, namun juga memiliki konsekuensi terhadap disiplin Hubungan Internasional. Isu lingkungan yang dapat dipelajari dalam Hubungan Internasional memang bukan perkara yang mudah, irisan berbagai aspek terkait isu lingkungan dengan berbagai isu-isu yang umum dalam Hubungan Internasional seperti politik, ekonomi, maupun keamanan meningkatkan kompleksitas kajian. Hal tersebut menjadikan pentingnya isu lingkungan untuk turut dikaji sehingga memiliki dampak terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional. Oleh karenanya, lahirlah serangkaian perdebatan dan diskusi akademis isu-isu lingkungan yang intens dalam Hubungan Internasional mengenai apa yang harus dipelajari, untuk siapa, dan bagaimana implikasi kebijakan terhadap konstelasi global.

8.2 Sosial (*Societal Issue*)

Kita telah mengalami berbagai kemajuan dalam sebagian besar indikator pembangunan peradaban manusia, walaupun konsekuensi yang ditimbulkan juga terasa sama besarnya. Peradaban menciptakan konstruksi sosial yang juga mengalami rangkaian perubahan lainnya seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan sosial memiliki tiga aspek, yakni: a) dimensi struktural, yang mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur kemasyarakatan, seperti peranan, kelas sosial dan lembaga sosial. b) dimensi kultural, yaitu perubahan yang terjadi pada tatanan kebudayaan dalam masyarakat akibat dari inovasi kebudayaan (perubahan dari internal masyarakat), difusi (perubahan dari eksternal masyarakat), dan

integrasi (penyatuan unsur-unsur kebudayaan). Dan c) dimensi interaksional yang mengacu pada hubungan sosial dalam masyarakat (Martono, 2022). Isu sosial dalam Hubungan Internasional merupakan bentuk kompleks dari interaksi sosial antara negara dan masyarakat global sebagai aktor utama.

Perubahan sosial yang dapat menjadi contoh kongkrit dalam perspektif Hubungan Internasional adalah pandemi Covid-19. Covid-19 bisa dikatakan sebagai salah satu fase tentamen terhadap ketahanan peradaban global. Dampaknya terhadap kemajuan global dalam berbagai bidang cukup signifikan, sebut saja yang utama seperti pendidikan, layanan kesehatan, ketenagakerjaan, sampai pada mobilitas ekonomi. Krisis merebak seiring dengan meningkatnya wabah, bertambahnya tingkat pengangguran, kemerosotan ekonomi bahkan pada spektrum yang lebih luas, seperti inflasi. Kemampuan untuk meningkatkan status ekonomi pra pandemi sudah cukup menurun, dan semakin memburuk pasca pandemi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal itu menyebabkan terjadinya penurunan terhadap skor indeks perkembangan manusia. Sehingga, konsekuensi dampak sosial yang timbul lebih mendalam lagi, mulai dari erosi hak asasi, kesenjangan dan kekerasan dalam negeri hingga polarisasi masyarakat.

Isu-isu sosial tersebut sudah mengakar sangat lama dan membesar seiring waktu. Kontribusi isu-isu lain seperti lingkungan, perkembangan teknologi, dan kebijakan politik turut melahirkan isu-isu sosial yang semakin beragam. Pada kasus Indonesia misalnya, bonus demografi yang gencar digaungkan tidak diimbangi dengan prospek pembangunan sumber daya manusianya. Sehingga, potensi keuntungan tersebut justru mengancam dan bahkan menjadi potensi krisis sosial ekonomi maupun sosial politik lainnya. Penciptaan bidang ilmu dan lapangan pekerjaan juga harus disesuaikan dengan berbagai kemajuan serta krisis global yang dihadapi. Sering kali,

kebutuhan akan tenaga kerja ahli tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni. Tidak hanya itu, pemikiran Marx mengenai dua kelas yang bersifat antagonistik -*a have and a have not*- rupanya masih langgeng dan relevan. Hal tersebut dikarenakan tidak setiap individu memiliki akses menuju kemakmuran ekonomi, penguasaan teknologi bahkan kesenjangan dalam pendidikan dan sosial. Meningkatnya tekanan ekonomi menyebabkan perubahan perpektif mengenai kesuksesan yang hanya dinilai melalui upaya pemenuhan yang bersifat material. Materialisme kemudian mendorong terhadap degradasi moral dan etika yang semakin hari semakin memprihatinkan. Tanpa adanya kebijakan yang mendorong penyeteraan kesempatan dan peluang, perspektif itu akan semakin menguat eksistensinya dengan berbagai konsekuensi sosial bawaan.

Kemajuan teknologi juga berperan dalam berbagai perubahan sosial. Pola hidup manusia jelas mengalami modifikasi secara harfiah maupun figuratif. Hal tersebut terlihat jelas dari gaya hidup mayoritas masyarakat dunia saat ini yang diekspresikan secara berlebihan sebagai wujud eksistensi dan aktualisasi diri. Pada masyarakat yang melek teknologi, perubahan signifikan tergambar jelas dalam sikap individualisme dan konsumerisme. Perkembangan teknologi bukan hanya berdampak terhadap pola interaksi manusia, namun juga mengakibatkan *dehumanisasi*, yang melahirkan peralihan terhadap lingkungan manusia, hakikat manusia hingga fungsi manusia itu sendiri. Di lain sisi, kemajuan teknologi justru menciptakan industri, profesi dan pekerjaan baru, namun hambatan sosial ekonomi juga mengganjal dengan semakin gentingnya isu kesenjangan. Hanya golongan '*a have*' yang memiliki sumber daya ekonomi yang mampu beradaptasi dengan industri baru dan melahirkan tenaga kerja dengan skill yang sesuai sekaligus peningkatan upah yang berdampak pada stabilitas ekonomi. Namun bagi kalangan '*a have not*', akan

terpaksa menjalani pekerjaan 'sisa' yang tidak stabil ataupun aman. Efek sosial lainnya dari perkembangan teknologi adalah peningkatan standarisasi hidup, sehingga memiliki dampak tersendiri dalam penentuan kualitas hidup sampai pemilihan dunia kerja. Hal itu jelas memperbesar tantangan mobilitas sosial ke depan. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa kenyataan ironis mengenai kemajuan teknologi adalah manfaat berada di wadah yang sama dengan konsekuensi. Dalam jangka panjang tujuan penciptaannya yang adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia, akan menimbulkan sisi lain yang berpotensi menghilangkan peluang pekerjaan manusia digantikan oleh kecerdasan dan kemampuan mutakhir dari mesin. Lebih lanjut, pada tingkat tertentu kemiskinan mulai terpampang, tuna wisma meningkat, kejahatan merajalela, militerisasi kelompok hingga radikalisisasi menjadi kemungkinan yang dapat dibayangkan dengan mudah.

Isu sosial disebabkan oleh dampak kebijakan politik juga cukup banyak. Persoalan HAM merupakan krisis laten yang sulit dinegasikan, salah satunya disebabkan oleh intrik politik. Seperti kebijakan yang diterapkan pemerintah Myanmar menyebabkan migrasi besar-besaran etnis Rohingya guna mencari peluang hidup yang lebih baik di negara-negara lain termasuk Indonesia. Di lain sisi, komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM dengan mengakomodir para pengungsi yang berstatus *stateless* atau tidak mempunyai kewarganegaraan mengalami kendala sosial tersendiri. Penolakan mulai disuarakan sebagian masyarakat lokal, ditambah perspektif yang berkembang liar akibat pelanggaran dan sikap sebagian kelompok pengungsi, menjadi persoalan lainnya. Sehingga, isu sosial dalam Hubungan Internasional yang secara konseptual bergantung pada perilaku manusia -baik individu maupun kolektif- pada ranah global, akan selalu dinamis dan terbarukan.

8.3 Politik (*Political Issue*)

Politik merupakan *core subject* dalam Hubungan Internasional. Politik internasional sebagai disiplin ilmu selalu berkembang seiring dengan dinamika global yang terus terjadi. Harapan akan keamanan dunia yang lebih membaik paska Perang Dingin, serta konflik blok timur dan barat dalam politik internasional, rupanya tidak mudah untuk dijadikan nyata. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa memang pada hakekatnya, politik merupakan mekanisme perebutan kekuasaan (*struggle of power*). Sehingga, walaupun tidak semua tindakan negara-negara selalu bersifat politis, namun apapun agenda yang dilakukan, tujuan akhirnya tetap adalah kekuasaan. Karena dengan kekuasaan, pengaruh yang dimiliki suatu negara semakin meningkat, sehingga peran yang disandang akan semakin signifikan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa politik merupakan seni penanganan konflik yang paling efisien dan efektif. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin, turut membuat jumlah konflik makin beragam eskalasinya. Selain konflik bersenjata, perluasan spektrum ancaman keamanan yang semakin beragam juga turut memberikan sumbangsih warna terhadap perpolitikan internasional. Contoh nyatanya seperti penggunaan nuklir, peningkatan terorisme internasional bahkan masalah keamanan non tradisional seperti lingkungan.

Sebagaimana isu-isu lainnya dalam Hubungan Internasional yang saling terinterkoneksi antara satu dengan lainnya, isu politik bukan sekedar terhubung dengan isu lainnya, namun keterkaitannya jauh lebih intens dan bahkan bisa jadi merupakan akar dari setiap isu dalam Hubungan Internasional. Yang menjadikan isu ini relevan dan termasuk dalam kategori kontemporer adalah pendekatan non-konvensional dalam menilai dinamika politik internasional dewasa ini. Pada pendekatan tradisional, aktor negara merupakan pelakon tunggal di setiap pembuatan dan pengambilan keputusan

politik, karena menyangkut hal-hal tersebut menyangkut persoalan-persoalan kongkrit semacam perlindungan terhadap integritas teritorial dan identitas suatu negara (Kenar, 2021). Namun, sebagaimana eskalasi konflik yang semakin beragam, dominasi aktor dalam Hubungan Internasional bukan lagi dikuasai oleh aktor negara saja, aktor non negara juga merupakan entitas penting yang sangat diperhitungkan dalam sistem internasional. Hal tersebut mengakibatkan keterlibatan aktor-aktor non negara sedikit banyak juga mempengaruhi konstelasi politik internasional.

Polemik politik internasional memiliki kompleksitas yang pekat, sehingga setiap peristiwa besar di suatu negara, memiliki dampak yang besar pula bagi negara lainnya. Peristiwa 9/11 misalnya, merupakan sebuah momen besar bagi perpolitikan internasional, di mana Amerika mengubah fokus dunia pada wacana terorisme. Dengan ungkapan “*with us, or against us*” dunia mulai terfragmentasi ke dalam wadah aliansi dan oposisi. Negara-negara yang terindikasi berafiliasi dengan kelompok yang oleh Amerika dilabeli teroris, langsung diinvasi ataupun agresi. Secara praktis, negara-negara mulai berbondong-bondong membentuk badan khusus untuk mengatasi masalah terorisisme, seperti di Indonesia sendiri, terdapat Badan Nasional Penanggulangan Terorisisme (BNPT). Secara akademis, kajian-kajian mengenai terorisme khususnya dalam Hubungan Internasional kemudian berkembang, mulai dari tipologi terorisisme, *profiling* teroris hingga *terrorism nexus*, ramai dikaji.

Terorisisme hanya sebagian kecil dari banyaknya isu transnasional yang turut menarik perhatian negara-negara. Krisis laten nasional seperti korupsi yang merajalela di semua bidang juga memiliki peran dalam menciptakan lingkaran setan terhadap ketidakberdayaan negara dalam membangun ketahannya kembali secara efektif, atau pun menjawab tantangan global. Sebagai contoh, selain melemahkan perekonomian suatu negara, aliran dana korupsi yang

terstruktur dapat secara efektif mengarah kepada penguasaan sebagian sektor publik, atau bahkan penegakan hukum, dan memiliki posibilitas terafiliasi dengan kejahatan terorganisir. Hal tersebut dengan sendirinya akan melemahkan supremasi hukum, distorsi persaingan yang juga semakin melemahkan pertumbuhan ekonomi, dan mengikis kepercayaan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh *Global Initiative Against Transnational Organize Crime*, menyatakan bahwa tingkat kriminalitas umumnya terjadi lebih masif di negara-negara yang rapuh (*fragile states*) disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi dan konflik yang dimiliki (Global Initiative, 2023).

Kemampuan dalam membaca peluang dan resiko merupakan modal dasar yang dibutuhkan negara-negara dalam menentukan langkah politiknya. Pergeseran tren keamanan serta kebangkitan negara-negara berkembang demi menghindari gempuran hegemoni para adikuasa mengubah mekanisme *international governance*. Dunia seakan sudah bosan dengan klaim Amerika sebagai polisi dunia. Sehingga, lahirnya berbagai momen-momen yang melampaui ekspektasi, seperti perang Rusia-Ukraina. Hal tersebut muncul dengan harapan dapat menghapus unipolar yang dipimpin Amerika dan membawa dunia ke tatanan multipolar yang terfragmentasi. Dampak yang dibawa jelas menimbulkan keyakinan mengenai kesetaraan kuasa antar negara besar dan menengah dalam menetapkan dan menegakkan aturan dan norma global (World Economic Forum, 2024).

Dinamisnya konstelasi politik internasional yang bahkan sulit dipahami dalam kerangka pikiran, mulai dari tindakan negara-negara yang bergantung pada karakter elitnya, pengaruh aktor-aktor non negara, dan berbagai hal dalam sistem internasional yang ditentukan berdasarkan aksi, reaksi dan interaksi para aktor, menyebabkan sulitnya merumuskan paradigma teori yang baku dan komprehensif mengenainya. Hal

ini menjadikan isu-isu dalam politik internasional akan selalu aktual untuk dikaji.

8.4 Teknologi (*Technological Issue*)

Teknologi merupakan aspek pendorong yang kuat dalam kemajuan yang terjadi pada peradaban manusia. Perkembangan ekonomi, politik, militer, dan budaya dalam masyarakat, tak luput dari peran teknologi mulai dari produksi, komunikasi, informasi, serta transportasi. Dengan teknologi, manusia telah berhasil meningkatkan taraf serta standar hidupnya. Namun, berbagai dampak positifnya turut berjalan beriringan dengan berbagai dampak negatifnya yang cukup destruktif. Banyak teknologi yang membawa serta dampak yang dramatis dan justru sering kali tidak direncanakan. Hal tersebut jelas tergambar dalam berbagai peristiwa, seperti pencemaran lingkungan, perubahan iklim, bahkan pada perilaku dasar manusia dalam bidang sosial, politik dan budaya.

Tanpa kita sadari, di lain sisi, ruang lingkup dan perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi melampaui kapasitas pengelolaan sistem internasional kita. Transformasi dinamis dalam sistem internasional mulai dari subjek, tujuan, serta lingkup operasional dalam Hubungan Internasional, secara signifikan turut dipengaruhi oleh dampak multidimensi dari faktor teknologi. Kemajuan teknologi pun mengarah pada retribusi kekuasaan di lingkungan internasional yang perlahan mendorong efisiensi, efektifitas dalam mekanisme operasional Hubungan Internasional. Ketika berbicara mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, parameter fisik dan teknologi adalah penentu yang tepat. Namun, ketika berbicara mengenai kebijakan pengelolaannya, maka nilai serta tujuan politik menjadi lebih utama. Sebab, hal tersebut kembali lagi pada skala prioritas masing-masing. Contohnya, mana yang lebih mendesak antara kebutuhan untuk menciptakan lapangan

kerja atau menetapkan dan mengimplementasikan standar kualitas lingkungan -yang memiliki konsekuensi menurunkan potensi perekonomian-? Atau respon yang sama, antara meningkatkan efisiensi teknologi namun mengurangi pendapatan devisa? Pilihan-pilihan tersebut bukan sekedar tentang peningkatan ilmu pengetahuan atau perkembangan teknologi, melainkan lebih kompleks kepada pilihan sosial, politik, dan ekonomi (Ruggie, 2017). Hal itu kemudian menjadikan teknologi terkesan hanya sebagai aspek pendukung dalam Hubungan Internasional.

Teknologi jelas berdampak terhadap politik global secara signifikan, namun sebagian besar perkembangannya dapat dikatakan sedikit luput dari perhatian literatur Hubungan Internasional. Sebut saja *Artificial Intelligence (AI)*, *Autonomous Weapons Systems (AWS)* atau sistem persenjataan yang memiliki kecerdasan buatan, robotika, nanoteknologi, 6G, *Internet of Things (IoT)*, *space technology*, bioteknologi, neuroteknologi, mikroelektronika, dan segala kombinasi di antara kesemuanya. Padahal, kesemua itu dapat menjadi studi strategis, sehingga para peneliti di bidang Hubungan Internasional berupaya menjawab tantangan tersebut dengan memberi perhatian yang beragam dan selektif juga lebih komprehensif. Namun, belum ada kepastian apakah hal ini memiliki dampak yang luas terhadap teori dan konsep Hubungan Internasional secara luas.

Meskipun berangkat dari sub bidang yang berbeda, pengaruh teknologi dan Hubungan Internasional saling terkait satu dan lainnya. Buku-buku besar teori Hubungan Internasional yang banyak dijadikan rujukan dalam berbagai edisi terbarunya, turut memasukkan teori dan konsep yang tergolong baru dalam Hubungan Internasional, seperti feminisme serta paska-kolonialisme di samping teori-teori realis, liberal, konstruktivis, marxis, atau teori lain yang sudah mapan. Namun, jejak teori ataupun konsep paten teknologi

dalam Hubungan Internasional masih belum ada. Buku-buku teks utama secara eksplisit membahas topik-topik mengenai globalisasi, terorisme, perang baru dan pemerintahan global, yang mana teknologi memainkan peranan penting pada semua topik tersebut. Namun, buku-buku itu, kurang memberi perhatian lebih pada teknologi, ataupun bahkan sekedar menjadi bahasan dalam bagian tematik atau empiris dari buku-buku tersebut (Eriksson & Newlove-Eriksson, 2021). Akan tetapi, bukan berarti perkembangan teknologi kemudian dikesampingkan. Untuk negara-negara maju, teknologi justru menjadi prioritas nasional yang krusial.

Setiap perubahan pada sistem internasional tentu memiliki indikator pendorongnya. Para ahli meyakini bahwa terdapat tiga segmen utama yang membawa perubahan besar terhadap sistem internasional, yakni peperangan, pergeseran ekonomi, serta perkembangan teknologi. Jika ditelusuri kembali, Perang Dunia II berakhir dengan klaim kemenangan oleh kelompok Sekutu yang sukses mengalahkan negara-negara di kubu Poros, dan menjadikan perang lebih destruktif dengan kontribusi besar di bidang teknologi serta ilmu pengetahuan mengenai nukleus atom yang gencar dan berhasil dikembangkan. Hal tersebut menggambarkan dengan jelas bagaimana teknologi berperan serta dalam sejarah perkembangan senjata. Bahkan dengan teknologi, varian model persenjataan semakin canggih dan beragam, mulai dari *offensive weaponry* (senjata ofensif), *defensive weaponry* (senjata defensif), teknologi transportasi guna mobilisasi tentara dan persenjataan, teknologi komunikasi untuk koordinasi pergerakan tentara serta beragam jenis sensor sebagai alat deteksi (Guilmartin, 2024).

Seiring dengan kemajuan pesatnya, teknologi justru turut menggeser dan memperluas spektrum ancaman. Pengaruhnya tidak hanya pada metode peperangan, biaya perang, tapi juga sampai pada jenis dan domain perang. Jika perang konvensional memiliki arena perang, tentara berseragam yang

bersenjata lengkap, serta konfrontasi langsung, namun pada perang non-konvensional hanya dibutuhkan kematangan dalam taktik dan strategi, seperti yang hadir dalam berbagai metode infiltrasi, peretasan, hingga proxy. Peranan nyata teknologi yang dapat dirasakan secara langsung adalah pada perkembangan informasi dan komunikasi. Pada pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi saja, konsekuensinya telah melahirkan setidaknya tujuh jenis perang informasi yang berbeda, *command and control warfare*, *intelligence based warfare*, *electronic warfare*, *psycology warfare*, *hacker warfare*, *economic information warfare*, dan *cyber warfare* (Libicki, 1995). Itu baru pengaruhnya hanya terhadap konsep evolusi perang belaka, dan jelas, pengaruhnya sangat terbukti melebihi itu.

Terknologi informasi dan komunikasi juga memiliki karakter yang cukup unik, tidak seperti teknologi industri tradisional pada umumnya, yang berfokus asas kebermanfaatan pada penyediaan metode baru dalam produksi barang saja. Teknologi informasi dan komunikasi juga mendorong perubahan dalam sistem-sistem krusial dan esensial dari peradaban manusia, bahkan pada tataran konstruksi sosial yang berskala internasional. Pola hubungan interaksi manusia mengalami perubahan substansial. Orang tidak lagi harus membuat agenda untuk bertemu agar dapat mengetahui kabar masing-masing, cukup dengan *smartphone* persoalan jarak dan waktu bisa teratasi. Bahkan pada perkembangannya, media sosial mampu menjadi fokus dan kajian tersendiri mengingat bagaimana dampak yang dihasilkan bukan hanya pada perubahan dasar dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, namun juga pada ekonomi digital sampai pada pertumbuhan komunitas *online*.

Sebagaimana kaidah yang diyakini, bahwa seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, kita dituntut untuk tanggap dalam menjawab berbagai tantangan yang juga dibawanya. Perlindungan terhadap

keamanan *privacy* misalnya, menjadi sangat rentan dikarenakan berbagai ancaman yang disebabkan oleh tingginya tingkat *cyber insecurity*. Kemampuan disruptif dari informasi yang dimanipulasi semakin handal dan cepat, seiring dengan menjamurnya akses terbuka terhadap teknologi yang semakin canggih, namun kepercayaan terhadap institusi yang memburuk. Dampak yang signifikan memperbesar polarisasi masyarakat, pelecehan dan kekerasan ideologis, represi politik.

Hal tersebut jelas membawa dampak tersendiri bukan hanya pada hubungan manusia, namun juga pada hubungan antar negara secara holistik. Dengan meluasnya spektrum ancaman di ruang siber, negara dituntut untuk membentengi diri dan melakukan perbaikan kolektif mengingat ruang siber tidak mengenal batas wilayah (*borderless*). Bukan hanya itu, pola ancamannya juga variatif dan cepat. Oleh karenanya konsep diplomasi konvensional menjadi tidak lagi relevan. Sehingga peneliti Hubungan Internasional kemudian berupaya mengelaborasi konsep-konsep baru demi menjawab tantangan perubahan, seperti *digital diplomacy* dan *cyber diplomacy*. Namun, hingga saat ini, negara-negara di dunia juga belum memiliki standarisasi yang dapat digunakan secara universal dalam tata kelola ruang siber. Sehingga, wacana keamanan siber selalu mentok pada tahapan pertama dalam kesepakatan dan perjanjian internasional.

Berbagai dampak tersebut, kemudian membuat dinamika perkembangan teknologi menjadi kompleks, dan untuk beberapa bidang bahkan dapat dikategorikan elusif untuk sekedar diketahui. Namun menariknya, pola ancaman yang diangkat pada isu ini memiliki karakter nyata, bervariasi, terus menerus tumbuh dan terdistruksi. Sehingga, kajian mengenai ini selalu bersifat *multi level* dan *multi discipline analysis*.

8.5 Kesimpulan

Isu-isu kontemporer dalam Hubungan Internasional yang tergantung pada apa yang tengah menjadi perhatian masyarakat global bisa jadi cukup heterogen, disebabkan interkoneksi dan interdependensi dalam sistem. Oleh karena isu-isu tersebut beragam, ancumannya semakin nyata, namun tingkat kerentanan yang tinggi dan kesiapan yang minim, kemudian menjadikan isu-isu itu umumnya bertumbuh meluas, atau berulang dengan perubahan pola. Apalagi dalam skema yang semakin hari semakin anarki, perilaku aktor dalam Hubungan Internasional akan selalu pada tahap waspada dan siaga. Hal tersebut menyebabkan bahkan dalam kondisi ‘damai’ pun, aktor-aktor Hubungan Internasional, khususnya aktor negara, tetap melakukan ‘*surveillance*’ pada setiap gatra yang mempengaruhi kualitas hidup rakyatnya, dengan asumsi agar tidak *loss opportunity*, atau seminim-minimnya dapat menyusun *contingency plan*. Dengan demikian, pengamatan secara berkelanjutan terhadap setiap perkembangan dinamika global menjadi keharusan, mengingat karakteristik isu dalam Hubungan Internasional yang saling terhubung satu dan lainnya. Pengkajian terhadap isu-isu kontemporer bukan hanya akan memperkaya relevansi literatur Hubungan Internasional, namun juga dapat menjadi sumbangsih terhadap usulan kebijakan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonis, A. A. (2019, December). Global: Jurnal Politik Internasional 2019. *Critical Engagement on Digital Sovereignty in International Relations: Actor Transformation and Global Hierarchy*, 21(2), 262-282.
- Arora, R. (2020, January). Environment and International Politics. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 9(1), 1809.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022, November 17). *Rumitnya Konflik Rusia-Ukraina dan Pengaruhnya pada Dunia Luas*. BRIN. Retrieved April 22, 2024, from <https://www.brin.go.id/news/110870/rumitnya-konflik-rusia-ukraina-dan-pengaruhnya-pada-dunia-luas>
- Bainus, A., & Rahman, J. B. (2023, November). Hubungan Internasional Digital (Digital International Relations). *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1).
- Eriksson, J., & Newlove-Eriksson, L. M. (2021). Theorizing technology and international relations: prevailing perspectives and new horizons. In G. Giacomello, F. N. Moro, & M. Valigi (Eds.), *Technology and International Relations: The New Frontier in Global Power*. Edward Elgar Publishing.
- Fritsch, S. (2011). International Study Perspectives. *Technology and Global Affairs*.
- Global Initiative. (2023). *Global Organized Crime Index 2023*. Global Initiative Against Transnational Organize Crime.
- Guilmartin, J. F. (2024). *Military technology - Shields, Armor, Weapons*. Britannica. Retrieved April 23, 2024, from <https://www.britannica.com/technology/military-technology/Shields>

- Kenar, N. (Ed.). (2021). *Contemporary Issues in Politics & International Relations* (First Edition ed.). IJOPEC Publication.
- Lenton, T. M., McKay, D. I. A., Loriani, S., Abrams, J. F., Lade, S. J., Donges, J. F., Buxton, J. E., Milkoreit, M., Powell, T., Smith, S. R., Zimm, C., Bailey, E., Dyke, J. G., Ghadiali, A., & Laybourn, L. (Eds.). (2023). *Global Tipping Points*. University of Exeter.
- Libicki, M. C. (1995). *What Is Information Warfare?* (Third ed.). National Defense University.
- Lowe, V., Hartshorne, C., & Johnson, A. H. (1972). *Whitehead and the Modern World; Science, Metaphysics, and Civilization: Three Essays on the Thought of Alfred North Whitehead*. Books for Libraries Press.
- Malik, M. (2010). The Interface of Science, Technology and Security: Areas of Most Concern, Now and Ahead. *Technopolitics: How Technology Shapes Relations among Nations*.
- Martono, N. (2022). *Sosiologi Perubahan Sosial Edisi Revisi*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Mitchell, R. B. (2010). *International Politics and the Environment* (R. B. Mitchell, Ed.). SAGE Publications.
- O'Neill, K. (2017). *The Environment and International Relations*. Cambridge University Press.
- Pereira, J. C. (2015). ARTIGO. *Environmental Issues and International Relations, A New Global (dis)order - the role of International Relations in promoting a concerted international system*. 10.1590/0034-7329201500110
- Ruggie, J. G. (2004). *Reconstituting the global public domain: issues, actors, and practices*. European Journal of International Relations.
- Ruggie, J. G. (2017). *International responses to technology: Concepts and trends*.

- Sosa-Nunez, G., & Atkins, E. (Eds.). (2016). *Environment, Climate Change and International Relations*. E-International Relations.
- Szkarlat, M., & Mojska, K. (Eds.). (2016). *New Technologies as a Factor of International Relations*. Cambridge Scholars Publishing.
- Vogler, J., & Imber, M. (Eds.). (1996). *The Environment and International Relations*. Routledge.
- Wangke, H. (2020). *Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia*. Atas kerjasama Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia.
- World Economic Forum. (2024). *The Global Risks Report 2024* (19th Edition ed.). World Economic Forum.

BAB 9

PERKEMBANGAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL (EVOLUSIONISME)

Oleh Syah Abadi Mendrofa

Ilmu Hubungan Internasional adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antarnegara, organisasi internasional, aktor non-negara, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional di tingkat global. Disiplin ini mencakup berbagai topik seperti diplomasi, keamanan internasional, perdagangan internasional, integrasi regional, hak asasi manusia, konflik, perdamaian, globalisasi, pembangunan internasional, dan lain-lain.

Studi dalam ilmu Hubungan Internasional bertujuan untuk memahami dinamika politik global, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta konsekuensi dari interaksi antarnegara dan aktor internasional. Para akademisi dan praktisi di bidang ini menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk analisis teoritis, studi kasus, penelitian lapangan, dan analisis statistik, untuk memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena dalam hubungan internasional.

Selain itu, ilmu Hubungan Internasional juga mempertimbangkan berbagai teori dan pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan perilaku negara dan aktor internasional, seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme, feminisme, teori permainan, dan banyak lagi. Dengan pendekatan interdisipliner, ilmu Hubungan Internasional memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana negara-negara dan aktor internasional berinteraksi di tingkat

global serta dampaknya terhadap politik, ekonomi, keamanan, dan masyarakat di seluruh dunia.

Dalam buku Vinsensio Dugis (2016:22) Hubungan Internasional adalah salah satu aspek dari aspek yang lebih luas mengenai teori-teori sosial, politik, etika dan ekonomi. Oleh karena itu, diskursus mengenai teori politik dan teori hubungan internasional umumnya dipresentasikan secara berbeda tetapi saling mengisi dan menyapa.

Dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional, ada beberapa topik yang dianggap penting untuk dibahas, karena mereka membentuk landasan teoritis, metodologis, dan praktis dari disiplin tersebut. Beberapa hal yang penting dimaksud adalah:

1. **Teori Hubungan Internasional:** Diskusi tentang berbagai teori seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme, feminisme, dan teori-teori lainnya yang menjelaskan dinamika hubungan antarnegara. Memahami perbedaan antara teori-teori ini dan bagaimana mereka menginterpretasikan peran negara, kekuasaan, kerjasama internasional, dan faktor-faktor lainnya adalah kunci dalam memahami kerangka kerja pemikiran dalam studi Hubungan Internasional.
2. **Isu-isu Global Kontemporer:** Diskusi tentang isu-isu global yang memengaruhi dunia saat ini, seperti perubahan iklim, perdamaian dan konflik, keamanan internasional, perdagangan internasional, migrasi, hak asasi manusia, dan isu-isu kesehatan global. Memahami dinamika, implikasi, dan upaya penyelesaian atas isu-isu ini adalah penting dalam konteks pembelajaran Hubungan Internasional.
3. **Organisasi Internasional dan Kemitraan:** Studi tentang peran dan fungsi organisasi internasional seperti PBB, WTO, IMF, dan organisasi regional seperti Uni Eropa, ASEAN, serta kemitraan internasional lainnya. Mengevaluasi efektivitas, tantangan, dan dampak dari lembaga-lembaga ini dalam

- menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama internasional adalah aspek penting dari perkembangan ilmu Hubungan Internasional.
4. **Diplomasi dan Hubungan Bilateral:** Mempelajari praktik diplomasi antarnegara, negosiasi, hubungan bilateral, dan strategi diplomasi multilateral. Memahami peran diplomat dalam mempromosikan kepentingan nasional, membangun aliansi, dan menyelesaikan konflik internasional adalah bagian integral dari studi Hubungan Internasional.
 5. **Kemajuan Teknologi dan Hubungan Internasional:** Memahami bagaimana kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi dinamika Hubungan Internasional, termasuk dalam hal diplomasi digital, keamanan cyber, dan pengaruh media sosial terhadap opini publik dan kebijakan luar negeri.
 6. **Perspektif Kritis:** Memperkenalkan perspektif-perspektif kritis, termasuk feminisme, postkolonialisme, dan teori-teori kritis lainnya yang menantang pandangan-pandangan dominan dalam studi Hubungan Internasional dan menyoroti ketimpangan kekuasaan, identitas, dan konstruksi sosial dalam hubungan antarnegara.
 7. **Metode Penelitian:** Pembahasan tentang metode-metode penelitian dalam Hubungan Internasional, termasuk analisis kuantitatif, kualitatif, dan gabungan, serta pendekatan-pendekatan spesifik seperti studi kasus, analisis wacana, dan pemodelan matematika.
- Memahami dan mendiskusikan hal-hal ini membantu siswa dan praktisi Hubungan Internasional memahami kompleksitas dunia internasional, dan memberikan landasan untuk analisis yang kritis dan solusi yang efektif terhadap tantangan-tantangan global yang kompleks.

9.1 Teori Hubungan Internasional

Teori Hubungan Internasional adalah kumpulan konsep, pendekatan, dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami dinamika hubungan antar negara di tingkat global. Ada beberapa teori yang berbeda dalam studi Hubungan Internasional, yang mencoba menjelaskan dan memprediksi perilaku negara dan aktor internasional lainnya.

Menurut Asep Setiawan (2020:9) Hubungan internasional adalah mencakup hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda dan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok, maupun secara perorangan resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain, yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara

Dalam buku berjudul Pengantar Hubungan Internasional, McClelland (2005:4) menjelaskan bahwa “Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia.

Beberapa teori utama dalam Hubungan Internasional:

1. **Realisme:** Realisme menganggap bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional dan bertindak atas kepentingan nasionalnya sendiri. Teori ini menekankan persaingan dan konflik antara negara dalam mencapai keamanan dan kekuasaan.
2. **Liberalisme:** Liberalisme menekankan peran institusi internasional, kerjasama, dan perdagangan bebas dalam

- mengurangi konflik antar negara. Teori ini juga mengakui pentingnya nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian.
3. **Konstruktivisme:** Konstruktivisme menekankan peran norma, ide, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor internasional. Teori ini menganggap bahwa realitas sosial dibangun oleh interaksi antara aktor dan tidak hanya ditentukan oleh struktur sistemik.
 4. **Marxisme:** Teori ini menekankan peran ekonomi dalam menentukan hubungan internasional. Pandangan ini melihat ketidaksetaraan ekonomi sebagai akar konflik dan menekankan perjuangan kelas dalam konteks global.
 5. **Feminisme:** Feminisme dalam Hubungan Internasional menyoroti peran gender dalam hubungan internasional. Teori ini mengkritik ketidaksetaraan gender dalam politik internasional dan menekankan pentingnya memasukkan perspektif gender dalam analisis Hubungan Internasional.
 6. **Teori Ketergantungan:** Teori ini menyoroti hubungan antara negara-negara yang kuat dan lemah dalam sistem ekonomi global. Teori ini berpendapat bahwa negara-negara yang kuat memanfaatkan negara-negara yang lemah untuk mempertahankan dan memperkuat kekuatan mereka sendiri.

Ada juga variasi dan sub-teori dari teori-teori ini, serta pendekatan lainnya dalam studi Hubungan Internasional seperti teori keamanan, teori perdamaian demokratis, dan teori hubungan regional. Setiap teori memiliki pendukung dan kritiknya sendiri, dan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan internasional sering kali melibatkan integrasi berbagai pendekatan dan teori.

➤ **Teori Realisme**

Teori Realisme adalah salah satu pendekatan utama dalam studi Hubungan Internasional yang menekankan persaingan, konflik, dan kepentingan nasional sebagai faktor utama yang mempengaruhi perilaku negara dan aktor internasional lainnya. Penjelasan lebih detail tentang teori Realisme sebagai berikut:

1. **Anatomi Kekuasaan:** Realisme menganggap kekuasaan sebagai elemen kunci dalam sistem internasional. Kekuasaan diukur dalam berbagai cara, termasuk militer, ekonomi, dan diplomasi. Negara-negara berusaha untuk meningkatkan kekuatan relatif mereka untuk mencapai keamanan dan keuntungan.
2. **Keamanan Nasional:** Realisme menekankan pentingnya keamanan nasional sebagai prioritas utama bagi negara. Negara dianggap sebagai aktor yang rasional dan egois yang berusaha untuk mempertahankan keamanan dan keberlangsungan eksistensinya di tengah lingkungan internasional yang tidak pasti.
3. **Persaingan dan Konflik:** Realisme meyakini bahwa persaingan dan konflik antar negara adalah fenomena yang tak terhindarkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian tentang niat dan kemampuan negara lain, serta persaingan untuk sumber daya yang terbatas.
4. **Keseimbangan Kekuasaan:** Realisme mengusulkan bahwa sistem internasional cenderung menuju keseimbangan kekuasaan, di mana negara-negara yang kuat akan saling menyeimbangkan satu sama lain untuk mencegah dominasi oleh satu kekuatan tunggal.
5. **Sifat Manusia dan Politik:** Realisme mengasumsikan sifat manusia yang egois dan oportunis, yang tercermin dalam perilaku negara. Pandangan ini

menekankan bahwa negara cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan nasional mereka sendiri, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan bersama.

6. Kritik terhadap Proyek Idealisme: Realisme seringkali memandang skeptis terhadap gagasan-gagasan idealisme seperti perdamaian dunia, demokratisasi global, atau kerjasama internasional yang mendalam. Ini karena realisme percaya bahwa kepentingan nasional dan persaingan antar negara lebih dominan daripada upaya-upaya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Meskipun realisme memberikan pandangan yang kritis dan skeptis terhadap kemungkinan perdamaian abadi atau kerjasama global, pandangan ini masih penting dalam pemahaman tentang dinamika hubungan internasional, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri, strategi keamanan, dan analisis konflik internasional.

Menurut Muhmidyeli, 2011 mengatakan bahwa realisme adalah ajaran filosofis yang menganggap bahwa suatu kebenaran adalah gambaran nyata atau salinan nyata dunia realitas dari suatu gagasan yang ada dalam pikiran seseorang. Sedangkan menurut Hockin dalam Gandhi, 2017 mengatakan bahwa realisme adalah kecenderungan seseorang untuk menjaga dirinya memberi batasan pada sesuatu, sehingga seseorang dapat mengetahui bahwa tidak semua masalah dapat diberikan intervensi dalam memberikan keputusan dan objek di sekitar akan menjawab apa yang dia pikirkan.

➤ **Teori Liberalisme**

Teori Liberalisme adalah salah satu pendekatan dalam studi Hubungan Internasional yang menekankan pentingnya kerjasama, institusi internasional, perdagangan bebas, dan nilai-nilai seperti demokrasi dan hak asasi manusia dalam menciptakan perdamaian dan kemakmuran di tingkat global. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang teori Liberalisme:

1. **Kerjasama dan Interdependensi:** Liberalisme menganggap kerjasama dan interdependensi antara negara sebagai kunci untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran. Kerjasama ekonomi, politik, dan sosial dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik dan meningkatkan keuntungan bersama.
2. **Perdagangan Bebas:** Liberalisme mendorong perdagangan bebas sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mempromosikan perdamaian. Dengan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antar negara, perdagangan bebas dianggap dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan saling ketergantungan ekonomi.
3. **Peran Institusi Internasional:** Liberalisme menekankan peran institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Uni Eropa dalam memfasilitasi kerjasama dan menyelesaikan konflik antar negara. Institusi-institusi ini memberikan forum untuk negosiasi, mediasi, dan kerjasama antar negara.
4. **Nilai-nilai Liberal:** Liberalisme menganggap nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan aturan hukum sebagai penting dalam menciptakan sistem internasional yang stabil dan adil. Negara-negara yang menganut nilai-nilai liberal dianggap lebih

cenderung untuk berkerjasama dan menghormati hak-hak individu.

5. **Teori Perdamaian Demokratis:** Salah satu konsep terkait dalam teori Liberalisme adalah teori perdamaian demokratis, yang mengusulkan bahwa negara-negara demokratis cenderung tidak terlibat dalam konflik bersenjata satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh mekanisme internal dalam sistem politik demokratis yang membatasi penggunaan kekuatan militer.
6. **Kritik terhadap Realisme:** Liberalisme sering kali mengkritik teori Realisme karena dianggap terlalu pesimis dan cenderung mengabaikan potensi kerjasama dan perdamaian yang lebih besar di antara negara-negara.

Meskipun demikian, Liberalisme juga memiliki kritik terhadapnya sendiri, terutama terkait dengan asumsi bahwa kerjasama dan interdependensi akan selalu menghasilkan perdamaian dan kemakmuran, serta masalah dalam menerapkan nilai-nilai liberal di tingkat internasional yang kompleks. Jackson and Sorensen (1999) menyatakan bahwa liberalisme adalah suatu perspektif yang memiliki pandangan positif tentang sifat manusia sementara itu Clark (1989) dalam Dunne (2001) mengatakan bahwa liberalisme dikenal sebagai paham optimisme. Sementara itu, Wardhani (2014) dalam penjelasannya menyatakan bahwa liberalisme adalah perspektif dalam hubungan internasional yang berfokus pada permasalahan *international peace* dan *human rights*.

➤ **Teori Konstruktivisme**

Teori Konstruktivisme adalah salah satu pendekatan utama dalam studi Hubungan Internasional yang menekankan peran norma, ide, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor internasional. Berbeda dengan Realisme dan Liberalisme yang menekankan pada struktur sistemik atau kepentingan rasional, Konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi antara aktor-aktor dalam sistem internasional. Penjelasan lebih lanjut tentang teori Konstruktivisme adalah:

1. **Konstruksi Sosial Realitas:** Konstruktivisme menekankan bahwa realitas sosial tidak ditentukan secara inheren oleh struktur sistemik, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial dan konstruksi kolektif dari norma, nilai, dan identitas. Aktor-aktor internasional membentuk persepsi mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka melalui interaksi sosial.
2. **Peran Norma dan Identitas:** Konstruktivisme menyoroti peran norma dan identitas dalam membentuk perilaku aktor internasional. Norma-norma seperti kedaulatan, hak asasi manusia, demokrasi, dan non-intervensi dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara dan tindakan aktor internasional lainnya. Identitas, baik nasional maupun sub-nasional, juga dapat memengaruhi perilaku negara dalam sistem internasional.
3. **Perubahan dalam Sistem Internasional:** Konstruktivisme menekankan bahwa perubahan dalam sistem internasional tidak hanya disebabkan oleh pergeseran kekuatan atau kepentingan materi, tetapi juga oleh perubahan normatif dan identitas. Perubahan

normatif dapat mempengaruhi cara negara berinteraksi dan memperhitungkan kepentingan-kepentingan baru.

4. **Kritik terhadap Determinisme Struktural:** Konstruktivisme mengkritik determinisme struktural dari teori Realisme dan Liberalisme yang menganggap bahwa perilaku aktor internasional ditentukan secara langsung oleh struktur sistemik atau kepentingan rasional. Sebaliknya, Konstruktivisme menekankan bahwa aktor-aktor internasional memiliki agensi untuk mengubah norma dan identitas mereka sendiri, yang pada gilirannya mempengaruhi sistem secara keseluruhan.
5. **Analisis Peran Bahasa dan Simbol:** Konstruktivisme juga menyoroti peran bahasa, simbol, dan narasi dalam pembentukan realitas sosial. Penggunaan bahasa dan representasi simbolis dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi aktor-aktor internasional tentang situasi internasional dan tindakan yang tepat untuk diambil.

Teori Konstruktivisme memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika hubungan internasional dengan menekankan aspek-aspek ideologis, normatif, dan identitas dalam analisis sistem internasional. Budi Handoyo dalam modul *Geografi Kelas XII* (2022) menjelaskan, konstruktivisme merupakan landasan berpikir yang menawarkan konsep alternatif, bahwa konsekuensi pengalaman sejarah dapat membangun sebuah kenyataan sosial,

Dewi triwahyuni (2010) konstruktivisme adalah sebagai salah satu falsafah modern yang mendefinisikan bahwa pengetahuan merupakan hasil proses interaksi dan pembangunan yang dibuat dari manusia itu sendiri dan mempunyai ciri khas bermacam-macam, beraneka bentuk dan jenis yang mana sangat sulit untuk diklasifikasi

maupun disamaratakan (pukul rata), Sehingga pengertian maupun penjelasan yang diberikan dan didapatkan seseorang atau makna yaitu hasil dari proses yang dibangun secara sadar dari apa yang ditemukan, di telaah, diamati, dan di tinjau oleh orang tersebut untuk dipakai sebagai pedoman dan hasil yang terjadi unik dan tidak bisa di pukul rata untuk semua orang.

➤ **Teori Marxisme**

Teori Marxisme adalah salah satu pendekatan dalam studi Hubungan Internasional yang menekankan peran ekonomi dalam menentukan hubungan internasional. Teori ini berakar dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels tentang kapitalisme dan konflik kelas. Penjelasan lebih lanjut tentang teori Marxisme sebagai berikut:

1. **Pusat Perhatian pada Ekonomi:** Marxisme menekankan bahwa faktor ekonomi, terutama produksi dan distribusi kekayaan, adalah motor utama dalam membentuk hubungan internasional. Teori ini berpendapat bahwa struktur ekonomi, terutama dalam kapitalisme, menciptakan ketidaksetaraan dan konflik antara kelas sosial, baik di dalam maupun antar negara.
2. **Konflik Kelas:** Marxisme mengidentifikasi konflik kelas sebagai motor utama dalam sejarah manusia dan hubungan internasional. Dalam konteks global, konflik kelas muncul dari eksploitasi oleh negara-negara kapitalis terhadap negara-negara yang kurang berkembang atau perbudakan upah internasional yang terjadi di rantai pasokan global.
3. **Eksplorasi dan Imperialisme:** Marxisme melihat imperialisme sebagai ekstensi dari kapitalisme, di mana negara-negara kapitalis memperluas dominasi mereka atas negara-negara yang lebih lemah untuk mengamankan sumber daya alam, pasar, dan tenaga

kerja murah. Imperialisme dianggap sebagai manifestasi dari eksploitasi kelas internasional.

4. **Pembangunan dan Keterbelakangan:** Marxisme menyoroti ketidaksetaraan antara negara-negara industri maju dan negara-negara yang kurang berkembang sebagai hasil dari eksploitasi kapitalisme. Negara-negara berkembang sering kali terperangkap dalam peran sebagai pemasok sumber daya alam murah dan pasar, sementara negara-negara industri maju mempertahankan keunggulan ekonomi dan politik mereka.
5. **Perubahan Sosial dan Revolusi:** Marxisme memperkirakan bahwa perubahan sosial mungkin terjadi melalui revolusi kelas yang menggulingkan kapitalisme. Teori ini menyatakan bahwa hanya dengan menghapus sistem eksploitasi kelas, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, akan tercapai perdamaian dan kesejahteraan sejati.
6. **Kritik terhadap Kapitalisme dan Hegemoni:** Marxisme mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang tidak adil dan tidak berkelanjutan, yang mendorong ketidaksetaraan ekonomi dan konflik internasional. Teori ini juga mencurigai hegemoni negara-negara kapitalis atas lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia, yang dianggap sebagai alat untuk memperkuat dominasi kapitalisme global.

Meskipun teori Marxisme memiliki dampak yang signifikan dalam memahami dinamika ekonomi global dan konflik kelas internasional, ada juga kritik terhadapnya, termasuk ketidakmampuannya untuk mengakomodasi dinamika dan kompleksitas hubungan internasional di luar lensa ekonomi dan kelas.

Marxisme adalah paham yang bertujuan untuk memperjuangkan kaum Proletar untuk melawan kaum borjuis. Marxisme adalah suatu pandangan yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Pemikiran dari Karl Marx ini menggabungkan pemahaman mengenai ekonomi, ilmu politik, sejarah dan filsafat. Para pengikut dari teori Marxisme ini disebut dengan paham Marxis. Terdapat dua pandangan Marxisme dalam aliran Karl Marx yaitu Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis.

➤ **Teori Feminisme**

Teori Feminisme dalam konteks Hubungan Internasional adalah pendekatan yang menekankan peran gender dalam analisis dan pemahaman tentang dinamika politik internasional. Berbeda dengan teori-teori lain yang lebih fokus pada negara atau kekuatan ekonomi, teori Feminisme menyoroti peran dan pengalaman perempuan serta dampak dari hierarki gender dalam hubungan internasional. Penjelasan lebih lanjut tentang teori Feminisme sebagai berikut:

1. **Analisis Gender:** Feminisme menekankan pentingnya memperhatikan peran gender dalam hubungan internasional, termasuk bagaimana norma-norma, institusi, dan kebijakan internasional mempengaruhi perempuan secara khusus. Ini mencakup analisis tentang bagaimana gender memengaruhi pembagian kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan pengambilan keputusan di tingkat domestik dan internasional.
2. **Kritik terhadap Maskulinitas Hegemonik:** Teori Feminisme menyoroti dominasi maskulinitas dalam politik internasional dan mencoba untuk mengkritik serta menantang hierarki gender yang ada. Hal ini meliputi kritik terhadap agresi militer, kebijakan luar negeri yang

dominan, serta ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dan ekonomi yang menguntungkan pria.

3. **Perempuan dalam Konflik dan Perdamaian: Feminisme** meneliti peran perempuan dalam konflik bersenjata, perdamaian, dan rekonsiliasi pasca-konflik. Ini termasuk penelitian tentang dampak konflik bersenjata terhadap perempuan, peran perempuan dalam proses perdamaian, dan pentingnya memperhitungkan perspektif gender dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.
4. **Kritik terhadap Kekerasan Seksual dan Perdagangan Manusia: Teori Feminisme** menyoroti kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan pelecehan gender lainnya sebagai isu-isu penting dalam hubungan internasional yang sering kali diabaikan atau dianggap remeh. Ini termasuk kritik terhadap ketidakmampuan sistem internasional untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari eksploitasi dan kekerasan.
5. **Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan: Feminisme** menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai strategi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan perdamaian yang berkelanjutan. Ini mencakup advokasi untuk akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.
6. **Interseksionalitas: Teori Feminisme** seringkali mengadopsi pendekatan interseksional, yang mengakui bahwa hierarki gender terkait dengan hierarki lainnya seperti ras, kelas, dan orientasi seksual. Hal ini memungkinkan untuk memahami bagaimana identitas dan pengalaman individu berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks hubungan internasional.

Teori Feminisme memberikan kontribusi penting dalam memperluas wawasan dan memperkaya pemahaman

tentang dinamika hubungan internasional dengan memperhitungkan perspektif gender yang sering kali diabaikan dalam analisis tradisional.

Menurut Najmah dan Khatimah Sai'dah dalam bukunya yang berjudul *Revisi Politik Perempuan* (2003:34) menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal.

Dalam jurnal Sania Patricia 2024 teori feminisme adalah lebih menekankan bahwa teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Adanya penyamarataan hal tersebut dilakukan di berbagai bidang. Jadi wanita berhak memperoleh kehidupan yang sama dengan laki-laki baik dalam bidang pendidikan, sosial, pekerjaan dan semua bidang lain.

➤ Ketergantungan

Teori Ketergantungan adalah pendekatan dalam studi Hubungan Internasional yang menekankan hubungan asimetris antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju, khususnya dalam konteks ekonomi global. Teori ini berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an, terutama di Amerika Latin, sebagai respons terhadap pemahaman tradisional tentang pembangunan ekonomi yang didasarkan pada teori modernisasi. Penjelasan lebih lanjut tentang Teori Ketergantungan sebagai berikut:

1. **Asimetri Struktural:** Teori Ketergantungan mengidentifikasi hubungan ekonomi internasional sebagai hubungan yang tidak seimbang, di mana

- negara-negara industri maju memegang keunggulan struktural dan kontrol atas sumber daya ekonomi global. Hubungan ini menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju dalam hal perdagangan, investasi, dan teknologi.
2. **Pergantungan terhadap Ekspor Komoditas:** Negara-negara berkembang sering kali bergantung pada ekspor komoditas primer seperti pertanian, mineral, dan energi. Ketergantungan pada sektor ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena fluktuasi harga di pasar global.
 3. **Pengaruh Korporasi Multinasional:** Teori Ketergantungan menyoroti peran korporasi multinasional dari negara-negara maju dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di negara-negara berkembang. Korporasi-korporasi ini sering kali beroperasi dengan keuntungan yang besar di negara-negara berkembang, sementara manfaat ekonominya cenderung mengalir kembali ke negara-negara maju.
 4. **Kritik terhadap Pembangunan Modernisasi:** Teori Ketergantungan mencela pendekatan modernisasi yang dipromosikan oleh negara-negara maju, yang percaya bahwa pembangunan ekonomi dapat dicapai melalui industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Teori Ketergantungan berpendapat bahwa pendekatan ini sering kali meningkatkan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.
 5. **Pilihan Pembangunan Terbatas:** Teori Ketergantungan menyoroti keterbatasan pilihan pembangunan yang tersedia bagi negara-negara berkembang akibat ketergantungan mereka pada negara-negara maju. Ini mencakup keterbatasan dalam kebijakan ekonomi, kebijakan perdagangan, dan akses terhadap teknologi.

6. Perjuangan untuk Kemandirian Ekonomi: Berdasarkan teori ini, negara-negara berkembang diharapkan untuk mencari cara-cara untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara-negara maju melalui pembangunan ekonomi yang mandiri, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan industri dalam negeri.

Meskipun teori ini memberikan wawasan yang penting tentang hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang, kritik terhadapnya termasuk kecenderungan untuk mengabaikan faktor-faktor internal dalam negara-negara berkembang yang juga mempengaruhi pembangunan ekonomi mereka, serta kompleksitas hubungan ekonomi internasional yang tidak selalu dapat direduksi menjadi hubungan ketergantungan yang sederhana. Menurut Theotonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.

Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) menurut Melvin DeFluer dan Sandra Ball Roeach, adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu.

9.2 Isu-isu Global Kontemporer

Isu-isu global kontemporer dalam ilmu hubungan internasional mencakup sejumlah topik yang relevan dengan dinamika politik, ekonomi, keamanan, dan lingkungan di tingkat global. Beberapa isu yang penting untuk dipahami:

1. Perubahan Iklim: Perubahan iklim merupakan salah satu isu paling mendesak dan kompleks dalam politik global saat ini. Dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu

- global, cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan air laut memiliki implikasi serius terhadap keamanan pangan, migrasi massal, konflik sumber daya, dan stabilitas ekonomi.
2. **Krisis Pengungsi dan Migrasi:** Konflik berskala besar, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik di beberapa wilayah telah menyebabkan gelombang pengungsi dan migran yang besar. Hal ini menimbulkan tekanan pada negara-negara tujuan dan dapat memicu konflik sosial serta politik di tingkat lokal dan global.
 3. **Ketidaksetaraan Ekonomi:** Kesenjangan ekonomi antara negara-negara dan dalam negara-negara tertentu menjadi sumber ketegangan sosial dan politik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, perdagangan global yang tidak adil, dan dominasi ekonomi oleh beberapa negara menjadi isu penting yang perlu diatasi.
 4. **Ketegangan dan Konflik Internasional:** Meskipun dunia telah mengalami penurunan dalam konflik antar-negara besar, masih ada ketegangan geopolitik yang signifikan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Isu-isu seperti klaim wilayah, hegemoni regional, dan perlombaan senjata masih mempengaruhi stabilitas global.
 5. **Perdagangan dan Proteksionisme:** Ketegangan perdagangan antara negara-negara besar, terutama AS dan Tiongkok, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlombaan untuk dominasi ekonomi dan teknologi serta kebijakan proteksionis dapat mengganggu hubungan internasional dan pertumbuhan ekonomi global.
 6. **Kesehatan Global:** Pandemi COVID-19 telah menyoroti pentingnya kesehatan global sebagai isu politik dan keamanan. Respons global terhadap pandemi, termasuk upaya vaksinasi, distribusi obat, dan koordinasi internasional, menjadi perhatian utama dalam hubungan internasional.

7. **Teknologi dan Keamanan Siber:** Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru dalam keamanan global, termasuk ancaman siber, spionase cyber, dan penggunaan teknologi untuk mengganggu proses politik dan pemilihan umum di berbagai negara.
8. **Ekstremisme dan Terorisme:** Ancaman dari kelompok ekstremis dan organisasi teroris internasional tetap menjadi perhatian utama dalam keamanan global. Upaya kolaboratif untuk mencegah pembiayaan terorisme, menghentikan rekrutmen, dan melawan propaganda radikal menjadi penting dalam menghadapi ancaman ini.
9. **Krisis Kemanusiaan:** Konflik bersenjata, bencana alam, dan krisis politik sering kali mengakibatkan krisis kemanusiaan yang membutuhkan respons internasional. Bantuan kemanusiaan, perlindungan terhadap warga sipil, dan upaya rekonsiliasi menjadi bagian penting dari upaya penanganan krisis ini.

Memahami dan mengatasi isu-isu global kontemporer ini memerlukan kerja sama dan diplomasi yang kuat antara negara-negara, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat lokal, regional, dan global.

➤ **Perubahan Iklim**

Perubahan iklim adalah salah satu isu global paling mendesak dalam ilmu hubungan internasional. Ini melibatkan peningkatan suhu global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan. Beberapa aspek penting dari isu perubahan iklim dalam konteks hubungan internasional:

1. **Dampak Multidimensional:** Perubahan iklim memiliki dampak multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Ini mencakup

kerugian ekonomi akibat bencana alam, migrasi paksa, ketidakstabilan politik, dan ancaman terhadap keamanan pangan dan air.

2. **Kerja Sama Internasional:** Mengatasi perubahan iklim memerlukan kerja sama internasional yang kuat antara negara-negara di seluruh dunia. Kesepakatan global seperti Persetujuan Paris menjadi landasan bagi upaya bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tak terhindarkan.
3. **Dinamika Diplomatik:** Diplomasi iklim telah menjadi bagian integral dari agenda hubungan internasional. Negara-negara berupaya untuk mempengaruhi kebijakan internasional tentang perubahan iklim, menegosiasikan kesepakatan, dan mendorong aksi bersama untuk mengurangi emisi.
4. **Ketimpangan dan Keadilan:** Perubahan iklim tidak merata dalam dampaknya, dengan negara-negara berkembang sering kali menjadi yang paling rentan terhadap konsekuensinya. Isu-isu tentang ketimpangan dan keadilan menjadi penting dalam pembicaraan tentang perubahan iklim, termasuk pertanyaan tentang tanggung jawab historis dan kontribusi yang adil dari negara-negara maju.
5. **Inovasi Teknologi dan Keuangan:** Teknologi dan keuangan memainkan peran penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Investasi dalam energi terbarukan, teknologi hijau, dan inovasi rendah karbon menjadi kunci dalam mengubah arah ekonomi menuju jalur yang lebih berkelanjutan.
6. **Pertanyaan Keamanan:** Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi keamanan global melalui meningkatnya konflik atas sumber daya alam, migrasi paksa, dan destabilisasi politik di beberapa wilayah. Ini menunjukkan perlunya mengintegrasikan aspek

keamanan dalam upaya untuk mengatasi perubahan iklim.

7. **Tantangan dan Peluang Ekonomi:** Meskipun ada tantangan serius yang terkait dengan perubahan iklim, juga ada peluang ekonomi yang signifikan dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Industri energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan lapangan kerja.

Perubahan iklim bukanlah isu yang dapat diselesaikan oleh satu negara atau entitas saja. Diperlukan komitmen dan kerja sama global yang kuat untuk mengatasi tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan aman bagi generasi mendatang.

Isu perubahan iklim merupakan isu modern yang hadir dalam ilmu hubungan internasional dan menjadi isu penting selain isu keamanan dan ekonomi. Faktor lingkungan dalam politik internasional menjadi sebuah kesatuan dalam segala lini kehidupan yang menunjang aktivitas manusia (Porter dan Brown, 1996).

➤ **Krisis Pengungsi dan Migrasi**

Krisis pengungsi dan migrasi merupakan fenomena global yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan krisis pengungsi dan migrasi antara lain konflik bersenjata, perubahan iklim, ketidakstabilan politik, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Di bawah ini adalah beberapa aspek yang terkait dengan krisis pengungsi dan migrasi:

1. **Konflik Bersenjata:** Konflik bersenjata adalah penyebab utama dari pengungsi dan migrasi. Perang saudara, konflik etnis, dan konflik antar negara sering kali memaksa jutaan orang untuk meninggalkan rumah mereka dalam mencari keamanan.

2. **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim menyebabkan bencana alam yang sering kali menghancurkan rumah dan sumber daya bagi komunitas yang rentan, memaksa mereka untuk berpindah ke tempat lain.
3. **Ketidakstabilan Politik:** Ketidakstabilan politik di beberapa negara menyebabkan penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia, yang mendorong orang untuk mencari perlindungan di tempat lain.
4. **Kemiskinan:** Kemiskinan yang ekstrem mendorong orang untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik di negara lain, baik melalui migrasi resmi maupun ilegal.
5. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia:** Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penganiayaan etnis, agama, atau gender, dapat menjadi penyebab utama migrasi paksa.
6. **Krisis Kemanusiaan:** Krisis kemanusiaan seperti kelaparan, epidemi, atau konflik bersenjata yang meluas dapat memaksa orang untuk melarikan diri dan mencari bantuan di tempat lain.

Dampak dari krisis pengungsi dan migrasi ini meliputi tantangan bagi negara-negara yang menerima pengungsi, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Mereka harus menghadapi masalah integrasi sosial, distribusi sumber daya, dan tekanan politik internal.

Penyelesaian krisis pengungsi dan migrasi memerlukan kerja sama internasional yang kuat, solusi politik untuk konflik yang mendasarinya, upaya pencegahan perubahan iklim, peningkatan kesejahteraan ekonomi global, dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Ini adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan komitmen global untuk menyelesaikannya.

Menurut International Organization for Migration (IOM), Migrasi Internasional adalah pergerakan sejumlah orang yang meninggalkan negara asalnya ke negara lain untuk

tinggal dan menetap secara permanen atau sementara. (IOM 2011; 52). Sedangkan menurut PBB, sebagaimana dikutip oleh Koser (2007; 4), Migrasi Internasional adalah seseorang yang meninggalkan negaranya untuk tinggal dan menetap di luar negaranya sekurang-kurangnya satu tahun. Pada bagian lain, Bali (1997; 200) menyebutkan bahwa Migrasi Internasional adalah perpindahan penduduk yang melintasi batas negara.

➤ **Ketidaksetaraan Ekonomi**

Ketidaksetaraan ekonomi merujuk pada kesenjangan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara individu, kelompok, atau negara-negara. Fenomena ini sering kali diukur dengan menggunakan indikator seperti indeks Gini, yang mengukur seberapa jauh distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan ekonomi:

1. **Akses ke Pendidikan:** Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas dapat memperpetuat ketidaksetaraan ekonomi. Individu yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas sering kali memiliki peluang ekonomi yang terbatas.
2. **Ketidaksetaraan dalam Kesempatan Ekonomi:** Ketidaksetaraan dalam kesempatan ekonomi, seperti akses terhadap pekerjaan yang layak, promosi, dan pengusaha yang berada dalam kendali kelompok tertentu, dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
3. **Perbedaan Gaji dan Upah:** Perbedaan dalam tingkat gaji dan upah antara sektor, profesi, dan tingkat pendidikan dapat memperbesar ketidaksetaraan ekonomi.

4. **Kesenjangan Gender:** Ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi secara keseluruhan.
5. **Kesenjangan Regional:** Perbedaan dalam pembangunan infrastruktur, investasi, dan akses terhadap pasar antar wilayah atau negara dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi regional.
6. **Ketidaksetaraan Akses ke Sumber Daya:** Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, dan teknologi juga dapat memperbesar kesenjangan ekonomi.

Dampak dari ketidaksetaraan ekonomi bisa sangat merugikan masyarakat, termasuk menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan ketegangan sosial, dan menghambat pembangunan manusia secara keseluruhan.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, diperlukan kebijakan yang memperkuat akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja yang adil, perlindungan sosial yang memadai, serta kebijakan redistribusi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi untuk kelompok yang rentan seperti perempuan dan minoritas juga penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Para ahli ekonomi secara umum menafsirkan ketidaksetaraan ekonomi sebagai perbedaan pada distribusi hasil, kemampuan, dan kesejahteraan antara masyarakat atau grup dalam suatu negara atau antara negara-negara. Ketidaksetaraan ekonomi dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti keanekaragaman sosial, pengaruh budaya, pemerintahan yang tidak adil, dan kekurangan akses ke sumber daya dan peluang.

Beberapa ahli ekonomi menganggap ketidaksetaraan ekonomi sebagai masalah yang perlu ditangani dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang tercoba. Strategi yang diambil untuk mengatasinya dapat meliputi peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, serta pengembangan program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi dari masyarakat tersebut.

➤ **Ketegangan dan konflik internasional**

Ketegangan dan konflik internasional merupakan fenomena yang dapat timbul dari berbagai penyebab, seperti persaingan kepentingan politik, ideologi, agama, ekonomi, atau sumber daya alam. Ketegangan ini dapat berkembang menjadi konflik terbuka antara negara-negara atau kelompok-kelompok di dalam negara.

Beberapa penyebab dan contoh ketegangan dan konflik internasional:

1. **Persaingan Kekuasaan:** Persaingan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik di tingkat regional atau global sering kali menjadi penyebab utama ketegangan antara negara-negara.
2. **Sumber Daya Alam:** Persaingan atas sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral sering kali menjadi pemicu konflik antara negara-negara yang mengklaim hak atas sumber daya tersebut.
3. **Ketegangan Perbatasan:** Sengketa perbatasan antara negara-negara dapat menyebabkan ketegangan yang meningkat dan berpotensi memicu konflik militer.
4. **Agenda Ideologis atau Agama:** Perbedaan ideologi politik atau agama sering kali menjadi penyebab ketegangan antara negara-negara atau kelompok-kelompok di dalam negara.

5. **Intervensi Asing:** Campur tangan asing dalam urusan dalam negeri suatu negara dapat memicu konflik internal dan ketegangan antara negara-negara.
6. **Krisis Kemanusiaan:** Krisis kemanusiaan seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, atau bencana alam sering kali menjadi pemicu konflik internasional atau meningkatkan ketegangan antara negara-negara.

Contoh-contoh nyata ketegangan dan konflik internasional termasuk sengketa wilayah antara China dan negara-negara tetangga di Laut China Selatan, konflik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, serta persaingan geopolitik antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok.

Pencegahan dan penyelesaian konflik internasional memerlukan upaya diplomasi yang kuat, kerja sama internasional, penggunaan lembaga-lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk mengatasi akar penyebab konflik, seperti ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia.

John Mearsheimer berpandangan bahwa Konflik internasional adalah pertikaian atau perselisihan antara negara-negara atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bertentangan di tingkat internasional. Konflik semacam itu dapat melibatkan berbagai masalah, termasuk perbatasan, sumber daya alam, ideologi, agama, keamanan nasional, hak asasi manusia, persaingan politik, dan ekonomi.

➤ **Perdagangan dan proteksionisme**

Perdagangan dan proteksionisme adalah dua konsep yang berkaitan erat dalam konteks ekonomi internasional. Perdagangan internasional mengacu pada pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi antara negara-negara, sedangkan proteksionisme adalah kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negerinya dari persaingan luar negeri dengan menggunakan berbagai alat, seperti tarif, kuota impor, subsidi, atau hambatan non-tarif. Beberapa poin penting terkait dengan perdagangan dan proteksionisme:

1. **Keuntungan Perdagangan:** Teori perdagangan internasional menunjukkan bahwa perdagangan bebas dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, karena memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.
2. **Ketergantungan Ekonomi:** Negara-negara sering kali memiliki ketergantungan ekonomi satu sama lain melalui perdagangan internasional. Ketergantungan ini dapat menciptakan hubungan yang kompleks antara negara-negara dan mempengaruhi kestabilan politik dan ekonomi global.
3. **Proteksionisme:** Proteksionisme merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Meskipun dapat memberikan perlindungan sementara bagi industri domestik, proteksionisme sering kali dianggap memiliki konsekuensi negatif, seperti memicu balas dendam dari negara lain, memperburuk ketidakadilan ekonomi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
4. **Tarif dan Hambatan Non-Tarif:** Tarif adalah pajak yang dikenakan pada impor barang dan jasa, sedangkan hambatan non-tarif meliputi berbagai regulasi, standar

teknis, atau prosedur administratif yang membuat impor menjadi lebih mahal atau sulit.

5. Perang Dagang: Ketegangan perdagangan antara negara-negara dapat memicu perang dagang, di mana negara-negara saling memberlakukan tarif atau hambatan non-tarif sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap tidak adil dari negara lain.
6. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO): WTO adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan bebas antara negara-negara anggotanya dan menyelesaikan sengketa perdagangan. WTO juga berperan dalam mengawasi praktik proteksionisme yang tidak adil.

Dalam praktiknya, kebijakan perdagangan dan proteksionisme sering menjadi subjek perdebatan politik dan ekonomi yang kompleks. Sementara perdagangan bebas dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, proteksionisme dapat memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri yang rentan, tetapi juga dapat menyebabkan reaksi negatif dari mitra perdagangan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen domestik.

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antarnegara melalui cara tata niaga, pemberlakuan tarif bea masuk impor (*tariff protection*), jalan pembatasan kuota (*non-tariff protection*), sistem kenaikan tarif dan aturan berbagai upaya menekan impor bahkan larangan impor (Lake, 2000). Sedangkan Robert Mundell (1923) Perdagangan dan proteksionisme adalah isu kompleks dengan beragam argumen dan bukti. Kebijakan perdagangan yang optimal harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat pembangunan ekonomi, struktur industri, dan distribusi pendapatan.

➤ **Kesehatan Global**

Kesehatan global merujuk pada kondisi kesehatan populasi di seluruh dunia, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit di tingkat global. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pengendalian epidemi, promosi kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan tanggapan terhadap krisis kesehatan global seperti pandemi. Beberapa poin penting terkait dengan kesehatan global:

1. **Pencegahan Penyakit Menular:** Penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, tuberkulosis, dan infeksi virus baru seperti Ebola dan COVID-19 merupakan ancaman kesehatan global yang serius. Pencegahan, deteksi, dan pengendalian penyakit-penyakit ini memerlukan kerja sama internasional dan sistem pemantauan kesehatan global yang kuat.
2. **Penyakit Tidak Menular:** Penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker juga menjadi beban kesehatan global yang meningkat. Ini sering kali terkait dengan gaya hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan penggunaan zat adiktif.
3. **Krisis Kesehatan Global:** Krisis kesehatan global seperti pandemi influenza, SARS, MERS, Ebola, dan COVID-19 dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan ekonomi dunia. Tanggapan terhadap krisis semacam ini memerlukan koordinasi yang kuat antara negara-negara dan lembaga-lembaga kesehatan internasional.
4. **Akses Terhadap Layanan Kesehatan:** Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas menjadi penting dalam upaya meningkatkan kesehatan global. Banyak negara di dunia masih menghadapi tantangan dalam

menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh populasi.

5. **Kerja Sama Internasional:** Kerja sama internasional merupakan kunci dalam upaya meningkatkan kesehatan global. Organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia berperan penting dalam menyediakan bantuan teknis, sumber daya, dan koordinasi untuk menangani masalah kesehatan global.
6. **Promosi Kesehatan dan Pendidikan:** Promosi kesehatan dan pendidikan menjadi kunci dalam mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gaya hidup sehat, vaksinasi, dan tindakan pencegahan penyakit.

Kesehatan global menjadi semakin penting dalam era globalisasi, di mana perjalanan dan perdagangan antar negara semakin meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan tantangan kesehatan yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dan koordinasi global sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan kesehatan global yang kompleks ini.

Menurut World Health Organization Kesehatan global merupakan isu yang membutuhkan kerja sama lintas negara dan bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai kesetaraan status kesehatan masyarakat dunia. Faktor-faktor seperti mobilitas penduduk, globalisasi perdagangan, kejadian luar biasa penyakit yang berdampak global, perubahan iklim, dan disparitas status kesehatan antar negara telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya masalah kesehatan global.

➤ **Teknologi dan Keamanan Siber**

Teknologi dan keamanan Siber memiliki keterkaitan yang erat dalam era digital saat ini. Teknologi memberikan kemungkinan besar untuk transformasi positif dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, tetapi juga membawa risiko baru terkait dengan keamanan data dan sistem informasi. Beberapa poin terkait dengan teknologi dan keamanan Siber:

1. **Pentingnya Keamanan Siber:** Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keamanan siber menjadi semakin penting. Pelanggaran keamanan data, serangan perangkat lunak berbahaya, pencurian identitas, dan serangan siber lainnya dapat memiliki dampak yang serius bagi individu, perusahaan, dan bahkan infrastruktur kritis suatu negara.
2. **Ancaman Terhadap Keamanan Siber:** Ancaman keamanan siber dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk kelompok-kelompok kriminal, negara-negara asing, dan bahkan individu yang memiliki motivasi politik atau ideologis. Serangan siber dapat berupa malware, serangan phishing, pencurian data, serangan DDoS, dan banyak lagi.
3. **Perlindungan Data Pribadi:** Privasi dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama dalam era digital ini. Undang-undang perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa atau CCPA di California bertujuan untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka dan mendorong praktik yang lebih baik dalam pengelolaan data.
4. **Pengembangan Teknologi Keamanan:** Seiring dengan berkembangnya ancaman keamanan siber, ada peningkatan dalam pengembangan teknologi keamanan seperti perangkat lunak antivirus, firewall,

enkripsi data, dan teknologi deteksi ancaman canggih. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin juga digunakan untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap serangan siber.

5. **Kerja Sama Internasional:** Keamanan siber menjadi masalah global yang memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Negara-negara bekerja sama untuk berbagi informasi intelijen, mengembangkan standar keamanan yang seragam, dan menanggapi serangan siber lintas batas.
6. **Peningkatan Kesadaran dan Keterampilan:** Kesadaran akan ancaman keamanan siber dan keterampilan dalam mengelola keamanan informasi menjadi penting bagi individu dan organisasi. Pelatihan keamanan siber untuk karyawan, edukasi tentang praktik keamanan cyber yang baik, dan pelaksanaan kebijakan keamanan yang ketat merupakan langkah-langkah yang penting dalam mengurangi risiko keamanan siber.

Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, keamanan siber akan tetap menjadi isu yang relevan dan penting dalam waktu yang akan datang. Penting bagi individu, perusahaan, dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri dari ancaman keamanan siber yang terus berkembang.

Menurut Myriam Dunn Cavelty, masalah umum dalam ancaman-ancaman siber adalah menyerang jaminan informasi yang mengenai keamanan dasar informasi dan sistem informasi. Oleh sebab itu, jaminan informasi (*information assurance*) merupakan konsep proteksi utama dalam keamanan siber. Sedangkan Harruma (2022), Kejahatan siber adalah sebuah tindakan kriminal yang menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet sebagai alat tindakan kejahatan. Kejahatan siber ini memiliki karakteristik seperti bersifat global, dapat

menimbulkan kekacauan yang tidak terlihat, pelaku tidak mengenal usia dan bersifat universal, menggunakan teknologi yang sulit dimengerti orang awam, dan dapat menimbulkan kerugian material dan atau non-material.

Menurut Basmatulhana (2022), keamanan siber (*cyber security*) adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Biasanya Keamanan Siber ini biasanya bersangkutan dengan alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang digunakan untuk melindungi asset organisasi atau negara dan meminimalisir munculnya resiko ke dalam komputer.

➤ **Ekstremisme dan Terorisme**

Ekstremisme dan terorisme merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak yang serius pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Beberapa poin penting terkait dengan ekstremisme dan terorisme:

1. **Definisi:** Ekstremisme merujuk pada keyakinan atau praktik yang ekstrim dan radikal dalam ideologi politik, agama, atau sosial. Terorisme, di sisi lain, adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologis tertentu.
2. **Motivasi:** Terorisme dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ideologi ekstrem, ketidakpuasan politik atau sosial, perpecahan etnis atau agama, atau keinginan untuk membalas dendam terhadap pemerintah atau kelompok tertentu.
3. **Metode:** Terorisme sering menggunakan taktik-taktik seperti serangan bom, serangan bersenjata, serangan cyber, atau serangan terhadap infrastruktur kritis. Teroris juga dapat menggunakan propaganda dan rekrutmen secara online untuk memperluas jaringan mereka.

4. **Dampak:** Terorisme dapat memiliki dampak yang merusak pada masyarakat, termasuk korban jiwa dan luka-luka, ketakutan dan kecemasan masyarakat, pembatasan kebebasan individu, dan gangguan terhadap stabilitas politik dan ekonomi.
5. **Respons Terhadap Terorisme:** Respons terhadap terorisme termasuk tindakan penegakan hukum, upaya pencegahan radikalisme, kerja sama internasional dalam pertukaran intelijen dan penindakan hukum, serta upaya rekonsiliasi dan pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpuasan dan kebencian yang mungkin memicu terorisme.
6. **Penanganan Masalah Akar:** Untuk mengatasi terorisme secara efektif, penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mendorong radikalisme dan ekstremisme. Ini termasuk ketidakpuasan politik atau sosial, ketidakadilan ekonomi, konflik etnis atau agama, dan perpecahan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa kebanyakan orang yang terlibat dalam kelompok ekstremis tidak menggunakan kekerasan atau terlibat dalam tindakan terorisme. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara ekstremisme sebagai sebuah sikap atau keyakinan, dan terorisme sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya untuk mengatasi terorisme harus mencakup penanganan ekstremisme, pencegahan radikalisme, dan penanganan konflik yang mendasarinya.

Wahid, dkk (2004) menjelaskan bahwa terorisme adalah suatu kekerasan yang dilakukan terorganisasi, mengartikan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan sedangkan ekstremisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman

kekerasan ekstrem, dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

➤ **Krisis Kemanusiaan**

Krisis kemanusiaan merujuk pada situasi di mana terdapat dampak serius terhadap kesejahteraan, keselamatan, dan hak asasi manusia dari sejumlah besar orang. Krisis semacam ini sering kali disebabkan oleh konflik bersenjata, bencana alam, perubahan iklim, atau pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa poin terkait dengan krisis kemanusiaan:

1. **Konflik Bersenjata:** Konflik bersenjata adalah penyebab utama dari krisis kemanusiaan di banyak bagian dunia. Konflik semacam ini dapat menyebabkan pengungsi, korban jiwa, kekurangan makanan dan air, serta kerusakan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
2. **Bencana Alam:** Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, badai tropis, dan kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan besar-besaran dan krisis kemanusiaan. Bencana semacam ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa, pengungsi, kekurangan pangan dan air bersih, serta kerusakan infrastruktur.
3. **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim menyebabkan cuaca yang ekstrem dan fenomena alam yang lebih sering terjadi, meningkatkan risiko bencana alam dan krisis kemanusiaan. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan kelaparan, kekurangan air, dan konflik atas sumber daya alam.
4. **Pengungsi dan Displaced Persons:** Jutaan orang menjadi pengungsi atau terlantar akibat konflik bersenjata, kekerasan etnis atau agama, atau bencana alam. Mereka sering kali membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti tempat tinggal sementara,

makanan, air bersih, perawatan medis, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

5. **Akses Terhadap Bantuan Kemanusiaan:** Salah satu tantangan utama dalam mengatasi krisis kemanusiaan adalah akses terhadap wilayah yang terkena dampak. Konflik bersenjata, perubahan iklim, atau kebijakan politik dapat menghalangi bantuan kemanusiaan dari mencapai mereka yang membutuhkan.
6. **Respons Kemanusiaan:** Respons terhadap krisis kemanusiaan melibatkan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), badan kemanusiaan PBB, dan masyarakat internasional. Tanggapan ini meliputi penyediaan bantuan kemanusiaan, koordinasi logistik, evakuasi medis, dan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi jangka panjang.

Krisis kemanusiaan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan tanggapan yang cepat, koordinasi yang efektif, dan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. Diperlukan kerja sama internasional yang kuat dan investasi dalam pencegahan konflik, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi dampak krisis kemanusiaan di masa depan.

Menurut Ibrahim (2017) Krisis Kemanusiaan merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang merupakan ancaman kritis terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan atau kesejahteraan suatu komunitas atau kelompok besar orang, biasanya mencakup wilayah yang luas. Tidak ada definisi universal mengenai krisis kemanusiaan, dan istilah 'krisis kemanusiaan' dan 'darurat kemanusiaan' sering digunakan secara bergantian.

9.3 Organisasi Internasional dan Kemitraan

Organisasi internasional dan kemitraan merupakan instrumen penting dalam menangani tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa organisasi internasional dan kemitraan yang memiliki peran penting dalam dunia saat ini:

1. **PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):** PBB adalah organisasi internasional terbesar yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama internasional, dan pembangunan berkelanjutan. PBB memiliki berbagai badan, termasuk Dewan Keamanan, Majelis Umum, UNESCO, UNICEF, WHO, dan lain-lain, yang bekerja untuk memecahkan masalah global seperti konflik bersenjata, kemiskinan, penyakit menular, dan perubahan iklim.
2. **Bank Dunia:** Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dan bantuan kepada negara-negara berkembang untuk proyek-proyek pembangunan. Fokus Bank Dunia termasuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan lingkungan.
3. **IMF (*International Monetary Fund*):** IMF adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas ekonomi global dan pertumbuhan berkelanjutan. IMF memberikan bantuan finansial kepada negara-negara yang mengalami krisis keuangan, memberikan saran kebijakan ekonomi, dan melakukan penelitian ekonomi.
4. **Organisasi Perdagangan Dunia (WTO):** WTO adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan bebas antara negara-negara anggotanya. WTO menegosiasikan perjanjian perdagangan, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggotanya.

5. **G20:** G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan Uni Eropa. G20 bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi global, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan menanggapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis keuangan.
6. **Kemitraan Publik-Privat:** Kemitraan antara sektor publik, swasta, dan non-profit juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kemitraan semacam ini dapat mencakup investasi swasta dalam proyek-proyek pembangunan, kolaborasi dalam inovasi teknologi, atau upaya bersama dalam memecahkan masalah sosial dan lingkungan.

Kemitraan dan kerja sama internasional merupakan kunci dalam menangani tantangan global yang kompleks dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat antara negara-negara, organisasi internasional, dan sektor swasta, kita dapat meningkatkan kesejahteraan global dan mempromosikan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia.

Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Organisasi internasional dapat didefinisikan, sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri.

9.4 Diplomasi dan Hubungan Bilateral

Diplomasi dan hubungan bilateral merupakan instrumen penting dalam politik luar negeri suatu negara. Beberapa poin penting terkait dengan diplomasi dan hubungan bilateral:

1. **Definisi:** Diplomasi adalah proses negosiasi, perundingan, dan interaksi antara negara-negara untuk

- mencapai tujuan politik, ekonomi, atau keamanan tertentu. Hubungan bilateral mengacu pada interaksi dan kerja sama antara dua negara.
2. **Tujuan:** Tujuan diplomasi dan hubungan bilateral dapat bervariasi, termasuk mempromosikan perdamaian dan keamanan, memperkuat kerja sama ekonomi, meningkatkan pertukaran budaya dan pendidikan, serta memecahkan konflik dan sengketa antara negara-negara.
 3. **Diplomasi Publik:** Diplomasi publik atau diplomasi budaya melibatkan promosi budaya, bahasa, seni, dan nilai-nilai nasional sebagai bagian dari diplomasi suatu negara. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan hubungan antara negara-negara.
 4. **Diplomasi Ekonomi:** Diplomasi ekonomi melibatkan promosi kepentingan ekonomi suatu negara di tingkat internasional, termasuk perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya. Hal ini sering dilakukan melalui negosiasi perjanjian perdagangan, promosi investasi, dan kampanye pemasaran nasional.
 5. **Peran Diplomat:** Diplomat adalah perwakilan resmi suatu negara di luar negeri yang bertugas untuk menjaga dan mempromosikan kepentingan nasional mereka. Mereka melakukan negosiasi dengan diplomat dari negara lain, menyediakan informasi intelijen, dan memberikan bantuan kepada warga negara mereka di luar negeri.
 6. **Krisis Diplomatik:** Krisis diplomatik dapat terjadi ketika terjadi ketegangan atau konflik antara negara-negara, baik akibat perselisihan teritorial, kebijakan luar negeri yang kontroversial, atau serangan terhadap warga negara suatu negara di luar negeri.
 7. **Kemitraan Strategis:** Beberapa negara membangun hubungan bilateral yang lebih dalam dan strategis, disebut sebagai kemitraan strategis. Kemitraan semacam ini dapat melibatkan kerja sama dalam bidang keamanan, politik, ekonomi, teknologi, dan budaya.

Hubungan bilateral dan diplomasi merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan dunia. Dengan diplomasi yang efektif, negara-negara dapat mempromosikan kepentingan nasional mereka, memecahkan konflik, membangun kemitraan yang kuat, dan mencapai tujuan bersama di tingkat internasional.

Menurut Berridge (2002), diplomasi bilateral adalah hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Diplomasi bilateral adalah diplomasi yang paling sederhana dan tertua. Diplomasi bilateral biasanya merupakan misi dari kedutaan besar dan kunjungan kenegaraan

Menurut Harwanto dan Mirsawati, diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai. Diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain.

9.5 Kemajuan Teknologi dan Hubungan Internasional

Kemajuan teknologi memiliki dampak yang signifikan pada hubungan internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial. Beberapa cara di mana kemajuan teknologi mempengaruhi hubungan internasional:

1. **Komunikasi:** Teknologi telah merevolusi cara negara-negara berkomunikasi satu sama lain. Penggunaan email, telekonferensi, media sosial, dan platform komunikasi lainnya memungkinkan para diplomat dan pejabat pemerintah untuk berinteraksi secara instan, efisien, dan tanpa batas geografis.
2. **Perdagangan:** Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah lanskap perdagangan internasional. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) memungkinkan perusahaan untuk menjalankan bisnis secara global dengan lebih efektif, memperluas pasar

- mereka, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antar negara.
3. **Keamanan:** Teknologi memainkan peran penting dalam bidang keamanan internasional. Penggunaan teknologi satelit, drone, dan sistem informasi berbasis komputer memungkinkan negara-negara untuk memantau aktivitas militer di wilayah mereka sendiri dan di seluruh dunia, serta meningkatkan kekuatan pertahanan dan deteksi ancaman keamanan.
 4. **Spionase dan Intelijen:** Kemajuan teknologi juga telah memperluas kemampuan intelijen negara-negara untuk mengumpulkan informasi tentang negara lain, baik melalui pengintaian elektronik, pemantauan komunikasi online, atau penggunaan teknologi canggih lainnya. Hal ini telah memunculkan isu-isu terkait privasi dan keamanan data.
 5. **Diplomasi Publik:** Media sosial dan internet telah memberikan platform baru bagi negara-negara untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional dan mempromosikan citra mereka di tingkat global. Diplomasi publik melalui jejaring sosial, situs web pemerintah, dan kampanye informasi menjadi semakin penting dalam memengaruhi opini publik di luar negeri.
 6. **Krisis dan Konflik:** Teknologi juga dapat menjadi faktor yang memperumit atau memperburuk konflik internasional. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan propaganda, memobilisasi massa, atau memperkuat kelompok ekstremis dapat memperkeruh ketegangan antar negara atau memperburuk konflik yang sudah ada.

Penting untuk dicatat bahwa sementara teknologi memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan internasional dan menciptakan kesempatan baru, ia juga dapat membawa tantangan dan risiko baru. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan yang bijaksana dalam mengelola dampak teknologi pada hubungan internasional,

serta memperkuat kerja sama internasional untuk memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang yang muncul.

Teknologi digital berpotensi positif dalam membina kerja sama global, komunikasi, dan keterhubungan antaraktor yang terlibat. Teknologi komunikasi digital dan platform media sosial berkontribusi pada penyebaran nilai-nilai demokrasi, kesadaran hak asasi manusia, dan saling ketergantungan ekonomi. Internet dan jaringan digital sebagai mekanisme untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional, mendorong pertukaran budaya, dan mencari pemecahan masalah secara kolaboratif dalam skala global (Eriksson & Newlove-Eriksson, 2021).

9.6 Perspektif Kritis

Perspektif kritis, terutama dalam konteks hubungan internasional, menawarkan analisis yang mendalam terhadap struktur kekuasaan, ideologi, dan dinamika politik yang mendasari tindakan negara-negara di tingkat global. Beberapa poin kunci terkait perspektif kritis dalam hubungan internasional:

1. **Analisis Kekuasaan:** Perspektif kritis menyoroti distribusi kekuasaan di antara negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya. Ini mencakup identifikasi dominasi dan ketidaksetaraan kekuasaan, serta penelusuran bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan dan dipertahankan.
2. **Struktur Politik Global:** Pendekatan kritis menyoroti struktur politik global yang mendasari sistem internasional. Ini mencakup pemerintahan global, organisasi internasional, dan institusi-institusi kekuasaan yang mempengaruhi tindakan negara-negara.
3. **Ideologi dan Hegemoni:** Perspektif kritis meneliti peran ideologi dan hegemoni dalam hubungan internasional. Ini mencakup analisis terhadap bagaimana ideologi tertentu

- memengaruhi tindakan dan kebijakan negara-negara, serta bagaimana negara-negara menciptakan dan mempertahankan hegemoni mereka di tingkat global.
4. **Kritis terhadap Imperialisme dan Kolonialisme:** Pendekatan kritis menyoroti peran imperialisme dan kolonialisme dalam membentuk struktur politik global dan hubungan antar-negara. Ini termasuk analisis terhadap sisa-sisa kolonialisme dalam hubungan internasional kontemporer dan upaya-upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan penindasan yang masih terjadi.
 5. **Peran Kelompok-Kelompok Marginal:** Perspektif kritis menekankan peran kelompok-kelompok yang marginal atau terpinggirkan dalam hubungan internasional. Ini mencakup penelusuran bagaimana struktur kekuasaan global dapat memperkuat ketidaksetaraan dan marginalisasi, serta upaya-upaya untuk memberikan suara kepada kelompok-kelompok tersebut.
 6. **Kritis terhadap Globalisasi Neoliberal:** Pendekatan kritis menyoroti dampak globalisasi neoliberal, yang menekankan pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi, terhadap negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia. Ini mencakup analisis terhadap ketidaksetaraan ekonomi global, komodifikasi segala hal, dan efek destruktif terhadap lingkungan dan budaya.

Perspektif kritis dalam hubungan internasional menantang pandangan konvensional tentang politik global dan menyoroti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan penindasan yang mungkin terjadi dalam sistem internasional. Dengan menyediakan analisis yang mendalam dan kritis terhadap struktur kekuasaan dan ideologi, perspektif kritis berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan internasional dan upaya untuk mencapai kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan global.

Mazhab Frankfurt mengatakan bahwa teori kritis adalah sebuah konsep akademis yang rumit dan sulit untuk dipahami, tetapi sangat penting dalam menjelaskan hubungan antara objek dan identitas yang berbeda. Teori kritis mengamati objek yang merupakan satu kesatuan dari identitas dan perbedaan, satu kesatuan dari yang bertentangan.

9.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa metode penelitian yang umum digunakan:

1. **Metode Kualitatif:** Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual melalui pengumpulan data non-angka, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang nilai, keyakinan, dan pengalaman subjek penelitian.
2. **Metode Kuantitatif:** Metode kuantitatif menggunakan data numerik untuk menganalisis hubungan antara variabel dan menguji hipotesis penelitian. Ini melibatkan penggunaan teknik statistik dan analisis data untuk menghasilkan generalisasi dan pola yang dapat diukur.
3. **Metode Gabungan (*Mixed Methods*):** Metode gabungan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang suatu fenomena. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan atau berturut-turut.
4. **Studi Kasus:** Metode studi kasus digunakan untuk mempelajari fenomena sosial dalam konteks spesifik yang mendalam dan terperinci. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang terbatas,

dengan fokus pada pemahaman konteks dan dinamika yang kompleks.

5. **Survei:** Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi dari responden tentang perilaku, pendapat, atau karakteristik mereka. Survei sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data dari sampel yang besar dan representatif.
6. **Eksperimen:** Metode eksperimen melibatkan manipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkontrol. Ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan tentang hubungan sebab-akibat antara variabel.
7. **Analisis Dokumen:** Metode analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen tertulis, seperti laporan, artikel jurnal, dan arsip historis, untuk mendapatkan wawasan tentang suatu topik atau fenomena.
8. **Analisis Konten:** Metode analisis konten digunakan untuk menganalisis teks atau media secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna tertentu. Ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam teks tertulis atau visual.

Pemilihan metode penelitian tergantung pada pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan jenis data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa peneliti juga menggunakan pendekatan campuran atau triangulasi metode untuk memperkuat validitas dan keandalan temuan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan.

Penelitian Kuantitatif, menurut Sugiyono (2017:8) adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Creswell, 2015, mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan Menurut Sugiyono, 2016 metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Ayu Angelina. (2017). Upaya Indonesian Diaspora Network (IDN) Dalam Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Belanda Di Bidang Sosial Budaya 2013-2016. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol.4 No.2 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau*, Pekanbaru, 3-4.
- Asrudin, A. (2017). Thomas Kuhn Dan Teori hubungan internasional: Realisme Sebagai paradigma. *Global South Review*, 1(2), 107.
<https://doi.org/10.22146/globalsouth.28830>
- Azwar Asrudin. (2014). "Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma". *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*.
- Berutu, Mesi Fransiska. (2016). Kepentingan Pemerintah Norwegia Dalam Kerjasama Penangan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Indonesia Melalui Mekanisme REDD+. *Journal of International Relations Vol.2 No.3 Universitas Diponegoro, Semarang*, 11-12.
- Bhasin, K. & Khan, N. S. (1999). *Feminisme dan Relevansinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Winarno. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*.
- Danus Ardiansah, "Metode Penelitian Komunikasi 3: Analisis isi (Kuantitatif)", diakses dari https://www.academia.edu/11381625/Metode_Penelitian_Komunikasi_Analisis_Isi_
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (terj. Kamdani, Rianayati Kusmini P). Holtsville. New York: Pustaka Pelajar

- Karyono, Sharaswaty. (2016). Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Belanda Dalam Bidang Pertahanan Tahun 2013-2014. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol.11 No.3 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau Pekanbaru*, 3-4.
- Paramita, Novritrianti. (2017). Kerjasama Antara Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG) Dan World Meteorological Organization (WMO) Kaitannya Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Indonesia. *Skripsi Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Bandung*, 4-13.
- Rizky Hikmawan, S. S. (2017). Pemikiran Bela Negara Dan Hubungan internasional: Pergeseran Peran Negara Dan Implikasinya terhadap perkembangan sudut pandang studi Ilmu Hubungan internasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3).
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.234>
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional, Terjemahan Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman*
- Rudy, Teuku May. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalahmasalah Global*. Jakarta: Refika Aditama
- Sitepu, P. Anthonius. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Tangerang: Graha Ilmu.
- Suparlan, S. (2019). Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran. *ISLAMIKA*, 1(2), 79-88.
<https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.208>
- Swabra, M. (2022). *Teori Sosiologi Moderen Dalam DESAIN Sebua PENGANTAR Teori Teori Moderen*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/m6n9k>

BAB 10

HUBUNGAN INTERNASIONAL PRA-KONTEMPORER

Oleh Hidayat Chusnul Chotimah

10.1 Pendahuluan

Beberapa penstudi Ilmu Hubungan Internasional berpendapat bahwa hubungan internasional kontemporer dimulai pada tahun 1648 yaitu dengan adanya Perjanjian Westphalia. Mengacu pada periode tersebut, penulis akan menjelaskan hubungan internasional pra-kontemporer sebelum terbentuknya *nation-state*. Oleh sebab itu, Chapter ini akan menjelaskan awal mula peradaban sebagai unit dasar yang akan dikaji dalam hubungan internasional di era klasik. Peradaban adalah unit dasar dari tatanan dunia, sama halnya dengan negara-bangsa sebagai unit dasar dalam “sistem internasional”. Dalam hal ini, konsep “tatanan dunia” merupakan gagasan yang lebih luas dibandingkan gagasan “sistem internasional”. Kedua istilah tersebut menyiratkan adanya ketergantungan dalam hubungan antar negara. Artinya, tidak mungkin ada suatu sistem tanpa interaksi dan saling ketergantungan pada tingkat tertentu. Istilah “tatanan dunia” menjadikan kita mampu untuk menganalisis sistem yang lebih luas bahkan dalam kajian hubungan internasional pada era klasik. Terlebih pada era klasik, sistem kerajaan dan hubungan dengan bangsa lain belum menyerap gagasan atas kedaulatan Westphalia. Meskipun gagasan sistem internasional seringkali dikaitkan dengan istilah “*anarchy*” dalam arti tidak memiliki otoritas tertinggi di atas unit-unit (negara), di sini tatanan dunia dapat bersifat hierarkis ataupun anarkis. Artinya tatanan dunia

bukanlah sebuah entitas yang statis yang dapat berpindah dari anarki ke hierarki. Dengan kata lain, peradaban yang sama dapat menghasilkan kedua jenis tatanan dunia pada waktu yang berbeda, seperti yang terjadi pada zaman dahulu seperti Sumeria, Cina, India, dan Eropa, baik sebelum maupun sesudah Westphalia (Acharya, 2023).

Dengan demikian, masih cukup relevan apabila kita mempelajari hubungan internasional pada masa klasik. Terlebih apabila hubungan internasional kita definisikan secara lebih luas yaitu mencakup interaksi masyarakat yang melintasi batas-batas politik yang menekankan pada aspek transkultural dan transregional atau evolusi norma dan praktik peradaban yang ada di dunia (Malchow, 2020). Menurut Roatovtaeff (1922), konsep dasar hubungan internasional pada masa klasik dan modern sangatlah berbeda. Dunia modern menganggap bahwa kondisi alami kehidupan masyarakat kita identik dengan keadaan damai. Dalam hal perang hanyalah sebagai penghentian sementara dari perdamaian dan merupakan bagian dari keadaan yang tidak normal. Walsh juga menjelaskan bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antar negara adalah hal yang normal dan pembatasan mengenai hak-hak orang asing merupakan hal yang tidak normal dalam artian perlu sebuah alasan yang serius apabila akan menerapkan pembatasan tersebut. Keadaan-keadaan tersebut menurut Walsh berbeda dengan dunia pada era klasik. Dalam hal ini, sikap alamiah suatu negara terhadap negara lain dianggap identik dengan sikap permusuhan yang potensial dan nyata. Perang menjadi landasan utama dalam hubungan internasional (Roatovtaeff, 1922).

Pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Hershey (1911) yang mana dia berpandangan bahwa hubungan antar negara pada zaman dahulu (klasik) tidak hanya diwarnai oleh kekerasan saja tetapi juga hubungan diplomasi maupun perdamaian yang telah dilakukan di bawah payung perjanjian

atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersitegang. Meskipun demikian, Hershey menyebutkan bahwa penggunaan senjata maupun hak kontrol yang lebih bagi pihak yang memiliki kekuatan tetap menjadi cara normal yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan maupun mendapatkan konsesi atau keuntungan. Perang dianggap sebagai kondisi alami umat manusia. Sementara perdamaian, merupakan keadaan yang dibuat atas jaminan dari adanya perjanjian atau konvensi. Namun demikian, bukan berarti bahwa sejarah hubungan internasional pada zaman dahulu diwarnai dengan sejarah penaklukan dan pembantaian yang tidak terkendali. Bangsa Mesir kuno, bangsa Babilonia atau Kaldea, bangsa India Timur, dan bangsa Cina pada dasarnya merupakan masyarakat yang cinta damai, bertani dan industri, serta tidak menyukai pertumpahan darah ataupun penaklukan, kecuali jika ada pendorong untuk melakukan hal tersebut misalnya adanya pejuang atau penakluk besar (Hershey, 1911). Artinya suatu bangsa akan menyerang bangsa lain apabila ada beberapa faktor seperti kepemimpinan bangsa tersebut yang suka berperang atau karena adanya desakan selain mempertahankan diri yaitu dengan melawan musuh.

Secara lebih jauh, pada dasarnya kita dapat melihat perdebatan mengenai hubungan internasional berdasarkan sejarah pada era klasik baik di kawasan Eropa maupun di kawasan Asia. Misalnya dari sejarawan Yunani yaitu Thucydides yang juga merupakan seorang jenderal Athena dari abad kelima Sebelum Masehi (SM). Dia telah memperkenalkan istilah “kebijaksanaan abadi” atau “*eternal wisdom*” dari realisme sebagai penjelasan atas perang Peloponnesia yang terjadi antara Sparta dan Athena. Thucydides menyebutkan bahwa tindakan internasional hanya dapat dijelaskan oleh kemauan masyarakat yang tertanam dalam sifat manusia untuk melakukan perebutan kekuasaan tanpa henti dengan membuka kemungkinan peran yang sangat terbatas bagi perdamaian dan keadilan. Selanjutnya, dua abad kemudian,

Aristoteles (384–302 SM) dalam karyanya “*The Politics*”, menjelaskan bahwa sistem politik yang terbaik dan paling stabil bukanlah sistem yang menekankan peperangan antar wilayah perbatasan, namun sistem yang baik adalah sistem yang menjamin perdamaian dengan mendorong nilai-nilai keadilan dan kesederhanaan. Beberapa abad kemudian, sejalan dengan pemikiran Aristoteles, Thomas Aquinas (1228–1274) melalui karyanya *Summa Theologiae* merumuskan kondisi tentang ‘*just war*’ atau bisa diartikan sebagai keadilan perang di mana perang harus diumumkan oleh otoritas yang sah, dengan alasan yang adil atau niat yang adil sebagai bentuk verifikasi diri melalui deklarasi subjektif dari penguasa. Alasan tersebut misalnya untuk memulihkan hak yang dilanggar secara tidak adil, menghukum suatu kesalahan maupun menghukum suatu negara karena gagal memperbaiki tindakan yang tidak pantas (Telò, 2009). Istilah ‘*just war*’ tersebut kemudian diadopsi dan diaplikasikan dalam konteks hubungan internasional hingga masa kontemporer saat ini.

Dengan melihat gambaran-gambaran penjelasan tersebut maka chapter ini, akan membahas lebih jauh mengenai hubungan internasional pre-kontemporer yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu Hubungan Internasional pada era Klasik, Hubungan Internasional pada abad pertengahan dan Hubungan Internasional pada masa Renaissance.

10.2 Hubungan Internasional pada Era Klasik

Dalam teori HI, isu yang paling banyak diperdebatkan adalah gagasan tentang anarki antarnegara. Adam Watson (1992) dalam Malchow (2020) berargumen bahwa sistem negara yang paling awal yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk anarki adalah sistem negara-kota yang ada di wilayah Near East yaitu Sumeria, Mesopotamia, pada milenium keempat Sebelum Masehi. Watson berasumsi bahwa wilayah tersebut dapat dianalogikan sebagai bentuk anarki dari negara-

negara kecil yang kompetitif namun berasal dari kerangka budaya bersama. Negara-negara tersebut juga merupakan bagian dari masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu sehingga kemudian salah satu pihak akan muncul sebagai otoritas hegemonik. Demikian halnya dengan Buzan dan Little yang mengakui bahwa Sumeria merupakan sistem internasional pertama yang sepenuhnya matang dan menarik perhatian pada berbagai “sistem pra-internasional” yang lebih awal (Malchow, 2020).

“Anarki” Sumeria tersebut kemudian digantikan oleh hegemoni Kekaisaran Babilonia sejak keberhasilan yang dicapai pada zaman Perang Hammurabi. Pada masa kekaisaran Babilonia pada pertengahan abad kedelapan belas Sebelum Masehi juga tidak banyak perbedaan dengan sistem yang ada pada masa Sumeria seperti adanya birokrasi yang terpusat, sistem pengumpulan pajak, maupun kode hukum. Kekaisaran Babilonia sebagai hegemoni, berupaya menghapuskan peperangan *internecine* di mana otoritasnya dijalankan dan memberikan tawaran kepada para pedagang dan pihak lain berupa keuntungan tertentu dalam wujud keamanan dan peluang. Oleh sebab itu, dalam kasus Babilonia maupun kerajaan kuno lainnya, bentuk hubungan internasional yang kita temui merupakan semacam “*bandwagoning*” di mana negara-negara yang lebih kecil berada di bawah kekuasaan negara-negara yang kuat dalam arti mereka tidak memilih untuk menjadi oposisi. Pola ini mungkin menjadi masalah bagi sebagian besar teori negara dan sistem negara dalam HI kecuali kerajaan-kerajaan tersebut dianggap anomali (Malchow, 2020). Karena memang sejatinya sistem kenegaraan pada zaman klasik dengan zaman modern cukup berbeda. Namun, perlu diingan bahwa pada model negara modern saat ini, bentuk negara monarki atau kerajaan juga masih ada.

Sementara dalam teori realisme HI tentang “*balancing*” di zaman Alkitab, kekuasaan imperial pertama yang signifikan muncul pada masa raja-raja Assyria yang berhasil menggantikan hegemoni pendahulunya di Babilonia pada abad kesembilan sebelum masehi. Assyria kemudian mengkonsolidasikan pergeseran hegemoni menjadi kerajaan yang lebih nyata sekitar satu abad kemudian. Raja ekspansionis pada periode terakhir yaitu Ashurnasirpal II, menggunakan gelar sombong “raja dunia”, “penakluk mereka yang tidak patuh”, dan “penguasa seluruh umat manusia” untuk menaklukkan wilayah lain sehingga muncul istilah ‘*pax Assyrica*’. Meskipun sebagai bagian dari tindakan penaklukan dari seorang tirani, kita bisa menyebutkan bahwa kekaisaran Assyria dalam istilah hubungan internasional sebagai contoh klasik dari sistem “unipolaritas”. Akan tetapi memang ada kelemahan dari teks-teks kuno yang menjelaskan sifat sebenarnya dari rezim-rezim tersebut karena para pakar atau penstudi hubungan internasional maupun sejarawan bergantung pada kisah-kisah alkitab, epos, prasasti monumen, pahatan pada tanah liat yang berhuruf paku maupun tulisan dari sejarawan pada era klasik Kerajaan Yunani dan Romawi kuno (Malchow, 2020).

Negara-negara kota Mesopotamia di milenium ketiga di Sumeria tidak hanya memberikan contoh paling awal mengenai negosiasi diplomatik, namun juga rumusan yang ditemukan dalam janji aliansi seperti “*friend with friends and enemy with enemies*” (Malchow 2020). Dalam arsip-arsip sejarah, sejak milenium kedua Sebelum Masehi, masyarakat di wilayah Near East telah lama melakukan kegiatan pertukaran diplomatik yang intens sebagai bagian dari sistem hubungan internasional yang diformalkan. Hubungan internasional di wilayah tersebut dianalogikan seperti hubungan persaudaraan dan hubungan antara orang tua dengan seorang anak yang tercermin dalam

hubungan antara raja-raja dari komunitas wilayah yang satu dengan wilayah yang berbeda lainnya. Hubungan tersebut diistilahkan sebagai '*salimum*' yang artinya perdamaian, rekonsiliasi, persahabatan. Istilah lain yang juga menggambarkan hubungan dalam sistem tersebut adalah '*atfiūtum*' atau '*afifiūtum*' yang artinya yaitu persaudaraan. Istilah '*afifiūtum*' sendiri mengungkapkan sifat dari '*salimum*', dan mengacu pada hubungan baik yang mendahului aliansi dan menggambarkan hubungan baru yang muncul. Ungkapan yang lebih luas lagi yang menggambarkan konsep dari perdamaian dan persahabatan adalah '*afifiūtu u ra'amūtu*' yang artinya adalah persaudaraan dan cinta. Ungkapan tersebut kemudian dibakukan oleh orang Yunani dan kemudian dilambangkan oleh orang Romawi sebagai '*amicitia et societas*'. Istilah tersebut lebih mengacu pada istilah kolaborasi bukan ketundukan di mana istilah '*socius et amicus*' tidak lebih dari sebuah gelar resmi yang diberikan oleh orang Romawi kepada negara sahabat, dengan asumsi bahwa ketika perjanjian persahabatan direvisi, istilah '*amicus*' mewajibkan orang-orang Romawi untuk memberikan bantuan perlengkapan militer kepada negara sahabatnya tersebut. Perjanjian '*amicitia*' dan '*societas*' dirancang sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan dalam negeri dari masyarakat Romawi untuk membangun hubungan abadi (*amicitia*) dan kebutuhan masyarakat asing (pada waktu itu adalah bagi masyarakat Yunani), untuk membuat aliansi sementara (*societas*) (Cursi, 2014).

Negara-negara kota Yunani kuno, meskipun secara budaya berbeda dari kerajaan di wilayah Near East akan tetapi merupakan klien negara-kota yang membayar upeti kepada kerajaan Persia (Malchow, 2020). Pada dasarnya, Kerajaan Persia telah dianggap menciptakan perdamaian abadi bagi dunia dengan menyatukan semua negara-negara di wilayah Timur. Meskipun demikian, ada sejumlah perlawanan seperti dari negara-kota Yunani Kuno. Dari reruntuhan peradaban

Aegea kuno, sistem negara-kota Yunani yang kecil di semenanjung Balkan, berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Negara-kota tersebut telah mengambil warisan dunia timur, mengadopsi bentuk-bentuk hubungan internasional dan hubungan diplomatik, dan memperkenalkan bentuk-bentuk baru dari warisan dunia timur yang telah mereka pelajari dan adopsi. Semangat tersebut kemudian tidak hanya melahirkan konsep-konsep hubungan internasional, tetapi juga hukum internasional yang nyata (Roatovtaeff, 1922).

Pada awal abad kelima, perlawanan Hellenic yang meluas berbentuk aliansi pertahanan polis yang diorganisir oleh orang Athena dan Sparta digunakan untuk melawan hegemoni Kerajaan Persia. Setelah itu, ketika ancaman Persia surut, peperangan juga terjadi antara aliansi Athena dan Sparta yang digambarkan oleh Thucydides dalam Perang Peloponnesia. Sejarah yang ditulis oleh Thucydides dalam Perang Peloponnesia telah lama memberikan wawasan bagi para penstudi HI (khususnya kaum Realis) yang menggambarkan bahwa peran sifat manusia dalam urusan internasional dan pelaksanaan kekuasaan sebagai bentuk "*security dilemma*" atau dilema keamanan yang artinya semakin kuat kekuatan negara maka akan semakin menjamin keamanannya, sehingga semakin besar kemungkinan bagi negara-negara lain untuk terpaksa mengambil tindakan defensif terhadapnya. Selain itu, Thucydides juga menggambarkan adanya mekanisme "*balance of power*" yang berperan sebagai penyeimbang pergeseran dalam sistem Yunani (Malchow, 2020).

Pada masa negarawan Athena, Pericles, negara-kota atau polis Athena dan Sparta berperang di bawah sebutan Perang Peloponnesia. Untuk memahami mengapa perang tersebut terjadi, salah satunya adalah dengan memahami karakteristik masyarakat dari masing-masing polis tersebut. Yang pertama adalah masyarakat Sparta dianggap sebagai masyarakat yang

suka berperang. Kerja keras para helot Sparta di ladang Laconia dan Messenia memberikan mereka waktu luang untuk melakukan aktivitas berburu, atletik, dan latihan bela diri. Selain itu, pola asuh Sparta juga yang keras dalam sistem pelatihan militernya telah menjadikan Sparta unggul di medan perang. Dominasi dari kekuatan militer inilah yang kemudian merepresentasikan adanya “*balance of power*” yang memungkinkan Sparta untuk membentuk aliansi dengan negara-negara yang kalah, penakut, atau negara yang penuh harapan di bawah aliansi Liga Peloponnesia. Para anggotanya bertugas melawan kebangkitan para helot, dan menjadi sekutu melawan musuh-musuh lain, terutama melawan Argos yang angkuh sebagai musuh lama Sparta di Peloponnesia. Untuk memimpin aliansinya dalam perang, Sparta pada praktiknya tetap perlu mendapatkan persetujuan dari sekutunya.

Sementara dari sisi Athena, untuk lebih jauh menyelidiki asal muasal Perang Peloponnesia tidak hanya menelusuri sejarah diplomasi pada zaman Pericles, namun juga menyelidiki dinamika politik internasional Yunani maupun pemikiran yang muncul pada masa itu. Dalam hal ini, Thucydides, menjelaskan mengapa perang antara Athena dan Sparta pecah. Salah satu penyebab Perang dari sisi Athena yang tidak kalah dominan seperti Sparta yaitu semakin besarnya kebesaran orang Athena atau peningkatan kekuatan mereka, dan ketakutan yang ditimbulkannya, hingga memaksa orang Lacedaemonian untuk berperang. Bahkan sebagian besar wilayah di Yunani telah tunduk pada mereka. Begitu juga dengan ketakutan Sparta akan dominannya kekuatan Athena yang memaksa mereka untuk berperang. Dalam hal ini Thucydides menggambarkan bahwa ketakutan akan kekuasaan adalah penyebab pecahnya perang. Pemikiran Thucydides tersebut kemudian mempengaruhi pemikiran Hobbes tentang “Realisme.” Realisme Thucydides menyebutkan bahwa sebab-sebab perang dapat dibedakan secara tegas antara “penyebab yang paling

benar” (*truest cause*) dan sekadar “alasan untuk mengeluh” (*grounds for complaint*) dan “titik perbedaan” (*points of difference*) (Lendon, 2007).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem internasional Yunani kuno bersifat anarkis dalam arti tidak adanya pemerintahan bersama yang menyeluruh. Unit utama dari sistem ini adalah polis atau negara kota yang independen. Jika kita ilustrasikan maka Polis sebenarnya bisa dikatakan memiliki kemiripan dengan negara berdaulat yang ada saat ini. Artinya setiap polis merupakan otoritas politik yang tidak mengakui atasannya dan menuntut serta memberikan pengakuan internasional atas dasar hal tersebut. Konsepsi mengenai unit dan sistem ini sangat bergantung pada formulasi kedaulatan pada masa kontemporer yang dominan sebagai gagasan bahwa terdapat otoritas final dan absolut dalam komunitas politik dan konsekuensi internasionalnya bahwa tidak ada otoritas final dan absolut yang ada di tempat lain selain dari komunitas negara tersebut. Meskipun terdapat kesamaan awal, kesatuan polis di Yunani kuno didasarkan pada landasan moral yang sangat berbeda. Dalam hal ini, sistem internasional Yunani kuno merupakan contoh klasik dari sistem internasional karena jenis hubungan sistematis yang dimiliki oleh unit-unit penyusunnya yaitu kemerdekaan dan persamaan kedaulatan yang saling dihadapkan. Perdebatan tentang Hubungan Internasional pada masa Yunani Kuno sebagian besar terjadi antara kaum Realis dan pengkritiknya seperti dari Realisme Struktural. Pemahaman Realisme Struktural lebih menekankan pada polaritas, transisi kekuasaan (*power transition*), dan sebab-sebab sistemik dari perang sebagai bagian penting karena unsur kekuasaan dalam ranah politik, domestik dan internasional memiliki keterhubungan (Kokaz, 2001).

10.3 Hubungan Internasional pada Abad Pertengahan

1. Runtuhnya Kekaisaran Romawi

Abad Pertengahan merupakan periode yang menjembatani antara era Kekaisaran Romawi kuno dan era negara-negara di zaman modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa diraihnya kekuasaan oleh Romawi pada dasarnya merupakan hasil dari kekuatan militer dan peperangan yang dilakukan selama berabad-abad sebelum “perdamaian Romawi (*the Roman Peace*)”. Pada abad ke-3 SM, dalam Perang Punisia (*Punic war*), Roma berhasil mengalahkan Kartago sebagai lawan dalam perebutan kekuasaan di wilayah Mediterania barat dan tengah, sebelum menundukkan negara-kota Yunani yang tersisa pasca runtuhnya kekaisaran Alexander Agung. Meskipun demikian, telah menaklukkan dunia, kekaisaran Romawi juga memiliki ancaman internal yang kemudian memunculkan perang saudara selama lebih dari satu abad. Pada masa awal Republik, beberapa faksi yang ada di dalam Kekaisaran Romawi menerapkan praktik administratif yang terdesentralisasi. Sementara itu, ada juga faksi yang tidak menerapkan sistem tersebut seperti faksi di bawah kepemimpinan Julius Caesar lebih mendukung penerapan sistem administratif yang terpusat (tersentralisasi). Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang mendukung otoritarianisme aristokrat yang kaku, sementara yang lain mendukung masyarakat yang lebih demokratis secara radikal. Oleh sebab itu, Kekaisaran Romawi pada periode *Pax Romana* adalah negara yang sepenuhnya tersentralisasi dan mendelegasikan sebagian besar wewenang administratifnya kepada pejabat lokal. Pada dasarnya, ada dua faktor yang paling berperan dalam membentuk dunia Kekaisaran Romawi dan menumbuhkan vitalitas maupun stabilitas di wilayah kekuasaan Romawi yaitu Laut Mediterania dan Pasukan Militer Romawi (Backman, 2003).

Faktor pertama adalah Laut Mediterania, yang mana Kekaisaran Romawi berpusat di wilayah perairan laut tersebut yang menyediakan sarana transportasi dan komunikasi yang efisien dan siap pakai. Ketika orang-orang Romawi menyebut Mediterania sebagai "*mare nostrum*" atau "*our sea*", menunjukkan bahwa wilayah laut adalah infrastruktur fisik penting yang menyatukan seluruh Kekaisaran Romawi. Dalam sejarah manusia, lautan dianggap sebagai unsur pemersatu. Seperti halnya dengan Mediterania, yang membentang hingga Samudera Atlantik melalui Selat Gibraltar di mana Selat tersebut menghubungkan antara Samudera Atlantik dengan Laut Tengah dan secara alami terlindungi dari semua badai kecuali badai Atlantik. Karakteristik wilayah perairan laut yang tenang dan iklim sedang, setelah memberikan kemudahan bagi para pelaut dari abad-abad awal untuk melintasi Mediterania bahkan dengan kapal-kapal primitif. Karakteristik geografis dari Mediterania ini selama berabad-abad telah memudahkan masyarakat dari wilayah yang berjauhan seperti Spanyol bagian selatan dan Mesir bagian utara untuk dapat melakukan kontak secara teratur atau terus-menerus satu sama lain.

Faktor kedua adalah pasukan militer di mana karakter pasukan militer dari Kekaisaran Romawi sangat berbeda dari kekuatan militer lain pada zaman tersebut. Selain bertempur demi kejayaan negara Romawi, pasukan militer juga bertempur demi mendapatkan upah tetap dan memperoleh sebagian harta rampasan dari hasil penaklukan. Perang dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan di mana keberhasilan pasukan militer dalam melakukan penaklukan telah menghasilkan sejumlah besar uang yang bahkan lebih dari cukup mengimbangi biaya peperangan itu sendiri. Ketika sebuah wilayah berhasil ditaklukan, pasukan militer Romawi tidak menduduki wilayah tersebut secara permanen untuk menghindari kebencian masyarakat setempat yang berkepanjangan. Mereka kemudian justru mengubah praktik

administrasi lokal sesuai dengan sistem Kekaisaran Romawi (Backman, 2003).

Kehadiran militer secara permanen merupakan indikator yang sangat penting terlebih benua Eropa, mempunyai jaringan garnisun terpanjang, terbesar, dan paling permanen. Banyaknya penaklukan yang dilakukan pada masa Kekaisaran Romawi bukan hanya menimbulkan perlawanan yang sangat kuat, tetapi juga sulitnya mengelola wilayah yang begitu luas dari hasil penaklukan tersebut sehingga ini menjadi ancaman utama bagi stabilitas Romawi. Oleh sebab itu, keberadaan pasukan militer bagi Romawi memiliki arti penting yang tidak hanya memberikan kemenangan di medan perang, tetapi pasukan militer juga dijadikan sebagai satu-satunya instrumen yang paling penting untuk “meromantisasi” masyarakat yang ditaklukkan.

Dalam hal ini, pasukan militer digunakan sebagai elemen damai dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Athena pada abad ke-5 SM, yang dengan tegas mempertahankan pemisahan antara penakluk dan yang ditaklukkan di mana interaksi antar penguasa dengan rakyatnya terbilang sedikit. Praktek Romawi justru merangkul masyarakat dari berbagai wilayah untuk menjadi bagian dari pasukan militer. Pasukan militer berasal dari semua kelompok etnis di seluruh Kekaisaran Romawi seperti Italia, Mesir, Celtic, Dacia, Hibernian, Libya, dan banyak lagi. Mereka juga menggunakan pasukan militer untuk menyebarkan budaya Romawi ke wilayah provinsi-provinsi. Selain itu, para prajurit belajar berbicara bahasa Latin, mengetahui dan mematuhi hukum Romawi, dan mengamalkan agama Romawi. Praktek dari Kekaisaran Romawi ini telah menghasilkan dua hasil penting. *Pertama*, Kekaisaran Romawi mampu menarik sukarelawan untuk masuk menjadi pasukan militer dengan adanya kesempatan untuk menghasilkan uang, melihat dunia, menerima pendidikan,

mendapatkan tempat terhormat di masyarakat, dan pemberian tanah bagi prajurit yang pensiun dini untuk bertani serta sejumlah uang untuk mendanainya. *Kedua*, layanan militer tersebut memberikan dampak dalam membentuk identitas yang sama di mana seorang prajurit dengan kelompok etnis asalnya akan menanamkan pada dirinya sebagai seorang “Romawi”. Artinya mereka mengidentifikasi sebagai anggota masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih besar dari sekadar etnis yang disandangnya (Backman, 2003).

Meskipun Kekaisaran Romawi telah menunjukkan hegemoni yang kuat di wilayah Eropa, Asia dan Afrika, ancaman internal yaitu Perang Saudara juga melanda mereka. Khususnya yang menyangkut salah satu karakteristik yang ada di dalam sistem Kekaisaran Romawi pada masa-masa akhir kekuasaan yang mana munculnya provinsialisme dan lokalisme justru mendorong tidak adanya institusi politik yang menyatukan peradaban masyarakat dalam ikatan sekuler yang sama seperti yang terjadi sebelumnya pada Kekaisaran Romawi Kuno. Dampak dari sistem tersebut adalah masyarakat yang ada dalam komunitas yang berbeda-beda di berbagai wilayah provinsi tidak memiliki ketaatan politik pada masa akhir Kerajaan Romawi. Ketika bangsa Teuton menetap di wilayah Kekaisaran Romawi, bangsa Saxon di Inggris, bangsa Frank dan Burgundi di Gaul, bangsa Visigoth di Spanyol, dan bangsa Lornbard di Italia utara, tidak mengakui ketaatan politik apa pun kecuali kepada raja-raja suku dan kepala suku militer bangsa mereka saja. Pada saat yang sama mereka memodifikasi sistem kepemilikan tanah dan pertanian sesuai dengan adat istiadat dan menyesuainya dengan kegunaan lahan bagi mereka sendiri. Dengan kata lain, dominasi lokal di sini telah menggantikan dominasi dunia Romawi pada Abad Pertengahan. Prinsip hukum universal yang ada sebelumnya juga dikesampingkan. Bahkan alih-alih para raja lokal merekrut dan memanfaatkan tentara legiun untuk melestarikan *Pax Romana*, mereka justru memilih untuk mempersenjatai pengikut mereka

masing-masing dan berperang secara bebas satu sama lain (Walsh 1922). Sehingga bisa dikatakan bahwa pada masa akhir dari Kekaisaran Romawi tersebut diwarnai dengan perang saudara. Padahal Kekaisaran Romawi sebelumnya telah menyatukan berbagai wilayah di Eropa, Asia Kecil, Timur Tengah, dan pantai utara Afrika Kecil dari sekitar tahun 50 SM hingga 400 M. Namun, pada abad keempat, politik Kekaisaran dipenuhi korupsi dan kelumpuhan. Akibatnya, kota-kota Romawi goyah dan industri ataupun perdagangan merosot. Dan akhirnya pada tahun 1000 M, dunia Yunani-Romawi telah hancur. Sebagai gantinya muncullah tiga peradaban berbeda yang saling berhadapan di sekitar Mediterania yaitu Arab, Bizantium, dan 'Barbarian' (Knutsen, 1992).

Peradaban Arab secara geografis paling luas dan paling maju secara intelektual yang ditorehkan oleh lembaga-lembaga politik-keagamaan yang bersifat Khilafah. Cakupan dari peradaban ini adalah wilayah-wilayah yang membentang dari Semenanjung Iberia melintasi Afrika Utara, melalui Timur Tengah dan Persia dan jauh ke India, di mana Islam sebagai agamanya dan Bahasa Arab sebagai bahasa utamanya. Peradaban Arab dibangun dari hasil perang dan penaklukan (Knutsen, 1992). Rahasia di balik keberhasilan militer dari bangsa Arab tidak jauh berbeda seperti bangsa-bangsa sebelumnya yaitu dari kekuatan tempur yang tidak biasa. Militer Arab dikenal dengan tentara yang bersenjata ringan dan sangat *mobile*. Kita tahu bahwa Muhammad dan pengikut terdekatnya adalah pedagang dan penduduk kota, di mana sebagian besar penduduk Jazirah Arab adalah suku Badui. Salah satu kunci bertahan hidup yang dapat dipelajari dari mereka adalah mobilitas di lingkungan gurun yang keras, dan kemampuan berkuda dan mengemudikan unta yang handal telah menjadikan suku Badui dapat menempuh jarak yang jauh dengan kecepatan yang tinggi. Dengan demikian, ketika mereka dibentuk menjadi sebuah pasukan, kuda mereka dapat digunakan untuk melakukan serangan yang cepat dan unta

mereka dapat digunakan untuk mengangkut perbekalan yang cukup banyak. Terlebih, bangsa Arab juga mengambil keuntungan dari adanya permusuhan antara Bizantium dan Persia yang telah menjadi musuh terburuk satu sama lain selama berabad-abad. Titiknya adalah pada abad ketujuh, setelah berpuluh-puluh tahun relatif damai, perang antara kedua negara adidaya kembali terjadi dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, ketika pasukan Arab memulai serangan dari selatan, baik Bizantium maupun Persia sudah sangat lemah (Ringmar, 2019).

Setelah melakukan penaklukan, penguasa Arab membangun kota-kota dengan gedung-gedung megah. Di sisi lain, para pedagang Arab juga diorganisir secara teratur untuk menjalankan aktivitas perdagangan melintasi gurun tandus di Timur Tengah, serta lautan Mediterania dan Samudera Hindia. Kemudian tentara Arab menjaga perbatasan dan menjaga ketertiban di wilayah kekuasaan mereka. Selanjutnya, para sarjana Arab membangun langsung warisan Yunani-Romawi di mana mereka tidak hanya belajar dari bahasa Yunani, tetapi juga menerjemahkan teks-teks klasik lama ke dalam bahasa Arab serta mendiskusikan teks-teks tersebut dengan berbagai penstudi. Sehingga peradaban Arab menjadi maju. Bahkan jaringan korespondensi yang kompleks memungkinkan mereka bertukar buku dan komentar sejauh ribuan mil antara berbagai bagian kekaisaran (Knutsen, 1992).

Sementara peradaban lain yang juga muncul pada Abad Pertengahan adalah Kekaisaran Bizantium, yang berada di wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan yang selamat dari serangan Migrasi Besar, yang mencakup wilayah Asia Kecil, Semenanjung Balkan dan wilayah Italia. Byzantium beragama Kristen dan menggunakan bahasa dan budaya Yunani. Byzantium menjaga tradisi Yunani-Romawi dalam versi Kristen ortodoksnya. Perdagangan dan navigasi dilanjutkan pada tingkat yang sama seperti pada zaman dahulu. Bagi sebagian

besar umat Kristiani, Kaisar Bizantium mewakili penguasa tertinggi dunia dan Konstantinopel adalah kota terkemuka di dunia (Hussey 1966). Jika Far West pada abad pertengahan disatukan oleh suatu prinsip umum yang membedakannya dari peradaban-peradaban lain pada masa itu, maka hal ini bukanlah sebuah struktur material. Sebagian besar benua ini pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, yang menerapkan infrastruktur kekaisaran yang bersifat pemersatu dan mencakup sistem gereja, biara serta sekolah Kristen (Knutsen, 1992).

2. Peran Gereja Pada Abad Pertengahan

Eropa pada Abad Pertengahan secara formal merupakan sebuah hierarki di bawah pemerintahan Tuhan, yang kekuasaan dan wewenangnya pertama-tama didelegasikan kepada para Paus, dan melalui mereka kepada Kaisar Romawi Suci. Ini adalah era hierarki antara berbagai macam pemerintahan, dengan garis wewenang, subordinasi, dan kesetiaan yang jelas namun sering kali saling bersilangan. Adipati Burgundia, misalnya, sekaligus merupakan penguasa wilayah mereka sendiri dan juga pengikut raja Prancis dan Kaisar Romawi Suci. Eropa terdiri dari berbagai tipe politik yaitu selain Kekaisaran, terdapat kerajaan, kota bebas yang memiliki hukum, mata uang, dan struktur politiknya sendiri, wilayah gereja, baroni istana, dan liga kota. Kumpulan organisasi-organisasi politik yang heterogen ini hanya memiliki konsep teritorialitas yang lemah, dan tidak memiliki konsep kedaulatan atau yurisdiksi hukum eksklusif, namun disatukan secara longgar di bawah kosmologi hierarki yang diarahkan oleh Tuhan, dan diliputi oleh agama Kristen yang sama (Holsti, tanpa tahun). Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad kelima, prinsip-prinsip pemersatu yang tetap berlaku adalah kenangan akan

kebesaran, kebiasaan hukum dan administrasi serta Gereja (Knutson, 1992).

Selama Abad Pertengahan, warisan Romawi, dalam praktik dan teori, ditopang oleh etika Kristen. *Droit d'ambassade* pada dasarnya tidak ada artinya karena siapa pun yang mempunyai sumber daya dapat mengirim dan menerima perwakilan. Baik organisasi maupun praktik korps diplomatik dipengaruhi oleh jaringan diplomatik kepausan yang luas. Pada saat ini, aturan-aturan yang mengatur praktik diplomasi menjadi lebih kompleks dan lebih jelas. Penguasa, yang jarang bertemu satu sama lain karena masalah keamanan, malah mengirimkan *nuncii* atau *legati*. *Nuncius* atau *legatus* hanyalah seorang pembawa pesan, yang disamakan dengan burung murai oleh ahli hukum Italia kontemporer yaitu Azo. *Nuncius* tidak punya kekuatan untuk bernegosiasi atau menyimpulkan. Mereka juga belum tentu merupakan warga negara dari negara yang mengutusinya. Dalam hal ini, orang asing sering kali dipekerjakan dan bahkan dikirim dalam misi terbalik yaitu dikirim ke salah satu prinsipal dan dikembalikan oleh individu tersebut ke prinsipal lainnya. Mengingat keterbatasan yang melekat pada seorang *nuncius*, pengirim beralih ke pihak kejaksaan. Lembaga tersebut lebih fleksibel dan diturunkan dari hukum privat Romawi melalui hukum kanonik. Seorang prokurator dapat mengikat jika dia bertindak sesuai dengan mandatnya. Prokurator di sini berarti seorang birokrat yang menjadi perwakilan dari kekaisaran (Frey and Frey, 2023).

Beberapa periode berikutnya muncul seorang duta besar atau 'orang yang diutus' yang dapat berperan baik sebagai *nuncius* maupun *prokurator*. Utusan, rombongan, dan beserta segala hal yang dibawanya memiliki kekebalan hukum. Seperti di Roma pada masa itu di mana seorang perwakilan akan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan selama berada di kedutaan, tetapi bukan kejahatan yang dilakukan pada waktu sebelumnya. Aturan itu didukung oleh hukum

kanon yang menekankan bahwa aturan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan didasarkan pada akuntabilitas dari utusan tersebut. Dalam hal ini, adat istiadat, hukum, dan timbal balik, yang diperkuat oleh agama, yang dibawa oleh para utusan juga dijamin keselamatannya secara umum. Terlebih peran gereja maupun etos Kristiani memiliki peranan yang cukup penting dalam praktik diplomasi, sehingga kadangkala hari raya keagamaan dipilih untuk menandai awal atau akhir dari gencatan senjata. Selain itu, tempat yang disucikan juga sering digunakan untuk melakukan negosiasi atau penyelesaian sengketa. Tidak mengherankan jika para ulama kristiani sering kali diutus karena dianggap sebagai orang-orang terpelajar maupun karena status agama yang disandang akan mampu memberi mereka perlindungan tambahan. Begitu juga dengan adat istiadat yang juga tidak dapat diganggu gugat. Oleh sebab itu, pada era tersebut para utusan seringkali mengenakan pakaian khusus atau membawa simbol khas seperti tongkat, wakil kepausan yang bertindak sebagai utusan juga mengenakan pakaian berwarna merah untuk mengidentifikasi mereka (Frey and Frey, 2023).

Pada masa Kekaisaran Romawi, Hukum yang dianut juga melindungi para wakil utusannya. Di sini, tradisi hukum tetap bertahan dan mempengaruhi perkembangan kode hukum di sana. Hukum Romawi yang menekankan kekuasaan negara memperkuat gagasan bahwa diplomat dilindungi dan bertanggung jawab kepada hukum perdata. Hukum tersebut menurut para ahli teori abad pertengahan diartikan bahwa duta besar membawa hukumnya sendiri. Keyakinan tersebut pada akhirnya mempengaruhi gagasan tentang 'ekstrateritorialitas' bahwa lokasi tujuan dari misi diplomatik merupakan bagian dari negara sendiri (Frey and Frey, 2023).

Dalam pemikiran politik, teks-teks Kristen menjadi landasan pemikiran tentang organisasi masyarakat, sehingga para sarjana HI sering menarik perhatian pada tulisan-tulisan

para teolog seperti Agustin dan Aquinas. Pada tingkat identitas, agama Kristen merupakan cara utama identifikasi kolektif, yang menyebabkan sejumlah antagonisme struktural dan konflik dengan agama lain. Fokus pada Abad Pertengahan yang bertumpu pada keagamaan juga mengkondisikan bagaimana perjalanan menuju modernitas dipandang dengan Reformasi dan Perdamaian Westphalia sebagai tolak ukur utamanya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kesatuan budaya dalam Susunan Kristen Latin hancur pada pergantian abad keenam belas karena penolakan dari Martin Luther terhadap peran Gereja Latin. Penyebabnya sebenarnya bukan hanya masalah teologi, namun secara radikal peran gereja telah mengubah basis legitimasi otoritas atau kewenangan tradisional yang mendasari tatanan abad pertengahan. Terlebih lagi, hal ini juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap jaringan politik serta pola perkumpulan dan mobilisasi dari masyarakat (Lopez, 2023). Dalam konteks ini, menjamurnya pengakuan dosa pada abad pertengahan terjadi karena adanya penjualan surat pengampunan dosa (Jenihansen, 2023) sehingga tindakan membeli surat tersebut dianggap sudah cukup tanpa perlu melakukan pertaubatan. Hal ini yang secara mendasar mengubah dinamika antara penguasa dan gereja dalam sistem politik pada masa itu, sehingga kemudian mengarah pada krisis sistem yang luas dan transformasi yang terjadi setelahnya (Lopez, 2023).

Reformasi dan Perang Agama secara konvensional dipandang sebagai momen krisis. Momen penentu dari periode gejolak ini adalah Perdamaian Westphalia tahun 1648. Sementara itu, Perjanjian Munster dan Osnabruck telah melembagakan prinsip *cuius regio eius religio* yaitu siapa yang berkuasa maka agamanyalah yang ditegakkan dalam artian bahwa agama dari sang penguasa menjadi agama resmi dari negara. Meskipun biasanya dianggap sebagai tindakan teritorialisasi, penekanan pada Abad Pertengahan yang bersifat religius mengubah Westphalia menjadi negara yang menganut

sekularisasi yang mana agama dihilangkan dari prinsip pengelolaan urusan internasional dan dibatasi ke dalam domain internal saja (Lopez, 2023).

Meskipun demikian, peran Gereja pada Abad Pertengahan pada dasarnya telah menggambarkan misi kemanusiaan dan internasionalnya serta melakukan upaya untuk membangun perdamaian melalui Gencatan Senjata Tuhan (*Truce of God*) dan Kedamaian Tuhan (*Peace of God*) di abad kesebelas. Upaya-upaya tersebut akan tetapi hanya berhasil sebagian saja. Justru yang lebih efektif adalah adanya institusi-institusi seperti *Quarantaine le Roy* (penetapan waktu empat puluh hari antara pecahnya dan dimulainya permusuhan di Perancis), *King's Peace* di Inggris, dan berbagai *Landesfrieden* di Jerman (Hershey, 1911). Dalam hal ini, revolusi agama dan pergolakan nasionalis pada awal abad keenam belas menandai peralihan dari era abad pertengahan ke era modern.

10.4 Hubungan Internasional pada Masa Renaissance

Pemikiran dalam studi hubungan internasional pada masa Renaissance dan modern awal menurut Ashworth (2014) dipengaruhi oleh tiga aliran penulis kuno. *Yang pertama* adalah aliran filsafat Yunani klasik, dari karya Plato dan Aristoteles. Plato telah menjadi pusat doktrin Kekristenan dan Gereja sejak zaman Kekaisaran Romawi. Melalui Boethius dan Agustinus, tulisan-tulisan Plato menjadi kanonik. Pada tingkat yang lebih rendah, proses ini juga dapat dilihat di dunia Arab (peradaban Arab), di mana Plato mempengaruhi tradisi pemikiran filsafat seperti Abu Nasr al-Farabi, Mabadi' Ara Ahl Al-Madina Al-Fadila yang ditulis pada abad kesepuluh. Karya Aristoteles kemudian sampai ke Eropa Kristen, melalui para sarjana Arab yang telah mempelajari dan mengintegrasikan tulisan Aristoteles ke dalam karya filosofis mereka. Dalam hal ini, Plato dan Aristoteles mengajarkan kepada dunia barat tentang kebenaran abadi (*timeless truths*) dan kehidupan pikiran (*life of the mind*).

Pemikiran Aristoteles digunakan untuk menjelaskan tentang alam, membenarkan komunitas manusia berdasarkan prinsip-prinsip moral kristen, dan untuk mendukung tatanan politik konservatif. *Tradisi kedua* didasarkan pada tradisi Republik Romawi, khususnya yang berasal dari adaptasi *Stoicisme* Romawi dari Partai Republik yang diwakili oleh karya-karya Cicero. Meskipun tradisi pertama mendapat dukungan dari Gereja, tradisi kedua ini menjadi populer di kalangan pembela abad kelima belas terhadap generasi baru politisi kota Italia. Kepedulian *Ciceronian* terhadap nilai-nilai inti politik Partai Republik membentuk inti dari karya Machiavelli dalam *The Discourses* (Ashworth, 2014). Dalam hal ini, Machiavelli menjelaskan hubungan antara perbedaan kelas dan kekuasaan politik melalui studi pada tiga rezim klasik yaitu Roma, Sparta, dan Venesia. Pembagian rezim tersebut digunakan untuk berargumentasi bahwa sistem aristokrasi yang diatur melalui undang-undang dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi dianggap lebih stabil dan harmonis dibandingkan bentuk pemerintahan kerakyatan apa pun. Argumen dari Machiavelli tersebut dianggap didasarkan pada pelembagaan konflik kelas yang produktif atau “kegaduhan” (*tumulti*) yang kemudian dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap negara yang bersatu secara internal dan diperintah oleh elit yang diwakili oleh Sparta dan Venesia (Parasher, 2017).

Tradisi ketiga adalah tradisi para sejarawan kuno, khususnya sejarah ‘Romawi’ yaitu Tacitus, Livy, Appian dan Polybius; biografi Plutarch, beberapa teks karya Xenophon; dan dua sejarah Alexander yang ditulis oleh Quintus Curtius Rufus dan Arrian. Sementara, sejarah Yunani awal yang ditulis oleh Herodotus dan Thucydides memiliki pengaruh terbatas pada studi tata negara hingga abad ketujuh belas. Tulisan Herodotus dianggap bersifat anekdotal, meskipun menurut catatan Gibbon, karya Herodotus tentang perang Persia mengilhami Ratu Elizabeth dari Inggris untuk melawan Spanyol. Di sisi lain,

karya Thucydides memiliki pengaruh pada abad ketujuh belas, khususnya pada karya Thomas Hobbes (Ashworth, 2014).

Tradisi ketiga inilah yang menjadi latar belakang dan pembenaran intelektual bagi pembangunan negara pada abad keenam belas. Sejarahawan paling berpengaruh, Tacitus, sebenarnya memberikan namanya pada gerakan humanis yang mendominasi penafsiran politik di Eropa pada abad keenam belas. Bagian-bagian sejarah Tacitus yang masih ada, yang pelestariannya mendapat dukungan kepausan (gereja) dan salinan Tacitus tersedia secara bebas selama abad kelima belas dan keenam belas. Selain Tacitus, abad keenam belas juga dipengaruhi oleh kisah-kisah Alexander dan Caesar. Gaya kepemimpinan dan kenegarawanan mereka dipelajari dan ditiru melalui karya-karya seperti Quintus Curtius Rufus dan Appian. Hal ini sangat kontras dengan humanisme Ciceronian Machiavelli di mana Caesar bagi Machiavelli adalah seorang penjahat utama. Alasannya bukan karena Caesar kejam tapi karena dia mengambil sistem republik yang berfungsi baik dan mengubahnya menjadi monarki. Bagi Machiavelli, orang-orang terhebat adalah mereka yang mampu mengubah masyarakat yang korup dan menjadikan republik berfungsi dan berbudi luhur. Bagi kaum humanis Tacitean seabad kemudian, tindakan membangun dan mempertahankan negaralah yang dianggap mempunyai nilai moral (Ashworth, 2014).

Renaissans tidak hanya menjelaskan bagaimana diplomasi dilakukan tetapi juga menggambarkan bagaimana pembentukan dan penyebaran inovasi Barat yang baru dan unik, yaitu dalam konteks diplomasi itu sendiri. Dalam hal ini, kebangkitan perdagangan dan seni serta perkembangan negara teritorial mendorong adanya pertukaran diplomatik. Begitu pula ketakutan akan perang juga menimbulkan adanya pertukaran diplomatik. Di Italia pada abad kelima belas, masalah ekonomi, komersial, pribadi, dan bahkan kekeluargaan sering kali dianggap sebagai aspek internasional. Di tempat lain, ketika

negara-negara teritorial seperti Spanyol, Perancis, dan Inggris mengkonsolidasikan kekuatan, negara-negara tersebut juga mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih energik. Bahkan Machiavelli, yang menyimpulkan bahwa penguasa harus menghargai kekuatan militer, menyimpulkan bahwa diplomasi berkelanjutan diperlukan, terutama bagi seorang pangeran yang berusaha 'melakukan hal-hal besar'. Kemudian apa yang dikatakan oleh Petrarch bahwa 'tidak ada perdamaian yang abadi di dunia, tidak ada perang yang berakhir'. Keyakinan tersebut mendorong dibentuknya duta besar tetap yang lebih ahli dalam mengumpulkan informasi. Selain itu, semakin banyak kedutaan *ad hoc* yang ditunjuk untuk jangka waktu yang lebih lama hingga utusan tersebut harus terus menetap. Di Venesia pada abad ketiga belas, utusan jarang tinggal lebih dari tiga atau empat bulan sedangkan pada abad ke-15 jangka waktu ini diperpanjang menjadi dua tahun, dan pada akhir abad ke-16 diperpanjang menjadi tiga tahun (Frey and Frey, 2023).

Kita bisa melihat bahwa *Renaissance* awalnya merupakan fenomena Italia karena adanya konsentrasi kekayaan dan kekuatan relatif negara-kota di Italia utara. Namun, pemikiran *Renaissance* menyebar berkat interaksi antara raja-raja dan kaum bangsawan di seluruh Eropa dan para elit di negara-kota Italia, terutama setelah serangkaian perang pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Dalam hal ini, kekuatan regional baru muncul di Timur Tengah dan menyebar ke Eropa mulai abad keempat belas yaitu Turki Ottoman. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel di zaman Romawi kuno jatuh ke tangan Turki, yang pada saat itu Turki telah menguasai seluruh wilayah Balkan yaitu wilayah utara Yunani termasuk Kroasia, Bosnia, Serbia, Albania, dan Makedonia saat ini. Meningkatnya kekuatan Turki di wilayah timur menimbulkan masalah bagi rute perdagangan timur-ke barat yang telah banyak dimanfaatkan oleh kota-kota Italia sejak era perang salib. Meskipun ada kesepakatan antara Venesia dan Ottoman, keuntungan yang bisa didapat tetap ada. Dari kegiatan perdagangan rempah-

rempah dan barang mewah hasilnya berkurang seiring berjalannya waktu. Pada pertengahan abad ke-15, manufaktur di wilayah utara juga mulai bersaing dengan produksi di Italia. Misalnya di Inggris dan Belanda, produksi kerajinan tangan Eropa utara menyaingi produk Italia dan mengurangi permintaan akan produk Italia. Dengan demikian, tingkat kemakmuran relatif di Italia vs. negara-negara Eropa lainnya menurun hingga abad keenam belas (Brooks, 2020).

Pukulan mematikan yang nyata bagi Renaisans Italia adalah runtuhnya keseimbangan kekuatan yang diresmikan oleh Perdamaian Lodi. Ancaman terhadap kemerdekaan Italia muncul dari semakin besarnya kekuatan Kerajaan Perancis dan Kekaisaran Romawi Suci. Raja Prancis, Charles VIII, memutuskan untuk menguasai Milan, dengan alasan klaim meragukan yang terkait dengan pernikahan dinasti, dan seorang Milan yang berpura-pura diundang ke Prancis untuk membantunya menguasai despotisme pada tahun 1494. Seluruh wilayah utara Negara-negara kota di Italia terjebak dalam baku tembak aliansi dan kontra-aliansi yang terjadi kemudian. Di samping itu, keluarga Medici diasingkan dari Florence pada tahun yang sama karena menawarkan wilayah kepada Prancis. Hasilnya adalah Perang Italia yang mengakhiri Renaisans. Tiga kekuatan besar pada masa itu, Prancis, Kekaisaran Romawi Suci, dan Spanyol, berebut satu sama lain. Italia menjadi medan pertempuran dan selama beberapa dekade berikutnya, kemerdekaan kota-kota Italia terancam atau musnah sama sekali. Antara tahun 1503 – 1533, satu demi satu, kota-kota menjadi wilayah atau boneka dari salah satu kekuatan besar dan sumber daya keuangan kota-kota terkuras habis (Brooks, 2020).

Perang itu sendiri, meskipun biasanya terbatas, merupakan instrumen politik negara-kota yang normal dan teratur dan mengandung sedikit cita-cita ksatria dari abad pertengahan (seperti yang kemudian ditegaskan Machiavelli dalam *The Art of*

War). Setidaknya beberapa dari rezim ini didirikan oleh *condottieri* yang terbiasa mengubah kesetiaan mereka berdasarkan peluang dan keuntungan. Machiavelli menyatakan bahwa tentara yang kuat adalah fondasi negara. Namun peperangan dalam sistem politik negara-kota Italia, meskipun biasa terjadi dan bersifat brutal, namun masih dalam skala yang kecil. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan konfigurasi dari aliansi dibandingkan dengan konflik yang berkelanjutan, baik dalam skala internasional maupun domestik, yang menyertai kebangkitan negara-kota tersebut. Dalam hal ini, revolusi militer pada abad keenam belas dan ketujuh belas memastikan bahwa unit-unit yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih besar akan menang atas model Italia (Malchow, 2020).

10.5 Kesimpulan

Hubungan internasional pada era pra-kontemporer dari era klasik hingga era renaissance memberikan gagasan bahwa sebelum era negara modern muncul, tatanan makro-politik dalam tatanan global dipengaruhi oleh formasi sosial seperti kota atau kerajaan. Oleh sebab itu, beberapa pakar menyebutkan bahwa sebagian besar negara-negara Eropa modern tidak lain hanyalah pengembangan dari kota atau provinsi-provinsi dalam Kekaisaran Romawi. Wilayah perbatasan alam dari Spanyol, Prancis, Italia, bahkan Inggris yang ada saat ini merupakan bagian dari sejarah wilayah perbatasan kuno Italia dan wilayah Romawi Barat pada masa Kekaisaran Romawi. Selain itu, fondasi kehidupan serta peradaban di negara-negara Eropa modern juga berdasarkan pada periode klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2023) 'Before the Nation-State: Civilizations, World Orders, and the Origins of Global International Relations', *The Chinese Journal of International Politics*, 16, pp. 263–288. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cjip/poad011>.
- Ashworth, L.M. (2014) *A History of International Thought: From the origins of the modern state to academic international relations*. New York: Routledge.
- Backman, C.R. (2003) *The Worlds of Medieval Europe*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Brooks, C. (2020) 'CHAPTER 4: POLITICS IN THE RENAISSANCE ERA', in *WESTERN CIVILIZATION: A CONCISE HISTORY*. NSCC Pressbooks Team.
- Cursi, M.F. (2014) 'INTERNATIONAL RELATIONSHIPS IN THE ANCIENT WORLD', *Fundamina*, 1, pp. 186–195.
- Frey, L. and Frey, M. (2023) 'Chapter 13 Diplomacy', in M. BUKOVANSKY et al. (eds) *The Oxford Handbooks of History and International Relations*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Hershey, A.S. (1911) 'The History of International Relations During Antiquity and the Middle Ages', *The American Journal of International Law*, 5(4), pp. 901–933.
- Jenihansen, R. (2023) *Sejarah Abad Pertengahan: Ketika Gereja Menghapus Dosa dengan Uang*, *National Geographic Indonesia*. Available at: <https://nationalgeographic.grid.id/read/133924069/sejarah-abad-pertengahan-ketika-gereja-menghapus-dosa-dengan-uang?page=all> (Accessed: 3 May 2024).
- Knutsen, T.L. (1992) *A history of International Relations Theory: An Introduction*. Manchester, UK: Manchester University Press.

- Kokaz, N. (2001) 'Between anarchy and tyranny: excellence and the pursuit of power and peace in ancient Greece', *Review of International Studies*, 27, pp. 91–118.
- Lendon, J.E. (2007) '11: Athens and Sparta and the Coming of the Peloponnesian War', in L.J. Samons (ed.) *Cambridge Companion to the Age of Pericles*. New York: Cambridge University Press, pp. 258–281.
- Lopez, J.C. (2023) 'The "Premodern" World', in M. BUKOVANSKY et al. (eds) *The Oxford Handbooks of History and International Relations*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Malchow, H.L. (2020) *HISTORY AND INTERNATIONAL RELATIONS: FROM THE ANCIENT WORLD TO THE 21ST CENTURY*. Second Edi. London, UK: Bloomsbury.
- Parasher, T. (2017) 'Inequality and Tumulti in Machiavelli's Aristocratic Republics', *Polity*, 49(1), pp. 42–68.
- Ringmar, E. (2019) *History of International Relations: A Non-European Perspective*. Cambridge, UK: Open Book Publishers.
- Roatovtaeff, M.I. (1922) 'INTERNATIONAL RELATIONS IN THE ANCIENT WORLD', in E.A. Walsh (ed.) *THE HISTORY AND NATURE OF INTERNATIONAL RELATIONS*. New York: The Macmillan Company, pp. 31–65.
- Telò, M. (2009) *International Relations: A European Perspective*. England: Ashgate publishing limited.

BIODATA PENULIS



Fitri Adi Setyorini, S.I.P., M.H.I
Dosen Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal
Soedirman

Fitri Adi Setyorini lahir di Rembang, 15 Februari 1997. Dia menyelesaikan program sarjana dan magister Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini dia diberi amanah menjadi salah satu pengajar di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman. Minat studi yang dialami adalah *human security*.

Penulis berhasil mendapatkan Beasiswa Umum UMY pada tahun 2017-2018 dan Beasiswa Cumlaude UMY pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2022, penulis berhasil dikukuhkan sebagai Lulusan dan Wisudawan Terbaik Pascasarjana UMY. Penulis berhasil mendapatkan prestasi sebagai *Best 10 Selected Paper* pada *International Student Conference on Humanity Issues 2020*. Beberapa karya telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi seperti *Nation State: Journal of International Studies*, *Journal of Islamic World and Politics*, *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *Jurnal Abdimas*

BSI, Jurnal Abdimas Awang Long, Marhalado: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, serta Journal of Social Politics and Governance (JSPG). Penulis juga telah menerbitkan 2 buku, yaitu Isu-Isu Keamanan Nontradisional dalam Hubungan Internasional pada 2023 serta *Base Erosion and Profit Shifting* dalam Bingkai Tata Kelola Perpajakan Global pada 2024. Penulis dapat dihubungi via e-mail: fitri.adi@unsoed.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Ajeng P. Marlinda, S.IP., M.HI.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis lahir di Banjarnegara tanggal 30 November 1991. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menyelesaikan studi S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional (2012-2016); S-2 di kampus yang sama, Fakultas Pascasarjana, Magister Ilmu Hubungan Internasional (2016-2018); dan S-3 juga di kampus yang sama, Program Doktor, Politik Islam-Ilmu Politik (2018-2021). Keahlian yang dimiliki dalam bidang Diplomasi Budaya, Studi Korea Selatan, dan Kebijakan Pariwisata. Aktif sebagai *Section Editor (SE)* pada *Journal of Islamic World and Politics (JIWP)* di UMY dan *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy, and Politics (IJSSPP)* di Universitas Islam Riau (UIR). Pernah menulis beberapa artikel dan diterbitkan di Scopus, seperti *The Role of Airlines in Promoting Halal Tourism (Sociología y tecnociencia (2023))*; *Halal Tourism as a Strategic Option for*

South Korean Tourism (Journal of Islamic Marketing (2022)); South Korea's Halal Tourism Policy-The Primacy of Demographic Changes and Regional Diplomacy (Academic Journal of Interdisciplinary Studies (2021)); dan The Influence of Artificial Intelligence to Support Halal Tourism Policy in South Korea (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (2020)). Dan juga pernah mereview beberapa artikel di Jurnal Hubungan Internasional-JHI UMY (2023) dan Cogent Social Sciences (2023). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ajeng.puspa@umy.ac.id.

BIODATA PENULIS



Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi. S.IP., M.A
Dosen Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur

Penulis lahir di Karanganyar tanggal 03 September 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 2009 dan melanjutkan S2 hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013. Penulis menekuni bidang kajian Teori Kritis dalam Hubungan Internasional, Humanitarian dan kajian geopolitik Rusia.

Menjadi dosen sejak tahun 2017, Penulis yang menjabat sebagai sekretaris LPPM di tahun 2018-2020 dan Wakil dekan II di tahun 2020-2025, berpengalaman dalam melakukan penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat. Penulis telah sering mendapatkan hibah baik nasional maupun lokal. Terakhir, penulis mendapatkan hibah penelitian nasional di skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) di tahun 2023 sebagai

ketua dengan judul telaah Telaah Potensi penggunaan teori Uneven and Combined Development (UCD) sebagai Teori Sosial Hubungan Internasional. Lebih lanjut, penulis memiliki jabatan fungsional Lektor (300) dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen di tahun 2021. Beberapa mata kuliah yang penulis ajar diantaranya; Politik internasional, Ide-ide Politik, Teori Hubungan Internasional, dan Kapitalisme dan Lingkungan Hidup. Penulis membuka peluang kolaborasi dan kerjasama baik pribadi atau institusi. Silahkan menghubungi penulis melalui e-mail: [mdaa343@umkt.ac.id](mailto:madaa343@umkt.ac.id)

BIODATA PENULIS



Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.

**Dosen Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya, Universitas Islam
Indonesia**

Penulis lahir di Bekasi 6 Februari 1995. Penulis adalah dosen tetap program studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Penghargaan yang pernah didapatkan oleh penulis adalah mendapatkan predikat lulusan terbaik di Program Sarjana Hubungan Internasional UMY dan sekaligus mendapatkan predikat lulusan terbaik di Program Magister Hubungan Internasional UMY. Beliau telah menerbitkan beberapa jurnal dan tulisan selain itu pernah mengikuti beberapa konferensi nasional maupun internasional.

BIODATA PENULIS



**Anastazia Niatry Wattimena, S.I.P., M.H.I.
Dosen Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun**

Penulis lahir di Ambon, pada tanggal 6 Mei 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun Maluku Utara. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email tasya@unkhair.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Mohamad Rohim, S.Sos. M.Ec, CRM, CQMS, CIAE, CFAP, CPHR, CSEA.

Saat ini penulis adalah Pemerhati dan Pengamat Hubungan Internasional. Concern di bidang Studi Ekonomi Politik Internasional, Studi Ekonomi Pembangunan negara-negara Berkembang, Zona Pembangunan Ekonomi Regional, Zona Pembangunan ekonomi di negara-negara MENA, negara-negara Islam/Islamic Majority Countries dan negara-negara Timur Tengah. Dosen Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Abdul Kabier, Banten.

Selain itu penulis menempati posisi bekerja di Unit Kerja Senior Operational Risk (SOR), Decentralized Operational Risk & Compliance (DCOR) Vice President Directorate (Governance, Risk & Compliance (GRC)), Most Syariah Bank in Indonesia. (2017-Now). Level : sempat menduduki Posisi Senior Manager, Assistant-SEVP sejak 2010-2022. Penulis Juga berpengalaman Sebagai Branch Manager di Bank Syariah Mandiri selama 11 Tahun (2005-2016), Deputy Regional Head (Dept. Head of

Bussiness) di Regional Jakarta selama 1 tahun (2011-2012), dan Human Capital Business Partner (HCBP) manager Kantor Pusat BSM, Regional Sumatera 1-3 dan Regional Jakarta selama 1,5 tahun (2016 sd 2017).

Pendidikan Penulis :

- S1. Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Konsentrasi bidang Ekonomi Politik Internasional (lulus tahun 1998)**
- S2. Islamic Finance Universitas Trisakti (lulus tahun 2016)**
- S3 (Doktorate) Islamic Finance Universitas Trisakti (lulus tahun 2023)**

Beberapa Gelar yang didapatkan Penulis yaitu :

Dr From Univ Trisakti, Research in Financial Risk Management of Islamic Banking.

CRM : Certified Risk Management.

CQMS : Certified Quality Managemet System.

CIAE : Certified Internal Auditor Expert.

CFAP : Certified Financial Analyst Profesional.

C.PHR : Certified Profesional Human Resource, BNSP.

C.SEA : Certified Syariah Economic Auditor.

Certified ISO 9001:2018

Certified ISO 19011:2018

Certified BSMR, Level 2, BNSP

BIODATA PENULIS

Salsabilah Attamimi, S.IP., M.Han., lahir di Ambon, 1993. Penulis merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, dan S2 jurusan Asymmetric Warfare di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Salsattamimi@gmail.com

BIODATA PENULIS



Syah Abadi Mendrofa

Penulis dilahirkan di Gunungsitoli pada 11 September 1966. Pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan di kota kelahirannya. Pendidikan tinggi (S1) diperoleh di Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan dan menyelesaikan (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia-Malang.

Penulis saat ini sebagai Dosen tetap Universitas Nias dan Aktif mengajar sejak tahun 1995 dikala itu, perguruan tingginya masih dengan nama Akademi Manajemen Gunungsitoli dan tahun 2000 berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Nasional yang sekarang kini berubah namanya menjadi Universitas Nias Tahun 2021.

Sembari mengabdikan sebagai dosen, penulis juga pernah menjalankan tugas dan amanat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) selama dua periode. Periode Pertama (2003-2008) dan Periode kedua, (2008-2013). Disamping memberikan beberapa mata kuliah sempat menduduki jabatan struktural sebagai pelaksana dan juga sebagai unsur pimpinan di STIE Pembangunan Nasional Nias, Pernah sebagai Sekretaris DPD LPM Kabupaten Nias (2002-2007), hingga menjadi ketua DPD LPM Kabupaten Nias (2007-2012) dilanjutkan lagi terpilih sebagai ketua DPD LPM Kota Gunungsitoli (2013-2018) Selain

tugas sebagai dosen, juga terlibat di beberapa kegiatan lain, di Pemerintahan Desa sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, dan terpilih lagi menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta sebagai pelayan di Gereja.

Menulis buku ini merupakan sebuah kewajiban sebagai seorang Dosen untuk dapat dipergunakan oleh berbagai pihak dalam menambah referensi. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

BIODATA PENULIS



Hidayat Chusnul Chotimah, S.I.A., M.A.
Dosen Hubungan Internasional
Fakultas Bisnis dan Humaniora
Universitas Teknologi Yogyakarta

Penulis lahir di Kebumen, 27 Juni 1990 dan merupakan dosen tetap pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta sejak tahun 2017. Penulis telah menyelesaikan studi pada jenjang S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada pada jurusan Hubungan Internasional. Penulis juga merupakan Sekretaris Program Studi HI UTY dari tahun 2023-2025. Fokus utama yang menjadi kajian penulis adalah Politik Internasional, Analisis Kebijakan, Studi Pembangunan, Keamanan Global, Diplomasi Siber dan Kajian Strategis. Penulis pernah menjadi Tenaga Ahli di bidang Kebijakan Publik dan beberapa kali menerima Hibah Penelitian dari Kemendikbud. Penulis juga merupakan Section Editor pada Indonesian Journal of International Relations (IJIR) dibawah Asosiasi Ilmu Hubungan

Internasional Indonesia (AIHI). Sejak 2022 hingga saat ini Penulis juga masih aktif sebagai reviewer pada Jurnal terindeks Scopus yaitu Cogent Social Sciences. Penulis dapat dihubungi melalui email hidayat.chotimah@staff.uty.ac.id